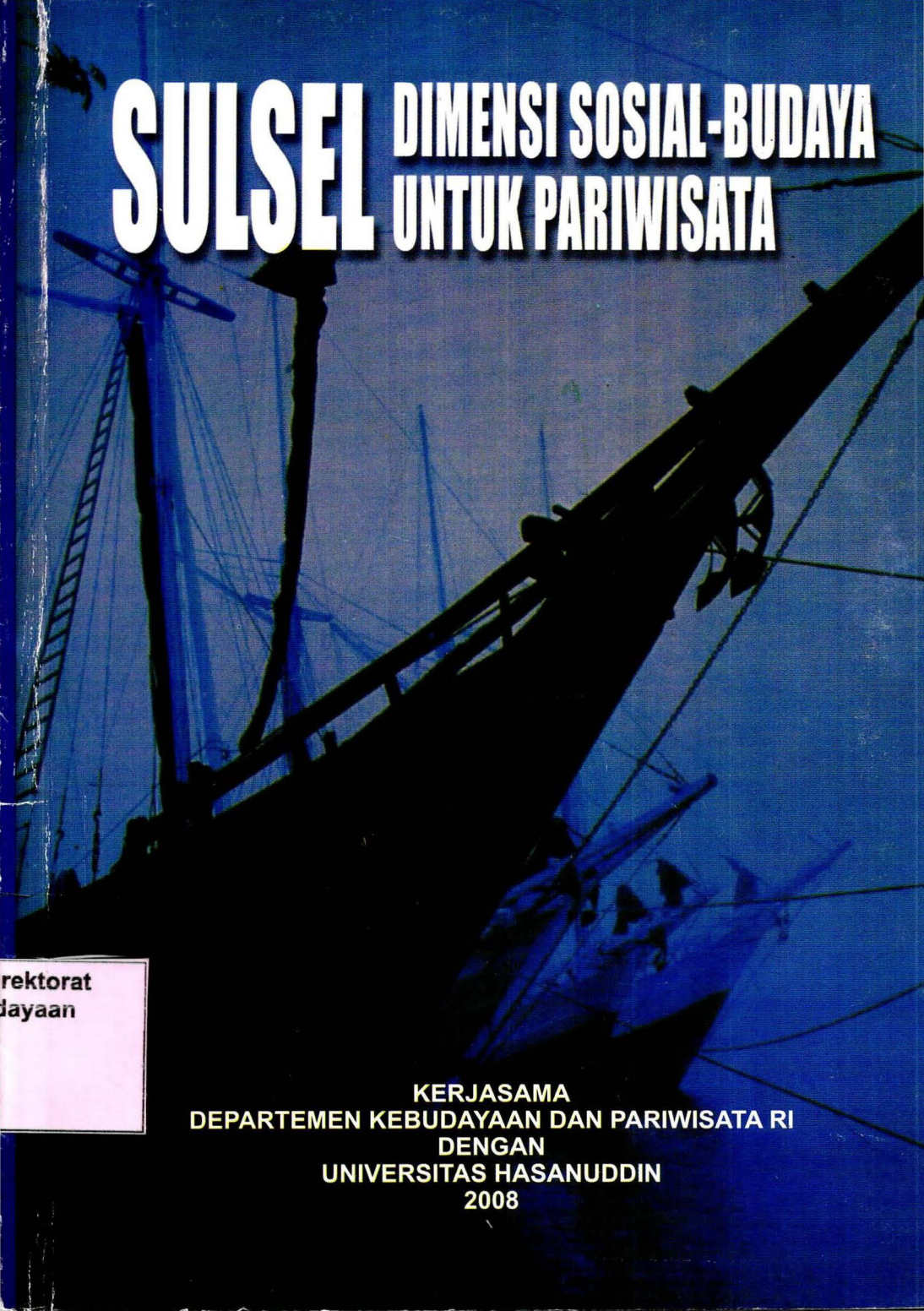




SULSEL DIMENSI SOSIAL-BUDAYA UNTUK PARIWISATA

rektorat
dayaan

KERJASAMA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA RI
DENGAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2008

303.4847 MUH 5

SULSEL

DIMENSI SOSIAL-BUDAYA

UNTUK PARIWISATA

Kerjasama
Departemen Kebudayaan & Pariwisata RI
Dengan
Universitas Hasanuddin
2008



SEKAPUR SIRIH

Pertama-tama saya menyambut gembira dan memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada Para Staf Ahli Menteri yang telah memperakarsai diadakannya dialog di tiga propinsi yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Propinsi-propinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kalimantan Barat. Dialog dan penulisan yang melibatkan para akademisi di berbagai perguruan tinggi di ketiga propinsi tersebut sangat penting artinya karena merekalah yang secara dekat dengan daerah masing dan juga secara harfiah mengetahui lebih dalam persoalan di daerahnnya masing-masing. Karena itu tingkat akurasi penulisan ini sangat tinggi. Hasil dialog yang kemudian diwujudkan dalam 3 (tiga) buah buku tersebut adalah:

1. Dimensi Sosial-Budaya Dalam Pengembangan Pariwisata di Sulawesi Selatan.
2. Mozaik Sosial - Budaya untuk Pengembangan Kepariwisata di Aceh.
3. Multikultural dan Pariwisata di Kalimantan Barat.

Ketiga buku ini sangat penting untuk dibaca di cermati dan di kaji karena informasi dan nuansa data yang di kemukakan dalamnya sangat terkait dengan upaya yang dewasa ini sedang di galakkan di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, yakni

mengutarakan dimensi kemaritiman Sulawesi Selatan yang merupakan kekuatan utama kawasan ini sejak abad ke-15. tradisi dan kehidupan kemaritiman ini merupakan sebuah panorama yang sangat mempesona. Karena itu untuk menjadikannya sebagai obyek wisata bahari, Sulawesi Selatan perlu mempersiapkan diri sebagai destinasi pariwisata Sulawesi Selatan, yang tidak hanya dikunjungi wisatawan untuk sekedar melancong menghabiskan masa libur dengan menikmati nuansa alam, tradisi dan menyaksikan berbagai ritual tetapi juga Makassar memiliki potensi menjadi salah satu kota penyelenggara berbagai konferensi dan pertemuan atau kegiatan - kegiatan ilmiah yang dilakukan berbagai pihak, misalnya perguruan tinggi yang pesertanya tentu saja erat hubungannya dengan hasil – hasil Penelitian dan Penerbitan ilmiah dari daerah ini .

Dalam hubungan itulah tulisan **Andi M. Akhmar S.S M.Hum** yang membahas tentang penerbitan di Makassar ini menjadi sangat penting untuk dicermati. Pertanyaannya adalah; dapatkah penerbitan lokal yang ada di Makassar melayani kebutuhan – kebutuhan internasional di bidang penerbitan. Karena bagaimana pun juga penerbitan adalah sarana informasi yang memegang peran penting.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di abad global dewasa ini peran media sangat penting. Pemberitaan yang positif akan berdampak positif demikian pula sebaliknya. Kesadaran akan dampak besar yang diakibatkan oleh media, menggiring untuk diadakannya **Bali Global Tourism Forum** 2007. pada pertemuan ini ditekankan sebuah pemikiran bahwa salah satu faktor yang menyebabkan dunia semakin rawan konflik adalah karena pemberitaan yang tidak berimbang dan cenderung sesat. Dengan latar belakang itu BGF menghimbau agar Media menjadi mitra perdamaian dunia. **Fierenziana Getranda Junus**, dalam tulisannya "**Wacana Kekerasan dan Media serta dampaknya bagi pariwisata** " ingin mengingatkan bahwa dalam

mengembangkan pariwisata Indonesia khususnya Sulawesi Selatan pemberitaan media sangat menentukan. Jika demikian peran penulis selaku ujung tombak pemberitaan yang membawa rasa damai sangat menentukan bagi wisatawan, karena rasa damai diatas segala – galanya.

Sulawesi Selatan memiliki perjalanan sejarah yang amat panjang, tradisi besar dari pusat – pusat kekuasaan tradisionalnya menyimpan khazanah pengetahuan yang sangat kaya, satu diantaranya yang dikemukakan **Mukhlis Hadrawi** dalam buku ini adalah Lontara Assikalabineng. Lontara ini menyampaikan berbagai pengetahuan tentang keharmonisan suami istri. Pengetahuan tentang hubungan harmonis ini bisa dikembangkan ke arah kajian dalam bentuk penulisan bersama yang mengundang berbagai penulis Internasional tingkat Asia untuk bersama-sama menulis Topik ini dan secara berkala mendiskusikan hal – hal yang menyangkut hubungan suami istri atau hubungan seksual dari perspektif tradisi yang bertopang pada manuskrip. Acara – acara semacam ini memiliki peminat khusus yang tersebar di berbagai penjuru dunia, tentu saja dari sisi akademis kajian – kajian tentang khazanah manuskrip perlu dikaji secara sungguh – sungguh sebagai kekayaan budaya bangsa.

Prof. Dr. Abdul Hakim Yassi, dalam tulisannya yang berjudul ***“Peran Lembaga Pendidikan Tinggi Terhadap Penanam dan Pengembangan Nilai Budaya Damai di Indonesia.”*** Satu hal yang sangat mendasar ialah bahwa pendidikan adalah salah satu institusi yang sangat diharapkan menjadi medium bagi pelestarian nilai – nilai dan transformasi budaya. Di era gelombang IV peradaban dunia dewasa ini sumber daya manusia terdidik/berkualitas serta profesional sangat menentukan, karena itu pengembangan kebudayaan suatu bangsa hanya dapat dilakukan oleh manusia terdidik yang memiliki kreatifitas yang tinggi. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa sebagai sebuah daerah

tujuan wisata , Sulawesi Selatan hanya bisa dikembangkan oleh tangan – tangan melalui SDM yang kreatif.

Dalam hubungan itulah tulisan **Prof. Dr. Abdul Hakim Yassi** menjadi sangat penting. Hal lain menyangkut mengenai kota dalam hal ini Manado sekalipun obyek tulisan ini tidak secara langsung pada kota – kota di Sulawesi Selatan, tapi tulisan **Ilham S.S MHum** yang mengemukakan tentang kota kolonial dapat menjadi rujukan untuk mengamati kasus – kasus yang sama di Sulawesi Selatan serta kota – kota Kolonial di Indonesia umumnya. Kota dengan berbagai keunikan dan karakteristiknya sendiri – sendiri, merupakan obyek destinasi pariwisata yang menarik untuk dikunjungi . Seperti apakah kota Manado yang disebut – sebut kota kolonial yang memiliki ciri – ciri tersendiri yang berbeda dengan kota – kota tradisional lainnya di Indonesia? Tentu hal ini merupakan salah satu daya tarik tersendiri sebagai sebuah study tentang kota dan pada sisi lain memiliki daya tarik bagi sebuah objek wisata kota yang memiliki peminat khusus.

Dalam hubungan ini maka tulisan Ilham S.S MHum tidak hanya penting untuk dibaca tapi juga dikaji lebih lanjut. Pariwisata erat hubungannya dengan keamanan, karena itu jika negara telah menjamin rasa aman masyarakat, dan juga menjamin hak - hak individu untuk bebas dari rasa takut, maka secara otomatis hal tersebut akan merangsang para pelaku ekonomi untuk berinvestasi termasuk didalamnya pelaku pariwisata. Tapi sebaliknya pula citra negara yang di cap sebagai negara pelanggar HAM, akan membuat masyarakat internasional pun akan mengasingkan Indonesia dari kunjungan wisata dunia. Dengan demikian perekonomian negara pun menurun disektor riil. Sesungguhnya kaidah – kaidah nilai dasar dari HAM bukan sesuatu hal yang baru dalam masyarakat Bugis, Makassar. **Wahyudin S.S** dalam tulisan yang berjudul “*nilai HAM dalam tradisi lisan masyarakat Bugis – Makassar*” menekankan berbagai simpul – simpul tradisi tentang HAM dalam masyarakat

Bugis – Makassar, satu diantaranya adalah konsep **SIPAKATU** yang disebutnya sebagai pemuliaan kemanusiaan. Sementara itu tulisan ke sepuluh dari dua belas tulisan dalam buku ini , ditulis Muslimat berjudul **Citra Wanita dalam Cerita Rakyat Makassar : Relevansinya dengan Masa Kini.** Fokus utama tulisan ini adalah memberi pemahaman tentang budaya Makassar yang mengatur kehidupan wanita baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sedang tulisan selanjutnya terfokus pada warisan budaya yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, warisan budaya tak benda disebut juga **Intangible** dan warisan budaya yang dapat disentuh **Tangible.** , **DR. Anwar Thosibo** dengan memfokuskan pengamatannya pada warisan budaya **Tangible** mengamati satu persatu Benteng Kerajaan Gowa yang terbentang dari Muara Sungai Tallo hingga ke Sanra Bone dengan mengemukakan tentang 5 buah benteng dari sekitar 11 buah yang pernah dimiliki kerajaan Gowa.

1. Benteng Tallo
2. Benteng Somba Opu
3. Benteng Sanra Bone
4. Benteng Kale Gowa
5. Benteng Anak Gowa

Kelima buah benteng tersebut secara singkat diuraikan DR. Anwar Thosibo dalam tulisan ini dengan keunikannya masing-masing . Sementara 6 lainnya tidak menjadi perhatian dalam tulisan ini yakni :

6. Benteng Mariso
7. Benteng Baro Boso
8. Benteng Ujung Tanah
9. Benteng Panaklukang
10. Benteng Garassi
11. Benteng Ujung Pandang

Ada dua benteng utama kerajaan Gowa tidak dibicarakan disini, yakni Benteng Ujung Pandang dan Benteng Panakkukang, sekalipun keduanya sangat strategis yang merupakan benteng utama. Walau demikian tentu saja tulisan ini masih berpeluang dikembangkan untuk keperluan kajian akademis disamping secara praktis dapat dikemukakan sebagai informasi penting dari sebuah obyek wisata sejarah yang memiliki daya tarik tersendiri. Tulisan terakhir dari dua belas tulisan mengemukakan kerajaan Bone. Sebuah kerajaan Bugis yang terbesar dan memegang peranan penting dalam percaturan politik di Sulawesi Selatan selepas keruntuhan kerajaan Gowa 1667, setelah keruntuhan Somba Opu 1669. sekalipun pada awalnya VOC menjadikan kerajaan Bone sebagai koalisinya dalam berbagai perang penaklukan atas kerajaan – kerajaan lokal di Nusantara. Namun pada akhirnya kerajaan Bone merupakan musuh yang paling di benci oleh kompeni. Kebencian ini di wariskan kepada penguasa Belanda berikutnya, yakni Pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang telah menghabiskan biaya besar dan korban yang sangat banyak ketika melakukan perang penaklukan atas Bone yang kemudian dikenal perang Bone 1905.

Tulisan yang dikemukakan **Suryadi Mappangara** ini sepintas menginformasikan suasana politik Sulawesi Selatan 1860 –1905 / penghujung abad ke-20. Informasi ini sangat penting untuk di kaji mengingat bahwa pengetahuan tentang sebuah destinasi barulah dianggap utuh jika perkenalannya diawali dengan informasi kesejarahan.

SELAMAT MEMBACA.....!!!!!!

Tim Pengarah:

1. Dr. Mukhlis PaEni
2. Dra. Sri Rahayu Budiarti, MM
3. Drs. Thamrin B. Bachri, M.Sc
4. Dra. Titien Soekarya, M.Si

Daftar isi

Sekapur Sirih	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	xi
1 Analisis Sociolinguistik terhadap Pelapisan Sosial . 1 Masyarakat Bugis Bone..... <i>Dr. Muhammad Darwis, M.S</i>	
2 Makassar Kekuatan Maritim Pada..... 21 Periode Akhir Kolonial	
<i>Dr. A. Rasyid Asba, M.A.</i>	
3 Awal Mula kebudayaan Maritim di Sulawesi Selatan; 71 Tinjauan Perspektif Ideologi dan Konteks Sosial Politiknnya <i>Dr. Bambang Sulistyoy, M.S.</i>	
4 Penerbit di Makassar dan Pembelajaran Kebudayaan .. 103 <i>Andi Akhmar, S.S., M.Hum.</i>	
5 Wacana Kekerasan dan Media serta 129 Dampaknya bagi Pariwisata <i>Fierenziana G. Junus, S.S., M.Hum.</i>	
6 Skriptoria dan Genealogi Assikalaibineng: 149 Peranan Istana dan Santri Khalwatiah terhadap Konstruksi dan produksi lontara Assikalaibineng Sulawesi Selatan <i>Muhlis Hadrawi, S.S., M.Hum.</i>	
7 Budaya Damai. Peran Lembaga Pendidikan Tinggi..... 171 Terhadap Pengembangan Budaya Damai di Indonesia <i>Prof. Dr. Abd. Hakim Yassi, M.A.</i>	

- 8 Melacak Jejak Perkembangan Kota di Indonesia: 187
Kasus Kota Manado
Ilham, S.S., M.Hum.
- 9 Nilai HAM Dalam Tradisi Lisan Masyarakat 215
Bugis-Makassar
Wahyuddin, S.S.
- 10 Citra Wanita dalam Cerita Rakyat Makassar: 237
Relevansinya dengan Masa Kini
Dra. Muslimat, M.Hum.
- 11 Pelestarian Budaya Tangible : 259
Benteng-benteng yang dihancurkan di Kota Makassar
Dr. Anwar Toshibo, M.Hum
- 12 Kerajaan Bone : 279
Dari kerajaan Pinjaman ke Kerajaan Taklukan
Drs. Suriadi Mappangara, M. Hum

ANALISIS SOSIOLINGUISTIK TERHADAP PELAPISAN SOSIAL MASYARAKAT BUGIS BONE

oleh

Muhammad Darwis

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

E-mail: hmdarwis@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pada masyarakat Bugis tradisional terdapat tiga lapisan sosial, yaitu masyarakat *arung*, masyarakat *tomaradeka*, dan masyarakat *ata*. Ketiga lapisan sosial tradisional ini direfleksikan dalam sistem tutur yang dikenal dengan sebutan *bicara congaa*, *bicara cukuk*, dan *bicara sanraa*. Sistem tutur ini mempunyai kaidah, tetapi dalam penerapannya mengalami banyak kendala sehubungan dengan makin kompleksnya hubungan sosial sebagaimana telah menjadi ciri masyarakat modern. Akibatnya ialah sistem tutur *bicara congaa*, *bicara cukuk*, dan *bicara sanraa* masih berlaku hingga sekarang, tetapi sudah tidak merefleksikan pelapisan sosial masyarakat Bugis secara tradisional, melainkan merefleksikan nilai-nilai ketakziman yang hidup dan berlaku dalam tatanan masyarakat Bugis modern. Hal ini terjadi karena pelapisan sosial masyarakat Bugis telah mengalami reorientasi, yaitu lapisan sosial ketiga, *ata*, telah hilang dan menjadi bagian dari lapisan sosial kedua, *tomaradeka*. Tambahan lagi, dalam keadaan penutur tidak menginginkan pengaruh feodal, digunakanlah bahasa Indonesia yang dinilainya lebih mengedepankan nilai-nilai ekualitas.

1. Pendahuluan

Pandangan hidup, watak, atau sifat-sifat mendasar suatu masyarakat, dapat digali melalui penelusuran pelapisan sosial yang ada pada masyarakat itu. Bahkan, pola-pola hubungan sosial antarwarga atau antarkelompok dalam masyarakat itu dapat dipelajari melalui pengungkapan pelapisan sosial. Itulah sebabnya menurut Mattulada (1991: 17), sebelum daerah Sulawesi Selatan dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda Friedericy dalam disertasinya pada tahun 1933 telah berusaha menggambarkan keadaan pelapisan masyarakat di Sulawesi Selatan sebelum daerah itu dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan menggunakan banyak bahan mitologis.

Dalam sejarahnya masyarakat Bugis Bone terkenal sebagai masyarakat kerajaan. Di dalamnya terdapat kerajaan-kerajaan, baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil. Sebagai masyarakat kerajaan padanya terdapat pelapisan-pelapisan sosial. Dalam hal ini, secara umum dikenal tiga lapisan, (1) masyarakat *arung*, (2) masyarakat *tomaradeka*, dan (3) masyarakat *ata*.

Keberadaan lapisan-lapisan sosial tersebut dahulu ditandai oleh penggunaan bahasa yang juga terdiri atas tiga tingkat, yaitu *bicara congaa* (komunikasi vertikal ke atas) atau *bicara cukuk* (komunikasi vertikal ke bawah), dan *bicara sanraa* (komunikasi horisontal). Ketiga tingkat tutur ini masih terpelihara dalam masyarakat Bugis hingga sekarang, tetapi sudah tidak merefleksikan keberadaan lapisan sosial masyarakat Bugis yang disebutkan di atas. Tentu saja timbul pertanyaan mendasar, mengapa hal ini terjadi? Apakah sistem tutur tersebut memunyai norma-norma penggunaan? Masihkah norma-norma bertutur ini telah tidak dikuasai dengan baik oleh para penutur bahasa Bugis?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dipandang perlu melaksanakan penelitian yang secara khusus

mempelajari pemertahanan ketiga lapisan sosial tradisional masyarakat Bugis di atas dari sudut kajian sosiolinguistik. Artinya, tulisan ini menggunakan data linguistik yang merefleksikan adanya pelapisan sosial yang berlaku pada masyarakat Bugis modern, yang kemudian dipersempit menjadi masyarakat Bugis Bone.

Tujuan penyusunan tulisan ialah (1) menedeskripsikan pelapisan sosial dalam masyarakat Bugis, dilihat dari segi penggunaan bahasa Bugis, yaitu keberadaan sistem tutur *congaa*, *sanraa*, dan *cukuk*, (2) merumuskan kaidah penggunaan sistem tutur tersebut, dan (3) mengetahui prospek masa depan sistem tutur tersebut sehubungan dengan kompleksitas hubungan sosial yang lazimnya berlaku pada masyarakat modern.

Untuk merampungkan tulisan ini digunakan data tuturan bahasa Bugis dialek Bone yang direkam secara sembunyi-sembunyi pada waktu terjadi pertuturan atau perbualan antarwarga pada masyarakat Bugis Bone, baik dalam situasi formal maupun dalam situasi informal. Data hasil rekaman diklasifikasi berdasarkan ciri linguistik yang dimiliki sehubungan dengan sistem tutur *congaa*, *sanraa*, dan *cukuk*. Untuk merumuskan kaidah penggunaannya berdasarkan pelapisan sosial yang ada dan untuk mengetahui prospek masa depan sistem tutur tersebut, diadakan wawancara kepada informan.

2. Teori Pelapisan Sosial dalam Masyarakat Bugis Bone

Pelapisan sosial dalam masyarakat Bugis Bone berhubungan langsung dengan keberadaan masyarakat ***arung*** (kebangsawanan). Masyarakat *arung* merupakan lapisan tertinggi, yang selanjutnya dibagi menjadi dua subkategori utama, yaitu ***anak arung matasak*** 'anak raja yang bertakhta' dan ***anakarung 'bangsawan'***. Anakarung matasak terdiri atas (a) ***anak arung***

mattola 'putra mahkota' dan (b) **anakarung matasak** 'putra raja'. Anakarung matasak atau putra raja ini selanjutnya masih dibagi menjadi atas tiga sublapis, yaitu (a) **anakarung ri bolang** 'bangsawan warga internal istana', (b) **anakarung sipuwek** 'bangsawan separuh', dan (3) **anak cerak** 'bangsawan berdarah campuran'. Lapisan berikutnya adalah masyarakat **tomaradeka** 'orang merdeka' yang terdiri atas (a) **todeceng** 'orang baik', yaitu kepala-kepala kaum/anang dan (b) **tosamaa** 'orang biasa', yaitu warga masyarakat umum. Terakhir, warga masyarakat **ata** 'hamba sahaya, yang juga terdiri atas dua sublapis, yaitu (a) **ata manaa** 'sahaya turun temurun' dan (b) **ata mabuang** 'sahaya baru' (Mattulada 1991: 85ff).

Dalam hubungan itu, perlu dijelaskan pola-pola hubungan sosial, terutama dalam hubungan perkawinan antara strata sosial yang satu dan strata sosial yang lain. Dalam hal ini, seorang laki-laki dari lapisan tertentu, boleh menikahi perempuan dari yang selapis atau yang lebih rendah dari lapisannya, tetapi ia terlarang menikah dengan perempuan yang datang dari lapisan yang lebih tinggi. Adapun yang dibolehkan menjadi **mangkau** 'raja' di Bone adalah laki-laki atau perempuan dari lapisan **anakarung matasak** karena dianggap masih berdarah **tomanurung** atau disebut **tomaddara takku**. Dengan sesama **anakarung matasak**, putra Raja Bone dibolehkan mendapatkan jodoh dari luar, tetapi yaitu hanyalah putra/putri mahkota dari Luwu, Gowa, Soppeng, Wajo, dan Sidenreng. Adapun **anakarung matasak** lainnya dipersiapkan menjadi raja-raja bawahan, yang merangkap Adek Pitu (Dewan Kerajaan yang terdiri atas tujuh orang raja bawahan yang menjadi daerah inti Kerajaan Bone). Dari lapisan ini pulalah yang menduduki tempat-tempat penting dalam birokrasi kerajaan, seperti **PakkadattanaE Tomarilaleng**, **Ponggaswa** (panglima tentara), dan lain sebagainya (Mattulada 1991: 85ff).

Sebelum menjadi kerajaan yang diperintah oleh **Tomanurung**, Bone pun merupakan federasi dari persekutuan

kaum, yang disebut '*Anang*'. Pemimpin tiap-tiap *Anang* adalah *ketua anang* atau *Matowa*. *Matowa-matowa Anang ini selanjutnya* digantikan oleh orang-orang dari lapisan yang lebih rendah. Persekutuan-persekutuan *Anang itulah kemudian menjelma menjadi Wanua*, yang diperintah oleh raja-raja bawahan. Dalam hal ini terdapat tujuh buah Wanua yang merupakan inti kerajaan. Raja-raja bawahan tersebut duduk dalam Dewan Kerajaan yang diikenal dengan sebutan '*Ade Pitu*' Tana Bone. Dengan demikian, melalui proses yang panjang, seluruh jaringan kekuasaan dalam kerajaan, mulai pada tingkat atas sampai ke desa-desa yang tersebar luas dalam daerah kerajaan dikuasai oleh anasir lapisan Anakarung yang setia kepada figur sentral yang disebut *mangkau* 'yang berdaulat' di Bone.

Dalam hubungan itu, ketika sebutan *Andi* mulai dipergunakan sebagai tanda kebangsawanan setelah diadakannya Raja Bone kembali (bulan April 1931), semua anggota lapisan anakarung dari sublapis tertinggi hingga ke sublapis terendah menggunakan sebutan itu di depan namanya. Sebelum itu, orang Bone mempergunakan istilah '*Puatta*' atau '*Petta*' untuk menunjukkan bahwa seseorang itu dari lapisan bangsawan berkuasa. Misalnya *Petta MangkauE ri Bone*, *Petta PonggawaE*, *La Tenri tatta Petta MalampeE Gemme'na*. Dengan dipergunakannya istilah *Andi*, seorang bangsawan Bone dapat saja menyebut atau menulis namanya, misalnya *Andi Pangerang Petta Rani* (lihat Mattulada 1991: 85ff).

Adapun lapisan *tomaradeka* dan *ata ridak* menggunakan gelar-gelar kebangsawanan yang diterangkan di atas. Namun, di antara mereka tetap berkembang sapaan-sapaan takzim yang menunjukkan adanya hierarki kekerabatan. Misalnya, sapaan *puak* kepada paman atau bibi, *uak* atau *ambo* kepada ayah dan *indo* kepada ibu. Kepada kakek digunakan sapaan *latok* dan kepada nenek digunakan sapaan *nenek*. Lalu kepada anak digunakan sapaan *anak*, dan kepada cucu digunakan sapaan *epo*.

3. Keberadaan sistem tutur *bicara congaa*, *bicara cukuk*, dan *bicara sanraa*

Sistem tutur *bicara congaa*, *bicara cukuk*, dan *bicara sanraa* pada masyarakat Bugis tradisional dahulu berkembang menjadi norma atau kaidah bertutur yang wajib dipatuhi. Kepatuhan ini tidak semata-mata menunjukkan rasa hormat atau ketakziman berbahasa, tetapi juga sekaligus menjadi sarana pengungkapan atau pengukuhan status sosial bagi mereka yang terlibat pertuturan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang lengkap bukan hanya mengenai norma bertutur tersebut, melainkan juga dituntut adanya kemampuan antisipatif terhadap kedudukan sosial tersapa (*addressee*) dan menghubungkannya dengan kedudukan sosial penyapa (*addressor*).

Norma bertutur tersebut dahulu merupakan masalah yang sangat peka. Suatu kekeliruan yang dilakukan tidak dengan sengaja sekalipun akan dapat dianggap sekurang-kurangnya sebagai suatu kekurangan pengetahuan tentang tatakrama dan secara ekstrim dianggap sebagai bentuk penghinaan atau tindakan tidak beradab.

Sekarang masyarakat Bugis telah mengalami perubahan yang disebabkan oleh pengaruh perkembangan sosial yang semakin kompleks. Pelapisan sosial secara tradisional dengan sendirinya mengalami reorientasi. Tentu saja hal ini tercermin pada penggunaan bahasa. Artinya, sistem tutur *bicara congaa*, *bicara cukuk*, dan *bicara sanraa* mengalami reorientasi. Kalau dahulu sistem tutur ini merupakan refleksi terbinanya pelapisan sosial dalam masyarakat Bugis, sekarang sistem tutur tersebut berorientasi kepada penggunaan bentuk-bentuk takzim berdasarkan perbedaan hubungan-hubungan sosial secara baru.

Pada masyarakat Bugis tradisional *bicara congaa* 'tuturan menengadah' digunakan sebagai bentuk komunikasi vertikal ke atas, misalnya dari warga masyarakat ata ke warga masyarakat

arung dan sebaliknya, digunakan bicara cukuk 'tuturan menunduk' sebagai bentuk komunikasi vertikal ke bawah dari warga masyarakat arung ke warga masyarakat *tomaradeka* dan ke warga masyarakat *ata*. Sekarang sisa-sisa dari pengaruh ini masih ada, tetapi pada umumnya penggunaan bicara *congaa* di tengah-tengah masyarakat lebih didasarkan pada pertimbangan ketakziman atau keformalan situasi pertuturan. Yang dijadikan referensi adalah perbedaan-perbedaan kedudukan sosial secara modern. Adapun bentuk-bentuk serta pola-pola penggunaan norma bertutur tersebut akan diterangkan pada pasal tersendiri di bawah ini.

a. Kaidah-kaidah penggunaan *bicara congaa*, *bicara cukuk*, dan *bicara sanraa*

Bicara congaa

Bicara congaa (BC) ditandai oleh penggunaan kalimat atau tuturan yang mengacu kepada persona ketiga. Dalam hal ini, tersapa ditempatkan dalam posisi persona ketiga. Unsur-unsur penandanya ialah penggunaan morfem terikat *-i* atau *na-* yang disertai nama gelar atau sebutan tertentu, baik dengan maupun tanpa nama diri. Misalnya:

- (1) Tettek siangangngarek *nalettuk Petta (Rani)* ?
'Pukul berapa gerakan Petta Rani tiba'
- (2) Agangarek napparelluang anakku
'Apa gerakan yang diperlukan anakku'
- (3) Aga najama Bapak -e
'Apa yang dikerjakan Bapak itu'

- (4) Narapini kapang wettunna Puangku soro matinro ?
'Sudah tiba saatnya kiranya tuanku menuju tidur'
- (5) Lettuk tettek siagai Pette (Baso) ri wenni?
'Tiba pukul berapa Petta (Baso) semalam?'
- (6) Tega (ngngarek) i Tuan Guru manguju maelee?
'Ke mana gerangan Tuan Guru hendak pergi sepagi ini'

Dapat juga bicara congaa itu ditandai oleh penggunaan afiks persona pertama jamak *-ik* (*-kik*, *-nik*- *-pik* *muik*), *ta-*, *-ata*, atau bentuk bebas idik yang diacukan kepada persona kedua (tersapa). Misalnya:

- (7) Lettu tettek siaga(k)ik, (Puang)?
'Pukul berapa tiba, tuan?'
- (8) Tettek siaga talettuk, (Ndik)
'Pukul berapa tiba, Ndik?'
- (9) Aga tajama, (Pak)
'Apa yang dikerjakan, Pak?'
- (10) (Madecenni), soronik tatinro, (Puang)!
'Baik, Tuan tidurlah!'
- (11) Lettu muik ri wennie, (Puang)
'Tiba jugakah, Tuan, semalam'
- (12) Ya tega toleta, Puang?
'Yang mana rokok (kita) Tuan?'
- (13) *Engkani topoleta, (D(a)eng)*!
'Ada tamu Kakak?'

Gelar atau sebutan *puang*, *daeng*, *pak*, dan sebagainya tidak selalu harus digunakan, kecuali untuk menyatakan ketakziman dan atau keintiman kepada tersapa. Kemudian penggunaan bentuk *-ta* akan berefek lebih hormat dan atau takzim lagi apabila dikombinasikan dengan bentuk bebas *ale* 'diri' atau *ata* 'hamba' dan *suro* 'pesuruh' menjadi *aleta*, *atatta*, *surota*, dan sebagainya. Sejalan dengan ini dapat pula digunakan bentuk terikat *-na*. Misalnya:

(14) Aleta engka, Puang denre?

"Tuan sendiri yang datang tadi?"

(15) Tasuro laloi atatta, Puang!

'Silakan Tuan menyuruh hamba Tuan'

(16) Magai nadek taparennuangi surota, Puang?

'Mengapa Tuan tidak percaya pada pesuruh Tuan'

Beberapa kata atau unsur leksikal yang bersinonim dapat pula dipilih untuk menyatakan tingkat tutur tersebut. Misalnya kata *wija* dianggap lebih hormat atau takzim digunakan dalam bertutur congaa daripada *anak*, kata *pahang* 'paham' atau 'tahu' lebih takzim daripada *isseng*, dan sebagainya. Misalnya:

(17) Sukkuruknik engkamumannenna wija rijajiang

'Syukurlah sudah ada anak dilahirkan'

(18) Dek namareso napahang atanna Petta.

'Tidak begitu paham (mengerti) hamba Tuan'

(19) Tapahanni kapang?

'Barangkali sudah dimengerti'

Dalam menyatakan pamit ketika bertamu di rumah seorang yang pantas dihormati, dapat digunakan *massimang*, tetapi pada kesempatan lain dipilih kata *mapparemmisi* atau ungkapan lain yang lebih sesuai. Misalnya:

(20) Madecenni, mellau simangni atanna, Petta (Puang).
'Baiklah, mohon pamit hamba Tuan'

(21) Messimanni atanna Puangku.
'Mohon pamitlah hamba tuanku'

Bandingkan dengan:

(22) Tapalalonak lisu (ri)yolo.
Mohon diizinkan pulang dahulu'

(23) Ujokkana yolo
'Saya pergi dulu'

(24) Mapparemmisinak palek yolo.
'Permisi dulu, kalau begitu.'

Waktu mempersilakan seorang tamu makan dapat digunakan kata *lecce* 'pindah' untuk konteks bicara *congaa*, dan bukan kata *lokka* 'pergi'. Kata makan sendiri diungkapkan dengan *mabbura* 'berobat (lapar)', bukan *manre*. Misalnya:

(25) Leccekni Puak Guru mabbura.
'Marilah Puak Guru berobat (makan)'

Sebagai jawabannya yang sepadan digunakanlah kata *iyek* 'ya' dan bukan *iyu*. Misalnya:

(26) Iyek, medecenni'
'Ya, baiklah'

Termasuk pula cara bertutur *congaa* yaitu menyatakan diri sebagai milik tersapa, dan sebaliknya milik tersapa dinyatakan sebagai milik penyapa. Misalnya:

(27) Siagani anaureku, Puak Kadirek
'Sudah berapa kemanakanku (anakmu) Puak Kadirek'

(28) Tellu liceniro eppota, Puak Imam
'Sudah tiga orang itu cucu (anakku), Puak Imam.

(29) Bolana uakna, anakku
'Rumah milik uak anak saya'

(30) Kalampanna indokta, Nak!
'Gubuk indukmu, Nak!'

Kata induk 'ibu' atau 'induk' berreferensi ibu susu. Oleh karena itu, kata ini hanya pantas digunakan atau ditujukan kepada seorang ibu yang diketahui berlatar belakang ibu penyusu. Untuk laki-laki yang berlatar belakang sama digunakan sebutan *ambek* 'ayah'. Adapun untuk mereka yang berlatar belakang keluarga *tomaradeka*, digunakan sebutan *uak* atau *puak*.

Bicara cukuk

Bicara *cukuk* ditandai oleh penggunaan morfem terikat $-(k)o$ dan *mu-* serta $(k)u-$, di samping unsur-unsur leksikal tertentu yang paling umum. Misalnya:

(31) Teg(ak)o jokka?
'Kemana kamu pergi?'

(32) Aga Mujama, Bacok
'Apa kau kerja, Baco'

(33) Leppakko mai
‘kau singga kemari’

(34) Anreko maega!
‘kau makan yang banyak!’

Ada banyak faktor yang menentukan si tersapa dipandang harus diberi tuturan *congaa*, *sanraa*, maupun *cukuk*. Seseorang dihormati karena latar belakang keturunannya (misalnya bangsawan atau arung), umur lebih tua, jabatan, memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, misalnya berilmu, berani, meskipun muda dalam usia, atau ia sedang bertamu. Kalau hal-hal ini kabur karena si tersapa tidak cukup dikenal, biasanya digunakan bicara *sanraa* yang netral, atau kalau hal-hal tersebut tidak dimiliki, digunakanlah bicara *cukuk*.

Bicara sanraa

Bicara sanraa (BS) ditandai oleh kenetralan tuturan itu dari komunikasi vertikal ke atas (*congaa*) dan komunikasi vertikal ke bawah (*cukuk*). Dalam hal ini, digunakan morfem terikat *(r)i-* atau *-e* atau samasekali tidak menggunakan penanda pertama maupun kedua. Misalnya:

(35) Aga (r)ijama?
‘Apa dikerjakan’

(36) Tega lokka (manguju)?
‘Ke mana pergi’

(37) Siaga ellinna gollae?
‘Berapa harga gula’

(38) Lecce manre
‘Pindah makan’

(39) Leppang mai!

'Mari singga!'

(40) Tudang-tudang cinak, di!

'Duduk-duduk sebentar, ya!'

b. Prospek tingkat tutur bahasa Bugis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah bertutur seperti disebutkan di depan tidak terlembagakan dengan baik di kalangan keluarga-keluarga, kecuali keluarga *arung* dan *tomaradeka* tertentu. Keluarga *arung* pada umumnya juga mengalami kesulitan dalam melembagakannya karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat umum yang tidak begitu memedulikan pentingnya penguasaan kaidah-kaidah bertutur demikian. Pada pihak lain, kaidah-kaidah bahasa seperti ini dirasakan sulit dan kaku diterapkan. Mereka menganggapnya berciri feodal dan tidak cocok dengan zaman kemerdekaan. Dalam keadaan seperti ini, pada umumnya terjadi peristiwa alih kode dari bahasa Bugis ke bahasa Indonesia. Alasannya ialah bahasa Indonesia dipandang lebih berciri ekualitas. Di samping itu, kaidah *bicara congaa*, *bicara sanraa*, dan *bicara cukuk* tersebut memang sulit untuk dikuasai dengan baik. Untuk menguasai sistem bahasa ini diperlukan adanya usaha pelebagaan di rumah tangga atau ia dijadikan sebagai bahan pelajaran muatan lokal pada sekolah-sekolah formal. Dengan demikian, secara perlahan bahasa Bugis ditinggalkan oleh penuturnya. Dikatakan secara perlahan bahasa Bugis ditinggalkan karena yang mula-mula ditinggalkan ialah sistem *bicara congaa*, kemudian *bicara sanraa*, dan terakhir *bicara cukuk*.

Karena *bicara cukuk* itu identik dengan penggunaan bahasa Bugis yang tidak takzim dan hanya cocok digunakan pada masyarakat level bawah, akhirnya orang berpikir tidak perlu

berbahasa Bugis untuk menghindarkan diri dari sanksi sosial, yaitu dicap tidak tahu sopan-santun berbahasa, bahkan lebih jauh dari ini, akan dianggap bagian dari warga masyarakat *ata*. Artinya, tanpa disadari bahasa Indonesia telah menjadi tempat pelarian untuk beralih kode dan hasilnya ialah bahasa Indonesia akan tambah menguat sehingga pada waktu yang sama posisi dan fungsi bahasa daerah akan melemah. Puncak ekstremnya ialah bahasa Bugis sebagai bahasa daerah akan tidak diwariskan lagi sebagai bahasa pertama dalam lingkungan keluarga, yang berarti akhirnya bahasa Bugis akan mengalami kekurangan jumlah penutur. Kalau hal demikian berlangsung dalam tempo lama tanpa usaha-usaha pemertahanan yang efektif tentu saja yang akan terjadi kemudian ialah kepunahan.

Memang disadari bahwa bahasa daerah mana pun di Indonesia menghadapi masalah ekologis dengan bahasa Indonesia. Itulah sebabnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sudah dirumuskan dengan baik sebagaimana kedudukan dan fungsi bahasa daerah telah dijabarkan sedemikian rupa agar kedua bahasa ini dapat hidup berdampingan secara harmonis. Dalam hal ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang jati diri nasional, sarana pemersatu berbagai kelompok etnik, dan sarana perhubungan antardaerah dan antarbudaya daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan tingkat nasional, bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bahasa media massa. Kemudian, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pengungkapan sastra Indonesia serta pemer kaya bahasa dan sastra daerah.

Pada pihak lain, bahasa daerah juga ditentukan fungsinya, yaitu sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang jati diri daerah, sarana pendukung budaya daerah, dan sarana pengungkapan sastra daerah. Kemudian, untuk pengembangan bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai pendukung. Begitu pula, untuk perhubungan dalam keluarga dan masyarakat daerah serta media massa lokal, bahasa daerah diharapkan masih berperanan. Adapun bahasa asing ditetapkan fungsinya sebagai alat perhubungan antarbangsa, sarana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan nasional, serta sumber pengembangan dan pemerayaan bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia sejauh ini telah menjalankan fungsinya sebagai bahasa nasional (persatuan) pada level negara. Namun, timbul masalah baru, yaitu bahasa ini dirasakan belum dapat menjadi wahana keakraban atau bahasa intim antarsuku di level masyarakat sebagaimana diperankan oleh bahasa daerah selama ini. Sementara itu, bahasa Indonesia ragam akrab merupakan ragam regional dan ragam ini tidak mengindonesia. Bahasa Indonesia ragam informal yang agak menasional ialah bahasa Indonesia dialek Jakarta. Sayang sekali, bahasa Indonesia dialek Jakarta ini kelihatan belum familiar bagi semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak bermukim di ibukota Republik Indonesia.

Lebih dari itu, bahasa Indonesia perlu diusahakan untuk menjadi wahana aspirasi bangsa ke arah pendemokrasian masyarakat. Namun, dalam hal ini dikhawatirkan menyusupnya pengaruh kultur feodal dan tingkat bahasa dari bahasa daerah pada zaman kolonial ke dalam tubuh bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia hendaknya benar-benar terbina menjadi bahasa egaliter, baik di dalam dirinya sendiri maupun dalam relasinya dengan bahasa daerah dan bahasa asing.

Di samping itu, revitalisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara masih perlu diperjuangkan dengan mengusahakan

memprosesnya, bukan hanya menjadi wahana modernisasi kebudayaan, melainkan benar-benar berproses menjadi alat penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Di sini bahasa Indonesia mendapatkan tantangan baru, yaitu masuknya pilihan bahasa asing, utamanya bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada kelas-kelas internasional. Sebenarnya hal ini dibolehkan oleh Rancangan Undang-Undang Kebahasaan, tetapi yang dikhawatirkan ialah terbentuknya sikap positif yang berlebihan kepada bahasa asing sehingga pada gilirannya menimbulkan sikap negatif yang juga berlebihan kepada bahasa nasional, bahasa Indonesia.

Pada pihak lain, pengembangan fungsi bahasa daerah sesungguhnya menjamin kesinambungan kebudayaan, tetapi sekaligus seringkali berjaln erat dengan pelapisan atau stratifikasi sosial tradisional. Dalam hal ini, terdapat hal yang lebih mengkhawatirkan lagi ialah terjadinya penguatan penguasaan dan penggunaan bahasa Indonesia pada masyarakat kelas menengah yang disebabkan oleh berkembangnya sikap negatif mereka terhadap bahasa daerah, yang dinilainya sebagai bagian dari identitas kelas yang lebih rendah. Dari satu segi, bahasa Indonesia diharapkan memberikan kontribusi positif bagi bertumbuh dan berkembangnya masyarakat egaliter yang menjunjung tinggi persamaan hak yang dapat menjamin menyuburnya kehidupan demokrasi yang sarat dengan upaya pembaruan di segala bidang kehidupan.

Lebih dari itu, menurut Alisjahbana (1954: 10), semakin maju negara dan masyarakat kita, bertambah luas pula serangan bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah, tidak terkecuali bahasa daerah yang mempunyai jumlah penutur yang besar dan wilayah penggunaan yang luas, bahkan yang berkesusastraan luhur sekalipun. Itulah yang terjadi di Indonesia sekarang. Bahasa Indonesia sudah begitu jauh mendesak ke daerah-daerah yang dahulu semata-mata dikuasai oleh bahasa daerah. Jika hal ini

berlangsung terus, sudah pastilah dalam waktu yang tidak berapa lama lagi banyak bahasa daerah kecil di Indonesia akan punah.

Menurut Poedjasoedarmo (1980: 193), dalam hubungan persoalan ekologis antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, ada tiga kemungkinan perkembangan. Yang pertama ialah bahasa Indonesia akan terus bertambah kuat dan akhirnya akan mendesak bahasa-bahasa daerah sampai mati. Kedua, akan terjadi diglosia yang mantap. Ketiga, akan terjadi semacam integrasi antara bahasa-bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Dalam kaitan ini, Alisjahbana menilai bahwa idealnya adalah kemungkinan kedua, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa perbedaan lingkungan penggunaan bahasa Indonesia pada satu pihak dan bahasa Indonesia pada pihak lain menjadi tambah kacau. Bahasa Indonesia bukan hanya tumbuh dalam lingkungan politik yang luas, administrasi negara, bidang teknik, pendeknya lingkungan atas yang luas (bersifat antardaerah dan antarbangsa), melainkan juga telah jauh merembes ke dalam keluarga, desa, atau daerah yang lebih kecil. Padahal, bahasa daerah diharapkan tetap berperan dalam lingkungan keluarga dan desa serta bidang seni budaya daerah.

Hal lain yang mengancam kelangsungan hidup bahasa daerah ialah penurunan populasi penutur bahasa itu yang ditandai oleh meningkatnya jumlah anak yang tidak mendapatkan bahasa daerah sebagai bahasa pertama di lingkungan keluarga. Gejala seperti ini tidak saja terjadi di ibukota provinsi dan kabupaten, tetapi juga diikuti oleh warga ibukota kecamatan. Penyebabnya ada beberapa. Pertama, bahasa daerah dinilai tidak berkembang dan tidak mendukung keberhasilan pendidikan formal anak-anak. Kedua, lingkungan pergaulan yang majemuk suku. Ketiga, pernikahan antarsuku menyulitkan mempertahankan atau mewariskan bahasa ibu sebagai bahasa pertama anak-anak. Ketiga, mobilitas penduduk. Dalam keadaan harus dimutasikan dari kota/provinsi satu ke kota/provinsi lain karena tuntutan

pekerjaan, tentu agak sulit mempertahankan bahasa daerah sebagai bahasa pertama anak-anak. Lebih dari itu, dalam hal terjadi mobilitas antarnegara, beberapa keluarga bahkan memilih bahasa asing, utamanya bahasa Inggris sebagai bahasa pertama anak-anak.

Simpulan

Sistem tutur *bicara congaa*, *bicara cukuk*, dan *bicara sanraa* masih dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat Bugis, tetapi telah mengalami reorientasi sesuai dengan dinamika masyarakat modern. Pada masyarakat Bugis tradisional sistem tutur ini merefleksikan keberadaan pelapisan sosial masyarakat Bugis yang terdiri atas tiga lapisan, yaitu (1) masyarakat *arung*, (2) masyarakat *tomaradeka*, dan (3) masyarakat *ata*. Karena pelapisan sosial demikian telah mengalami pengaburan, yaitu batas-batas identitas antara satu sama lain sudah makin tidak jelas, penggunaan sistem tutur *bicara congaa*, *bicara cukuk*, dan *bicara sanraa* dengan sendirinya mengalami reorientasi. Sistem tutur masih dipertahankan, tetapi bukan untuk merefleksikan pelapisan sosial masyarakat Bugis secara tradisional, melainkan untuk merefleksikan nilai-nilai ketakziman yang hidup dan berlaku dalam tatanan masyarakat Bugis modern.

Dalam keadaan mengalami reorientasi, sistem tutur *bicara congaa*, *bicara cukuk*, dan *bicara sanraa* jelas mengalami ancaman kepunahan terlebih-lebih lagi karena norma bertutur seperti ini jelas berciri feodal dan juga tidak terlebagakan penggunaannya, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat serta dunia pendidikan formal. Sementara itu, bahasa Indonesia yang menjadi alternatif dirasakan juga belum berkembang sebagai wahana komunikasi keakraban pada level komunitas keluarga dan etnik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Husen. 1965. "A Structural Comparison between English and Buginese Segmental Phonemes, and Its Application to the Teaching of English Pronunciation to Speakers of Buginese". *Skrripsi Sarjana*. Ujung Pandang: Fakultas Sastra Unhas.
- Abas, Husen. 1981. "Hubungan antara Ekologi Bahasa dan Lingkungan Hidup: Perspektif dan Implikasinya pada Masa Datang". Makalah yang disampaikan pada Seminar Lingkungan Hidup Universitas Tadulako Palu.
- . 1982. "Pemakaian Morfem-Terikat Honorifik di Kalangan Penutur Asli Bahasa Bugis dari Berbagai Strata Sosial: Statu Kajian Sociolinguistik". *Hasil Penelitian*. Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Unhas.
- Alisjahbana, S.T. 1954. *Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Achsan, Bachtiar dkk. 1978: Morfologi Bahasa Bugis". *Hasil Penelitian*. Ujung Pandang: Pemda Tkt. I Sulsel. Alimuddin D.P. dkk. "Pemakaian Kosakata Murid Kelas VI SD yang Berbahasa Ibu Bahasa Bugis" *Hasil Penelitian*. Ujung Pandang: Balai Penelitian Bahasa.
- Ambo Enre, Fachruddin dkk. 1974. Struktur Bahasa Bugis (Fonologi dan Morfologi). Jakarta: Pusat Bahasa.
- Atmodarsono, Soewondo. 1984: Peran Faktor Afektif dalam Mengajarkan dan Belajar Bahasa Asing" (Pidato Ilmiah). Ujung Pandang: Fakultas Sastra Unhas.
- Goodenough, H. Ward. 1971. *Culture, Language, and Society*. Newyork: The Benyamin Inc.
- Halim, Amran (ed.). 1976. *Politik Bahasa Nasional 1*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kaseng, Syahrudin dkk. 1974. Valensi Morfologi Dasar Kata Kerja Bahasa Bugis". *Disertasi Doktor*. Jakarta: UI
- Kaseng, Syahrudin dkk. 1981. *Sistem Perulangan Bahasa Bugis*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Kridalaksana, Harimurti. 1974: *Fungsi dan Sikap Bahasa*. Ende: Nusa Indah.
- Mattulada dkk. 1975. *Fungsi dan Kedudukan Bahasa Bugis di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Pusat Bahasa.

- Mattulada. 1991. "Manusia dan Kebudayaan Bugis-Makassar dan Kaili di Sulawesi" dalam *Antropologi Indonesia* No. 48, Tahun XV, Januari – April, hlm. 85. Jakarta: Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Mattulada. 1991. "Elite di Sulawesi Selatan" dalam *Jurnal Antropologi Indonesia* No. 48, Tahun XV, Januari – April, hlm. 85. Jakarta: Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Moeliono, Antón M. 1982. "Bahasa dan Struktur Sosial" dalam majalah *Analisis Kebudayaan*, No. 3 Thn. II. Jakarta: Depdikbud.
- Poedjasoedarmo, Soepomo. 1980. "Interferensi dan Integrasi dalam Situasi Keanekabahasaan" dalam Yusuf Abdullah Puar (ed.). *Setengah Abad Bahasa Indonesia*, hlm. 191—193.
- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebahasaan. 2006. Departemen Pendidikan Nasional.

Biodata Penulis

Nama lengkap: Dr. H. Muhammad Darwis, S.S., M.S.

Tempat/tgl. lahir: Bone, 28 Agustus 1959

Pendidikan:

1. MIN 7 Tahun Bone, 1971
2. PGAN 4 Tahun Makassar, 1976
3. PGAN 6 Tahun Makassar, 1979
4. Sarjana Muda Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Unhas, 1981
5. Sarjana Linguistik (Indonesia) Fakultas Sastra Unhas, 1982
6. Magister Sains (M.S.) bidang Linguistik, Unhas, 1990
7. Doktor bidang Linguistik, Unhas, 1998

Jabatan:

- Dekan Fakultas Sastra Unhas (2005 – sekarang)
- Ketua Program Studi S-2 Bahasa Indonesia Unhas (1999 – 2007)
- Ketua Umum Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) Sulsel (2006 – sekarang)

Makassar Kekuatan Maritim Pada Periode Akhir Kolonial

Oleh:

Dr. A.Rasyid. Asba. MA

Tulisan ini berusaha menjelaskan mengapa Makassar muncul sebagai kekuatan maritim dunia pada masa akhir kolonial Belanda. Namun sebelum membahas periode tersebut akan dibahas pentingnya kawasan Indonesia timur sebagai pusat perdagangan. Ada tiga hal yang mendukung Makassar ketika itu muncul sebagai kekuatan maritim. Pertama, Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) diberikan lesensi sebagai kekuatan utama dalam perdagangan antar pulau di Hindia Belanda. Kedua, Pelabuhan Makassar tumbuh dengan pesat sebagai kekuatan regional sehingga dapat menyaingi Singapura, dan yang ketiga adalah ditempatkannya Makassar sebagai pusat pengembangan industri minyak kelapa bagi pasaran Eropa dan Amerika, yaitu ditandai dengan dibentuknya Oliefabrieken Insulinde Makassar.

1. Jalur Pelayaran dan Perdagangan di Indonesia Timur

Jika jalur pelayaran tradisional di Indonesia Timur di jelajahi maka imajinasi historis kita di jumpai berbagai dermaga. Dalam Negara Kertagama dan naskah Kuno orang Bugis Ilagaligo menginformasikan bahwa wilayah Kawsan Timur Indonesia merupakan jalur perdagangan yang dikategorikan cukup tua. Itulah sebabnya Kenneth R. Hall sekitar abad ke 14 wilayah tersebut masuk dalam kawasan perdagangan Asia Tenggara.

Kawasan tersebut beradanya dalam pengaruh kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Daya tarik wilayah tersebut mempunyai kekhasan sebagai penghasil rempah-rempah dan kayu cendana. Sampai di mana keberadaan sumber tersebut memang masih memerlukan data historis lebih banyak.

Negara Kartagama mendeskripsikan kota-kota perdagangan di Indonesia Timur yang mempunyai hubungan dengan Majapahit. Negara Kartagama menyebutkan kota-kota dagangan di pantai Selatan semenanjung Pulau Sulawesi seperti Bontayang, Luwuk, Selayar, Banggae dan Makassar. Wilayah tersebut dinyatakan sebagai jalur utama ke timur yang dihubungkan dengan gugusan pulau Sumba, Solot, Kumir, Galiyao dan Kepulauan Maluku. Yang kaya akan rempah-rempah.¹

Gambaran Negara Kartagama tentang pelayaran dan perdagangan Jawa ke Indonesia Timur diperkuat oleh temuan fakta historis kepingan perahu layar niaga di pantai pulau Selayar. Perahu layar yang diduga milik saudagar ini di temukan di pantai Selayar yang berukuran indah dengan motif naga bersayap di bahagian haluan. Perahu tersebut dihiasi relief kaligrafi indah bertulis " Sultan Abdul malik Tuban". Perahu tersebut masih perlu penyelidikan apakah perahu tersebut milik Sultan Abdul Malik raja Tuban atau nama Perahu saja yang tidak terkait dengan raja Tuban. Bandar Tuban ketika itu sebagai satu-satunya bandar niaga Islam Jawa yang masih loyal terhadap Kerajaan Hindu yang masih berkuasa di pedalaman Jawa. Sisa kepingan kapal kayu yang ditemukan di Pulau Selayar ini dapat diduga secara pasti sebuah kapal dagang Jawa abad ke 16.

Jika dibuka lembaran sejarah perdagangan maritim di kawasan Sulawesi Selatan maka tampak bahwa sejak abad ke-14 kata Makassar telah disebut. Dalam babat Negara Kartagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1364 telah tercatat

¹ Th. Pigeaud, 1960. *Java in The Fourteenth Century. A Study in Cultural History.* The Hague: Nijhoff for KITLV hal, 11

sejumlah tempat di Sulawesi Selatan yang dikunjungi armada dagang Majapahit, yaitu Luwu, Bantaeng, Selayar, dan Makassar. Tanpa mempertimbangkan proses sejarah, kita pasti menyatakan bahwa berdasarkan karya Prapanca Bandar Makassar telah berkembang pada tahun 1360-an. Namun demikian bila ditelusuri proses kesejarahan dapat dikatakan bahwa bandar Makassar yang dicatat oleh Prapanca itu bukan bandar yang kini dikenal dengan Bandar Makassar, karena kawasan bandar ini pada periode itu masih sunyi-senyap dalam dunia perdagangan Maritim. Kota pelabuhan di pesisir barat jazirah selatan Pulau Sulawesi yang berkembang ketika itu diperkirakan Siang (Bungoro / Pangkajene), Bacokiki (Pare-Pare), Suppa, dan Nepo (Balanipa-Mandar).

Kota pelabuhan Tallo baru berkembang setelah beberapa kerajaan kecil di daerah Bira (kawasan Sungai Tallo) bersepakat membentuk persekutuan dan menetapkan mengangkat Karaeng Lowe ri Sero (saudara raja Gowa VII, Batara Gowa) menjadi raja Tallo (sekitar tahun 1460-an). Kerajaan Gowa ketika itu masih berorientasi pada kegiatan agraris dengan pusat pemerintahan di Tamalatea, sekitar 6 km dari pesisir. Kerajaan Gowa baru mulai menaruh perhatian pada perdagangan maritim ketika tampil Karaeng Tumaparissi Kalonna (1510-1546). Pada periode pemerintahannya dia membangun Sombaopu dan menjadikannya pusat pemerintahan dan bandar niaga.

Usaha memajukan perdagangan Maritim menjadi alasan Karaeng Tumaparissi Kalonna berperang melawan Kerajaan Tallo. Perang itu diakhiri dengan perjanjian pembentukan kesatuan dari dua kerajaan itu pada tahun 1528. Pembentukan kesatuan itu dalam ingintan kolektif masyarakat dinyatakan dengan ungkapan "satu rakyat tetapi dua raja" (*sereji ata narua karaeng*). Sejak pembentukan kesatuan itu, ditetapkan bahwa yang menjadi raja kerajaan persekutuan adalah raja Gowa dan yang menjadi mangkubumi (*tumabicara butta*) adalah raja Tallo.

Persekutuan dua kerajaan itu dalam perkembangan kemudian disebut Kerajaan Makassar. Itu berarti kerajaan ini terbentuk pada tahun 1528, dengan raja pertama adalah Karaeng Tumaparissi Kalonna dan yang menjadi mangkubumi pertama adalah raja Tallo, Mangaiyoang Berang Tunipasuru.

Setelah pembentukan persekutuan Gowa-Tallo itu, dua kerajaan itu mulai memperluas pengaruh kekuasaan ke berbagai kerajaan pesisir di kawasan itu, seperti Siang, Bacokiki, Suppa, Garaci, dan Nepo. Penaklukan itu diikuti pula dengan kesepakatan untuk berniaga ke Tallo dan Sombaopu. Kebijakan ini tampak dipandang kurang berhasil oleh penggantinya, Karaeng Tunipalangga Ulaweng (1546-1565). Oleh karena itu ia melaksanakan kebijakan yang diistilahkan dengan ungkapan "aku bertitah dan kamu menaatinya" (*makkanama nu mammio*). Strategi kebijakan itu adalah menaklukan dan menuntut kerajaan yang ditaklukan itu berjanji mentaati perintahnya, dan mengangkut penduduk dan barang mereka serta memukimkan mereka di daerah antara kota pelabuhan Sombaopu dan Tallo. Akhirnya dua kota pelabuhan itu menyatu karena sepanjang kawasan pesisir antara muara Sungai Jeneberang di selatan hingga pada muara Sungai Bira di bagian utara telah berjejer pemukiman pedagang dari berbagai daerah. Hal itu berakibat dua kota pelabuhan itu dipandang telah menjadi satu kota pelabuhan yang kemudian disebut Makassar.

Pemukiman penduduk-penduduk dari kerajaan taklukan di Makassar itu dilaksanakan tanpa perencanaan. Mereka dimukimkan pada tempat yang kosong antara Tallo dan Sombaopu. Itulah sebabnya ketika datang orang Melayu memohon untuk menetap dan berniaga di Makassar, mereka diberikan wilayah Mangalekanna, yang terletak di selatan Sombaopu. Kemudian juga datang pedagang Eropa lainnya, seperti pedagang Portugis (1532), ditempatkan pada daerah bagian utara Sombaopu, dan kemudian datang pedagang

Belanda (1607), Inggris (1613), Denmark (1618), Spanyol (1615), dan Cina (1618), dimukimkan berjejer ke bagian utara Sombaopu hingga Tallo.² Itulah sebabnya dalam diskripsi tentang perdagangan di Makassar dinyatakan bahwa sepanjang pesisir antara Sombaopu dan Tallo berjejer kapal dan perahu dagang, dan di balik tembok-tembok benteng itu berlangsung kehidupan pasar. Hal itu menunjukkan bahwa semua wilayah kota merupakan ruang niaga.

Bandar baru yang terbangun itu kemudian dikenal dengan nama baru yaitu Makassar, sehingga bandar Tallo dan Bandar Sombaopu hanya dipandang bagian dari bandar baru itu. Penyebutan nama bandar itu diikuti pula dengan penyebutan nama kerajaan kembar Gowa-Tallo menjadi Kerajaan Makassar, mungkin karena dua bandar dari dua kerajaan itu telah terlebur menjadi bandar Makassar sehingga penyebutan itu dapat dipandang mewakili penyebutan Gowa-Tallo.

Siapa yang memberikan penamaan itu dan kapan penaman itu diberikan dan diterima oleh pemilik bandar dan kerajaan itu sulit diketahui. Suatu yang jelas adalah bahwa nama Makassar itu telah dikenal jauh sebelum tampilnya Bandar Makassar dan Kerajaan Makassar. Dalam babat Negara Kartagama, nama itu telah disebut. Juga dalam naskah sejarah Kerajaan Bima disebutkan bahwa semua daerah di utara Pulau Sumbawa disebut Makassar. Informasi ini bila ditelusuri lebih jauh dapat diketahui bahwa peta daerah ini yang dibuat pelaut Portugis menempatkan seluruh kawasan pada bagian utara dalam pelayaran antara, Malaka ke Maluku diberi nama Makassar. Pulau Kalimantan dalam peta Portugis disebut Gramdos Ilha de Maccazar (Pulau Makassar yang Besar), sementara Pulau Sulawesi disebut Ilhas dos Maccazar (pulau-Pulau Makassar). Jika informasi ini dihubungkan dengan kedudukan Bandar

² Edward L. Poelinggomang, Makassar Abad XIX. Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hal. 28.

laskar Arung Palaka pada tahun 1672, dan diberikan daerah pemukiman di bagian timur Vlaardingen. Penataan ini menempatkan Benteng Jungpandang, yang kemudian diganti namanya menjadi Fort Rotterdam, menjadi pusat kegiatan administrasi politik dan Vlaardingen menjadi lokasi kegiatan ekonomi, pelabuhan Makassar dan areal perdagangan. Walaupun disebut pusat perdagangan namun aktivitasnya hanyalah pada perdagangan pesisir.⁵

Penyempitan wilayah kegiatan perdagangan ini dilakukan karena kebijaksanaan kompeni bukan sesungguhnya menjadikan Makassar pusat perdagangan tetapi menjadikannya pusat pengawasan pelayaran niaga ke Maluku. Hal itu dimaksudkan melindungi kebijaksanaan monopoli rempah-rempah di Maluku. Dalam kaitan itu pula, semua pelaut dan pedagang dari Sulawesi Selatan dilarang berniaga ke Maluku, dan semua pedagang asing (Eropa dan Asia) diperintahkan keluar dari Makassar. Dampaknya adalah kegiatan perdagangan di Makassar menjadi merosot dan sepi. Aktivitas perdagangan yang tampak hanyalah pada pembelian produksi lokal dan pedagang pesisir di sekitar wilayah Makassar dengan pulau-pulau, dalam komoditi beras, budak, dan kain Selayar.

Perkembangan aktivitas ekonomi Makassar mulai berubah ketika VOC mulai membuka hubungan niaga dengan Cina. Pada tahun 1731, Kompeni mengizinkan junk Cina berniaga ke Makassar untuk bisnis produksi laut, dengan batasan hanya 2 junk setiap tahun. Izin itu berakibat Makassar mulai dikunjungi junk Cina pada tahun 1736. Namun demikian kehadirannya hanya berdampak munculnya istilah "pasar utama" (*mata pasarra*). Walaupun demikian kehadiran pedagang Cina ini berhasil merubah suasana perdagangan karena negori Vlaardingen telah

⁵ Baca: H.A. Sutherland, "Eastern Emporium and Company Town: Trade and Society in Eighteenth Century Makassar" dalam: Frank Brieze (ed), *Brides of the Sea: Port Cities of Asia from 16th 260 Centuries* (Kensington: New South Wales University Press, 1989)

menjadi daerah pemukiman pedagang Cina, dan menggeser kedudukan para pedagang Belanda dan mestizo. Hal itu, berdampak pula bagi hubungan dagang. Pedagang-pedagang Cina berhasil menjalin hubungan dagang yang baik dengan pelaut dan pedagang Sulawesi Selatan di Makassar. Kelompok pedagang yang disebutkan terakhir itu dinyatakan selalu menepati janji dan cekatan dalam kegiatan perdagangan. Namun demikian, akibat pembatasan jumlah junk, sehingga aktivitas pedagang dari daerah ini berpindah ke pusat perdagangan asing lainnya, terutama Singapura, setelah dibangun oleh Raffles pada tahun 1819.

Keterlibatan pelaut dan pedagang Sulawesi Selatan dalam perdagangan di Singapura berhasil memajukan perdagangan dan memikat pedagang Cina memusatkan kegiatan perdagangan mereka di bandar niaga itu. Hal itu pendorong pemerintah colonial Belanda berusaha mengalihkan kegiatan mereka kembali ke Makassar. Langkah yang ditempuh adalah merubah status kota Makassar menjadi kota pelabuhan bebas pada tahun 1847. Kebijakan itu bukan hanya berhasil mendorong pelaut dan pedagang Sulawesi Selatan memusatkan kegiatan mereka ke Makassar, tetapi juga telah mendorong pengusaha Inggris dan Cina di Singapura bergiat mengembangkan bisnis mereka di Makassar. Pada gilirannya juga mengundang pengusaha asing lainnya bergiat untuk berniaga dan menanamkan modal usahanya di Makassar. Dalam beberapa tahun saja setelah pemberian status baru itu, perdagangan Makassar mengalami kemajuan pesat dan berhasil menyaingi kemajuan Singapura.⁶

⁶ Baca: Edward L. Poelinggomang, *op. cit.*

2. Konink Paketvaart Machappij Sebagai Pengintegrasikan Perdagangan Antar Pulau

Sejak tahun 1887 SMN (Stoomvaart Maatschappij Nederland) dan RL (Rotterdamsche Lloyd) mengakhiri kontraknya, sehingga sejak tanggal 4 September 1888 KPM mulai beroperasi.⁷ Itulah sebabnya berbagai eksekutif pelayaran di Nederland memberi dukungan perusahaan perkapalan KPM. Dukungan itu antara lain dari J. Boissevain, W. Ruys, dan P.E. Tegelberg. Selain dukungan dari perusahaan perkapalan juga muncul dukungan dari berbagai direktur perkapalan lainnya seperti direktur NHM, Amsterdam Bank, Deli Maatschappij dan Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij. Para Direktur perusahaan tersebut memberikan dukungan kepada pemerintah.⁸ Dalam kontrak pertamanya KPM direktur SMN dan RL mengusulkan kepada parlemen Belanda agar dibuatkan kesepakatan dengan Pemerintah Hindia.⁹

Pada tahun 1890, ketika kapal *Camphuys* utusan parlemen Belanda dalam perjalanannya menjelajahi kawasan Indonesia bagian timur, dikemukakan bahwa ekonomi di kepulauan itu punya prospek yang cerah. Semua pelabuhan di Timur Besar yang disinggahinya dan dilihatnya hampir semua pedagang Cina, Arab dan pribumi membentuk hubungan dengan Singapura. Makassar berfungsi sebagai pos terdepan bagi perdagangan Singapura. Lalu-lintas antara Makasar dan Singapura sangat maju.. Ketika itu banyak orang Cina di kota Makassar memiliki

7 M. A.J. Kelling "De. Konink Lijke Paketvaart Maatschappij en haar nieuwe overeenkomst met de Regeering dalam De Indische Gids. Twee en Vijftigste . Jaargang. Amsterdam: NV Drukkerij en Uitgeverij. 1930, 692..

8 M. A.J. Kelling , ibid hal, 691. Lihat pula Singgih Trisulistiyono. " Net Java Sea Network: Patterns in the Development of Interregional Shipping and Trade in The Process of National Economic Integration in Indonesia , 1870s-1970s ". Universiteit Leiden, Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doktor, 2003, hal, 124.

9 W. Van Braam, Het Paketvaart Contract, Koloniaal Tijdschrift, Twee en Vijftigste . Jaargang. Amsterdam: NV Drukkerij en Uitgeverij. 1934. hal, 673

majikan di Singapura. Usaha utamanya terdiri atas pengiriman barang-barang ekspor. Bukan hanya bagi produk hutan (rotan, getah dan damar yang sejak pertengahan abad XIX dikirim ke Singapura).¹⁰

Barang-barang ekspor dari Makassar yang diangkut ke Singapura selain untuk diolah di Singapura juga dikirim ke Cina, India, Jepang, Eropa dan Amerika. Berbagai Komoditi dari Singapura dipasarkan di Eropa melalui Inggris, Perancis dan Jerman. Sebaliknya barang-barang impor penting dari Makassar juga diambil dari Singapura seperti tekstil, alat-alat industri rumah tangga, minyak bumi dan beras.

Pada masa hubungan Makassar Singapura, lalu-lintas pengangkutan barang-barang tidak semuanya dikelola oleh perusahaan perkapalan Hindia Belanda. Di wilayah Timur Besar hampir teputus dengan Jawa. KPM pada awalnya terikat pada jalur subsidi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ada tiga prinsip yang dijalankan KPM untuk memonopoli pelayaran, pertama ia harus memperhitungkan pelayaran rutin semua pengangkutan, bukan hanya pada jalur bebas tetapi juga jalur tambahan. Kedua, Wilayah Indonesia Timur yang terdiri berbagai pulau didorong untuk menghasilkan suatu komoditi; dan ketiga, KPM harus membentuk hubungan yang lebih luas dan menjadikan perahu layar sebagai patner. Dalam kontrak pertamanya KPM hanya melayani 13 route. Hal itu disebabkan karena masih terbatas oleh kapal dan anggaran. Ketika itu pemerintah hanya memberikan subsidi £. 1,2 – £ 1, 50/ mil sehingga total keseluruhan £.660.000/ tahun.¹¹ KPM pada awalnya tidak diperuntukkan sebagai perusahaan perkapalan yang berorientasi bisnis, tetapi lebih banyak dibebankan sebagai

¹⁰ J.C. Westermann, *Een halve eeuw Paketvaart 1891-1941* (Amsterdam: de Bussy, 1941) hal. 221

¹¹ M. A.J. Kelling . Ibid, hal. 694-696. lihat pula Voorgestelde wijzingen in stoomvaartdienst, 8 November.1890", di dalam KPM/ KJCPL, Inv. No. 80 Archieh National Den Haag.

sarana pengangkutan bagi ekspedisi-ekspedisi militer dalam mengintegrasikan administrasi Kolonial. Dengan alasan tersebut pemerintah memberikan subsidi KPM untuk melayari daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Dalam bulan Mei 1899 terjadi perjanjian kontrak yang kedua, berbagai pembaharuan manajemen pengelolaan KPM antara lain Dewan direktur KPM menetapkan tiga direktur yang sebelumnya hanya dipegang oleh satu orang. Selain itu juga ditetapkan tambahan jalur menjadi 30 route dengan bantuan subsidi dari pemerintah f.500.000 pertahun. Pihak KPM berhak mendapatkan hak monopoli bagi pengangkutan barang seperti pengangkutan garam dan batubara.¹²

Dalam kontrak kedua KPM mulai memperluas jalur-jalurnya di Wilayah Timur Besar. Jalur itu antara lain Makassar menuju kepulauan Sunda Kecil di sepanjang Bima, Sumba, Ende sampai Kupang dan Dilly (jalur 24). Dari Makassar ada sejumlah jalur kecil mingguan (jalur 17B, 22) menuju pulau-pulau dan daerah Sulawesi secara bergiliran, kota-kota pantai itu seperti disebelah utara Makassar seperti Pare Pare dengan tujuan utamanya mengangkut beras. Selain itu juga menyinggahi Selayar, Balangnipa, Palime dan Palopo. Kapal KPM banyak mengangkut seperti kopra dan jagung, dan berbagai hasil hutan. Di Pare-Pare juga dibentuk jalur kecil (jalur 13) yang melayari Donggala, Pare Pare, Makassar ke pantai timur Borneo Samarinda dan Balikpapan.

Kehadiran KPM (pada jalur 24, 17 b, 22 dan 13) mengintegrasikan daerah-daerah penghasil kopra dari Selayar dan daerah-daerah pesisir Teluk Bone yang setiap tahunnya antara 80 ribu - 130 ribu ton dibawa ke Makassar. Dari jumlah itu sekitar 55 % berasal dari Selayar dan sisanya 45 % diperoleh

¹² N.V. KPM Official year Book, hal.7. Lihat pula Singgih Trisulistiyono. "Net Java Sea Network: Patterns in the Development of Interregional Shipping and Trade in The Process of National Economic Integration in Indonesia, 1870s-1970s". Universiteit Leiden, Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doktor, 2003, hal, 106

dari Bulukumba, Sinjai, Bone Selatan, palopo dan Buol Toli-Toli. Selain itu juga diangkut ribuan ton yang diangkut melalui perahu-perahu padawakang yang pada umumnya banyak dimiliki elite lokal.¹³

Dalam kontrak kedua KPM berhak mendapat ganti rugi, jika biaya operasional melampaui biaya eksploitasi pemerintah. Namun pemerintah juga berkewajiban melindungi hak monopoli yang diberikan kepada KPM. Meskipun KPM harus cermat terhadap munculnya persaingan. Keterlibatan pemerintah menegakkan monopoli adalah sesuatu yang berlebihan bagi munculnya perusahaan pengangkutan di luar KPM.¹⁴

Pada tanggal 6 September tahun 1915 kontrak kedua berakhir dan dilanjutkan dengan kontrak ketiga. Dalam kontrak ketiga ada berbagai kebijakan baru, termasuk penghapusan subsidi. Penghapusan subsidi dihentikan dengan syarat pemerintah membayar biaya pengangkutan pos senilai f 500 ribu per tahun. Dalam kontrak baru itu. KPM diangjurkan menambah jalur pelayanan wajib. Keistimewaan kontrak ketiga bila dibandingkan dengan kontrak kedua adalah lebih luwes dan tidak terlalu mengikat. Dalam kontrak itu juga KPM diberikan wewenang oleh Gubernur Jenderal menyinggahi tempat-tempat di luar jalur yang ditetapkan dengan catatan tidak melebihi radius 25 mil laut dan tidak mengalami kemacetan besar.¹⁵

Keluwesannya KPM, lebih banyak belajar dari pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, dimana kegiatan KPM banyak ditentukan oleh pemerintah. Karena KPM diharapkan mandiri dan mengembangkan misinya sebagai perusahaan yang profesional dan mengurangi ketergantungan pada negara melalui campurtangan pemerintah mengatur KPM. Eksploitasi negara

¹³ AND NHM Makassar Inv 5112, Koleksi .F.W.T Hunger, Opgave van Klapper ondernemingen. Tahun 1920

¹⁴ W. Van Braam, *Op-Cit*, hal 823

¹⁵ W. Van Braam, *Het Paketvaart Contract*, Koloniaal Tijdschrift, Twee en Vijftigste Jaargang. Amsterdam: NV Drukkerij en Uitgeverij. 1934. hal, 674

terhadap KPM seperti pengangkutan militer, garam dan batubara tanpa beban biaya. Pembatasan jalur yang terlalu besar oleh wewenang Gubernur Jenderal dapat pula dianggap sebagai campur tangan. Wewenang yang terbatas untuk menyinggahi kekuatan monopoli tempat-tempat dapat mengurangi kebebasan tarip KPM.¹⁶

Campur tangan pemerintah mengatur KPM, hanya dianggap sebagai sementara. Selanjutnya negara tidak dianjurkan untuk melakukan eksploitasi, meskipun negara turut memberikan jaminan melalui bentuk monopoli. Pengangkutan kepentingan administrasi pemerintahan menjadi bagian yang kecil dari seluruh pengangkutan dan juga sebuah pelabuhan negara akan mengalami persaingan dari KPM yang telah dikelola dengan baik. Hal itu mengakibatkan perusahaan negara tidak memberikan keluwesan dalam menata usahanya.

Dalam pembahasan kontrak ketiga melalui amandemen, penasehat KPM mengusulkan untuk membatasi wewenang Gubernur Jenderal bahkan kalau perlu dihapuskan. Pemerintah memandang kontrak itu diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti luas, termasuk kebebasan KPM menyinggahi tempat-tempat yang tidak termuat dalam kontrak. Alasan pemerintah agar KPM menyinggahi tempat-tempat yang tidak dimuat dalam kontrak harus diubah tidaklah menjadi faktor utama alasan pemerintah campur tangan. Karena itu tujuannya adalah desakan dari berbagai pengusaha untuk menyinggahi semua tempat.¹⁷

Dengan melihat peranan yang dimainkan KPM di Hindia Belanda, maka dapat dipahami bahwa pemerintah menghendaki adanya ikatan dan keterlibatannya mengelola perusahaan. Sejak awal tujuan KPM dibentuk memang tidak lepas dari semangat nasionalisme, sejumlah jalur dan tempat-tempat persinggahan

¹⁶ Ibid, hal, 673.

¹⁷ M. A.J. Kelling. *Ibid*, hal. -697

telah ditetapkan dengan penuh pertimbangan politik. Subsidi yang diberikan Sampai tahun 1915 masih mengandung unsur eksploitasi. Dengan adanya KPM sebagai sarana utama bagi perkembangan kekuasaan, Mr. Fock menduga juga penggunaan sarana ini tergantung pada pemerintah dan bukanlah alasan utama pemerintah campur tangan.¹⁸ Pengusaha tidak terikat selain itu kepentingan umum bisa dianggap aman seperti halnya pada pemerintah. Perbedaan pandangan antara pihak perusahaan dengan pemerintah keduanya tidak ada yang mau mengalah karena itu keputusan terakhirnya terletak di Belanda Hindia Belanda adalah suatu negara yang sangat tergantung pada hubungan melalui laut yang lancar. Suatu hubungan lalu-lintas yang teratur dan baik bukan hanya dengan bagian lain dunia tetapi juga berbagai bagian hubungan antarpulau mulai dari Hindia Belanda sampai dengan di Asia Timur. Hal itu penting bagi terciptanya bagi pemerintahan yang baik dan sarana yang paling diperlukan untuk membawa negara kepulauan dalam perkembangan ekonomi. Pengawasan negara, setidaknya campur tangan negara dengan perkapalan antar-pulau di Hindia Belanda juga nampak wajar dan bisa dimaklumi. Pandangan itu beralasan karena orang masih percaya pada pemerintah hanya memberikan keuntungan monopoli bagi KPM.¹⁹

KPM yang melayani berbagai jenis jalur tetap dengan jadwal yang telah ditentukan. Meskipun itu berat karena membutuhkan dana subsidi dari pemerintah. Dalam tahun 1912 jumlah subsidi pemerintah mencapai £ 457.498.²⁰ Apabila KPM tidak melayani jalur perintis maka para pemegang saham dalam waktu singkat gulung tikar, akibatnya tujuan KPM untuk memajukan ekonomi daerah terbelakang tidak bisa tercapai. Bagi KPM yang penting

¹⁸ W. Van Braam, *Op-Cit*, hal.680

¹⁹ J.C. Westermann, *Een halve eeuw Paketvaart 1891-1941* (Amsterdam: de Bussy, 1941) hal 231

²⁰ M. A.J. Kelling. *Loc-Cit*, hal. 696

adalah melayani jalur-jalur yang kurang lebih sekitar 300 pelabuhan yang harus disinggahi baik dari pelabuhan modern maupun yang tradisional. Pada pelabuhan modern semua sarannya lengkap sehingga kapal-kapal besar bisa langsung masuk dengan memakai waktu yang sangat singkat. Sebaliknya pada pelabuhan tradisional atau primitif tidak memiliki prasarana yang memadai, perairannya sempit, peta laut sering tidak memuat informasi yang memadai tentang batu karang yang sulit dipastikan. Begitu pula bagi bagi pelabuhan lautnya yang terbuka pembongkaran atau pemuatan tidak memungkinkan, karena kapal harus bisa bertahan dalam badai, sambil menanti kesempatan untuk membongkar muatan.

Dalam kontrak keempat KPM diharapkan dapat memperhatikan mosi Middendorp pada tahun 1929, yakni memberikan perhatian kepada Kamar Dagang dan industri Hindia Belanda, agar KPM bisa menurunkan tarifnya. subsidi KPM sekitar 18 % pertahun kepada negara segera diturunkan. Perusahaan semestinya lebih banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat dari pada pemerintah menikmati sendiri. Kebijakan tidak menurunkan tarif menurut direksi KPM cukup beralasan karena untuk mempertahankan modal awal yang mencapai f 30 juta yang hingga pada tahun 1930 naik menjadi £ 80²¹.

Untuk menjembatani perbedaan antara pihak KPM dan pemerintah memberikan ganti rugi sebesar £ 2.952.000 (10 % dari yang diusulkan 18% oleh parlemen) untuk pengangkutan pelayanan sarana administrasi pemerintahan. Karena itu pemerintah minimal bisa menutupi £.173.000 pertahun . Ganti rugi itu akan dipakai seperti:

1. melayani secara rutin 30 jalur, yang mencakup seluruh kepulauan itu;

²¹ M. A.J. Kelling, hal, 693

2. menggunakan kapal-kapal yang cocok (mengenai kedalamannya);
3. menerima pengawasan pemerintah atas tarip swasta
4. pembentukan suatu komisariat pemerintah;
5. penggantian sementara kapal yang tidak bisa melayani pelayaran;
6. penyediaan kapal-kapalnya bagi penyewaan atau pengambilan alihan setiap saat;
7. menyiapkan kapal-kapalnya bagi tujuan militer;
8. jaminan bagi sifat nasional perusahaan itu;
9. membangun kapalnya di galangan nasional;
10. menerima resiko lebih besar dalam bongkar dan muat barang-barang negara.²²

3. Singapura Pesaing Utama Makassar

Singapura yang terletak di Semenanjung Malaka, pada abad XVIII masih dihuni sedikit oleh orang-orang Melayu. Perubahan muncul pada awal abad XIX ketika Raffles menegaskan kekuasaan Inggris. Sebagai pelabuhan bebas Singapura menjadi pusat perdagangan dan perkapalan bagi pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Keberhasilan itu muncul ketika Bengkulu diserahkan kembali pada tahun 1816, setelah pemerintah Inggris gagal menjadikan Bengkulu sebagai pesaing utama Batavia. Pada tahun 1819 pemerintah Inggris membujuk seorang bangsawan Johor untuk mengizinkan pemukiman Kompeni Inggris di Hindia Timur. Ketika itu Johor berada di bawah pengaruh kekuasaan Belanda. Pemerintah Belanda menyerahkan Johor kepada Inggris pada tahun 1824 setelah beberapa kali terjadi perjanjian.²³

²² Besluit Nomer 12 Nopember 1904 Buitenzorg, 20 Nopember 1904

²³ Kolonial Tijdschrift, 1934, hal, 132. Lihat pula Peterpost Op-Cit. hal, 235-236

Gebernur Inggris Raffles menilai Singapura sebagai daerah pelabuhan yang strategis untuk menarik perdagangan Asia . Singapura yang merupakan pelabuhan lebar dan dalam letaknya strategis karena dilindungi oleh pulau-pulau dan menguntungkan bagi lalu-lintas perdagangan antara Selat Malaka dengan Laut Cina Selatan. Fungsi utama pelabuhan Singapura adalah menjadi pusat perkapalan antara Hindia dan Asia Timur. Pada fase ke tiga abad ke-19 Singapura menjadi pusat lalu-lintas di lautan Hindia. Usaha pemerintah Belanda untuk menjadikan daerah Riau sebagai pelabuhan bebas 1828 yang diharapkan mampu menahan arus perdagangan Singapura tidak berhasil. Dua titik temu itu tampaknya tidak bisa dipertemukan. Yang muncul adalah perkapalan Raffles (Singapura) meraih keunggulan atas Pemerintah Belanda. Pertemuan jalur perkapalan memperkuat posisi Singapura. Pedagang-pedagang Cina yang baru pada awal abad XIX menunjukkan ekspansi perdagannnya ke selatan, mulai tinggal di Singapura dan menjadikannya sebagai salah satu kota dagang Cina terbesar di dunia. Mereka menjadi sebagai pedagang perantara dari Cina dan menjadikan pelabuhan Sinagapura sebagai pelabuhan transito bagi hasil bumi dari pulau-pulau di sekitarnya. Dengan kapal-kapal layarnya, pedagang Cina mendesak perkapalan perahu pribumi mengikuti jalur perdagangannya sampai ke pedalaman kepulauan Hindia Belanda, melalui ikatan kongsi dan ikatan marga yang kuat.

Sementara Pemerintah Hindia Belanda mencurahkan perhatiannya pada politik Tanam Paksa di Jawa, armada dagang Cina yang berpusat di Singapura semakin menerobos ke pedalaman luar Jawa seperti pantai Borneo dan Sulawesi hingga Maluku dan kepulauan Sunda Kecil pada pertengahan abad ke-19. Armada Cina berdagang melalui pelabuhan-pelabuhan besar di Hindia Belanda, tanpa melihat jaringan dagang Makassar di Timur Raya dikurangi dan dialihkan ke Singapura sejak pada tahun

1870-an. Para pedagang Cina dan kapal-kapal layarnya menetap di Maluku dan membuka jaringan hubungan langsung dengan Singapura. Di Maluku pedagang-pedagang Cina membawa beras dan barang impor lain kepada penduduk.²⁴

Di bawah kekuasaan Inggris Singapura berkembang dengan pesat. Ia merupakan titik pertemuan semua jalur yang berhubungan dengan Eropa, Asia Timur dan Amerika. Para pedagang Inggris dan Cina memperkuat posisinya melalui pedagang-pedagang Eropa. Dalam tahun 1890 Singapura mencapai titik puncaknya sebagai pusat perdagangan. Baru ketika itu Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk menyaingi Singapura. Setelah munculnya dukungan KPM dalam memonopoli pengangkutan, Makassar segera dirintis menjadi kota pelabuhan modern dan mengambil alih fungsi Singapura sebagai kota dagang dan mengambil alih kembali produsennya di Sulawesi Maluku dan Papua Neuw Nuginia. Namun perdagangan Singapura tidak kehilangan posisinya, dalam arti mutlak yang dihitung menurut angka ekspor dan impor, Singapura tetap menunjukkan peningkatan ekspornya.

Posisi Singapura sepenuhnya berbeda dengan berbagai pelabuhan di Indonesia Timur. Singapura sebagai pusat lalu-lintas, juga merupakan titik simpul jalan antara Asia Timur dan Selatan, Afrika, Hindia Belanda dan Australia, lebih penting dari pada Makassar dan sebagai tempat penimbunan bagi pulau-pulau sekitarnya, Singapura jauh lebih maju. Sementara fungsi Makassar sebagai pusat ekonomi Timur Raya ditopang oleh produk utamanya yaitu kopra, Singapura menjadi pasar besar dari berbagai produk kawasan sekitarnya seperti Malaka, Sumatra, Borneo dan pulau-pulau sekitarnya. Rotan, sagu, kopra, lada, gambir, timah, karet dalam jumlah besar tetap diangkut dan diekspor ke Singapura.

²⁴ *Kamer van Koophandel en Nijverheid te Makassar Jaarverslag 1897*, hal.7

Dalam tahun 1890 Makassar tetap menjadi pelabuhan terpenting di Indonesia Timur meskipun perannya sebagai pusat niaga lemah. Ekspor Indonesia Timur ke Eropa hanya menggunakan Makassar sebagai pelabuhan transito. Hampir semua komoditi di Makassar dibeli oleh perusahaan dagang Singapura yang mengatur perkapalan antar-samodera. Hanya produk dari beberapa perkebunan Belanda seperti kopi dan tembakau yang dikirim melalui Pulau Jawa. Orang-orang Cina Makassar banyak berhubungan dengan perusahaan besar rekan-rekannya di Singapura dan mengirim hasil hutan seperti rotan, getah dan damar.²⁵

Jaringan Makassar Singapura secara perlahan-lahan berubah ketika KPM mulai beroperasi di kawasan Timur pada tahun 1891. Tidak seperti sebelumnya dimana NISM hanya mengelolah jalur utama antar-pulau. Setelah KPM muncul, mereka mencoba memperoleh pijakan dalam arus komoditi di seluruh kawasan kepulauan Hindia Belanda, yang masih didominasi oleh Cina yang berdiam di Singapur. Orang Cina Makassar banyak bekerja sama dengan kapal-kapal perahu pribumi. Meningkatnya hubungan antara daerah pantai pribumi dan kantong-kantong Barat seperti Singapur, Batavia membuat niaga Cina bangkit dengan jaringan tradisional. Di Makassar perdagangan kopra sebagai bentuk niaga yang dominan sejak awal abad ke-19 perahu pribumi sangat penting²⁶

Pemusatan jaringan perdagangan ke Makassar sebagai hasil keputusan Konferensi Pengangkutan Batavia (Batavia Vracht Conferentie- BVC) tahun 1900 tampaknya menjadi langkah strategis Pemerintah Belanda untuk menurangi jung-jung Cina menguasai Indonesia Timur. Pada tahun 1902 sebagian besar

²⁵ J. C. Westerman, *Op-Cit*, hal. 21

²⁶ H.W. Dick *Op-Cit*, hal. 41 Lihat pula J. N.F.M.a. A. Campo. *Koninklijke Paketvaart Maatschappij ; Stoomvaart en Staatsvorming in de Indonenesische Archipel, 1888-1914*. Hilvesum: Verloren 1992 hal, 157-161

kopra regional telah dikapalkan langsung dari Makassar ke Eropa (kecuali perusahaan dagang Mohrmann & Co., yang masih membeli kopra melalui perusahaan Behn Meyer & Co., yang berpusat di Singapura. Dalam jumlah lebih besar perusahaan Cina di Indonesia Timur melepaskan ikatan Singapura. Meskipun kebijakan itu tidak sepenuhnya berhasil karena Singapura diuntungkan oleh berkembangnya komoditi karet di Sumatra dan Kalimantan.

Untuk melihat hubungan dagang antara Makassar dengan Singapura, maka dapat dilihat secara umum perkembangan ekspor Makassar melalui Singapura. Dalam tahun 1910 jumlah ekspor Makassar mencapai £.35 juta, dari jumlah itu £. 7 Juta diperoleh melalui Singapura. Dua belas tahun kemudian yaitu pada tahun 1922 ekspor Makassar naik menjadi £. 135 juta dan melalui Singapura £. 52 juta. Dalam tahun yang sama andil kapal-kapal yang masuk dari Singapura ke Makassar menurun yaitu 21,4 % pada tahun 1910 menjadi 2,6 % pada tahun 1922. Sebaliknya Impor Makassar secara keseluruhan berjumlah f. 15 juta pada tahun 1910. Dari tahun yang sama jumlah impor melalui Singapura sebesar £. 6,7 juta. Dalam tahun 1921 jumlah impor Makassar naik menjadi £. 43 juta, £. 7,1 juta di antaranya diperoleh melalui Singapura. Pada umumnya impor Singapura itu adalah beras yang berasal dari Ngrangun, Saigon dan Bangkok.²⁷

Dari data hubungan antara Makassar dan Singapura menunjukkan bahwa nilai ekspor dan impor terus meningkat. Meskipun jumlah kapal yang masuk ke Makassar terus menurun. Hal itu diakibatkan karena KPM bagi Makassar sangat berpengaruh dalam memonopoli pengangkutan hubungan Makassar Singapura. Artinya kapal-kapal Cina dan Inggris peluangnya semakin menurun di Wilayah Timur Besar karena

²⁷ Broersma: *De Uitvoerhandel van Makassar Dalam Tijdschrift voor Economische Geographie*. S. Gravenhage- Mouton & Co 1925.

dimonopoli oleh KPM. Kapal-Kapal Cina dan Eropa yang berpangkalan di Singapura terbatas beroperasi di Hindia Belanda karena terikat oleh organisasi Pengangkutan BVC.

Dalam laporan statistik Kamar Dagang Makassar selama periode tahun 1901-1910 menyimpulkan bahwa muatan lokal yang masuk selama 10 tahun meningkat, yaitu 63% untuk impor dan 116 % ekspor. Terjadinya perbedaan antara ekspor dan impor pada periode itu berjumlah 47530,45 last pada tahun 1901 dan 27.487,51 last pada tahun 1910 atau penurunan hampir mencapai 42%. Hal itu disebabkan karena ekspor Makassar banyak tergantung dari kopra yang pada tahun 1901 masih banyak diekspor ke Singapura, belum diekspor secara langsung ke Eropa.²⁸

Dalam laporan Kamar Dagang Makassar terkesan bahwa Makassar adalah kota dagang yang ramai, pembukuannya tersusun secara rapi dan kotanya berkembang dengan pesat muncul tanda tanya apakah dengan nama yang disandang Makassar sebagai pusat perdagangan di Kawasan Timur Kepulauan Hindia Belanda. Makassar menjadi Singapura kedua atau merosot hanya sebagai pelabuhan transito.²⁹ Pertanyaan itu bukan saja seperti yang termuat dalam koran, tetapi Makassar harus ditempatkan sebagai sebuah pelabuhan yang modern, meskipun semakin banyak hubungan lalu lintas modern semakin banyak produsen yang ingin berhubungan langsung dengan konsumen dengan melalui para pedagang perantara yang tidak diperlukan. Sebagai contoh Hongkong hilang posisinya sebagai pusat perdagangan karena semua produk barang yang dihasilkan tidak lagi dikapalkan melalui Hongkong tetapi semua- pelabuhan- pelabuhan di Asia Timur dapat berhubungan langsung dengan para konsumen. Begitu pula apakah Makassar dan Singapura

²⁸ *Jaar verslag van de Handels Vereeniging " Makassar. 1901-1910*

²⁹ *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nedelandsch Indie*. Batavia: 1911, hal, 308-309.

akan kehilangan sejumlah produk yang berasal dari Kepulauan Hindia Belanda.

Meskipun letak Makassar sangat menguntungkan di posisi antara Hindia Belanda dengan Amerika, Australia dengan Asia Timur, namun harus dilihat pula bahwa posisi serupa juga dimiliki oleh Singapura dan Surabaya. Khususnya Singapura selalu menyaingi Makassar, dan dorongan Singapura untuk mengalihkan produsen Makassar yang telah dikuasai Makassar sejak abad ke-16. Perbaikan pelabuhan dan berbagai kebijakan baru dalam perdagangan menjadi pertimbangan utama untuk mempertahankan eksistensi kedudukan Makassar sebagai pusat perdagangan.³⁰

Kebijakan yang ditekankan pelabuhan, dalam usahanya untuk meningkatkan pendapatan negara adalah penerapan pajak perkapalan. Tinggi rendahnya biaya pajak perkapalan mempengaruhi ramainya kapal-kapal yang masuk di pelabuhan. Itulah sebabnya biaya pengangkutan yang tinggi berhubungan langsung dengan indikator-indikator yang dapat menghambat laju pertumbuhan .

Dampak yang ditimbulkan oleh penerapan pajak yang tinggi bagi pelabuhan transit mengakibatkan munculkan persaingan antara pelabuhan. Hal itu mengakibatkan lahirnya aturan-aturan baru yang menarik lalu-lintas pengangkutan bagi pelabuhan-pelabuhan antara Makassar dengan Singapura. Jika persaingan itu muncul dari bangsa lain maka kepentingan lokal akan semakin terancam. Itulah yang dialami pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan transit ketika Singapura sebagai pesaing utamanya.³¹ Beberapa pedagang dari Ambon dan Banda mengapalkan produknya ke Makassar dan Singapura. Mereka membuka

³⁰ R. Broersma, "De Uitvorhande van Makassar" dalam *Tijdschrift Economische Geographie*: S Gravenhage-Mouton &Co 1925, hal. 97.

³¹ W.C. Houck, *Singapore als Concurrent van de door Voerhavens Macassar en Tandjong Priok in verband met een eventueele verhooging va Havengelden in Laatstgenoemde havens* dalam *Koloniale Studien, Weltevreden: Albrecht & Co 1918*, hal. 125

Singapura dan Penang terhadap Timur Raya . Adanya perbedaan pajak ekspor dan impor antara Makassar dan Singapura pada tahun 1880- an menjadi perbedaan yang saling menyaingi hubungan dengan Singapura dan Makassar.³⁶

Di pelabuhan Singapura aktivitas dermaga biasa dilakukan di Tanjung Pagar sebelum barang-barang sampai ke Singapura, lama barang di tanjung pagar biasanya sampai 4 hari dengan tidak mendapat pemungutan biaya, kemudian selanjutnya dibawa ke pelabuhan Singapura. Sebaliknya di pelabuhan Makassar harus langsung di dermaga, sehingga biaya dermaga terkesan tinggi bila dibandingkan dengan Pelabuhan Singapura, karena ada tambahan waktu gratis. Adapaun perbedaan yang mendasar antara pelabuhan Makassar dengan pelabuhan Singapura ditunjukkan berbagai contoh sebagai berikut:

1. Pelabuhan Makassar:

Kapal pengangkut Heemskerk membongkar barang dagangan sejumlah 900 ton. dikenakan Biaya pembongkaran masuk dan keluar masing-masing £ 25, uang dermaga £ 107,32 dan uang pelabuhan £ 89,87, cukai pelabuhan dan berlabuh selama 6 bulan sebesar £ 858 dihitung 1/3 waktu berlayar dan 2/3 di pelabuhan maka untuk 4 bulan penggunaan pelabuhan dibayarkan £ 858, untuk 2 hari $\frac{2}{120} \times £ 858$ atau £ 14,30; jadi seluruhnya £ 261,49. Yang ditangani 1100 ton, yakni 900 ton untuk muatan. Pada muatan bisa ditekan $\frac{9}{11} \times £ 261,49 = £ 213,95$.

1. Kapal pengangkut untuk pembongkaran 200 ton muatan lokal dan memuat 900 ton muatan kapal serta 500 ton muatan lokal selama 3 hari. Biayanya uang muat masuk

³⁶ H.W. Dick. The Emergence of a national Economy , 1808-1990s" dalam Lindblad, ed *Historical Foundations of a National Economy in Indonesia*, L indblad 1890s-1990s, hal. 36-37

£ 70 dan uang muat keluar £ 70, uang dermaga £ 424,50 dan uang pelabuhan £ 360, cukai pelabuhan dan berlabuh selama 6 bulan £ 2.264; maksimal 2 X dalam 6 bulan tiba di Hindia Belanda dan kemudian menyinggahi 4 pelabuhan jadi $1/8 \times £ 2264 = £ 283$; seluruhnya £ 1207,50 diolah 1600 ton yakni 900 ton untuk muatan dan pada muatan bisa ditekan sebesar $9/16 \times £ 1207,50$ atau £ 679,21 jadi seluruhnya £ 893,16. Biaya pelabuhan sebesar £ 893,16 dan uang pajak gudang 900 ton @ £ 2,22 per ton atau £ 1998; jadi seluruhnya £ 2891,16 atau per ton £ 3.212.

Pelabuhan Singapura :

Pengapalan lewat penimbunan di Tanjung Pagar:

- a. kapal pengangkut Heemskerk membongkar 1000 ton dikenakan biaya pengkutan kembali ke Singapura selama 7 hari di tambah biaya ekspor dan impor senilai \$ 54,30, biaya gudang \$ 350
- b. Kapal pengangkut membongkar 1000 ton muatan lokal dan memuat 1000 ton muatan lokal serta 1000 ton selama 7 hari. Dikenakan biaya ekspor dan impor masing \$ 60 ditambah biaya pergudangan \$ 1550 .

Kapal pengangkut pertama membongkar muatan Tanjung Pagar. Pengolahan jumlah muatan dikenakan biaya pengangkutan berupa:

- a. Kapal angkut Heemskerk dalam 6 hari selesai, tidak membayar biaya pelabuhan.
- b. Kapal pengangkut seperti di atas \$ 1610 jadi pada muatan pengapalan ditekan $1/3 \times £ 1610 = \$ 536,66$. Biaya pergudangan 1000 ton @f 0,90 per ton ditambah \$ 868 untuk biaya perahu dan \$ 164 untuk tenaga

pengukur dsb. sebanyak \$ 1932, jadi semua \$ 2468,66 atau per ton \$ 2469 atau £ 3.457.³⁷

Dari uraian di atas tampak bahwa munculnya berbagai kebijakan di pelabuhan Makassar berpengaruh langsung terhadap meningkatnya bongkar muat barang. Begitupula sebaliknya yang terjadi di pelabuhan Singapura. Adanya berbagai biaya penarikan pajak di pelabuhan Makassar selalu berkaitan dengan meningkatnya kapal-kapal yang masuk. Pertanyaan yang seing muncul adalah apakah kepentingan niaga tidak di dasarkan atas program kebijakan yang telah dibuat. Apakah dengan kebijakan yang tiba-tiba diterapkan dapat menamba kas pelabuhan atau senantiasa mengancam keberadaan pelabuhan akibat adanya ketidak pastian.

Di Tanjung Pagar (Singapura) biaya pelabuhan, pergudangan dihitung berdasarkan sejumlah tonase, tanpa melihat perbedaan apakah barang itu diangkut oleh perahu atau kapal. Biaya pengapalan biasanya dihitung oleh nahkoda, apabila dia membongkar muatan, perahu yang berangkat. Bila sebuah kapal hanya dimuati dengan muatan perkapalan di Singapura tanpa melalui Tanjung Pagar untuk menghindari biaya perahu, maka tetap dikenakan biaya. Namun sering juga ada sejumlah besar muatan yang ditangani, di mana dibongkar di pelabuhan laut tanpa merugikan pergudangan.

Untuk memberikan perbandingan lebih lanjut antara pelabuhan Makassar, Singapura adalah dengan merincikan perbandingan biaya dari berbagai pajak di pelabuhan,. Orang menerima bahwa kapal yang sama membongkar muatan

³⁷ Ibid. hal. 128. Perbedaan Nilai kurs mata uang antara Dollars dan Gulden ketika itu masing-masing 2 : 3

yang sama dengan menghitung berapa biaya pendapat pelabuhan itu. Jangan hanya ditinjau dari sudut pandang perusahaan kapal, sehingga selain dengan biaya dermaga pelabuhan harus diperhitungkan dengan faktor lain dan jumlah hari tambahan. Perhatian yang diberikan untuk membongkar dan memuat sangat berpengaruh pada keuntungan yang akan diperoleh sebuah kapal setiap perjalanan, seluruh jumlah muatan dihitung bagi jumlah hari tambahan tertentu dan dengan demikian mengurangi keuntungan tambahan, bisa berarti kerugian. Perbandingan angka-angka yang diperoleh bagi setiap pelabuhan dari seluruh jumlah komoditi biaya pelabuhan, biaya kapal per hari dan bonus tambahan hari gratis .

Biaya pembongkaran kapal di Pelabuhan Singapura jauh lebih murah bila dibandingkan dengan pelabuhan Makassar Di Singapura hanya uang dermaga yang perlu dibayar. Sebaliknya pelabuhan Makassar biaya pembongkaran juga dibayar sehingga Singapura lebih menguntungkan dari pada Makassar. Hal itu melatari juga kopra para pedagang Bugis Makassar tetap mempertahankan jaringannya di Singapura

Munculnya Makassar sebagai kekuatan maritim juga diakibatkan oleh masuknya kapal-kapal asing dari luar ke pelabuhan Makassar. Dalam tahun 1905, misalnya, kapal uap yang berlabuh di pelabuhan Makassar berjumlah 519 buah dengan kapasitas 1.460.693 M3 dengan rata-rata 2814 M3 setiap kapal. Hal ini melampaui kapasitas kapal-kapal sebelumnya. Pada tahun 1883, misalnya, kapasitas muat kapal hanya mencapai rata-rata, 2814 M3 setiap kapal.³⁸

³⁸ S.DE. Graaf & D.G. Stibbe, *Encyclopaedie van Nederlands Indie, Ggraueuhage*. Martinus Nijhoff, Leiden: N.V. Brill.1918 Jilid III. hal 654.

Pada tahun 1913 jumlah kapal uap meningkat menjadi 559 buah kapal dengan kapasitas kapal seluruhnya berjumlah 2.377.665 M3, yaitu rata-rata 5142 M3 setiap kapal.³⁹ Pada tahun 1920 jumlah kapal uap meningkat menjadi 566 buah kapal dengan kapasitas kapal seluruhnya berjumlah 3.015.665 M3, yaitu rata-rata 5.324 M3 setiap kapal. Pada tahun 1930 Jumlah kapal uap meningkat menjadi 1028 buah kapal dengan kapasitas kapal seluruhnya berjumlah 7.646.912 dengan rata-rata 7.493 M3 setiap kapal. Pada tahun 1939 jumlah kapal 1008 kapal dengan kapasitas muatan 3.923.404 M3 dengan rata-rata 6474 M3 setiap kapal seperti digambarkan tabel-1 di bawah ini.⁴⁰

Tabel 1
Perkembangan Armada Kapal Yang Masuk
Di Pelabuhan Makassar 1905-1939

Asal kapal	1905		1913		1920		1930		1939	
	Kapal	Muatan	Kapal	Muatan	Kapal	Muatan	Kapal	Muatan	Kapal	Muatan
Belanda	412	1205.381	398	1621.564	413	2.371.032	735	5.783.335	820	1.366.309
Inggeris	27	199.611	43	294.122	54	324.407	54	614.408	50	422.488
Jerman	20	75.990	27	78.934	29	140.665	30	425.007	24	223.333
Jepan	12	257.450	46	358.149	72	523.498	91	713.488	76	1.554.231
Norwegia	7	21.761	8	24.846	10	65.169	11	215.179	23	357.043
Total kapal	519	1.460.193	559	2.377.665	566	3.015.665	1028	7.646.912	606	3.923.404

Sumber: Jaarverslag van de Handelsvereniging Makassar Exporteurs Vereniging Makassar 1905-1940; Kamer van Koophandel en Nijverheid te Makassar Jaarverslag 1905-1940; Jaarverslag Der Haven van Makassar Lands Drakkerij Witevreden 1921-1936; ANRI, Memorie van Overgave No.22.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 1930 jumlah kapal yang masuk di Makassar mencapai puncaknya.

³⁹ S.DE. Graaf & D.G. Stibbe, *Encyclopedie van Nederlands Indie*, Gravenhage. Martinus Nijhoff, Leiden: N.V. Brill. 1918 Jilid III. hal 654.

⁴⁰ ANRI Makassar no. 32, *Memorie van Overgave van Gouverneur Celebes en Onderhoorigheden* (14 Oktober 1941)

Meningkatnya kapal yang masuk di Makassar pada periode itu sejalan dengan keterbukaan Makassar sebagai pusat pelayaran antara pulau

Di bidang pelayaran rakyat, perahu layar juga terus meningkat kecuali antara tahun 1899 dan 1909. Meskipun demikian sebetulnya dari segi kedatangan perahu layar pribumi di pelabuhan-pelabuhan di Hindia Belanda dalam pelayaran antar pulau tetap menagalami kenaikan. Jika pada tahun 1899 pelabuhan di Hindia Belanda dalam rangka pelayaran antar pulau sebanyak 12.474 maka pada tahun 1909 menjadi 4.303. Peningkatan ini berhubungan dengan semakin besarnya armada KPM dalam menguasai trayek perdagangan antar pulau. Secara persentase perbandingan kepemilikan perahu di Hindia Belanda pada tabel-2 di bawah ini:

Tabel-2
Persentase Perkembangan Jumlah Armada Perahu Layar Pribumi Hindia Belanda 1869-1939

Tahun	Perahu Layar Pribumi	Perahu Layar Eropa	Perahu Uap dan Motor
1869	13,3 %	79,4 %	7,3 %
1879	79,4 %	18 %	2,6 %
1889	83,1 %	12,4 %	4,5 %
1899	87,4 %	7,9 %	4,7 %
1909	95,4 %	2,2 %	2,4 %
1919	95,7 %	0,6 %	3,7 %
1929	96 %	0,1	3,9 %
1939	90,01 %	-	9,09 %

Sumber: Diolah dari Gerrit J. Knaap (ed) *Changing Economy in Indonesia, Vol.9, Transport 1819-1940*. Amsterdam : Royal Tropical Institute .1989 hal.39-46

Tabel di atas menunjukkan adanya ekspansi kapal uap dalam pelayaran antar pulau. Selama 30 tahun peranan kapal uap berdasarkan volume muatan naik sebanyak 38 %. Kecenderungan jangka panjang perkembangan peranan kapal uap dalam penangkutan barang dalam pelayaran antar pulau terus meningkat. Sementara itu perahu layar pribumi turun peranannya sebanyak 5, 6 % dan kapal layar Eropa turun sebanyak 33 %. Namun demikian angka riil yang dicapai oleh perahu layar pribumi tetap mengalami kenaikan terkecuali tahun 1939.

Perkembangan serupa juga terjadi pada aktivitas perahu layar. Namun Perkembangannya cenderung lebih fluktuatif bila dibandingkan dengan kapal-kapal uap, khususnya pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Jawa. Hal itu diakibatkan karena kapal-kapal uap hampir mendominasi pengangkutan barang-barang dalam bentuk kargo, di mana para pedagang lebih senang dengan pertimbangan faktor efisiensi waktu. Sebaliknya kapal perahu layar lebih tidak menjamin ketidakpastian waktu karena banyak tergantung pada sistem angin.

Konflik antara KPM dengan kapal-kapal Cina "armada semut" yang paling parah terjadi pada pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Utara. Hal ini disebabkan karena KPM memonopoli kopra dari pelabuhan-pelabuhan kecil untuk mengalihkan ke kapal Batavia Freight Conference (BVC) yang berpusat di Makassar. Itulah sebabnya maka pada tahun 1918 orang Jepang memperkenalkan kapal kayu kecil bermotor untuk mengumpulkan kopra yang selanjutnya diekspor ke Jepang.⁴¹

Kehadiran KPM juga berimplikasi perubahan-perubahan pusat jalur-jalur dalam pelayaran dan perdagangan Makassar. Perubahan itu tertuang dalam kontrak jalur pelayaran dengan KPM yang dinyatakan mulai berlaku 1 Januari 1891. Jumlah

⁴¹ H.W. Dick. *Industri Pelayaran Indonesia Kompetisi dan Regulasi*, LP3ES 1990, hal.21

keseluruhan jalur pelayaran adalah sembilan belas jalur, di antaranya tujuh jalur yang menempatkan pelabuhan Makassar dasar tolak pelayaran dan perdagangan sebelum kehadiran KPM.⁴² Namun pada masa KPM tujuh jalur pelayaran yang berpusat di Makassar hanya dua jalur yang berlaku. Sisanya lima Jalur yang berpusat di Makassar dipindahkan masing-masing, yaitu tiga jalur berpusat di Surabaya dan dua jalur pelayaran berpusat di Singapura.⁴³ Akibat pemindahan pusat jalur-jalur pelayaran berimplikasi pada terbatasnya wilayah pemasaran jenis komoditi dari pelabuhan Makassar, misalnya saja karet dari Kalimantan yang sebelumnya diekspor melalui Makassar dipindahkan lewat Surabaya atau bisa diekspor langsung ke Singapura.

Ketika Jepang menduduki pulau Jawa pada bulan Maret tahun 1942, kapal-kapal pelayaran Belanda banyak ditenggelamkan atau melarikan diri dari kepulauan Indonesia, dan digantikan kapal-kapal Jepang untuk dipakai tujuan perang. Sebaliknya pelayaran antar pulau sebagian besar diisi oleh perahu-perahu. Cina yang telah masuk sejak tahun 1937. Demikian juga pelayaran perahu perahu Indonesia diberikan izin untuk mengisi kekosongan perdagangan antar pulau. Karena itu dibentuklah Badan Pengawasan Asosiasi-asosiasi Pelayaran yang berkedudukan di Makassar dan Surabaya. Tujuannya adalah untuk mencegah hancurnya perdagangan antar pulau setelah berakhir perang dunia kedua. Pada tahun 1946 hanya tinggal 50%

⁴² Tujuh Jalur perdagangan Makassar adalah: Pertama, Makassar Batavia, Semarang, Surabaya, dan Ambon; Kedua, Batavia, Makassar Kupang, Banjarmasin, Samsat dan Pontianak (jalur 8); Ketiga, Surabaya, Makassar, Ambon, Ternate, Manado (jalur 9); Keempat, Makassar, Bantaeng Bulukumba, Selayar dan Buton (jalur 10); Kelima, Makassar Surabaya, Ambon, Banda, Buru, Bacan, Ternate, Gorongtalo, Manado/Kema, Amurang, Toli-Toli, Palu, Pare-Pare (jalur 11); Keenam, Makassar Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Sinjai, Palopo, Buton, Kendari (jalur 12) Ketujuh, Makassar, Bima, Nangamessi, Sabu, Rote, Atapupu, Kupang, Larantuka, Maumere, Bima (jalur 13)

⁴³ Jalur-Jalur yang dialihkan pusatnya adalah jalur pelayaran no 9, 12 dan 14 untuk pelabuhan Surabaya dan jalur no. 8 dan 11 untuk pelabuhan Singapura. sisanya jalur no 10 dan 13 tetap di Makassar untuk lebih jelasnya lihat jalur pelayaran Cores de Vries, Jalur Pelayaran NISM dan jalur Pelayaran KPM.

dari armada perahu Sulawesi Selatan, yaitu 126 perahu yang lebih besar dari muatan 20 m³ yang terdaftar di Bira sebelum perang 50 telah hancur, 38 tidak layak berlayar dan hanya 40 masih berjalan.

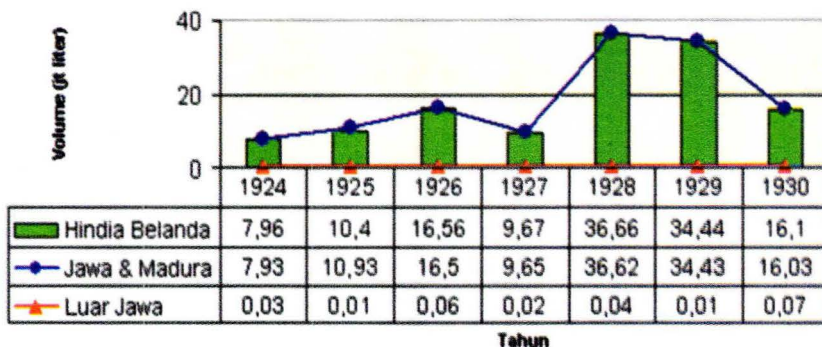
4. Oliefabrieken Insulinde Makassar Sebuah Kekuatan Industri.

Usaha pemerintah Belanda untuk membangun Makassar sebagai pusat perdagangan di Asia Pasifik dalam fase kedua abad ke 20, tampaknya bukan hanya dilatari oleh kepentingan ekonomi semata, tetapi lebih bersifat politis global, yaitu munculnya persaingan ekonomi antara pemerintah Hindia Belanda dengan Pemerintah Inggris untuk menanamkan pengaruhnya di Hindia Timur. Hal itu ditunjukkan ketika Makassar ditetapkan sebagai pelabuhan bebas tahun 1847 sebagaimana telah dikaji oleh Edward L. Poelinggomang. Awal pertarungan kedua bangsa Eropa itu tidak hanya sampai masalah kebijakan penataan pelabuhan di daerah jajahan masing-masing, tetapi juga sampai perebutan komoditi kopra di Wilayah Timur Besar. Dalam mengimbangi Singapura Pemerintah Belanda tidak hanya membangun Makassar sebagai pelabuhan enterpot yang penting di luar Jawa, tetapi juga mendirikan pabrik minyak kelapa di Makassar, sehingga melalui kebijakan itu Pemerintah Belanda berharap kopra tidak lagi diekspor ke Singapura, tetapi cukup hanya diolah di Makassar dan sisanya dikirim secara langsung ke Eropa.

Oliefabrieken Insulinde Makassar (OFI. Makassar) adalah perusahaan minyak Hindia Belanda yang beroperasi di Makassar. OFI. Makassar didirikan pada tahun 1913 dan merupakan bagian dari beberapa perusahaan minyak yang telah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Oliefabrieken Insulinde Hindia Belanda adalah perusahaan industri terbesar di Hindia

Belanda sebelum Perang Dunia Pertama.⁴⁴ Perusahaan itu tersebar di berbagai daerah di Hindia Belanda seperti Kediri, Sontono, Blitar, Tulung Agung, Banyuangi, Kebumen, Rangkas Bitung, Bandung, Padang dan Makassar.⁴⁵ Setiap tahun Oliefabrieken Insulinde Hindia Belanda secara teratur mengekspor minyak kelapa ke luar negeri., misalnya dalam tahun 1924 jumlah ekspor minyak kelapa ke Eropa sekitar 7.96 juta liter, tahun 1925 menjadi 10,93 juta liter dan pada tahun 1928 meningkat menjadi 36.66 juta. liter, dan tahun 1930 turun menjadi 16.01 juta liter (grafik.1)

Grafik 1
Perkembangan ekspor Minyak Kelapa Periode Tahun 1924 -1930



Sumber: Amsterdam, Gemeentearchief, Oliefabrieken Insulinde Makassar No.Inv. 590. Lihat pula R.N.J Kamerling. *De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indie*, Uitgeverij T. Wever B.V. Franeker. 1982. hal, 65-71. lihat juga Mededeeling van het Centraal Kantoor voorde Statistiek, Afdelingen Landbouw en Handelsstatistiek, dalam *Economisch Weekblad* 14 April 1933, hal, 1700

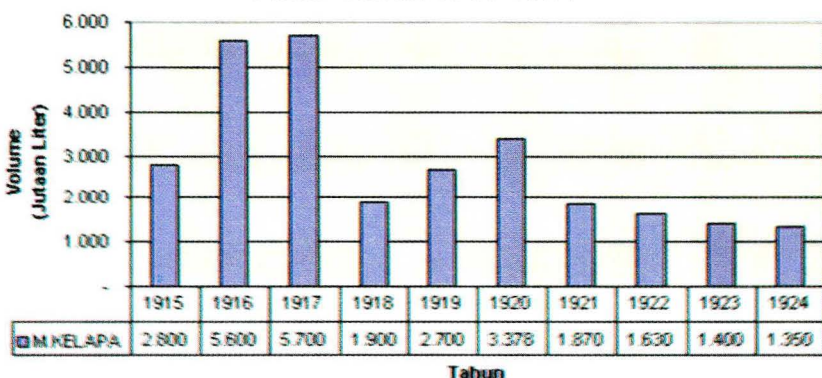
⁴⁴ J. Th. Lindblad, "Business Strategies in Late Kolonial Indonesia" Dalam J.Th. Lindblad ed. *Historical Foundations of a National Economy in Indonesia, 1890s-1990s* Amsterdam: Royal Netherlands Academy Of Arts and Sciences, 1994. hal.209.

⁴⁵ Gemeentearchief Amsterdam, Oliefabrieken Insulinde Makassar No.Inv. 590. Lihat pula R.N.J Kamerling. *De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indie*, Uitgeverij T. Wever B.V. Franeker. 1982. hal, 65-71

Grafik di atas menunjukkan ekspor minyak kelapa Hindia Belanda tidak selamanya meningkat, seperti halnya pada tahun 1927 yang kemudian terus berlanjut sampai pada tahun 1929 dan tahun 1930. Menurunnya ekspor minyak pada tahun 1927 lebih disebabkan oleh kurangnya permintaan minyak di pasaran Eropa akibat cadangan minyak tahun sebelumnya belum habis. Para industri pabrik mentega sebagai pasokan pemakaian minyak kelapa menurun karena stock produksi pada tahun sebelumnya masih cukup. Lain halnya penurunan yang terjadi pada tahun 1929 dan 1930 lebih disebabkan karena depresi ekonomi, yang berdampak pada menurunnya permintaan minyak kelapa.

Meskipun pada umumnya minyak kelapa Hindia Belanda berasal dari Pulau Jawa, bukan berarti daerah-daerah luar Jawa tidak menghasilkan minyak kelapa. OFI. Makassar dalam tahun 1915 telah mengeskor minyak kelapa ke Amerika sebanyak 2,8 juta liter. Ekspor minyak kelapa Makassar ke Amerika. (grafik2):

Grafik 2
Ekspor Minyak Kelapa Makassar ke Amerika
Pada Tahun 1915-1924



Sumber : AND, NHM Makassar tahun 1915-1924. No, Inv.5112. Lihat Juga Rapporten WGH. Ensenrin De Administrateur OFI. Makassar 1924, No. Inv. 590

Grafik di atas menunjukkan ekspor minyak kelapa dari Makassar ke Amerika selama tiga tahun terus meningkat (1915-1917) kecuali pada tahun 1918. Menurunnya ekspor minyak kelapa Makassar pada tahun 1918 lebih disebabkan oleh adanya gangguan perang yang berdampak pada semakin sulitnya pengapalan. Penurunan yang terus terjadi tahun 1921 hingga pada tahun 1924 lebih disebabkan karena mesin-mesin OFI Makassar kurang produktif lagi. Hal itu disebabkan karena mesin-mesinnya sudah tua, selain itu tingkat konsumsi lokal terus bertambah, sehingga konsentrasi ekspor semakin berkurang.

OFI. Makassar selain mengelolah kopra menjadi minyak, juga membeli dan memasarkan kopra. Karena itu dalam tahun 1917 gudang penampungan kopra di perluas sampai di luar pelabuhan yaitu di kampung Maroangin dekat Potere sekitar dua kilometer dari Pelabuhan Makassar. Ekspansi perluasan pergudangan kopra memberikan isyarat bahwa OFI Makassar terus berkembang. Perkembangan itu bukan hanya disebabkan karena minyak yang dihasilkan dari tahun ketahun terus berkembang tetapi juga karena OFI. Makassar memperluas usahanya sebagai eksportir kopra.

Dalam pembelian kopra OFI. Makassar mendapat dukungan kredit dari Pemerintah Kolonial Belanda melalui Javasche Bank cabang Makassar. Paling sedikit setiap bulannya Javasche Bank mengeluarkan kredit £. 1.500.000, kepada para pengusaha. Misalnya, dalam bulan Januari dan Februari pada tahun 1918 telah dikeluarkan kredit sejumlah £.3.733.469,99.⁴⁶

⁴⁶ Gemeentearchief Amsterdam. Oliefabrieken Insulinde Makassar, no. Inv. 531

Selain minyak kelapa yang dihasilkan oleh OFI. Makassar juga beredar dalam masyarakat Sulawesi Selatan minyak kelapa yang dibuat secara khusus oleh penduduk lokal. Di pedalaman Sulawesi Selatan penduduk lebih senang memakai minyak kelapa tradisional karena baunya harum bila dibandingkan dengan minyak kelapa buatan pabrik. Meskipun demikian dalam laporan tahunan OFI. Makassar sering menutupi kekurangan kebutuhan minyak lokal sekitar 3000-7.000 kaleng per bulan.⁴⁷

Selain minyak kelapa buatan penduduk juga beredar minyak impor dari Eropa, namun jumlahnya kecil. Minyak tersebut terbuat dari kelapa sawit yang pada umumnya dikelola oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Kelebihan jenis tanaman ini adalah cepat berbuah bila dibandingkan dengan kelapa yaitu waktunya relatif pendek untuk mendapatkan hasil. Namun kelapa juga mempunyai keistiwewaan bagi masyarakat Sulawesi Selatan karena tanaman itu telah lama dikenal oleh para petani sehingga pengelolaannya tidak asing lagi. Selain itu, juga pasarannya tidak sulit karena sudah bertahun-tahun telah mempunyai pasaran tetap di Eropa dan Amerika.⁴⁸ Untuk melihat tingkat pemakaian minyak yang terbuat dari kelapa rakyat dengan kelapa sawit dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

Secara politis kehadiran OFI. Makassar adalah sangat strategis, karena selain misinya sebagai lembaga bisnis juga diharapkan dapat mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi Singapura, sehingga pedagang-pedagang Cina Makassar dapat memutuskan kerditurnya di Singapura. Dengan demikian mereka bisa diatur bahkan menjalin hubungan dagang dengan OFI. Makassar. Itulah sebabnya OFI Makassar bukan saja menghasilkan minyak kelapa tetapi, ia juga berfungsi menjadi pusat penggudangan kopra di Wilayah Timur Besar. Ia muncul

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Economisch Weekblad*, "Beteekenis van Klapperproducten voor Nederlandsch- Indie 1922-1939" 9 Agustus 1940, hal.1436.

sebagai induk berbagai perusahaan eksportir yang ada di Makassar. Para pedagang yang di bawah naungan OFI Makassar dapat mengeksport kopra, asalkan memakai merek "Kopra OFI Makassar". Untuk menampung beberapa ton kopra, pihak OFI Makassar menyediakan sarana penggudangan yang memadai. OFI Makassar didukung oleh modal keuangan, yang dibekap oleh Javasche Bank. Hal itu merupakan keunggulan OFI Makassar bila dibandingkan dengan berbagai eksportir lainnya yang ada di Makassar. Selain itu kopra yang akan diekspor harus mendapat rekomendasi dari OFI Makassar.

Selain misinya mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi Singapura, pihak OFI Makassar diharapkan juga dapat menanggulangi kelangkaan penjualan minyak di pasaran Amerika dan Eropa Utara, yang selama itu didominasi oleh gabungan perusahaan minyak Jerman dan Australia (*Deutsch Auastralische Dampfschiffs Gessellschaft*), yang sejak tahun 1900 telah menguasai penjualan minyak di Eropa Utara.⁴⁹

Kekuatan OFI Makassar sebagai lembaga bisnis bukan saja karena dukungan pemerintah melalui Javasche Bank, tetapi juga munculnya kerjasama dengan berbagai perusahaan termasuk dengan perusahaan Jurgens. Perusahaan tersebut menanamkan modalnya dalam usaha pergudangan dan pengembangan tangki minyak. Selain itu, juga diberi tugas khusus untuk memasarkan minyak kelapa di berbagai perusahaan Margarin di Eropa. Politik penetrasi Jurgens memiliki dampak luas bagi struktur OFI Makassar, karena OFI menjadi lembaga perminyakan yang semakin kuat. Aturan kerjasama antara OFI Makassar dengan Jurgens pada intinya antara lain

⁴⁹ De Boer, M.G. dan J.C. Westermann, *Een Halve eeuw Paketvaart, 1891-1941*. Amsterdam: De Bussy. 1941, hal., 233-237. Lihat pula H.W. Dick. "The Emergence of a national Economy Nasional 1808-1990-s" dalam J. Thomas Lindblad. *Historical Foundations of a National Economy in Indonesia, 1890s-1990s*. Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arst and Sciences 1994, hal 38.

- a. Jurgens diberi hak untuk mengelola sebahagian pabrik minyak milik OFI.
- b. Makassar sesuai dengan investasi modal yang dimiliki
- c. Jurgen diberi hak untuk memasarkan minyak
- d. Dalam rangka pengembangan pabrik minyak pihak Jurgens memusatkan pada
- e. daerah-daerah di luar Pulau Jawa.⁵⁰

Untuk menjamin kelangsungan OFI.Makassar, maka setiap bulannya perusahaan itu membeli kopra dari berbagai daerah. Mereka membeli kopra baik melalui para pedagang maupun lewat perusahaan-perusahaan besar. Para pedagang itu , antara lain adalah : Sech bin Aoem Alamri , J. Caffin, Gebr. Mahieu, dari Gorontalo; Sie Ka The, Ong Soei Song, Thio Tjin Ton, E. Toemoando, Tjia Kae Tae dan Tjia Tjin Tai masing dari Menado; Badjamal dari Donggla; R.v. Duivenbods dari Ternate. Sedangkan beberapa perusahaan yang masuk dalam kelompoknya adalah: H. Ensering, J. Jonquire, Dordtsche Patrolium Maatschappij dan Lindeteves-Stokokvis, KPM dari Makassar; J.M. chs. Nyland, G.C.T. van Dorp & Co, Becker & Co, Van Vliet & Zonnenez, Eles & Co, H. Oving-Yzer Staathandel dan In t. Cred. & Hs. Ver: "Rotterdam" masing-masing dari Surabaya; Working & Co dari Bandung dan Moluksche Handelsvennootschap dari Ambon.⁵¹

Dalam tahun 1914 Para perwakilan dagang di atas rata-rata membeli kopra 26.173,67 pikul perbulan.⁵² Kopra yang dibeli dimasukkan dan ditampung pada gudang-gudang yang telah disediakan OFI Makassar. Tampak jumlah kopra yang dibeli itu masih jauh dari kebutuhan OFI Makassar sebenarnya, karena

⁵⁰ R. N.J Kamerling. *Oliefabrieken Insulinde in Nederlands Indie*. Uitgeverij T. Wefer by Franeker. 1982, hal, 68

⁵¹ Gemeentearchief Amsterdam . *Oliefabrieken Insulinde Makassar*, no. Inv.. 561, Lihat pula Verslag Nopens de Reis van de Directeur van Economic Zaken en de Hoofdinspectur Hoofd van de Dienst van Scheepvaart naar Celebes en de Molukken in September 1938. hal,119-120

⁵² Gemeentearchief Amsterdam. *Oliefabrieken Insulinde Makassar*, no. Inv.. 590

rata-rata setiap bulan menkomsumsi kopra rata-rata sekitar 50 ribu pikul.⁵³ Harga pembelian kopra OFI Makassar pada bulan November 1914 rata-rata £.12 perpikul ditambah biaya pengangkutan £. 1, biaya pengelolaan 50 sen, biaya komisi 25 sen, sehingga jumlah keseluruhan mencapai £. 13,75 perpikul.

Dalam sepikul kopra diperlukan 240-300 kelapa, satu biji kelapa bisa dinilai 4,1 sen. Dari harga kopra bulan Nopember tahun 1914 dapat dikatakan harganya menurun bila dibandingkan pada bulan yang sama pada tahun 1912 dengan harga perpikul kopra rata-rata £ 15,50.⁵⁴

Pada umumnya kopra yang dibeli melalui ikatan kontrak, dengan catatan terlebih dahulu kopra dimasukkan ke dalam gudang untuk diperiksa. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah spekulasi para pembeli agar kopra yang diambil sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan pihak OFI Makassar. Salah satu perusahaan yang telah ditunjuk oleh OFI Makassar dalam hal pembelian kopra untuk rayon A yang meliputi Wilayah Makassar adalah *Perusahaan Firma Veth Bersaudara*.⁵⁵ Biasanya *Perusahaan Firma Veth Bersaudara* tidak secara langsung dibayar karena perusahaan itu juga terlibat pemegang saham sehingga mereka akan mendapat keuntungan lebih tinggi, yaitu selain keuntungan yang diberikan sewaktu mengumpulkan kopra juga mendapatkan keuntungan setelah minyak laku di pasaran.

Selain OFI Makassar bekerjasama dengan pihak *Firma Veth Bersaudara*, juga pihak OFI membuka kerjasama dengan OFI. Padang dan berbagai berbagai pabrik minyak di Pulau Jawa. OFI Makassar mengirim kopra ke OFI . Kediri, hal itu dilakukan karena persediaan kopra lokal di Kediri menipis akibat bencana musim kemarau yang panjang pada tahun 1918 dan

⁵³ Gemeentearchief Amsterdam, Oliefabrieken Insulinde Makassar, no. Inv.. 555

⁵⁴ *Verslag van den Economischen Toestand der Inlandsche Bevolking over het jaar 1924*

⁵⁵ Gemeentearchief Amsterdam, Oliefabrieken Insulinde Makassar. Inventarisasi No.555

gangguan letusan gunung Kelud pada tahun 1919. Dalam bulan Maret tahun 1918 misalnya, OFI Makassar telah menjual kopra sebanyak 49.910 pikul.⁵⁶

Meningkatnya produksi minyak kelapa dan kurangnya peluang pengapalan menuntut pengadaan tangki yang besar. Itulah sebabnya pada tahun 1918 didatangkan empat tangki dari Amsterdam untuk pengembangan tangki minyak OFI Makassar. Dengan kedatangan empat tangki minyak itu maka kapasitas muatan OFI Makassar naik dari 20 ribu ton pada akhir tahun 1917 menjadi 26 ribu ton pada akhir tahun 1918. Dalam tahun yang sama, selain OFI Makassar mendapat penambahan tangki juga OFI lainnya seperti OFI Tanjung Priok, OFI. Banyuwangi, dan OFI Padang.⁵⁷

Peningkatan tangki minyak OFI tampaknya bukan saja terjadi pada berbagai tempat penampungannya di Hindia Belanda tetapi juga pada cabang-cabang pemasarannya. Misalnya saja pada tanggal 22 Juli tahun 1918 di Amerika Serikat telah dibuka cabang perusahaan OFI Makassar. Cabang itu bergerak pada bidang pengadaan tangki minyak di dua tempat yaitu di San Francisco dan New York. Modal pembukaan itu menelan biaya £ 2 juta (200 saham @ £ 10.000) yang terdiri dari 125 lembar saham, di mana 107 dimiliki OFI dan 18 lembar dimiliki oleh perusahaan *Clements* di Amerika. Dalam pembukaan cabang di Amerika Serikat itu pihak perusahaan *Clements* ditunjuk sebagai perwakilan OFI untuk wilayah Amerika Serikat.⁵⁸

Pengolahan minyak kelapa dengan teknologi modern di Makassar mulai diterapkan pada tahun 1914, ketika sebuah pompa hidrolis dengan mesin pelengkap di datangkan dari Amsterdam. Proses pengolahan dengan mesin modern itu

⁵⁶ Gemeetearchief, Amasrterdam, *Oliefabrieken Insulinde Makassar "Inventerisati Laopran Ofi Mkassar 3 April 1919"* No. 531

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ R. N.J Kamberling. *Op-Cit*, hal.,71

meliputi pembersihan , penggilingan, pembasahan dan pemanasan, pemerasan dan penyaringan minyak. Mula-mula kopra dibersihkan dengan air dalam sebuah kotak pembersih yang terdiri atas gabungan saringan putaran yang dapat memisahkan pasir dan kotoran lain yang melekat pada kopra. Sebaliknya kopra digiling dengan alat penggilas yang memiliki rusuk-rusuk halus, kemudian dibasahi dan dipanaskan dalam suatu katup pemanas. Proses berikutnya adalah pemerasan tepung kopra dengan papan penekan, dilanjutkan dengan pemerasan melalui alat penekan hidrolis. Minyak yang diperoleh dimasukkan dalam tangki minyak

Ketika OFI Makassar mulai beroperasi pada tahun 1913 , maka secara langsung juga mempengaruhi turunnya jumlah ekspor kopra dari Makassar. Sebelum OFI Makassar beroperasi yaitu pada tahun 1911 jumlah ekspor kopra dari Makassar mencapai 657653 pikul. Namun setelah mulai beroperasi pada tahun 1914, ekspor kopra dari Makassar turun menjadi 575.775 pikul bahkan pada tahun 1915 hanya sekitar 466.800 pikul.⁵⁹ Dari Jumlah itu diperkirakan OFI Makassar mengelola kopra menjadi minyak kelapa sekitar 20. 000 pikul perbulan, tidak termasuk kopra yang dikirim ke Jawa dan yang diekspor secara langsung.

Kehadiran OFI Makassar memberikan kontribusi penting bagi penduduk pedalaman Sulawesi Selatan karena kopra bisa dijual di setiap tempat. Para agen pembeli kopra yang kebanyakan adalah penduduk pribumi dan Cina membuka gudang-gudang kopra di setiap tempat, atau bahkan di bawah kolom rumah kopra digudangkan. Kebanyakan petani menjual kelapa tidak dalam bentuk kopra sehingga para pedagang-pedagang perantara membutuhkan waktu pengelolaan kelapa menjadi kopra. Di daerah Mandar hampir semua gudang-gudang

⁵⁹ *Jaarverslag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Makassar over het jaar 1915.* Makassar: Nv. Handelsdrukkerij en kantoohandel.1916,hal,6.

kopra berada di sepanjang pantai yang menudahkan pengangkutan melalui perahu atau kapal-kapal KPM.

Dari hasil keuntungan OFI Makassar, sebagian disumbangkan untuk merenovasi Pelabuhan Makassar. Misalnya dalam tahun 1915 OFI Makassar menambah dana pemerintah kurang lebih £. 3. juta dari dana yang disiapkan oleh pemerintah sebesar £ 7.768.000 dengan rincian: dana perluasan pelabuhan Makassar tahap pertama sebesar £. 4.268.000, tahap kedua £ 2.000.000, dan perluasan untuk tahap ketiga £ 1.500.000.⁶⁰ Selama tiga tahap pembangunan pelabuhan Makassar diperkirakan menelan biaya sekitar £. 11 juta . Dari bantuan OFI Makassar sebesar £.3 dapat dikatakan cukup besar karena hampir menampung melampaui bantuan pemerintah pada tahap pertama, yaitu sejumlah £. 3.268.800 (telah diurai dalam bab. II).

Sumbangan OFI. Makassar terhadap renovasi pelabuhan dapat dikatakan cukup besar, karena hampir semua keuntungannya masuk dalam kas keuangan pemerintah untuk perbaikan pelabuhan. Campur tangan pemerintah mengendalikan keuangan OFI Makassar dapat mengganggu eksistensi pengembangan perusahaan. Akibatnya adalah OFI. Makassar tidak mampu lagi merenovasi mesin-mesin pabriknya. Selain itu muncul persaingan yang tajam dari pabrik-pabrik minyak yang dikelola oleh pedagang Cina di Makassar.⁶¹ Di lain sisi para pelanggan konsumen kopra pabrik minyak di Jawa menilai kopra yang berasal dari OFI Makassar menurun kualitasnya, hal itu dibuktikan dengan adanya temuan dari Oliefabrieken Insulinde Kediri pada tanggal 18 Mei 1918 seperti berikut:

Berdasarkan laporan dari OFI. Kediri, bahwa kopra yang dikirim oleh OFI. Makassar ke pabrik-pabrik di Jawa sangat buruk dan sangat mengecewakan. Menurut Tuan Meyeringh

⁶⁰ AND, NHM Makassar tahun 1916 No Inv 5112

⁶¹ R.N.J. Kamerling RA. *De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nedrlands- Indie Bedrifsvoering in het Onbekende Uitgeverij T. Wever B.V. Franeker.* 1982. hal 65-85.

Direktur OFI. Kediri, kopra tersebut sudah tersimpan lama, bercampur baur dengan kopi dan ikan busuk akibatnya minyak kelapa yang dihasilkan tidak laku di pasaran. Itulah sebabnya pihak OFI Kediri berharap agar kejadian itu tidak terulang lagi. Mengenai informasi sebelumnya bahwa kopra yang akan dikirim memiliki kualitas yang sama seperti pada bulan-bulan sebelumnya tidak benar. Karena itu pihak OFI Kediri beranggapan bahwa OFI Makassar dalam membeli tidak melakukan pemeriksaan.⁶²

Kejadian di atas menunjukkan bahwa OFI Makassar tidak teliti dalam hal pembelian kopra. Menurut pihak OFI. Makassar kopra yang dicampur dengan ikan busuk dan dikirim ke Kediri itu berasal dari Perusahaan Dagang Maluku. Untuk menindak lanjuti kejadian itu maka OFI Makassar mengirim surat ke Maluku agar kejadian yang memalukan itu dikonfirmasi dengan pihak OFI. Kediri sehingga tidak terulang lagi. Sejak kejadian itu pihak OFI. Makassar sebelum mengirim kopra ke konsumennya diperiksa, khususnya kopra yang diterima dari bungkus karung⁶³.

Beberapa perusahaan pengumpul kopra yang telah dikoordinir Oleh OFI Makassar secara perlahan-lahan tidak aktif, dengan alasan standar pembelian kopra yang ditetapkan OFI Makassar terlalu rendah. Hal itu membuat OFI. Makassar kesulitan mendapat kopra. Selain itu para pedagang kopra Makassar lebih senang menjual kopra dengan sistem kontan dengan alasan harga kopra fluktuatif, sehingga tidak lagi menunggu berbulan-bulan sampai minyak laku di pasaran seperti ketika menjalin hubungan kontrak dengan pihak OFI. Makassar.⁶⁴

⁶² Gemeete Archief, Amasrterdam No.590 Surat Dirk, N.V. Oliefabrieken Insulinde Bandung kepada N.V. Oliefabrieken Insulinde Makassar tanggal 1 Mei 1918. Tentang Kwalitas Kopra Makassar.

⁶³ Gemeete Archief, Amasrterdam No.531 Inventerisasi Laopran Ofi Makassar 1 Mei 1918 No. 531

⁶⁴ Gemeete Archief, Amasrterdam No.590 , Op-Cit

Simpulan

Dalam negara kepulauan tampaknya, sistem jaringan perdagangan antar pelabuhan dan pulau sangat penting. Hal itu ditunjukkan ketika Makassar muncul sebagai kekuatan maritim di masa akhir kolonial. Jaringan perdagangan didasarkan pada keterkaitan antara pelabuhan dan teknologi perkapalan (KPM), sedangkan pelabuhan mengantung harapannya pada wilayah produksi yang mau tak mau mengharapkan suatu industri. Hubungan kait mengait antara wilayah produksi dan teknologi perkapalan dan industri membentuk suatu kekuatan maritim ekonomi. Hal itu ditunjukkan Makassar ketika Amerika menjadi cabang Industri Olie Fabrieken Insulinde Makassar. Hal itu membawa makassar dapat menyaingi Singapura.

Daftar Pustaka

- Berekening van de Afschrijving of Debituren Oliefabrieken Makassar Inventarisa'tie no. 561.
- Bergrooting der kosten van ontginning eener Klapper onderneming op een perceel Woeste groden groot Inventarisa'tie no. 531
- Catatan Pidato M. Saleh Lahade Tentang Piagam Perjuangan Permesta Collectie 127 F.W.T. Hunger, 1907-1924 No. Kode 2.21.089.
- De Vertegentwoordinger de Oliefabriken Insulinde. Copra Export Celebes 5 Juni, 1918
- Rapporten De Ambassadeur W.G.A. Loudon 17 Maart 1947 Copra Uitvoer uit Nederlandsch Indie. Inventarisa'tie no.1992
- Rapporten Mr. J.G. Kist. Zeeroverij in de Celebes Zee. Inventarisasi no.6306
- Rapporten Dr.J. Cator, Copra Smokkel van Overste Warouw en Majoor Worang Inventarisa'tie no.2024
- Rechtsgeding van de "RMS" Betreffende partij Copra te Sorong Inventarisa'tie no.2015
- Reisrapport heer Crawford 12 maret 1947. Inventarisa'tie no.1992
- Bijblad op het Staatsblad van Oost Indonesie ,1947.
- Boschwezen in Nederlansch- Indie, *Buitengewesten- Congresnummer 1937 Prae-Adviezen Voordrachten en Debaah*. Archipel, Drukkerij Buitenzorg. 1937
- Departement van Economische Zaken, 1937. *Nederlandsch Indischen Export van Copra Handel en Palmolie*. Samengesteld op het Bureau voor Uitvoorzaken van het Kantoor voor den Handel
- Departement van Economische Zaken, 1940. *Bureau Voor Buitenlandsche Handelsvoorlichting*. Batavia: Kantoor voor Handel Mail Bericht, 1940
- Dokumentasi dan Penerangan Kementerian *Warta Berita Ekonomi Indonesia Timur*. 1949

Jaarverslag van de Handelsvereniging Makassar ,1905-1940.

Stukken Betreffende Algemene Handelspolitieke Maatregelen, Handels Boycot en Smokkelarij of Singapura 1947.

Stukken Betreffende Financiering van de Import Handels ,1947-1949.

Stukken Zake de Bevordering der Economische Betrekking met het Buitenland, 1947-1948

Stukken Betreffende de Rijstpositie van Indonesie , 1948-1949

The Economic Review of Indonesia 1947, Ministry of Economic Affairs , Vol .1

The Economic Review of Indonesia.Batavia-Java: Department of Economic Affairs, vol. I. No.I.

Buku

Asba, A Rasyid , Kopra Makassar: Perebutan Antara Pusat dan Daerah, Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor 2007

_____, Katalog Sejarah Lisan Jepang Sulawesi Selatan. Japan: Tokyo University Of Foreign Studies . 2007

Abdul Qahhar Mudzakkar

1960 " Presepsi Demokrasi Indonesia" Tanpa Penerbit.

Clemens, A.H.P & Lindblad J.Th.

1989 *Het Belang van de Buitengewesten Economische Expansie en Koloniale Staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands Indie. 1870-1942*, Amsterdam: Neha.

Cornelius

1973 "Tropical Science, Tropical Products Institute", London: Vol.15 No. 1

1966 *The Natural History of Palms*, (London: Weidenfeld & Nicolson

Creutzberg, P.

- 1979 *Expenditure on Fixed Assest (Changing Economy in Indonesia,vol.3)*. The Hague: Nijhoff, 1979

Creutzberg, Pieter dan J.T.M. Van Laanen

- 1987 *Sejarah Statistik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Daeng Malewa, Nadjamoedin

- 1947 "Politik Manifest Kabinet Nadjamoedin", Pidato Pada Sidang Pertama Parlement Indonesia Timur

- 1975 "Perahu Shipping in Eastern Indonesia". Bulletin of Indonesian Economic Studies 23,1 104-121

Djojohadikusumo, Sumitro

- 1994 *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES. 1994 Cet. Kedua.

Furnivaal, J.S.

- 1939 *Nederlands India: A Study of Plural Economy*. Canbridge: Cambridge University Press.

G. Alting Du Cloux .

Gegevens Export Copra en Pamolie

- 1937 *Gegevens Betreffende den Nederlandsch Indischen export van Copra en Palmolie.*, (Departement van Economische Zaken)

Harvey , Barbara Sillars

- 1984, *Permesta, Pemberontakan Setengah Hati* Jakarta: Grafiti Prees.

Heersink, Christiaan.G

- 1995, "The Green Gold of Selayar A Socio Economic History of an Indonesia Coconut Island C. 1600 –1950: Perspectives from a Periphery" Academisch Proefschrift ter Verkrijging van de Graad van Doctor Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Higgins, Benyamin. 1957 *Indonesia's Economic Stabilization and Development* New York: Institute of Pacific Relation

Hunger, F.W.T.

1916 "Cocos Nucifera: Handboek voor de Kennis van den Cococs Palm in Nederlandsch-Indie, Zijn Geschiedenis, Beschrijving, Cultuur, en Producten, Amsterdam: Scheltema & Hlpkema' s Boekhandel.

1938 "De Paruw in De Wetgeving en In Het Adatrecht" dalam Koloniale Studien.

Kamerling, R.N.J.

1982. De. N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indie. Bedrijfsvoering in de verte, (Franeker wever)

Kementrian Penerangan RI.

1953. Peringatan 125 Tahun Berdirinya De Javasche Bank 182-1953

Knaap, Gerrit J. Ed

1989. *Changing Economy in Indonesia, Vol. 9 Transport 1819-1949*. Amsterdam: Royal Tropical Institute.

1994. The Copracontracten "An Indication of Economic Development in Minahasa During the Late Colonial Period" Koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschappen, Amsterdam

Lindblad, J.Th

1989 "Economic Growth in the Outer Island, 1919-1940", Holland: New Challenge

1989 *Het Belang van de Buitengewesten: Economische Expansie en Koloniale Staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indie, 1870-1942*. Amsterdam: Neha

1993, *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*. Leiden: Programme of Indonesian Studies.

1996 *Historical Foundations of a National Economy in Indonesia, 1890-1990*, Amsterdam: North Holland

Pigeaud, 1960. Java in The Fourteenth Century. A Study in Cultural History. The Hague: Nijhoff for KITLV hal, 11

Awal Mula Peradaban Maritim di Sulawesi Selatan; Tinjauan Perspektif Ideologi dan Kontex Sosial Politiknya

Oleh:

Dr. Bambang Sulistyono

Pendahuluan

Christian Pelras, Antropolog kebangsaan Perancis, alumni Universitas Sorbonne yang tekun mengkaji masyarakat, sejarah dan kebudayaan Bugis, pada karyanya *The Bugis* (yang diterbitkan pada 1996, kemudian diterjemahkan menjadi *Manusia Bugis*, pada tahun 2006) menyatakan keliru jika berpendapat bahwa sejak jaman dahulu kala orang Bugis adalah pelaut. Anggapan ini menurutnya muncul pada abad 19 ketika banyak perahu Bugis yang berlabuh di berbagai wilayah Nusantara: dari Singapura sampai Papua; dan dari Selatan Filipina sampai ke pantai barat laut Australia. Pelras menegaskan bahwa orang Bugis sesungguhnya adalah petani. Aktivitas maritim mereka baru berkembang pada abad 18.¹ Pendapat Pelras ini ditolak dengan tegas oleh Nurhayati Rahman, filolog yang disertasinya membahas tentang I Lagaligo; “tidak mungkin dari kalangan kebudayaan petani akan berkembang sebuah karya sastra yang hampir semua episodenya diwarnai kehidupan dan kejayaan di laut, dan sebagai suatu karya sastra terpanjang di dunia bahkan mendiskripsikan secara akurat karakter orang Bugis. Nurhayati

¹ Christian Pelras, *Manusia Bugis*. (Jakarta: Forum-Jakarta-Paris Ecole française d'Extreme-Orient, 2006), p. 3-4.

memuji La Galigo sebagai karya maha agung, yang ditulis pada masa sebelum kedatangan Islam di Sulawesi Selatan, bahkan menduga bahwa relief kapal di candi Borobudur yang dibangun pada abad 9 adalah kapal Bugis.²

Disertasi Nurhayati Rahman telah diterbitkan dengan judul *Cinta, Laut, dan Kekuasaan, dalam Epos La Galigo (Episode Pelayaran Sawerigading ke Tanah Cina: Perspektif Filologi dan Semiotika)*.³ Pendapat Nurhayati sejajar dengan pendapat Mattulada yang memperkirakan bahwa La Galigo ditulis sekitar abad 7-9 Masehi; sedang Fachruddin Ambo Enre memperkirakan pada abad 13. Sementara itu R.A Kern dalam karyanya *I Lagaligo* yang diterbitkan di Gadjah Mada University Press pada tahun 1989 berpendapat bahwa Lagaligo bagi orang Bugis lebih dari realitas, bahkan ia merupakan kepercayaan sebelum Islam.

Sudah tentu sehubungan dengan berbagai sanggahan diatas mungkin Pelras akan berkata bahwa *I Lagaligo* adalah karya sastra, semata-mata hanyalah hasil imajinasi, yang irrasional, bukan karya sejarah, maka logis jika ditulis pada abad 18. Akan tetapi kapan sesungguhnya kebudayaan maritim Sulawesi Selatan itu berkembang. Artikel ini membahas awal kebangkitan Negara maritim di Sulawesi Selatan. Pembahasan dengan melacak konteks sejarah dan juga fakta-fakta budaya dalam mitologi Lagaligo.

² Nurhayati Rahman. *Cinta, laut, dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo. Episode Pelayaran Sawerigading ke Tanah Cina: Perspektif Filologi dan Semiotika*. (Makassar: Lagaligo Perss, 2008), p. xi.

³ Islamisasi Sulawesi Selatan terjadi pada awal abad 17. Doto Ri Bandang, yang berasal dari Minangkabau, yang pernah belajar di Giri, Jawa Timur mengislamkan Raja Tallo pada 22 September 1605. Dua tahun berikutnya diselenggarakan sholat Jumat di mesjid Tallo. Lihat Lontara Bilang Gowa dan Tallo. H.J. De Graff. *Islam di Asia Tenggara* sampai abad ke- 18 dalam Azyumardi Azra (Edit.). *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 198. p. 16.

Teori dan Metodologi.

Pendapat Christian Pelras dan Nurhayati Rahman itu masing-masing memiliki kebenaran, meski memiliki kelemahan. Sumber-sumber sejarah dalam bentuk tulisan tentang Sulawesi Selatan, berupa dokumen arsip atau historiografi tidak ditemukan untuk periode sebelum abad 16. Oleh karena itu terdapat kesulitan menyimpulkan bahwa kebudayaan maritim di Sulawesi Selatan telah ada pada abad ke 7 – 9. Historiografi Tradisional Sulawesi Selatan yakni Lontara Bilang Gowa dan Tallo yang lebih merupakan catatan kerajaan tentang kejadian-kejadian penting, yang ditulis sebagai uraian sejarah baru ditulis pada abad 17. Sumber tertua tentang awal mula kehidupan, termasuk dalam aktivitas kemartiman di Sulawesi Selatan yang ada hanya dalam bentuk karya sastra yang lazim dikenal dengan mitologi I La Galigo, dengan ciri mengabaikan waktu (angka tahun), dan berisi kisah para dewa, yang secara gaib melakukan perjalanan ke dunia atas, dunia tengah dan dunia bawah; serta dapat menghidupkan orang mati; oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai karya sejarah, dalam arti sebagai rekonstruksi kejadian di masa lampau. Ia semata-mata hanya fiksi.⁴ Meskipun demikian tidak dapat diingkari hasil karya sastra juga merupakan fakta budaya, dalam arti sebagai suatu bentuk hasil pemikiran. Sebagai bentuk karya sastra I la galigo tentu dapat digunakan untuk melacak kebudayaan di masa lampau. Sesuai dengan judul artikel ini maka legenda I Lagaligo, karena berisi tentang petualangan yang sebagian besarnya di lautan menjadi fokus bahasan pada peper ini.

⁴ Leonard Andaya sangat meragukan untuk menggunakan La Galigo sebagai fakta sejarah dengan pernyataannya; "Rekonstruksi manapun tentang masa lalu hanya bersandar pada sumber yang ada pada La Galigo, dan bukti ini sendiri amat meragukan dan sulit dibuktikan". Leonard Y Andaya. *Warisan Arung Palakka. Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*, (Makassar: Inninawa, 2004), p. 25.

Ringkasnya bagaimana melacak keberadaan kebudayaan maritim di Sulawesi Selatan. Untuk itu akan dibahas dua hal yakni latar konteks sejarah dan kedua, kebudayaannya. Bidang pertama menyangkut kajian peranan Sulawesi Selatan dalam sejarah regional; sedangkan bidang kedua menyangkut kebudayaan maritim, khususnya mengamati hasil kesusasteraannya, yakni analisis I lagaligo. Teks I Lagaligo sebagai karya sastra akan ditempatkan dalam latar historis kemaritiman awal di Sulawesi Selatan.

Pembahasan tentang posisi Sulawesi Selatan (di masa lampau) dikemukakan dengan mendiskripsikan sejarah pada awal mula keterlibatan Sulawesi Selatan dalam interaksinya dengan daerah-daerah lain. Pembahasan berdasarkan fakta-fakta yang diangkat dari karya-karya historiografi yang ditulis berdasarkan bukti-bukti yang autentik karena merupakan hasil analisa metode sejarah. Meskipun menggunakan sumber tradisional, biasanya diperbandingkan serta dikontrol kebenarannya pada sumber lain yang merupakan subyek dari komunitas yang berbeda. Tujuan penulisan karya-karya historiografi yang dijadikan acuan penulisan ini memang mengungkapkan sejarah. Namun bagaimana dengan penggunaan karya sastra/fiksi sebagai sumber sejarah kebudayaan; untuk itu diperlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan penggunaan sumber-sumber sejarah yang diungkapkan sebagai gambaran realitas kejadian sesungguhnya. Dalam hal ini karya sastra ditempatkan sebagai suatu bentuk wacana.

Penelitian atas wacana tidak berhenti pada analisis atas teks, karena teks hanya hasil produksi yang prosesnya patut diamati. Teun A. van Dijk berpendapat bahwa wacana bukan sesuatu yang netral, dan tidak dicipta secara alamiah. Dalam setiap wacana selalu terkandung ideologi yang bertujuan untuk mendominasi dan memperebutkan pengaruh. Analisa teks harus melihat bagaimana sesuatu kelompok berperan dalam

membentuk wacana. Pembentukan kekuasaan berupa upaya membangun legalitas kelompok dominan pada komunitas pendukungnya dan dipihak lain untuk memperoleh otoritas pada komunitas lainnya. Oleh karena itu Dijk menyatakan bahwa ideologi meskipun bersifat eksternal, juga dapat bersifat internal dalam suatu kelompok atau komunitas. Untuk kepentingan internal ideologi dalam wacana berfungsi koordinatif dan mendorong kohesi dalam rangka pembentukan identitas kelompok yang membedakannya dengan kelompok lain. Ideologi berupa nilai yang abstrak dan umum yang menjadi pedoman bagi para anggotanya dalam melihat berbagai masalah dan menyelesaikannya.⁵

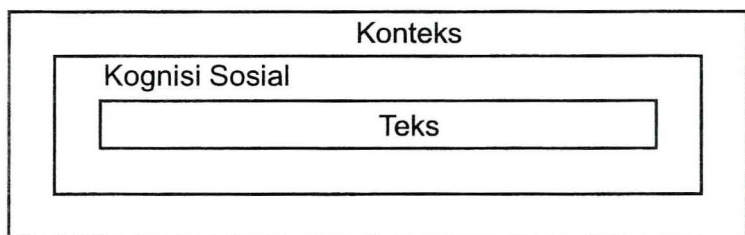
Fungsi eksternal wacana diwujudkan dengan membangun perbedaan, dengan kelompok lain, dan klaim atas otoritas dan berbagai macam intimidasi bagi kelompok lain yang mengganggu keberadaan mereka. Ideologi dibangun oleh kelompok dominan dengan tujuan melegitimasi dominasi mereka. Wacana yang diciptakan sebagai medium kelompok dominan dalam mempersuasi dan mengkomunikasi khalayak tentang kekuasaan dan dominasi mereka sehingga nampak absyah dan benar.⁶ Dalam perspektif internal maka wacana yang dibangun bertujuan menciptakan keabsyahan kedaulatan, identitas, dan kepercayaan diri yakni suatu stimulus bagi anggota kelompok tentang keyakinan keunggulan mereka, untuk itulah diciptakan ideologi.

Louis Althusser melengkapi pendapat Van Dijk dengan menyatakan bahwa di latar belakang ideologi yang menjadi dasar penyusunan karya sastra terdapat 3 dimensi yakni teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Dalam dimensi teks yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial

⁵ Eriyanto. *Analisis Wacana. Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), p. 14.

⁶ Kelompok dominan membangunkan kesadaran palsu, melalui kampanye disinformasi seperti misalnya klaim berdasarkan atas agama tertentu., *Ibid.*, p.15.

dipelajari proses produksi teks yang melibatkan kognisi individu penulisnya. Selanjutnya pada aspek ketiga dipelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan sesuatu masalah. Analisis sosial dikembangkan dengan cara melihat bagaimana teks itu dihubungkan dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam suatu masyarakat atas suatu wacana.⁷ Apabila digambarkan dalam bentuk bagan berikut:



Konteks adalah kondisi realitas sosial dan politik. Kognisi sosial adalah pemahaman penulis wacana dalam melihat konteks sosial; sedangkan teks adalah produksi dan rekayasa penulis wacana dalam menyasati konteks untuk kepentingannya termasuk kelompoknya.

Searah dengan pandangan van Dijk dan Althrusser itu Gramsci memiliki konsepsi tentang hegemoni. Apabila teori Althusser tentang ideologi menekankan bagaimana kekuasaan kelompok yang dominant dalam mengontrol kelompok lain, maka Antonio Gramsci mengemukakan tentang hegemoni, yakni suatu teori yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kelompok dominant berlangsung dalam proses yang damai tanpa tindakan kekerasan. Media dijadikan sarana dimana satu kelompok mengukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok lainnya. Untuk terjadi proses marjinalisasi

⁷ *Ibid.*, p. 224.

wacana yang berlangsung secara wajar, apa adanya dan dihayati bersama. Khalayak tidak merasa dibodohi atau dimanipulasi oleh media.⁸

Dalam peper ini akan mengaplikasikan pemahaman sejarah dan karya sastra I Lagaligo. Pemahaman sejarah dalam arti kemaritiman Sulawesi Selatan ditempatkan pada konteks sejarah ketika berinteraksi dengan etnis atau bangsa-bangsa lainnya. Pemahaman dengan melacak keberadaannya pada sumber-sumber lokal (Sulawesi Selatan) maupun pada etnis atau bangsa-bangsa lain. Pemahaman karya sastra I Lagaligo dilakukan dengan menganalisa unsur-unsur sejarah pada isi kisahnya. I La Galigo dipilih karena karya ini merupakan hasil sastra tertua yang berisi kehidupan kebudayaan maritim di Sulawesi Selatan. Karya I Lagaligo akan ditempatkan sebagai suatu bentuk wacana yang dipahami menurut persepsi van Dijk, Althrusser dan Gramsci. Dari ketiga tokoh ini maka I lagaligo dipandang sebagai produk karya sastra yang ditulis ketika etnis Bugis merupakan kelompok dominan, yang mengungguli etnis-etnis lainnya. Dengan I Lagaligo itu etnis-etnis Sulawesi Selatan, terutama Bugis mengidentivikasi diri, memiliki klaim atas kekuasaan atas etnis-etnis lainnya. Dari perspektif internal suatu komunitas maka I Lagaligo sesungguhnya merupakan produk dari elit penguasa untuk mendominasi massa atau rakyatnya. Apabila ditempatkan pada struktur sosial Sulawesi Selatan, maka dengan I Lagaligo kini merupakan produk lapisan sosial atas yakni bangsawan (*anak arung*), yang mengukuhkan dominasinya atas orang bebas (*to maradeka*) dan budak (*ata*).

Kebudayaan Marine dan Maritim

Tanda-tanda awal kehidupan di Nusantara termasuk Sulawesi Selatan telah ada antara 10.000 sampai 2000 tahun

⁸ *Ibid.*, p. 103.

Sebelum Masehi. Tanda-tanda itu berupa misalnya sisa-sisa alat-alat pre histori berupa gambar-gambar dinding di goa – gua di: Suppangbita, Maros; ⁹ di Lawa dekat Sampung, Ponorogo; gua Prajekan di Tuban Jawa Timur, dan di Langsa, Tamiang Aceh. Di guwa-guwa itu selain benda-benda, juga ditemukan sisa-sisa makanan manusia purba yang lazim disebut *kyokenmoddiger* (*sampah, sisa makanan yang berasal dari binatang karang*). Kuntjaraningrat berpendapat bahwa bukti-bukti kebudayaan dan fosil-fosil manusianya yang ditemukan di gua-gua itu memiliki ciri-ciri Austro Melanesoid (perpaduan rumpun Austronesia dan Mongolid). Dengan mengamati kondisi geografis Nusantara dan persebaran kebudayaannya dapat disimpulkan bahwa mereka adalah migran yang datang dari ras yang datang dari timur, utara maupun selatan, sehingga memiliki kebudayaan campuran.¹⁰ Berbeda dengan Kuntjaraningrat, Fritz dan Paul Sarasin berpendapat bahwa manusia purba di Cakondo, Uleba dan Balisao di Maros adalah orang Toala yang merupakan keturunan Wedda dari Ceylon.¹¹ Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara Kuntjaraningrat dan Fritz tetapi jelas mereka hidup tergantung pada hasil-hasil laut. Mereka hidup di pantai atau disekitar sungai dan menggunakan perahu. Keberadaan kebudayaan manusia purba itu belum menunjukkan adanya tanda-tanda peradaban maritim di Sulawesi Selatan. Dengan kata lain mereka masih hidup pada tingkat peradaban marine.

⁹ Penentuan waktu ini berdasarkan metode yang dinamai dengan C14. Analisa berdasarkan prinsip bahwa semua makhluk hidup sesudah kematiannya akan menyinarkan atom-atom zat arang dalam bentuk radio aktif. Akin Duli, "Kawasan Gua-gua Prasejarah Jaman Mesolitik di Belae, Pangkep Sulawesi Selatan: Rekonstruksi Lingkungan Arkeologi dan Adaptasi Manusia" dalam *FORA (Forum Akademik)*. Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 2004. p. 9. dan Kuntjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. (Jakarta: Penerbitan Djambatan, 1990), p. 9.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Akin Duli, *op. cit.* 84-85.

Kebudayaan maritim adalah perkembangan lebih lanjut dari kebudayaan marine. Kebudayaan maritim hanya dapat berkembang dengan dukungan kebudayaan agraris. Masyarakat marine (marine society) memiliki ketergantungan yang sangat besar pada alam. Mereka hidup secara subsistensi, yang hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Masalah mencari bahan makan dan mempertahankan hidup merupakan kegiatan yang menyita banyak waktu bagi masyarakat marine. Mereka belum bersifat komersial, apalagi berdagang.

Migrasi di kalangan mereka sebagai akibat ketergantungan kebutuhan kepada alam. Terdapat dua hal yang mendorong mereka bermigrasi. Pertama karena alam tidak lagi dapat memenuhi seluruh kebutuhan makan. Migrasi dengan factor ini terjadi secara damai. Apabila terjadi pemisahan dan muncul kelompok baru, maka mereka masing-masing tetap menjalin hubungan. Kedua, adalah karena kegagalan mempertahankan integrasi dalam komunitasnya. Kelemahan institusi sosial yang tidak dapat menjamin kedamaian, keadilan, kesejahteraan dan persaingan mendorong terjadinya konflik, yang berakibat perpecahan komunitas mereka, yang diakhiri dengan migrasi dan permusuhan sesama mereka. Apabila migrasi terjadi karena perang saudara, maka mungkin antar komunitas tidak menjalin hubungan sosial lagi akibatnya akan terbentuk kebudayaan bahkan bahasa yang berbeda. Siklus berupa tumbuh, berkembang dan terjadi disintegrasi merupakan ciri peradaban masyarakat *marine*. Mereka terdiri dari kelompok-kelompok kecil, hidup dengan masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan lainnya terdiri dari kelompok-kelompok kecil.

Masyarakat maritim jauh lebih maju dari masyarakat *marine*. Kemajuan teknologi dan peradaban telah maju. Masyarakatnya telah mengalami telah menjadi diferensiasi dan spesialisasi dalam penghidupan. Kebutuhan hidup mereka telah berkembang tidak hanya sebatas untuk makan. Kemajuan teknologi pertanian

telah berhasil meningkatkan produksi yang melimpah, sehingga orang tidak terjebak untuk sepanjang hidupnya mencari bahan makan. Sebaliknya produksi bahan makan itu dapat dikonsumsi oleh orang lain; sehingga memungkinkan orang hidup di luar sektor pertanian. Terdapat petani, pedagang, pengrajin, dalam berbagai tingkatan. Komunitas telah berkembang dalam bentuk Negara yang diwujudkan dengan adanya kerajaan dengan birokrasi dan institusi yang melayani seluruh warganegaraanya sehingga seluruh masyarakatnya yang kompleks dapat hidup bersama dan terus berkembang. Spesialisasi dan diferensiasi terjadi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beradab. Perkembangan kebutuhan telah meluas sehingga hanya dapat dipenuhi dengan menjalin hubungan dengan komunitas lain. Orang lain di luar komunitasnya diperlakukan sebagai asset ekonomi dan bukan sebagai pesaing yang mengancam peluang mereka untuk hidup, karena meningkatkan kebutuhan makan, yang disediakan alam yang relative tetap jumlah produktivitasnya. Oleh karena itu dikembangkan pelayaran dan pembentukan jaringan perdagangan.

Mereka menggunakan laut sebagai infrastruktur. Pelayaran menjadi bagian kehidupan, tidak sebatas mencari ikan atau hasil-hasil laut lainnya. Peradaban maritim hanya mungkin berkembang bila terdapat surplus produksi pertanian dan terdapat industri untuk komoditas perdagangan. Pelayaran pada masa lampau hanya dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga angin musim, yang berganti arah yang berlawanan setelah setengah tahun. Artinya perjalanan kembali hanya dimungkinkan sesudah 6 bulan berikutnya. Oleh karena itu masyarakat maritim membutuhkan modal yang sangat besar untuk melakukan pelayaran ke daerah seberang yang membutuhkan waktu selama berhari-hari, minggu bahkan bulan. Seorang pelaut tidak hanya berani dan terampil mengemudikan kapal ia juga memiliki pengetahuan tentang musim, arah mata angin, bahkan sifat-sifat arus, ombak dan tanda-tanda alam lainnya. Suatu pelayaran

tanda-tanda alam lainnya. Suatu pelayaran antar pulau harus dilegkapi dengan persediaan bahan makan, air minum, tenaga kerja, akomodasi di perjalanan dan kapal. Pelayaran dilakukan setelah berdasarkan perhitungan akan memperoleh keuntungan. Seluruhnya sulit dapat dipenuhi pada masyarakat marine, yang penghidupannya tergantung pada alam. Masyarakat maritim tidak hanya bersifat komersial, tetapi lebih dari itu merupakan masyarakat kapitalis. Jaminan keamanan, perundang-undangan, keadilan, yang menjamin transaksi ekonomi dapat berlangsung. Hal ini hanya dimungkinkan dengan adanya kerajaan yang berdaulat. Keberadaan masyarakat maritim dengan demikian merupakan pertanda kemajuan peradaban.¹²

Pada abad 15 basis kehidupan di Asia Tenggara pada umumnya dapat dibedakan atas masyarakat agraris dan maritim, yakni mereka yang hidup di daratan, menempati lembah-lembah sungai yang luas, hidup bercocok tanam padi di persawahan dan perikanan. Pada sisi lain adalah masyarakat marine yang hidup di perairan pantai terdapat pengembara laut yang hidup diatas perahu dan mempunyai hubungan dengan penguasa di daratan. Mereka dikenal dengan orang laut, to sama, dan bajoe. Mereka hidup dengan mobilitas tinggi karena tidak tergantung pada kehidupan di daratan, maka tidak terdapat sebuah Negara pun yang sepenuhnya dapat menguasai mereka. Mereka adalah penduduk bebas, meskipun membayar upeti pada penguasa, yang dapat pergi dan pulang hidup sebagai penyedia hasil-hasil hutan, laut, sebagai kurir, serdadu bahkan dapat juga sebagai budak. Kebudayaan masyarakat Bajo dengan demikian dapat ditempatkan sebagai transisi menuju pada peradaban maritim. Mereka hanyalah salah satu komponen masyarakat maritim. Peradaban maritim berkembang dari perpaduan masyarakat agraris dan marine.

¹² Chaudhuri, K.N. *The Trade and Civilization in the Economic History from the Rise of Islam to 1750*. (New York : Cambridge University Press, 1995), p. 11.

Ketergantungan pada kehidupan pertanian merupakan factor penting Negara agraris yang relative lebih mudah dikembangkan. Sedangkan basis kehidupan di perairan sulit untuk dikembangkan. Masyarakat *marine* hanya dapat dikembangkan jika terdapat kesadaran dari masyarakatnya sendiri (*from below*). Oleh karena itu komunitas politik masyarakat *marine* bercorak demokratis.

Ketika Tome Pires (orang Portugis) berada di Melaka pada abad 15, ia merasa asing dengan orang Bugis sehingga tidak dapat membedakannya dengan bajak laut orang Bajo. Namun Abu Hamid bahwa pada masa lampau orang Bugis adalah bajak laut dan pedagang.¹³ Bajak laut dapat timbul pada masyarakat apa saja, baik primitive maupun modern, tidak terkecuali, pada masyarakat *marine*. Namun kebudayaan maritim tidak akan muncul pada masyarakat yang semata-mata berbasis *marine*. Oleh karena itu Anthony Reid berpendapat bahwa orang Bugis di Melaka yang ditemukan Tome Pires bukan bajak laut. Searah dengan itu Edward L. Poelinggomang berpendapat bahwa orang Bugis adalah pedagang karena berpakaian rapi dan bersih, sedangkan bajak laut itu adalah orang Buyus atau Bajo yang berpenampilan kasar dan tidak rapi. Namun rasa asing Tome Pires itu menunjukkan bahwa orang Bugis adalah pelaku baru dalam dunia maritim.

Kebudayaan maritim menempatkan komunitas atau orang lain sebagai mitra dan konsumen yang diperlakukan sebagai subyek atau actor ekonomi. Oleh karena itu orang lain diperlakukan secara manusiawi agar dapat mengembangkan diri sebagai pelaku ekonomi yang otonom agar dapat menjadi mitra usaha. Untuk menjadikannya sebagai mitra diperlukan seperangkat nilai dan perundang-undangan, yang bercorak global. Pada sisi lain bajak laut hanya memandang orang lain semata-mata sebagai komoditas ekonomi, sehingga tidak diperlakukan

¹³ H. Abu Hamid, Prof.Dr. *Pesan Pesan Moral Pelaut Bugis*. (Makassar : Penerbit Refleksi, 2007), p. 3.

sebagai manusia yang berdaulat. Pandangan ini sebenarnya sama dengan pandangan masyarakat nomaden yang hidup dan berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Orang lain dalam perspektif ini pada prinsipnya sama dengan binatang buruan. Penghidupan sebagai pedagang yang menjadi bajak laut, jika ada, dalam perspektif sosiologi merupakan gejala anomali, yang menyimpang dari pola umum. Sebab perilaku bajak laut bertentangan dengan aktivitas perdagangan. Jadi perangkapan status yang kontradiksi itu tidak mungkin bersifat permanent. Apabila terjadi maka posisi sesungguhnya adalah menghancurkan peradaban maritim; dengan kata lain pengembalian peradaban maritim sesungguhnya bukan bajak laut. Perdagangan hanya akan berkembang jika terdapat jaminan keamanan, termasuk bebas dari gangguan keamanan. Terdapat kejujuran, saling menghargai, dan mampu berinteraksi yang dilanjutkan dengan transaksi yang menguntungkan orang dan kelompok lain sekalipun berbeda komunitas dan etnisnya. Bajak laut adalah penghancur tatanan peradaban maritim. Aktivitas pelayaran niaga tidak mungkin akan berkembang pesat jika bajak laut merajalela.

Latar Sejarah Indonesia sampai abad 17

Tanda-tanda kehidupan peradaban maritim di Nusantara sudah cukup tua. R. Kenneth Hall menyebutkan sumber Cina yang memberitakan bahwa Tolomo (Taruma Negara) meminta bantuan militer dan perlengkapan perang pada kekaisaran Cina hingga 15 kali, pada abad 4 Masehi.¹⁴ Taruma Negara adalah kerajaan kedua setelah Kutai di Kalimantan Timur, yang meninggalkan jejak sejarah berupa prasasti. Pada abad-abad berikutnya terdapat Mataram Hindu, Medang Kamulan, Singasari, Sriwijaya, dan Malaka seluruhnya adalah kerajaan maritim.

¹⁴ Namun Anthony Reid berdasarkan data yang dimilikinya berpendapat bahwa Campa yang pada masa itu terletak di Vietnam merupakan negara maritim tertua di Asia Tenggara. Baca Anthony Reid. *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*, Pengantar R.Z. Leirissa. Jakarta: LP3ES, 2002.

Bagaimana gambaran kehidupan maritim pada periode itu belum jelas, kecuali ekspansi mereka yang melintasi lautan. tetapi Kidung Sunda, memberi informasi abad 13 kepada kita bahwa Kaisar Cina-Mongolia, Kubilai Khan memerintahkan seribu kapal besar mengangkut 20.000 tentara Cina dari Fujian ke Jawa untuk menghukum Kertanegara atas penghinaan yang pernah mereka lakukan, namun lebih dari 3000 tentara Cina terbunuh sisanya ditawan sebagian lagi bergabung kepada Wijaya. Pada periode berikutnya 1331-1351 adalah kebijakan ekspansionis Gajah Mada yang menurut Negara Kertagama (1365) memperluas kekuasaan ke wilayah timur sepanjang route rempah-rempah sampai ke Maluku. Kepeloporan para saudagar Cina yang berlayar sampai Maluku digantikan oleh orang Jawa (Majapahit). Bersamaan dengan itu bermunculan kerajaan-kerajaan Muslim di Maluku (Ternate dan Tidore).¹⁵ Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk melebar ke utara yakni ke Sumatra bagian utara, (seperti Pasai, Haru dan Perlak), juga ke Lamuri, (di Pangkalan Brandan), Barus; Malaya, Campa dan Maluku. Dalam konteks ini maka Jawa (Majapahit) berhasil menjadi Negara maritim yang mendominasi di seluruh Nusantara.

Pada awal abad 14 hubungan antara Campa dan Majapahit sangat akrab. Sumber-sumber Campa menjelaskan bahwa Raja Jaya Simhavarman III menikah dengan putri Jawa. Sejarah Melayu memperkuat berita hubungan yang akrab itu dengan memberitakan adanya penguasa Campa yang nikah dengan putri Majapahit. Keturunan dari pernikahan ini menjadi raja terakhir Campa.¹⁶ Hubungan perkawinan merupakan bukti adanya frekuensi hubungan yang tinggi antar kerajaan yang bersangkutan; sebab tidak ada seorang pun yang mau dipisahkan dari keluarganya. Hubungan ini pasti diikuti dengan perjalanan pergi

¹⁵ (Pegeaud 1960; 17) dalam *Ibid.*, p. 82.

¹⁶ *Ibid.*, p. 44.

dan pulang antar kerajaan. Seseorang memutuskan untuk kawin dengan orang dari sabrang sudah tentu terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai sarana yang memungkinkan ia dapat kembali ke negeri asalnya. Pada sisi lain perjalanan dengan frekuensi tinggi sudah tentu tidak akan berlangsung jika tidak memiliki nilai ekonomis. Salah satu pendorong pelayaran pada masa itu adalah perdagangan rempah-rempah ke Maluku.¹⁷

Kehadiran Portugis masih menyaksikan sisa-sisa kemaritiman Majapahit. Ketika tiba di Nusantara, mereka menyaksikan bahwa perairan didominasi kapal-kapal jung Jawa, khususnya dijalur rempah-rempah Maluku-Jawa-Melaka. Jung Jawa mampu menahan tembakan meriam Portugis, berbobot sekitar enam ratus ton. Dengan ukuran melebihi kapal-kapal perang Portugis (Albuquerque 1557, III:62-63. Orang Portugis mengenali Jawa sebagai tempat asal jung-jung terbesar ketika mereka baru tiba dan menguasai Melaka. Couto, penulis Kronik Portugis, memperkirakan pelaut-pelaut Jawa telah memperkirakan berlayar ke Tanjung Harapan (Afrika Selatan) dan menjalin hubungan dengan pantai timur San Lorenzo (Madagaskar), karena disana banyak dijumpai penduduk asli berkulit sawo matang seperti orang Jawa.¹⁸ Melaka praktis nampak sebagai kota Jawa, mereka hidup sebagai pedagang di pasar, tukang kayu, nakhoda bahkan menjadi tukang di galangan kapal.¹⁹ Mereka memiliki kapal sendiri. Apabila perahu-perahu Bugis memiliki dua tiang layer, maka Barbarosa, pelaut Portugis, memberitakan adanya kapal-kapal raksasa dari Jawa yang memiliki 4 tiang layar. Dengan demikian relief perahu bercadik di

¹⁷ Pigeaud 1960, III: 16-17.

Hal ini diperkuat oleh sumber-sumber non Jawa antara lain Hikayat Raja-raja Pasai, Sejarah Melayu, silsilah Raja-raja Sambas dan Hikayat Banjar serta sejumlah sumber dalam bentuk tradisi lisan dari pulau-pulau di kawasan timur Indonesia. Bahkan Tideman (1938:78) mendapatkan tradisi lisan yang mengisahkan bahwa "Orang Timur" Jambi merupakan keturunan orang-orang dari Serawak dan Brunai yang datang menyerbu Jambi sebagai tentara Majapahit pada abad 14. Baca Anthony Reid, op. cit., p. 43.

¹⁸ Ibid., p. 57.

¹⁹ Ibid., p. 75.

candi Borobudur merupakan bukti bahwa peran pelaut Jawa di Nusantara telah berlangsung berabad-abad lamanya sebelum abad 15.

Perkembangan terbalik setelah Majapahit mengalami keruntuhan akibat perang saudara. Kemunduran peran Jawa terutama ketika ekspedisi militer Patih Unus dari Kerajaan Demak untuk merebut Melaka dari Portugis pada Januari 1513, mengalami kegagalan armada ekspedisi Demak terdiri dari 30 jung, yang berbobot 500 ton dan 70 kapal kecil, dan beberapa kapal lagi yang bersenjata lengkap yang berangkat dari Jepara. Di perairan Malaka, Portugis menembaki jung-jung Demak dengan meriam. Satu persatu jung-jung itu tenggelam, dan para serdadunya gugur tanpa sempat melakukan perlawanan. Hanya sebuah jung raksasa berbobot 1000 ton yang melarikan diri kembali ke Jepara.²⁰ Kapal-kapal Portugis lebih ramping sehingga mampu bergerak lebih cepat; selain itu dilengkapi dengan meriam yang lebih besar dibandingkan dengan milik kapal-kapal Demak.

Sesudah itu sejarah maritim Jawa terus merosot. Sultan Agung membangun Mataram dengan menghancurkan kota-kota pantai di utara Jawa. Kemunduran kembali terjadi ketika Amangkurat I naik tahta kerajaan Mataram. Pada 1651 ia melarang melarang orang Jawa berdagang dan menghancurkan kota-kota pesisir yang dinilainya tidak setia kepada Sultan bahkan pada 1655 ia menghancurkan semua kapal-kapal Jawa, sehingga akhirnya pada abad 17 para pelaut Barat hampir tidak ditemukan lagi.²¹

²⁰ Pires 1515; 188, 282 dan Cortesao 1944: 151-152, 282 dalam Anthony Reid. *Ibid.*, 103.

²¹ *Ibid.*, p. 105.

Bagaimana dengan perkembangan kemaritiman di Sulawesi Selatan.²² Negara Kertagama abad 14 kenal Makassar, Bantaeng (Bantayan), Luwu, bahkan menyebutkan nama Sorobaya (Takalar dan Bantaeng), Jipang (Takalar) dan Garrasi (Gresik) di muara Sungai Jeneberang. Klaim wilayah Majapahit. Gadjah Mada, yang makamnya dapat ditemukan di Lombok, dan Buton. Ia pernah bersumpah *A mukti Palapa*, tidak akan merasa berhasil (*mukti*) dan tidak akan makan makanan yang enak sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Dalam tradisi Hindu-Jawa terdapat tradisi puasa mutih yakni makan nasi tetapi tidak menggunakan lauk-pauk. Nampaknya Gadjah Mada berhasil dalam mencapai cita-citanya.

Braam-Morris memperkirakan Luwu mengalami periode keemasan pada abad 10. sedangkan Zainal Abidin Farid berpendapat pada abad 9, namun Luwu baru berkembang menjadi besar pada awal abad 15. Hubungan antara Luwu dengan dunia luar tidak hanya dengan Jawa. Dari I Lagaligo dapat diketahui bahwa Luwu mengenal Ternate, Bima, Jawa, bahkan pantai Coromandel. Namun Undang-undang Pelayaran Melaka yang disusun abad 15 menyebutkan bahwa pedagang Sulawesi Selatan berlayar ke Sumbawa, Singapura, Johor, Melaka, Perak, Aceh dan Timor.²³ Valentijn seperti yang dikutip oleh H. Daeng Mangemba dan Abu Hamid, menyatakan bahwa CRAINT Samarluca, (mungkin yang dimaksud adalah Tunilabu ri Suriwa), pada tahun 1420 dengan 200 perahu menyerang Malaka, tapi berhasil dipukul mundur Laksamana Melaka, sehingga melarikan

²² Berita-berita tentang pelayaran dan kekuasaan Jawa sebelum abad 17 tidak hanya berdasarkan sumber Jawa, tetapi juga sumber-sumber dari luar Jawa, bahkan dari Cina dan Korea, baik sebagai sumber tertulis maupun tradisi lisan. Andaikata ada pelayaran dan kekuasaan Bugis di luar Sulawesi Selatan sebelum abad 15 semata-mata hanya ditemukan dalam bentuk sumber Bugis. Itu pun isinya berupa mitologi, berupa kisah tentang dewa dan dewi di dunia atas dunia bawah, yang apabila kita dipahami dari perspektif ilmu pengetahuan Barat misalnya seperti yang dikemukakan Immanuel Kant, semata-mata hanyalah suatu imajinasi atau khayalan.

²³ Leonard Y. Andaya, op. cit., p. 24-25.

diri ke Pasai.²⁴ Persoalannya dari informasi ini adalah apa benar yang dimaksud Samarluka itu Makassar. Mengingat nama ini mirip dengan Samara yang disebutkan oleh Ibn Batuta yang mengunjungi negeri Pasai pada tahun 1345 selama 15 hari.²⁵ Battuta menyebutkan selain Samudra juga terdapat Samarlanga, kedua tepat ini berada di Aceh. Bahkan Basman memperkirakan bahwa yang dimaksud Samara adalah Samudra. Perkiraan Valentyn karena Samarluka menggunakan nama Crait, yang diidentikan dengan gelar Karaeng, yang lazim digunakan di kalangan bangsawan Makassar. Selain itu serangan diperkirakan pada musim kemarau (antara bulan Maret – Oktober), ketika angin bergerak ke barat laut. Pada periode ini kerajaan Tallo dipimpin Tunilabu yang agresif. Namun akhirnya ia terbunuh ketika bersama armadanya dalam pelayaran menuju Flores, ia ditenggelamkan di Suriwa oleh raja Polombangkeng. Jika benar peristiwa ini merupakan fakta kebangkitan kemaritiman Sulawesi Selatan, maka periode kejadiannya sesudah Majapahit runtuh, kemudian disusul dengan munculnya kekuatan baru yakni Melaka. Sebelum Melaka menjadi kerajaan, namanya adalah Tumasik, didirikan oleh seorang pangeran dari Majapahit. Angka tahun 1420 kiranya akurat, sebab kerajaan Samudra Pasai berakhir ketika ditaklukan oleh kerajaan Aceh pada tahun 1523, sejak itu bahasa Melayu digantikan dengan bahasa Aceh.²⁶

Kapan kemaritiman di Sulawesi Selatan? abad 9, 10 atau 15? Namun dapat dipastikan bahwa kemaritiman di Sulawesi Selatan baru berkembang pesat setelah dunia Maritim Jawa mengalami kemunduran. Perang-perang antara Jawa dan bangsa-bangsa Barat, berakibat berpindahnya route pelayaran

²⁴ H.D.Mangemba, "Semangat Kebaharian orang Sulawesi Selatan: Dulu dan Sekarang" dalam *Lontara, Majalah Ilmiah Universitas Hasanuddin*, Tahun XXIX, NO.3 1994, p.9.

²⁵ Ibn Battuta. "Travels in Asia and Africa 1335-1354 "(London: George Routledge & Sons, Ltd., 1929) p.274 dikutip dari Teuku Ibrahim Alfian. *Kronika Pasai, Sebuah Tinjauan Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1973), p. 21.

²⁶ Ibid., p. 8.

niaga (ke Maluku) dari laut Jawa ke Selat Makassar. Akibat perang-perang Gowa menjadi tempat pelarian dan penampungan para perantau dari negeri-negeri yang ditaklukan, terutama dari Malaka.

Siang (letaknya sekarang adalah Pangajene) pada akhir abad 15 telah didatangi para saudagar dari Johor, Pahang, dan Patani. (Schurhammer 1977: 528; Wessels 1925: 8; Pelras 1977: 166). Saudagar-saudagar Muslim-Melayu ini kemudian menetap setelah Melaka ditaklukan Portugis pada 1511. Menurut sumber-sumber Portugis mereka tidak ke pulau rempah-rempah Maluku, sebagaimana pedagang-pedagang Jawa yang singgah di beberapa tempat agak ke selatan dan tenggara Siang, tetapi untuk mengumpulkan produk-produk ekspor lokal Sulawesi Selatan: cendana, hasil laut seperti cangkang penyu), beras, dan budak.

Para saudagar Melayu tersebut memindahkan basis operasi ke daerah Gowa-Tallo menjelang masa pemerintahan Tunipalangga Ulaweng (tahun 1548-1566). Bersamaan dengan itu juga tinggal Nakhoda Bonang, yang boleh jadi adalah guru Sunan Kalijaga, salah seorang dari wali sembilan di Jawa. Bonang meminta izin kepada raja Gowa, agar komunitas Melayu, yang didalamnya termasuk etnis Pahang, Patani, Campa, Minangkabau, dan Johor. Makassar pada masa itu dikenal sebagai negeri yang ramah kepada orang asing. Gowa berkembang menjadi Bandar internasional. Para pedagang Portugis, Belanda, India singgah di Makassar. Namun laporan-laporan Portugis pada 1540 menyatakan bahwa sebelum Gowa berkembang menjadi besar, ia terlebih dahulu pernah dikuasai oleh Siang, sebuah kerajaan yang berada diutaranya.²⁷ Selain itu Gowa berkembang dengan terlebih dahulu menaklukan kerajaan-kerajaan di sekitarnya diawali oleh Karaeng Tumaparissi Kalonna dan memindahkan ibukotanya dari Tamalate (yang terletak di pedalaman) ke Somba Opu, yang terletak di muara Sungai

²⁷ Anthony Reid., *op. cit.*, p. 23-25.

Jeneberang. Raja berikutnya yang berperan penting pengembangan Gowa adalah Tunipalangga Ulaweng (1546-1565). Para sejarawan melihat gejala ini merupakan pertanda Gowa berkembang dari Negara agraris menjadi Negara maritim. Perpindahan terjadi ketika raja memandang bahwa hubungan dengan daerah luar (seberang laut) sangat penting bagi perkembangan ekonomi bahkan politik.

Setelah berhasil mencapai kebesarannya dengan wilayah seluruh Sulawesi Selatan, Maluku; Gowa akhirnya runtuh melawan Belanda yang dibantu Bone, Soppeng, Turatea. Peran kemaritiman Makassar di gantikan Bugis. Namun Bone sebagai pemenang perang memilih berorientasi ke darat. Dunia maritim memang berkembang tetapi tidak dengan dukungan secara terbuka dari kerajaan yang berada di daratan Sulawesi Selatan.

Dari uraian diatas maka perpindahan route perdagangan dunia dari Melaka- laut Jawa- Maluku ke Melaka - pantai utara Kalimantan - Laut Sulawesi - Sangier - Maluku dan sebagian lagi Laut Sulawesi - Selat Makassar - Maluku berperan penting dalam perkembangan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Bersama dengan perubahan jalur niaga akibat ekspansi Barat (Portugis) terjadi migrasi yang dampaknya kota-kota di Sulawesi Selatan berkembang pusat. Perkembangan ini, terutama selat Makassar karena letaknya yang paling strategis dibanding dengan kerajaan-kerajaan di sebelah timur (Teluk Bone) menjadikannya lebih maju dalam pelayaran niaga di bandingkan dengan wilayah timur di teluk Bone misalnya.²⁸ Di sini telah berkembang kerajaan-kerajaan yang didatangi bangsa-bangsa lainnya.

Di Makassar (kota yang merupakan gabungan Gowa dan Tallo), industri telah berkembang maju. Disini terdapat pembuatan kapal, penghasil kain katun putih dan kain berpola petak persegi, merupakan kain yang paling laku di seluruh Nusantara. Karaeng

²⁸ Mukhlis juga berpendapat bahwa Bone adalah agraris, sehingga memilih berkuasa di daratan dari pada di lautan. Perang Makassar, antara VOC dan Bone melawan Gowa adalah memperebutkan kedaulatan di lautan.

Matoaya menempatkan agen dagang di Banda pada awal abad ke-17. Makassar juga menjadi pasar bagi barang-barang Cina dan India membuat orang Eropa tertarik pula datang ke kota ini. Pada tahun 1625 sekitar sepuluh sampai dua puluh dua kapal perang kecil Portugis dengan sekitar 500 orang Portugis singgah di sini. Setelah Melaka direbut Belanda pada 1641, Makassar menjadi persinggahan lebih dari 3.000 orang Portugis. Inggris mendirikan loji di Makassar pada 1613, Denmark pada 1619, sementara para saudagar Spanyol dan Cina masing-masing mulai muncul pada 1615 dan 1619.²⁹

I Lagaligo: Dari Karya Sastra menjadi Mitos

Pada setiap komunitas yang berkembang semakin kompleks dan ketika kehidupan masyarakat mengalami proses diferensiasi dan spesialisasi maka masalah utama yang dihadapi oleh sebuah kerajaan adalah bagaimana membangun legitimasi kekuasaan dan membangun kesetiaan rakyat dan vazalnya. Masing-masing wilayah (kerajaan) terdapat hubungan saling mempengaruhi, namun biasanya kerajaan besar dijadikan acuan bagi kerajaan kecil atau vazalnya. Sehubungan dengan itu maka karya sastra berperan penting. Raja dengan dukungan para punggawa dan penulis di istana menggunakan karya sastra sebagai media sosialisasi nilai-nilai, undang-undang bahkan seluruh aspirasinya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dikembangkanlah berbagai bentuk kebudayaan di istana, misalnya tari-tarian, drama, lagu-lagu dan kisah-kisah yang disampaikan kepada rakyatnya pada upacara-upacara kerajaan. Oleh karena itu di Jawa berkembang berbagai bentuk pementasan budaya seperti wayang³⁰, ketoprak, dan lain-lain, yang merupakan

²⁹ Anthony Reid, *op. cit.*, p. 154-157.

³⁰ Sukmono menyatakan Wayang telah ada pada jaman Erlangga

produk kebudayaan istana.³¹ Pada upacara-upacara kerajaan seni pertunjukkan itu dipergelarkan dengan tujuan menanamkan ideologi tertentu berupa suatu ajaran tentang nilai-nilai sosial, agama, etika dan sebagainya selain sebagai hiburan juga sebagai pujian kepada raja. Dengan tujuan itu maka kesusasteraan berkembang dengan pesat. Mitologi Ramayana (yang lazim dianut aliran Hindu Wisnu) dan Mahabarata (Hindu Shiwa) berkembang dengan pesat, dikelola dalam berbagai versi. Hampir setiap daerah mencipta versinya sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan nilai yang mendesak yang dibutuhkan masyarakat dan jamannya. Dalam konteks seperti inilah dapat diperkirakan bahwa setiap kerajaan di Nusantara mengembangkan kesusasteraannya. Jika kerajaan-kerajaan di Jawa terdapat wayang kulit, dan wayang orang, dan di Jawa Barat terdapat orang Sunda memiliki wayang kulit dan wayang golek, maka orang Bugis memiliki seni pertunjukan I Lagaligo, yang masing-masing memiliki kesamaan antara lain tari-tarian dan prosanya. Dalam peper ini akan dilacak kesamaan dan kemungkinan hubungan antara kisah-kisah pewayangan Jawa dan I Lagaligo. Kesamaan yang tidak dapat disangkal adalah pada sosok Batara Guru, dan di Luwu terdapat seorang raja yang bernama Raja Dewa, yang agresif menaklukan kerajaan-kerajaan di sekitarnya pada pertengahan abad 16. Hal ini mengingatkan kita pada nama-nama raja dan mitologi yang berkembang di Jawa.

Pengarang I Lagaligo sangat menyadari kehidupan di lautan, sehingga dapat dikategorikan sebagai produk masyarakat marine. Kesadaran nampak dengan pemahaman kosmologi bahwa selain dunia tengah (*dunia kita*) juga terdapat dunia atas (*boti langi*)

³¹ Wayang telah ada pada antara abad 8-10 yakni pada masa Mataram Hindu, pada abad 10 – 16 berkembang di Jawa Timur. Ia dikembangkan sebagai suatu bentuk kesenian istana, bahkan Sudarsono menyatakan sebagai wayang wong (orang) sebagai drama tarian ritual negara. Lihat Sudarsono : *Wayang Wong. The State Ritual Dance Drama in The Court of Yogyakarta*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1974), p. 1

dan adanya dunia bawah (*buru liu*). Meskipun dunia atas lebih berkuasa tetapi memiliki fungsi yang sama dengan dunia bawah sebagai tempat keberadaan para dewa. Pemahaman bahwa di dunia atas terdapat kehidupan merupakan sifat yang universal (baik orang yang hidup di darat maupun di laut). Orang yang tidak pernah di laut cenderung berpikir dunia bawah adalah dunia kematian tanpa kehidupan. Hampir 90 persen kisah I Lagaligo adalah kehidupan di laut maka dapat diperkirakan pengarangnya membayangkan dirinya berada di laut (di atas perahu). Namun ternyata terdapat pengaruh Hindu dalam mitologi I Lagaligo dengan menyebut dunia atas tempat tinggal para dewa dengan *kayangan*; sedangkan dunia bawah juga disebut dengan Peretiwi. Dalam mitologi Hindu, Pertiwi juga dikenal sebagai dewi yang tinggal di dalam bumi, ia adalah isteri dewa Brahma (dewa pencipta). Pandangan kosmologi tentang dunia atas, tengah dan bawah juga ada pada masa pra Islam di Jawa, pada masa ini Jawa telah berkembang sebagai masyarakat maritim, yakni pada kerajaan Singasari, Majapahit dan lain-lain.

Dalam kesusasteraan Bugis, Batara Guru adalah dewa yang diturunkan oleh ayahnya, Datu Patotoqe (yang artinya Sang Penentu takdir), ke bumi dari dunia atas (*kayangan*), agar menurunkan raja-raja Luwu. Turunnya Batara Guru ke Bumi adalah perintah Datu Patotoqe.³² Dalam konsepsi ini maka ideologi yang dibangun yakni Luwu adalah satu-satunya negeri yang diciptakan oleh para dewa. Dengan demikian Luwu adalah pewaris syah kedaulatan di seluruh dunia.

Klaim kedaulatan dengan menggunakan figur dewa Batara Guru, juga terjadi pada jaman Majapahit yakni pada Tantu Pagelaran.³³

³² Nurhayati Rahman, op. cit., p. 53.

³³ Hal ini juga ditemukan pada mitos tentang berdirinya Melaka yang didirikan (pada sekitar 1400) oleh Parameswara setelah Majapahit runtuh. Parameswara adalah nama lain dari Batara Guru.

Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa Tengahan,³⁴ ketika Majapahit mencapai puncak kebesarannya. Tantu Pagelaran mengisahkan Batara Guru memindahkan Suralaya (tempat tinggal para dewa ke pulau Jawa). Dalam ceritera itu pulau Jawa masih gonjang-ganjing (tidak stabil), selalu terjadi gempa bumi. Di Jawa hanya terdapat satu pasang manusia, tetapi masih belum berpakaian, belum dapat bergaul, dan belum dapat membuat rumah. Para dewa diperintahkan turun ke tanah Jawa untuk mengajarkan manusia supaya berpakaian, membuat rumah, membuat perabot rumah tangga, bergaul sesamanya, dan lain-lain. Selanjutnya para dewa diperintahkan memindahkan gunung Semeru yakni puncak pegunungan Himalaya di tanah Hindu ke pulau Jawa. Setibanya badan gunung, pulau Jawa goyah dan miring. Para dewa mengupayakan agar pulau menjadi datar kembali. Di sepanjang perjalanan badan gunung tercecer di antaranya terbentuklah gunung Lawu, Wilis, Kelud, Arjuna dan lain-lain, puncaknya adalah gunung Semeru.³⁵ Tujuan penciptaan mitos adalah menjadikan Jawa (Majapahit) sebagai pusat kekuasaan dunia. Para dewa dari Suralaya telah dipindahkan ke Jawa. Dengan cara ini Majapahit mengklaim memiliki otoritas atas kedaulatan di seluruh dunia, karena para dewa bersama mereka.

Batara Guru dalam La Galigo adan Tantu Pegelaran memiliki persamaan yakni mengenai klaim kedaulatan, masing-masing menempati kedudukan sebagai dewa tertinggi dan sebagai dewa

³⁴ Prof. Dr. R.M Purba Tjaraka, *Kapustakan Djawi*. Djakarta: Penerbit Djambatan, 1957 menggolongkan bahasa Jawa atas bahasa Jawa Kuno, Pertengahan dan Baru. Bahasa Jawa Kuno disebut juga sebagai bahasa Kawi digunakan pada masa kuno, bahasa Jawa Pertengahan lazim dipakai pada periode Majapahit; dan bahasa Jawa Baru mulai digunakan pada jaman Mataram, hingga kini. Seluruh bahasa ini menurut van Stein Callenfels tergolong sebagai bahasa Austronesia yang tersebar sejak dari Madagaskar hingga Amerika Selatan; dari Formosa, hingga pantai Utara Australia. Bahasa Austronesia pada mulanya berlaku di Campa, Asia Tenggara bagian Utara, ketika Campa runtuh pada tahun 1500 akibat serbuan Vietnam, terjadi eksodus besar-besaran bersama dengan persebaran bahasanya. Lihat Purba Tjaraka, *Ibid.*, p. vi.

³⁵ *Ibid.*, p. 54-55.

yang anti status quo, yang membongkar tertib sosial. Prof. Purbatjaraka berpendapat bahwa Batara Guru adalah Tuhan Allahnya orang Jawa dan hal ini baru tergeser ketika Jawa menerima Islam sebagai agamanya. Pada periode Islam Batara Guru sang Hyang Tunggal, atau sang Hyang Wenang ditempatkan dibawah Nabi Adam.³⁶

Dalam karya sastra Jawa awal status Batara Guru sebagai dewa berada sebagai dewa rendahan, tetapi pada periode Majapahit menjadi dewa tertinggi yakni ayah dewa Brahma, Wisnu dan Shiwa, akan tetapi pada masa Islam, posisinya merosot kembali. Ia tidak disebut-sebut sebagai orang tua tiga dewa tertinggi agama Hindu, bahkan sering dikisahkan sebagai sumber berbagai masalah dan malapetaka. Ialah ayah dari Batara Kala, yang kehadirannya menimbulkan adalah awal dari "goro-goro" (penyebab malapetaka, wabah penyakit dan peperangan). Peran yang anti kemapanan ini nampaknya diambil alih oleh kerajaan-kerajaan yang baru berkembang.

Bagaimana para pujangga di istana kerajaan-kerajaan Jawa membangun identitas kebudayaan mereka, dapat diketahui dari kognisi mereka tentang pembagian wilayah teritorial Nusantara bahkan dunia yang terdiri dari; Negara Agung, Monco Negara, Negara Sabrang dan Negara atas Angin. Negara Agung adalah wilayah kerjaan Jawa yang terdiri dari Kota-goro (ibukota), Negoro-Agung yakni suatu seluruh wilayah kedaulatan raja, Monco-negoro adalah Negara mitra, untuk menyebutkan vazal kerajaan, tetapi semuanya berada di pulau Jawa. Mereka termasuk Negara-negara di luar negara agung, di Jawa Timur dan Jawa Barat. Negara Sabrang adalah kerajaan-kerajaan yang untuk mencapainya dengan menyebangi lautan. Sedikitnya ada 3 negara yakni sabrang Lor (utara), Wetan (wetan), dan Kulon (Barat). Selanjutnya negeri atas angina adalah negeri yang tidak semusim dengan Jawa, yang tidak dapat dicapai dengan

³⁶ Purbatjaraka, op. cit. 66. hal ini dapat diketahui dari kitab korawasrama.

menggunakan angin muson. Negeri-negeri ini adalah India, Arab.Persia, Cina termasuk Negeri antah berantah, tempat asal para raksasa, seperti Portugis, Belanda, Spanyol dan bangsa-bangsa dari Eropa lainnya. Dalam persepsi Jawa , suatu wilayah jika semakin jauh dari Kuto-goro, kondisi semakin kacau, tidak ada keharmonisan dan ketenangan hidup, yang ada hanyalah kekacauan, kegelisahan dan kemurkaan.

Gambaran ideal tentang kehidupan dalam sastra Jawa dijiwai oleh ajaran Hindhu-Budhis tentang Aryasatya (kebenaran utama) yang menyatakan bahwa (1)hidup adalah menderita, 2) menderita disebabkan karena tresna atau haus (hasrat) akan hidup, oleh karena itu penderitaan dapat dihentikan dengan menindas tresna. Tresna berarti juga cinta yang dapat ditindas dengan astawida.³⁷ Terdapat kepercayaan tentang reinkarnasi, bahwa hidup yang benar adalah kembali kepada sang pencipta, yang dapat dicapai dengan menjauhi kehidupan dunia yang materialistik. Sosok ideal pada wayang kanan, yakni Pandawa pada Mahabarata; dan Rama bersaudara pada Ramayana; pada sisi kiri adalah segala bentuk figur yang sesat dan salah, mereka adalah Kaurawa pada Mahabarata dan Rahwana pada Ramayana.

Kehidupan yang ideal seperti yang tampak pada wayang kanan adalah kehidupan yang sederhana, yang kontradiksi dengan wayang kiri yang bersifat materialistik dan kapitalistik. Karakter materialistik itu tampak pada badan dan perut besar, mulut besar, dan sifat kemewahan nampak pada pakaian dan perhiasan. Pujangga Bugis (palontaraq) mungkin menyadari hal ini. Pakain menjadi symbol status, ketika pejabat kerajaan

³⁷ Astawida berisi perintah untuk : 1. memandang segala sesuatu dengan benar; 2. memiliki niat atau sikap yang benar; 3. berkata yang benar; 4. bertingkah laku yang benar; 5. berpenghidupan (matapencharian) yang benar; 6. berusaha yang benar , 7.memperhatikan dengan benar, dan 8. bersamadi dengan benar. Sukmono, Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 2 (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1974), p. 20-21. Konsepsi Astawida pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan konsepsi Science yang dikemukakan Immanuel Kant, yakni perpaduan antara ratio dan empirisme yang hanya dapat ditangkap dengan panca-indera.

tersinggung karena masalah pakaian maka ia pun memerintahkan punggawanya:

“pindahlah to mangngauwe ke perahu oppuna wareq. Demikian kata la madukkelleng “gantikanlah pakaian To Mangngauwe sebab tak pantas menduduki permadani di depanku” . Maka diberikanlah La To Mangngauwe sarung sutera, baju satin merah yang disulam langit penutup kepala pucuk gunratu lalu duduk didepanku.”³⁸

Namun seberapa jauh, I Lagaligo menyerap budaya Jawa. Nampaknya hanya sebatas mengadopsi kepercayaan Batara Guru. Nilai-nilai luhur Hindu-Budhis tidak nampak. Sawerigading yang dipandang sebagai sosok ideal, jauh dari gambaran ideal nilai-nilai Hindu-Budhis. Ia merupakan sosok pribadi manusia Bugis yang mempunyai watak yang berdimensi ganda, yakni cinta dan dendam, benci dan sayang, tegar dan cengeng, lembut dan kasar, halus dan keras. Ia tidak mengenal kompromi, hanya ada dua pilihan hitam dan putih dan pantang menyerah. Dari Lagaligo diperoleh pesan agar selalu berpegang teguh kepada empat sifat yang berpasangan, yakni *warani na malempuq, macca na magetteng*; berani tapi jujur, pintar tapi teguh pada pendirian.³⁹ Meskipun demikian kisah La Galigo tidak disusun seperti para pujangga atau dalang dalam wayang Jawa, yang dengan jelas menampilkan dikhotomi antara yang hitam (salah) dengan yang putih (yang benar atau sosok ideal. Lagaligo dikemas dengan mengemukakan suatu kehidupan yang pada hakekatnya manusia disamping sebagai makhluk yang berakal juga memiliki naluri persaingan dan perpecahan. Begitu besarnya permusuhan dan perpecahan tersebut, dalam naskah-naskah lontaraq sering digambarkan sebagai sianre bale i tauwe artinya manusia saling mamangsa antara yang satu dengan lainnya.⁴⁰ Sisi terang dan

³⁸ Nurhayati, op. cit., p. 304.

³⁹ Nurhayati., op. cit., p.390.

⁴⁰ Nurhayati, op. cit., p. 391

gelap dalam terang menyatu pada diri setiap manusia. Sebagai manusia maka sosok ideal syah untuk marah dan tersinggung seperti pada Sawerigading ketika kehadirannya tidak dihormati di kerajaan Cina:

"Tak dianggap manusia. La Puang oleh hamba jawanya orang Cina. Belum habis ucapan tunas mutiara yang duduk di atas bintang kejora di Watang Mpareq maka guntur pun menggelegar kilat berlomba-lomba petir bersahut-sahutan kendati jari tangan dibalikkan tak jua kelihatan oleh gelap gulita di Ale Cina. Bagaikan runtuh istana lengkap manurung di La Tanete, tujuh puluh rumah tercabut di Cina Barat, sekian pula di cina timur sampan To Massarie telah terlempar, kendati labu tak jua muncul semua tenggelam di Uri Liu."
*"Bagaikan bara menyala raut muka Sawerigading bak bara dikais dadanya."*⁴¹

Serat Wedhatama yang dijadikan para dalang dalam melakonkan seorang figur ideal mengajarkan kepada manusia agar mampu mengendalikan hawa nafsu, menjauhkan diri dari angkara murka (menuruti kemarahan), untuk menjiwai ilmu luhur, yang hakiki yakni agama sebagai kekuatan menyelesaikan berbagai masalah (*ageming aji*).⁴² Mengikuti murka dan hawa nafsu dalam berbagai kisah wayang merupakan awal bagi timbulnya guntur, hujan lebat, gempa bumi, petir yang bersahut-sahutan. Hal ini merupakan pertanda adanya "goro-goro" malapetaka yang harus diatasi.

Khusus mengenai gejala goro-goro dalam sastra wayang Jawa, memiliki kesamaan dengan gejala para dewa dalam Lagaligo yang sedang marah. Apakah hal ini merupakan kesengajaan bahwa figure "kiri" seperti Batara Guru, Batara Kala

⁴¹ Ibid., p. 301,

⁴² Adityo Jatmiko, *Tafsir Ajaran Serat Wedhatama*. (Yogyakarta: Pura Pustaka, 2005), p. 43.

dan Durga, meskipun berada atau bahkan sebagai pelaku yang menentang arus toh tetap sebagai dewa. Bahkan Pada periode Majapahit Batara Guru merupakan dewa tertinggi dalam Tantu Pagelaran. Dalam La Galigo, Batara Guru yang maha perkasa di Majaahit ditempatkan di bawah Dewa lainnya yakni Datu Patotoqe yang artinya Sang Penentu Takdir.

Namun keunggulan Lagaligo, adalah pada kepiawaiannya untuk menggambarkan kepribadian manusia Bugis yang masih bisa ditemukan pada masa kini; yakni menuruti emosi, yang berpeluang untuk bersikap irrasional, mengandalkan badik, sebuah senjata pembunuh, sebagai jalan keluar penyelesaian masalah. La Galigo mampu mengemukakan stereotype orang Bugis sebagai bangsa yang keras dan senang berkelahi. Namun disini lain semangat keberanian bagi orang Bugis bila ditempatkan pada posisi yang luhur akan memunculkan manusia-manusia yang berjiwa patriotisme, satunya kata dengan perbuatan, pantang menyerah dalam membela kebenaran. Oposisi di antara berani karena benar atau berani di jalan yang salah menimbulkan dampak pencitraan bagi orang Bugis yang sedang merantau. Di satu pihak bila akan menjadi pahlawan bila oleh kejujuran, kepintaran dan keteguhan, sebaliknya tanpa ketiganya ia menjadi manusia preman.⁴³

Kapan kira-kira I Lagaligo ditulis. I La Galigo menyebutkan nama Sriwijaya dan Majapahit. Jadi tidak mungkin ditulis pada jaman Sriwijaya, karena realitas sejarahnya, jaman Majapahit berada jauh sesudah Sriwijaya runtuh. Kemungkinan berikutnya adalah bersamaan atau mungkin sesudah Majapahit runtuh. Faktanya adalah kisah La Galigo tentang Majapahit hanyalah keterlibatan Sawerigading dalam pertempuran di lautan, tidak menjelaskan latar belakang pertempuran, jalannya perundingan dan siapa pemimpin pertempuran. Berdasarkan pertimbangan ini maka dapat dipastikan bahwa La Galigo ditulis sesudah

⁴³ Nurhayati Rahman, *op.cit.*, p. 404.

- Nurhayati Rahman. *Cinta, laut, dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo. Episode Pelayaran Sawerigading ke Tanah Cina: Perspektif Filologi dan Semiotika*. Makassar: Lagaligo Perss, 2008.
- Cristian Pelras. *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum-Jakarta-Paris Ecole française d'Extreme –Orient, 2006.
- Reid, Anthony. *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*, Pengantar R.Z. Leirissa. Jakarta: LP3ES, 2002.
- Kern, R.A. / *Lagaligo*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss, 1986.
- Poerbatjaraka, Prof. Dr. R.M. *Kapustakan Djawi*. Djakarta: Penerbit Djambatan, 1957.
- Sudarsono : *Wayang Wong, The State Ritual Dance Drama in The Court of Yogyakarta*,
Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 1974.
- Sukmono, *Sejarah Kebudayaan Indonesia Jilid 2*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1974.
- Teuku Ibrahim Alfian. *Kronika Pasai, sebuah tinjauan sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss, 1973.
- D. Zawawi Imron. *Berlayar di Pamor Badik*. Makassar: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Lembaga Kesenian Sulawesi Selatan DKI Jaya, bekerja sama dengan Yayasan Pembina Generasi Penerus Indonesia (YPGPI), 1994.

PENERBIT DI MAKASSAR DAN PEMBELAJARAN KEBUDAYAAN

*Andi M. Akhmar, S.S., M.Hum
Fak. Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin*

1. Pendahuluan

Buku-buku yang mengisi rak-rak toko buku dan perpustakaan atau yang sampai ke tangan pembaca hadir melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan banyak pihak. Salah satu pihak yang paling berperan dalam proses produksi tersebut adalah penerbit. Lembaga inilah yang memilih naskah buku yang sesuai dengan kebutuhan pasar; mengorganisir desain dan penampilan buku agar menarik perhatian pembaca; dan menyiapkan biaya produksinya, hingga menyalurkan ke distributor atau toko-toko buku dan perpustakaan.

Para penerbit ini pada umumnya memiliki kekhususan pada bidang atau isu-isu tertentu serta segmen pembaca tertentu pula. Ada penerbit yang memfokuskan perhatian pada buku-buku pelajaran dengan segmen siswa atau pelajar; ada yang memfokuskan perhatian pada buku-buku agama, ada penerbit yang memfokuskan perhatian pada buku-buku pemikiran; dan bahkan ada penerbit yang memfokuskan perhatian pada sastra, bahasa, sejarah, dan isu-isu kebudayaan lainnya. Memang ada sejumlah penerbit yang mengangkat berbagai tema, tetapi biasanya penerbit semacam ini selalu menyesuaikan diri dengan pasar. Dinamika penerbit buku ini memiliki tantangan yang bermacam-macam pula, ada yang berkembang, ada yang timbul-tenggelam, dan ada pula yang tidak dapat bertahan hidup lama.

Penerbit yang memiliki tantangan yang kuat adalah mereka yang menerbitkan buku pemikiran dan kebudayaan. Katagori penerbit ini, di luar penerbit buku-buku fiksi, pada umumnya tidak mampu bertahan lama. Hanya ada beberapa di antara katagori penerbit ini yang mampu bertahan hingga kini. Kemampuan bertahanannya pun tidak semata-mata karena tema-tema buku yang disodorkan, melainkan adanya dukungan pemerintah dan atau manajemen yang diterapkan oleh penerbit tersebut. Misalnya, penerbit Balai Pustaka, penerbit buku yang didirikan di pada tahun 40-an yang banyak menerbitkan karya-karya sastra Angkatan Balai Pustaka dan karya sastra terjemahan;¹ dan hingga kini penerbit ini masih tetap hadir. Namun, perlu diketahui bahwa penerbit ini sudah memasuki juga wilayah proyek pengadaan buku untuk sekolah dan instansi. Contoh yang lain yang dapat diajukan adalah penerbit buku Gramedia yang lahir pada tanggal 25 Maret 1974 yang merupakan cikal bakal dari KKG (Kelompok Kompas Gramedia), rumpun usaha penerbitan terbesar di Indonesia.²

Beberapa penerbit dengan wacana idealisme yang mampu bertahan hingga kini, antara lain Kanisius, Dian Rakyat, dan Pustaka Jaya. Penerbit Kanisius adalah penerbit yang berbasis di Yogyakarta, mampu bertahan karena tidak hanya mengangkat wacana kebudayaan, melainkan juga pemikiran, filsafat, agama, dan pertanian yang banyak digunakan sebagai literatur di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, penerbit ini didukung oleh ketersediaan mesin cetak yang tergolong besar. Lain halnya dengan penerbit Pustaka Jaya, penerbit buku yang didirikan pada tahun 1971 oleh sastrawan Ajip Rosidi, Ramadhan KH, Asrul Sani, Irfati Sudiarto, dan para anggota Dewan Kesenian Jakarta, lahir

¹ Ahmad Husein, "Kisah tentang Buku (Bag. 2): Sekilas Perkembangan di Indonesia", www.duamata.blogspot.com/2006/08/kisah-tentang-buku-bag2-sekilas.html.

² "30 Tahun Gramedia Penerbitan: Dengan Buku, Menuju Indonesia Baru", *Kompas*, 25 Maret 2004. Lih juga Adhe, *Declare! Kamar Kerja Penerbit Jogja (1998-2007)*, Komunitas Penerbit Jogja, 2007:31.

dari keprihatinan mereka atas situasi perbukuan era tahun 1960-an ketika Balai Pustaka yang sejak zaman Belanda bertugas menerbitkan buku sastra sedang mengalami kevakuman.³ Penerbit ini mampu bertahan hingga sekarang yang dimungkinkan oleh beberapa hal, terutama kemampuannya tampil inovatif, memiliki intensitas terbitan, dan sosialisasi yang mereka lakukan secara terus-menerus.

Fenomena perbukuan yang lebih menarik lagi adalah keberadaan penerbit di kota Yogyakarta. Di kota ini terdapat banyak penerbit, baik yang berskala besar maupun berskala kecil, menerbitkan buku-buku ilmiah akademis dan ilmiah populer, filsafat, teologia, agama, ekonomi, politik, sosial, pemasaran, pengembangan diri, psikologi, sosiologi, manajemen, kedokteran, teknik, dan lain-lain. Namun, tidak sedikit di antara mereka yang mengkhususkan diri menerbitkan buku-buku sastra dan kebudayaan. Penerbit Ombak adalah sebuah penerbit yang secara khusus menerbitkan buku-buku sejarah, penerbit Navila menerbitkan buku-buku sastra timur, Bentang Budaya yang identik dengan wacana kebudayaan, dan lain-lain. Adhe (2007:91) menyebutkan bahwa pada masa awal kelahirannya, para penerbit Yogyakarta seperti melawan arus bisnis buku yang mesti memperhitungkan aspek pasar. Bahkan mereka justru berpendapat bahwa yang penting adalah perjuangan agar buku mereka diterima di pasar. Pada saat yang bersamaan, kelahiran generasi baru penerbit Yogyakarta ini diwarnai dengan semangat reformasi, masa kejatuhan rezim Soeharto, dan pada umumnya mereka adalah aktivis mahasiswa di berbagai kampus di Yogyakarta.

Penerbit-penerbit buku yang telah disebutkan di atas, harus diakui telah memberikan warna terhadap dunia perbukuan di Indonesia. Penerbit ini pada umumnya cukup konsisten dan dapat

³ "Penerbit Tua, Bertahan Karena Idealisme", suplemen "Pustakaloka", *Kompas*, 19 Juli 2003.

bertahan di tengah-tengah gempuran industri perbukuan nasional; mereka dapat mempertahankan segmen pembacanya; serta pada umumnya mereka membawa wacana idealisme kebudayaan, dan tidak hanya mempertimbangkan pasar melulu. Para penerbit inilah yang selama ini banyak mengisi rak-rak bahasa, sastra, dan kebudayaan pada toko-toko buku dan perpustakaan-perpustakaan. Memang terdapat sejumlah penerbit lokal yang berkedudukan di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa, tetapi mereka tidak mampu bersaing karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Penerbit lokal tersebut tidak mampu bersaing dengan penerbit-penerbit besar yang sekian lama telah menguasai pasar melalui jaringan distributor dan toko buku yang kuat, memiliki manajemen yang modern, memiliki alat produksi (mesin cetak), memiliki modal yang memadai, yang juga ditunjang oleh ketersediaan komunitas penulis dari universitas, budayawan, sastrawan, dan lain-lain.

Meskipun demikian, peran penerbit nasional atau penerbit yang berasal dari Pulau Jawa ini juga memiliki keterbatasan. Pada umumnya mereka hanya mampu mengangkat isu kebudayaan yang bersifat umum dan nasional, misalnya sastra Indonesia, sastra terjemahan, sejarah nasional, dan lain-lain. Sementara itu, penerbit lokal lebih jeli melihat isu-isu kebudayaan yang lebih spesifik, seperti nilai-nilai kearifan pada masyarakat tertentu, sastra daerah, dan sejarah lokal. Dalam konteks inilah peran penerbit lokal senantiasa diharapkan terus memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pembacanya.

Salah satu kota di luar Pulau Jawa yang akhir-akhir ini banyak melahirkan penerbit adalah kota Makassar. Dalam satu dasawarsa terakhir, bermunculan penerbit di kota ini, yang tidak hanya berkiprah pada pengadaan buku-buku ajar sekolah, melainkan banyak di antara mereka yang menerbitkan buku-buku sastra, bahasa, dan kebudayaan lokal. Keberadaan penerbit-penerbit lokal ini juga turut didukung oleh program Adikarya IKAPI,

pada tahun 2002-2003, yang memberikan hibah penerbitan buku kepada penerbit lokal tersebut. Dalam kaitan itu, tulisan ini menelusuri dan mengungkap latar belakang, dinamika, dan idealisme penerbit lokal Makassar dalam mengangkat isu-isu kebudayaan.

Secara khusus, ada lima penerbit buku yang dibicarakan dalam tulisan ini, namun dalam beberapa contoh juga dibicarakan beberapa penerbit yang telah menerbitkan buku-buku tentang kebudayaan. Kelima penerbit itu adalah Pustaka Refleksi, Telaga Zam-Zam, La Macca Press, Innawa, dan Masagena Press. Penerbit yang dipilih adalah penerbit yang lahir menjelang atau setelah reformasi yang melanda bangsa Indonesia, tahun 1997. Selain itu, pemilihan ini didasarkan atas pertimbangan produktivitas, konsistensi, dan jangkauan pembaca. Pustaka Refleksi dapat diletakkan sebagai penerbit yang sangat produktif dan banyak menerbitkan buku-buku kebudayaan. Telaga Zam-Zam adalah penerbit yang cukup berperan dalam menyediakan buku-buku pelajaran sekolah di Sulawesi Selatan. La Macca Press juga merupakan salah satu penerbit buku-buku tentang sejarah dan nilai-nilai lokal Sulawesi Selatan. Penerbit Innawa adalah penerbit yang digerakan oleh "anak muda" yang kuat dengan buku-buku terjemahan, sastra, dan kebudayaan. Adapun Masagena Press adalah sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Makassar yang cukup aktif dalam bidang penerbitan, khususnya tema-tema sejarah dan nilai-nilai lokal.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan studi pustaka. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menelusuri data adalah melalui sejumlah pertanyaan kunci yang diajukan kepada pimpinan penerbit tersebut. Sedangkan studi pustakan dilakukan dengan mempelajari komentar atau ulasan pembaca atau ahli tentang buku-buku terbitan kelima penerbit tersebut, baik di surat kabar maupun dalam tulisan ilmiah, serta mengamati langsung buku-buku terbitan mereka.

2. Buku Sebagai Sumber Ilmu dan Peradaban

Pada masa sebelum mengenal tulisan, orang menyimpan pengetahuan atau peristiwa-peristiwa penting yang mereka alami dalam ingatan mereka. Pengetahuan dan peristiwa-peristiwa penting itu diabadikan dengan menggunakan media tertentu, seperti mitos, cerita rakyat, puisi rakyat, dan lain-lain, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah manusia mengenal tulisan (aksara), mereka lalu mulai merekam pengetahuannya dengan cara menulis pada bahan keras, seperti kulit kayu, batu, daun lontar, kulit binatang, dan kertas. Karya-karya yang ditulis pada masa lampau tersebut dikenal dengan nama naskah kuno atau manuskrip; yang hingga kini banyak yang disimpan pada perpustakaan pemerintah dan sebagai koleksi pribadi. Setelah dikenal mesin ketik dan alat cetak, manusia mulai memproduksi pengetahuan mereka secara massif dalam bentuk buku. Jika manuskrip diproduksi secara terbatas dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, maka buku dapat dimiliki oleh siapa saja.⁴

Saat ini, buku dengan berbagai jenis dengan mudah dapat diperoleh di toko-toko buku atau di perpustakaan. Setiap orang dapat memilikinya dan membuat koleksi buku pribadi. Bagi masyarakat tertentu, membaca buku juga sudah menjadi kebutuhan, tergantung kepentingan mereka. Ada kelompok masyarakat yang senantiasa membutuhkan informasi mengenai bidang tertentu; ada yang ingin menikmati karya-karya fiksi, dan ada pula yang ingin mengembangkan pengetahuannya lewat membaca buku. Mengapa buku menjadi penting? Pendapat berikut ini menarik dicermati.

Buku, ilmu, dan peradaban adalah satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Siapa pun tak bisa menyangkal, bahwa

⁴ Untuk memahami pergeseran dari dari budaya lisan murni, tulisan, cetakan, dan elektronik, lih. Walter J. Ong (1982), *Orality and Literacy The Technologizing of the Word*. London: Methuen.

tonggak penyangga peradaban adalah ilmu. Dan ilmu ini tentu saja—sebagian besar—diperoleh dari buku. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kita bisa melihat, memahami dan menyerap apa saja yang ada di sekitar kita. Dengan buku, kita bisa mengetahui sesuatu hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Buku pulalah yang mencatat, merekam setiap gerak peristiwa dan pengetahuan yang terjadi di muka bumi. Ketika ilmu bermanfaat dan dapat dimanfaatkan demi kemaslahatan umat manusia, maka di sanalah peradaban dibentuk.⁵

Fungsi buku sebagaimana pendapat di atas tidak dapat disangkal. Itulah sebabnya sehingga buku selalu dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Selain keberadaan toko buku sebagai mata rantai distribusi yang paling terakhir, pemerintah atau lembaga swasta lainnya menyediakan perpustakaan agar masyarakat dapat mengakses sumber pengetahuan tersebut. Di sekolah-sekolah atau di universitas, buku merupakan kebutuhan utama untuk memperoleh pengetahuan. Bahkan proporsi belajar lewat membaca buku lebih banyak dibandingkan melalui pengajaran di dalam kelas.

Bagi masyarakat yang memiliki tradisi lisan yang kuat, keberadaan penerbit buku menjadi penting lantaran aneka macam tradisi, sejarah, cerita rakyat, dan berbagai nilai-nilai kearifan lokal dapat direkam dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, usaha itu membuka kesempatan kepada peneliti dari luar dan peminat kebudayaan, dan khususnya kepada generasi baru untuk mempelajari warisan budaya tersebut. Wanua, Direktur Pustaka Refleksi⁶ menyebutkan bahwa buku-buku tentang kearifan lokal Sulawesi Selatan yang ia terbitkan banyak dibeli oleh orang Bugis-Makassar perantauan. Mereka pada

⁵ Imam Cahyono, "Buku, Ilmu, dan Peradaban 'Kacang Goreng'", *Sinar Harapan*, 13 September 2003.

⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 2 April 2008 di Makassar.

umumnya memiliki motivasi untuk mempelajari sejarah dan kearifan lokal karena ingin mengidentifikasi dan mengenali jati diri dan kebudayaannya.

Dalam konteks inilah terlihat peran buku dalam pembelajaran kebudayaan. Melalui buku orang dapat menyerap informasi, pengetahuan, sejarah, ilmu, kebudayaan dan lain-lain. Seorang yang berkedudukan di Makassar dapat mempelajari kebudayaan orang Indian kuno di Amerika Selatan melalui buku; orang Eropa dapat mengetahui tradisi pengobatan tradisional orang Tibet, dan seterusnya. Dengan demikian, peran buku tidak hanya sekedar mendorong minat baca, memberikan informasi dan pembelajaran kebudayaan, melainkan juga sesungguhnya dapat mendorong perubahan sosial dan kebudayaan. Selain itu, buku juga secara langsung memperkenalkan berbagai warisan budaya yang tersebar di daerah-daerah di Sulawesi Selatan, yang tentu saja mendukung kepentingan program pariwisata budaya yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Harus diakui bahwa buku merupakan salah satu media yang efektif dalam mempromosikan objek-objek wisata.

3. Profil Penerbit yang Diamati

Dalam sepuluh tahun terakhir, banyak penerbit buku yang lahir di Makassar. Wanua Tangke menyebutkan bahwa periode pasca-Soeharto adalah momentum lahirnya sejumlah penerbit di Indonesia. Di Kota Makassar tidak kurang dari 20 penerbit yang lahir pada rentang waktu tahun 1998-2003.⁷ Beberapa di antaranya penerbit ini telah bergabung dalam IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)⁸, sebuah organisasi penerbit yang cukup mengakar di Indonesia.

⁷ Wawancara Wanua Tangke pada tanggal 2 April 2008.

⁸ IKAPI Perwakilan Sulawesi Selatan dibentuk pada tahun 2002 dan Alwy Rachman, Direktur LEPHAS diangkat menjadi kepala perwakilan. Pada tahun 2007 lembaga ini berubah status menjadi cabang dan memilih A. Wanua Tangke sebagai kepala cabang. Saat ini pengurus IKAPI berkonsentrasi melakukan penguatan manajemen dan rekrutmen anggota baru.

Tabel 1

DAFTAR ANGGOTA DAN BUKAN ANGGOTA IKAPI SULSEL⁹

No.	Nama Penerbit Anggota IKAPI SULSEL	Penerbit Bukan Anggota IKAPI
1.	Lembaga Penerbitan UNHAS	Penerbit UNM
2.	Pustaka Refleksi	UIN Press
3.	Intermedia Publishing	Baruga Nusantara
4.	La Macca Press	Era Media
5.	Telaga Zam-Zam	Penerbit Innawa
6.	Mitra Media	Pustaka Sawerigading
7.	Umitoha	To Accae
8.	Citra Adi Bangsa	Padat Daya
9.	Indobis	Penerbit Gora
10.		Pelita Pustaka
11.		Yapensi
12.		Masagena Press
13.		La Galigo Press
14.		Fahmis Pustaka.

Tiga dari penerbit anggota IKAPI dan dua bukan anggota yang diamati dalam tulisan ini adalah Pustaka Refleksi, Telaga Zam-Zam, La Macca Press, Penerbit Innawa, dan Masagena Press. Berikut ini adalah profil singkat dari kelima penerbit tersebut.

a. Pustaka Refleksi

Pustaka Refleksi adalah sebuah penerbit buku yang didirikan pada tahun 2000. Pendiri dari penerbit ini adalah Andi Wanua Tangke, seorang jurnalis senior di Makassar. Sejumlah buku terbitan awalnya, selalu melibatkan tiga orang penyunting, yaitu Moh. Yahya Mustafa, Anwar Nasyaruddin, dan Andi Wanua Tangke. Mereka adalah para wartawan yang kemudian beralih ke dunia penerbitan buku. Penerbit ini beralamat di Jl. Abdullah Dg. Sirua, Perum Swadaya Mas Blok A/7 Makassar.

Penerbit ini memiliki visi berobsesi menumbuhkan nilai-nilai dan budaya lokal untuk memberi peran dalam pembangunan

⁹ Sumber IKAPI SULSEL.

peradaban bangsa. Dari visi ini terlihat bahwa Pustaka Refleksi menjadikan budaya dan nilai-nilai lokal sebagai wacana idealismenya. Kesadaran yang mendasari wacana idealime tersebut adalah adanya kecenderungan semakin terpinggirkannya nilai-nilai budaya lokal oleh modernisasi dan globalisasi. Segmen pasar dari penerbit ini adalah masyarakat umum, peneliti dan mahasiswa.

b. Penerbit Zam-Zam

Penerbit ini didirikan oleh Prof. Dr. H. Kulla Lagousi, M.S., guru besar pada Universitas Negeri Makassar (UNM) pada tahun 1995. Latar belakang pendirian lembaga penerbit buku ini adalah kesadaran tentang tingginya kebutuhan buku ajar pada sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan. Pendirinya menyadari bahwa selama ini pengadaan buku-buku pelajaran sekolah didominasi oleh penerbit-penerbit dari Pulau Jawa. Padahal, kota Makassar memiliki sumber daya manusia yang memadai, yang memiliki kapasitas baik dalam menulis, editing, maupun menerbitkan buku. Visi dari penerbit ini ikut serta dalam mencerdaskan bangsa, dan secara khusus mengangkat muatan-muatan lokal Sulawesi Selatan, seperti sejarah lokal, bahasa daerah, sastra daerah, dan kearifan lokal. Penerbit ini telah menerbitkan ratusan buku pelajaran, yaitu buku pengayaan keterampilan (sains, beternak, teknologi sederhana, kewirausahaan, bercocok tanam, perikanan, kerajinan tangan, PKK, etika pergaulan, dll) dan pengayaan pengetahuan (IPA, pengetahuan umum, pengetahuan populer, sains pemula, Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, Budi Pekerti, sejarah, sastra, dll).

c. Penerbit Innawa

Penerbit ini didirikan oleh sekelompok aktivis mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 2000. Kelompok mahasiswa ini pada awalnya berupa komunitas kecil yang gandrung berdiskusi

tentang wacana sosial dan kebudayaan. Pendirian lembaga penerbit ini bermula dari keresahan dari "kelompok kecil" tersebut atas situasi pasca reformasi. Pada masa itu, sejumlah intitusi yang berperan sebagai penjaga moral, agen perubahan, pembela rakyat, dan pendorong perubahan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga mahasiswa, dan perguruan tinggi mengalami kemunduran, dan terjebak dalam politik wacana politik dan ekonomi. Oleh karena itu, mereka mulai memikirkan lembaga alternatif yang dapat berperan mencerdaskan masyarakat dan mendorong perubahan.

Penerbit ininnawa memfokuskan perhatian pada buku-buku sastra, pemikiran, dan kebudayaan yang ditulis oleh akademisi, peneliti, dan seniman di Makassar. Penerbit ini juga menerbitkan buku-buku terjemahan dari bahasa Inggris, yang ditulis oleh peneliti-peneliti asing. Dua buah buku terjemahan yang telah diterbitkan, yaitu *Warisan Arung Palakka; Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17* (judul asli: *The Heritage of Arung Palakka; A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*) dan *Tapak-Tapak Waktu, Kebudayaan, Sejarah, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan*.

Ininnawa tidak hanya lembaga penerbit, melainkan juga membangun komunitas pembaca dan penulis, yang mereka beri nama *biblioholic*. Kelompok ini juga melakukan diskusi mingguan dengan topik yang bermacam-macam. Dalam menerbitkan buku-bukunya, Ininnawa bekerja sama dengan beberapa lembaga donor, baik dari dalam negeri maupun lembaga asing. Lembaga ini beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan km. 9 Makassar.

d. La Macca Press

La Macca Press didirikan oleh Goenawan Monoharto dan Ajeip Padindang pada tahun 2001. Goenawan adalah seorang berlatar belakang pekerja seni sedangkan Ajeip adalah anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Golkar, yang juga pernah

aktif dalam kegiatan kesenian. Pendiri penerbit ini menyadari perlunya penerbit buku tentang seni dan kebudayaan di Kota Makassar. Mereka menyadari bahwa masyarakat Sulawesi Selatan memerlukan bacaan seni dan kebudayaan daerah. Sejauh ini, buku-buku yang mengisi toko buku dan perpustakaan di Makassar atau di kota-kota lain di Sulawesi Selatan didominasi oleh penerbit dari Jawa.

La Macca Press tergolong penerbit lokal yang sangat produktif. Penerbit ini sedikitnya telah menerbitkan 100 judul buku yang mengangkat isu seni dan kebudayaan. Lembaga ini sering bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga lainnya dalam bidang penerbitan. Lembaga penerbitan ini dipimpin oleh Goenawan Monoharto, beralamat di Jalan Pelita Raya 2 No. 1 Makassar.

e. Masagena Press

Masagena Press adalah salah satu divisi Yayasan Masagena. Lembaga ini didirikan pada tahun 1994 oleh Prof. Dr. H. Mattulada dan Prof. Drs. Burhamzah, MBA. Sejumlah aktivis mahasiswa angkatan 1980-an bersama sejumlah aktivis LSM adalah pemrakarsa pendirian lembaga ini. Tujuan utama pendiriannya adalah berusaha untuk ikut dalam proses pencerahan dan pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan tersebut adalah: 1) menggali nilai, pengetahuan, teknologi, sejarah lokal, sebagai aset pembangunan, guna memperluas wawasan bagi lahirnya pemikiran pembangunan yang berbasis kebudayaan; 2) menciptakan arus informasi timbal balik dalam upaya mencapai masyarakat makmur sejahtera.

Masagena Press pertama kali menerbitkan buku pada tahun 2002 dengan mendapatkan dukungan Program Pustaka Regional Makassar Sulawesi Selatan, kerja sama Yayasan Adikarya IKAPI dengan Ford Foundation. Penerbit ini cukup aktif menerbitkan buku-buku bertema sejarah kebudayaan dan nilai-nilai kearifan

lokal Sulawesi Selatan. Penerbit ini dipimpin oleh Kasmir (Kepala Divisi Penerbitan), beralamat di Komplek Perum Unhas Blok AB/20 Tamalanrea Makassar.

Jika dicermati profil kelima penerbit ini, terlihat bahwa mereka memiliki latar belakang pendirian dan segemen pasar yang berbeda. Ada yang pendiriannya diprakarsai oleh kalangan jurnalis (wartawan), aktivis mahasiswa, akademisi, seniman, dan aktivis LSM. Namun, mereka memiliki spirit yang relatif sama, yaitu membangun wacana kebudayaan dan menyediakan bacaan bermutu bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Selain itu, ada juga semacam upaya perlawanan terhadap gempuran industri perbukuan yang didominasi penerbit dari Pulau Jawa.

4. Penerbit Makassar dan Pembelajaran Kebudayaan

Seperti halnya dengan kondisi penerbit buku di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung dan Yogyakarta, penerbit Makassar juga memiliki masalah yang cukup kompleks. Hal ini terutama dialami oleh penerbit yang mengangkat tema-tema pemikiran dan kebudayaan. Mereka pada umumnya diperhadapkan pada sambutan pembaca. Jika penerbit tidak mampu memahami selera pembaca, maka akan berakibat pada kesinambungan terbitannya.

a. Lahirnya Penerbit Makassar

Di Makassar terdapat penerbit yang tergolong tua dan masih mampu bertahan hingga kini. Namun, mereka pada umumnya adalah penerbit universitas, di antaranya Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (LEPHAS), Lembaga Penerbitan UNM, dan Umitoha (penerbit Universitas Muslim Indonesia). Penerbit yang paling tua adalah LEPHAS, didirikan pada tahun 1968. Penerbit inilah yang pada umumnya menerbitkan hasil penelitian atau karya-karya para dosen Universitas Hasanuddin, yang kemudian menjadi bahan bacaan bagi para mahasiswa dan bacaan umum. Pada pertengahan tahun 1990-an muncul

beberapa penerbit, seperti Telaga Zam-Zam, Zamrud Khatulistiwa, dan beberapa lain yang kelahirannya terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pendidikan dasar dan menengah mengenai keberadaan muatan lokal dalam kurikulum. Sebagai konsekuensi dari kebijakan itu, mutlak diperlukan buku pelajaran tentang muatan lokal. Itulah sebabnya penerbit yang disebutkan di atas berperan besar dalam pengadaan buku pelajaran sekolah di Sulawesi Selatan.

Setelah bergulirnya reformasi, pada awal abad ke-21, muncul beberapa penerbit kecil yang memiliki oplah antara 500 – 1500 eksemplar per judul. Generasi penerbit yang masuk dalam kategori ini dapat dilihat pada tabel 1. Hal yang menarik dari penerbit baru ini adalah spirit yang dimilikinya, yaitu mengangkat wacana idealis, seperti seni, sejarah, kebudayaan, dan pemikiran. Kalangan seniman merupakan salah satu pihak yang mendorong penerbit lokal Makassar. Goenawan Monoharto, direktur La Macca Press adalah seorang seniman sangat konsisten menerbitkan buku wacana seni dan kebudayaan. Meskipun oplahnya terbatas, tetapi Goenawan yakin La Macca Press dapat bertahan dengan tema seni, sastra, dan kebudayaan.¹⁰ Penerbit lain yang diprakarsai oleh kalangan seniman adalah Baruga Nusantara, yang didirikan oleh Shaifuddin Bahrum juga memilih tema-tema seni dan kebudayaan.

Kalangan jurnalis (wartawan) juga mewarnai kelahiran penerbit baru di Makassar. Wanua Tanke dan Anwar Nasyaruddin (Pustaka Refleksi), Moh. Yahya Mustafa (Fahmis Pustaka), M. Ruslan (Era Media) adalah pentolan jurnalis, yang kemudian berkiprah di dunia penerbitan buku. Kalangan aktivis mahasiswa dan akademisi, di luar penerbit kampus (*university press*), seperti LEPHAS, Penerbit UNM, Umitoha, dan UIN Press. Telaga Zam-Zam dan Padat Daya adalah diprakarsai oleh akademisi dari Universitas Negeri Makassar, yaitu Kulla Lagousi dan Halilintar

¹⁰ Wawancara tanggal tanggal 15 April 2008 di Makassar.

Lathief serta La Galigo Press yang diprakarsai oleh Nurhayati Rahman dari Universitas Hasanuddin. Demikian pula kalangan aktivis mahasiswa melahirkan penerbit, seperti Inninawa, Era Media, Pustaka Sawerigading, dan Gora. Penerbit Inninawa didirikan oleh sekelompok kecil aktivis mahasiswa Universitas Hasanuddin, dengan pemrakarsanya Nurhady Sirimorok dan Hasriady yang sejak awal memilih wacana idealis, yang masih dipertahankan hingga kini. Era Media didirikan oleh M. Ruslan, aktivis mahasiswa periode 1990-an memilih tema sastra dan kebudayaan, Penerbit Gora yang didirikan oleh Muhary Wahyu Nurba, sastrawan dan aktivis mahasiswa Universitas Hasanuddin periode 1990-an memilih tema sastra dan kebudayaan. Ada pula kolaborasi antara mantan aktivis mahasiswa dengan aktivis LSM mendirikan penerbit Masagena Press juga memilih tema-tema sejarah kebudayaan dan kearifan lokal.

Satu hal yang patut dicatat bahwa selain momentum reformasi, program pustaka Yayasan Adikarya IKAPI berupa pemberian bantuan penerbitan buku telah mendorong lahirnya beberapa penerbit baru di Makassar. Alwy Rachman, mantan Ketua Perwakilan IKAPI Sulsel menyebutkan bahwa program pustaka tersebut merupakan pemicu (*trigger*) kelahiran penerbit baru yang kemudian memberikan warna perbukuan di Makassar.¹¹ Demikian terlihat dari proses kelahirannya, terlihat tiga kategori penerbit di Makassar, yaitu generasi pertama adalah penerbit universitas; penerbit yang diprakarsai oleh akademisi, penerbit yang diprakarsai oleh jurnalis dan seniman, serta penerbit yang diprakarsai oleh aktivis mahasiswa dan LSM.

b. Lingkungan Perbukuan

Terdapat beberapa pihak yang masuk dalam lingkungan perbukuan, di antaranya penulis, editor, *lay outer*, komunitas akademik, komunitas mahasiswa, komunitas peneliti, seniman,

¹¹ Wawancara tanggal 5 Mei 2008.

penerbitan, percetakan, toko buku, distributor, komunitas pembaca, dan lain-lain. Pihak-pihak inilah berperan dalam mendukung dunia perbukuan di kota Makassar. Di kota ini terdapat beberapa universitas yang selain melahirkan penulis dan editor, juga memiliki mahasiswa yang menjadi konsumen buku. Bahkan tidak sedikit dari komunitas kampus yang membuat kelompok pengkajian buku (bedah buku) dan kelompok diskusi.

Keberadaan toko buku di kota ini juga cukup banyak. Ada toko buku (TB) dari tahun 1970-an dan tahun 1980-an yang masih bertahan hingga kini, seperti TB Makassar Agung di Jalan Cenderawasih, TB Dunia Ilmu dan TB Bina Ilmu di Jalan Bulukunyi, TB. Toha di Jl. Sultan Alauddin, TB Trimedia di Jl. A. P. Pettarani, TB Palopo Ilmu di Jl. Pongtiku, TB Siswa di Jl. RW Monginsidi, TB. Papyrus di Jl. P. Kemerdekaan, TB Indah Jaya (distributor), dan sejumlah toko buku lokal yang lain, seperti di kampus-kampus.. Kemudian terdapat tiga toko buku yang besar, yaitu TB Promedia di Jl. Tentara Relajar, TB Gramedia di Mari Mal Jl. Dr. Ratulangi, TB Gramedia Panakkukang Mal. Toko buku Gramedia adalah jaringan toko buku terbesar di Indonesia dan memiliki koleksi yang cukup lengkap. Toko buku besar ini sering kali melakukan diskusi buku dengan melibatkan penulis, akademisi, mahasiswa, dan pelajar.

Di Makassar juga sering berlangsung pameran buku, baik yang diprakarsai oleh pemerintah kota Makassar, IKAPI, maupun diadakan oleh kelompok mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Makassar. Pelaksanaan pameran biasanya melibatkan penerbit besar dari Pulau Jawa seperti Erlangga Surabaya, Ganescha Bandung, Gramedia, Grasindo, Graffiti, Andi, Kanisius, Pustaka Jaya, LKiS, serta penerbit lokal di Makassar, seperti Pustaka Refleksi, Masagena Press, dan lain-lain. Pameran ini menyediakan fasilitas diskon yang jumlah mencapai 30 persen. Dalam satu terakhir ini, terdapat pameran buku di Mal Tello yang

menyediakan rabat 10-15 persen. Dalam pelaksanaan pameran ini, biasanya diadakan bedah buku dan diskusi.

Keberadaan penjual buku yang menarik di Makassar adalah penjual buku yang menggelar tikar di emperan-emperan kampus. Ada juga penjual buku "kagetan" yang hadir jika ada even-even besar, seperti pertemuan saudagar Bugis-Makassar, pertemuan-pertemuan ilmiah di kampus, dan lain-lain. Muhajar, penjual buku spesialis acara-acara seminar mengungkapkan bahwa biasanya, peserta even-even seperti ini, terutama mereka yang berasal dari luar Sulawesi Selatan ganrung membeli buku dengan tema-tema sejarah dan budaya lokal Sulawesi Selatan.¹² Ada pula jajaran kios buku yang terdapat di Jl. P. Kemerdekaan dekat kampus Universitas Hasanuddin, Jl. Urip Sumiharjo, menyediakan buku dengan harga murah.

Komponen perbukuan lainnya yang terdapat di Makassar adalah perpustakaan. Di kota ini terdapat perpustakaan daerah yang memiliki koleksi buku cukup lengkap, perpustakaan universitas, dan sejumlah rumah baca di Makassar. Khususnya mengenai keberadaan rumah baca, cukup mendorong minat baca masyarakat di Kota Makassar. Rumah baca ini memiliki koleksi buku yang diterbitkan oleh penerbit lokal Makassar.¹³ Di katakan demikian karena meskipun koleksinya terbatas tetapi jumlahnya cukup banyak dan tersebar di berbagai tempat sehingga mudah diakses oleh masyarakat, baik pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Program ini juga ditunjang oleh program pemerintah Kota Makassar yang dikenal dengan nama Gerakan Makassar Gemar Membaca (GMGM). **Program ini** dicanangkan pada tanggal 05 Juni 2006 oleh Walikota Makassar, H. Ilham Arief Sirajuddin dan Dewan Pembina Yayasan Pena Madani, Marwah Daud Ibrahim. GMGM dimaksudkan sebagai upaya untuk menumbuhkan gemar membaca. SDM yang

¹² Wawancara tanggal 5 April 2008.

¹³ Wawancara dengan Ali Samad, seorang pegiat buku di Makassar, tanggal 6 April 2008.

berkualitas lahir dari masyarakat yang gemar membaca. Untuk mendukung program ini, pemerintah kota Makassar mendirikan satu taman baca setiap kecamatan. Setiap rumah baca memiliki koleksi buku antara 500-1000 judul dengan jumlah anggota setiap taman baca antara 50-150 orang. Ada pula sekitar 60 taman bacaan yang diprakarsai rakyat. Selain itu, terdapat perpustakaan keliling yang memanfaatkan dua unit mobil. Di perpustakaan ini tercatat sekitar 60-80 pengunjung setiap hari.¹⁴

Sebuah LSM internasional, BaKTI sebuah lembaga cukup memiliki kepedulian terhadap dunia intelektualitas dan perbukuan di Makassar. Lembaga ini secara rutin melakukan diskusi dan bedah buku, baik yang diterbitkan oleh penerbit besar maupun penerbit lokal. Lembaga ini cukup terbuka dan menyediakan tempat bagi penerbit untuk melakukan peluncuran buku.

Kehadiran kafe buku juga merupakan fenomena menarik akhir-akhir ini di Makassar. Kafe buku disenangi oleh anak muda yang "gaul", yang senang makan-minum sambil membaca buku. Sejumlah kafe buku yang dapat disebutkan adalah kafe baca Biblioholic di Jl. Perintis Kemerdekaan km 9 No 76 (Depan Mercedes, PT Timur Permai) Makassar, rumah baca Lontarak, Jl Monumen Emmy Saelan No 5/43 Makassar, Kafebuku, Jl. Tentara Pelajar No 141 Makassar, Bookcholicafe, Jl. Dr. Sam Ratulangi No 136, Kafe Hitam Putih, Jl Perintis Kemerdekaan km 9 Hartaco Jaya, Kafe Buu Kuu, Jl Sehati No 4, dan Starbook Cafe, Jl Bougenville No 31, Panakukang Mas.¹⁵

Demikian terlihat peran komponen perbukuan di Makassar yang mendorong lahirnya buku-buku bertema sejarah dan budaya lokal. Universitas, LSM, organisasi seniman, dan wartawan menyediakan penulis dan editor yang handal. Pembeli buku dari kalangan relajar, mahasiswa, dan peneliti cukup mendorong

¹⁴ "Walikota Gemar Membaca Apa?", www.panyingkul.com, Rabu, 23-08-2006.

¹⁵ M. Aan Mansyur, "Berakhir Pekan di Kafe Baca", www.panyingkul.com, 10-08-2006.

produksi buku para penerbit lokal. Untuk mendapatkan atau membaca buku, di kota ini juga tersedia banyak toko buku, mulai dari penjual buku di emperan, toko buku lokal, hingga jaringan toko buku besar yang beberapa di antaranya menyediakan fasilitas diskon. Ada pula kegiatan pameran buku, bedah buku, yang cukup menunjang dinamika perbukuan di Makassar.

c. Kecenderungan pada Tema Kebudayaan

Penerbit Makassar, terutama yang didirikan sepuluh tahun terakhir sesungguhnya masih mencari bentuk. Dari lima penerbit yang diamati secara khusus memang masih diperhadapkan pada dua pokok persoalan umum penerbitan, yaitu antara tema terbitan dan pasar. Pada umumnya kelima penerbit ini menyadari jika masuk ke dalam tema-tema pemikiran, seperti filsafat, psikologi, teori-teori sosial, dan buku-buku non-fiksi lainnya atau buku-buku agama, buku panduan umum, dan buku pelajaran umum di sekolah mereka akan bersain dengan penerbit-penerbit besar dari Pulau Jawa. Sebagaimana diketahui bahwa sejumlah penerbit besar dapat menjual buku dengan harga murah karena produksinya berskala besar yang didukung oleh jaringan pasar yang luas. Hanya satu di antara penerbit Makassar yang diamati yang berani bertarung dengan penerbit luar adalah Telaga Zam-Zam. Penerbit ini memproduksi buku-buku pelajaran umum, yang memang dimaksudkan untuk membendung dominasi penerbit luar.

Ada pun keempat penerbit lainnya lebih memilih mengangkat isu-isu lokal, seperti sejarah kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal Sulawesi Selatan. Keempat penerbit ini menyadari bahwa wilayah itu lebih aman, selain dari ketersediaan penulis atau naskah buku maupun dari segi jangkauan pasar. Untuk melihat produktivitas dan kecenderungan tema terbitan dari kelima penerbit tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
DAFTAR PENERBIT DAN
JUMLAH TERBITAN DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR

No.	Nama Penerbit	Jumlah Judul Terbitan 5 Tahun Terakhir	Jumlah Judul Terbitan Buku Sastra	Jumlah Judul Terbitan tentang Sejarah Kebudayaan dan Nilai-Nilai Lokal
1.	Pustaka Refleksi	78	14	17
2.	Telaga Zam-Zam	212	21	13
3.	Penerbit Innawa	13	4	8
4.	La Macca Press	60	3	45
5.	Masagena Press	16	1	8

Jika diamati kecenderungan tema terbitan berdasarkan tabel di atas, tema sejarah kebudayaan dan nilai lokal lebih banyak dibandingkan dengan terbitan jenis fiksi dan cerita rakyat. Jumlah terbitan sejarah kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal berjumlah 91 judul, sedangkan jenis fiksi hanya 43 judul. Jenis terbitan fiksi berupa kumpulan cerpen dan antologi puisi yang diterbitkan oleh Pustaka Refleksi, Innawa dan La Macca Press, sedangkan cerita rakyat diterbitkan oleh Telaga Zam-Zam dan Putaka Refleksi. Buku fiksi yang lebih disenangi pembaca adalah jenis cerita rakyat. Hal ini terlihat dari cerita rakyat Budi Istihara yang diterbitkan oleh Telaga Zam-Zam, terdiri dari enam jilid ternyata telah mengalami cetak berulang-kali. Kulla mengakui bahwa cerita rakyat yang berisi pendidikan moral ini diperuntukkan sebagai bacaan untuk relajar, ternyata juga disenangi oleh masyarakat umum.¹⁶ Selain itu, terdapat jenis fiksi yang diangkat dari cerita rakyat, yang diterbitkan oleh Pustaka Refleksi, seperti kumpulan cerpen *Parakang*, juga cukup mendapatkan sambutan yang baik.

¹⁶ Wawancara tanggal 12 April 2008.

Kumpulan cerpen dan antologi puisi juga cukup banyak yang diterbitkan oleh penerbit Makassar yang ditulis oleh cerpenis dan penyair Makassar. Kecenderungan penerbitan ini dimungkinkan karena di Makassar memang terdapat cukup banyak sastrawan yang cukup produktif berkarya, dan di antara mereka adalah kalangan mahasiswa dan anak muda. Pustaka Refleksi menerbitkan dua buah novel, yaitu *Pangeran Bermuda Putih dan Sopirku* di tulis oleh Ishla Rasyid dan *Santri Lembah Hitam* ditulis oleh Sirajuddin Bantang. Novel yang pertama ditulis oleh seorang relajar SMA dan kemudian didiskusikan di kantor BaKTI, Jl. Lasinrang Makassar pada tahun 2007 lalu. Kumpulan cerpen *Tanda di Pohon Beringin* diterbitkan oleh La Macca Press juga mewarnai penerbitan fiksi oleh penerbit Makassar. Meskipun demikian, sebagaimana diakui oleh para penerbit bahwa minat pembaca terhadap karya-karya fiksi sangat rendah. Kecuali yang diperuntukkan sebagai buku bacaan di sekolah, buku fiksi, terutama antologi puisi sangat jarang diminati pembaca Makassar. Para penerbit juga mengakui bahwa pasar buku-buku fiksi di Makassar masih dikuasai oleh penerbit besar, seperti Gramedia, Balai Pustaka, dan Pustaka Jaya yang selain menyediakan dengan harga murah, buku-buku itu ditulis oleh sastrawan besar, seperti W. S. Rendra, Putu Wijaya, Ayu Utami, dan lain-lain.

Buku-buku terbitan penerbit Makassar yang cukup digemari adalah sejarah kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal. Buku terjemahan, *Warisan Arung Palakka; Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17* (cetakan pertama 2004) dan *Tapak-Tapak Waktu* (2005) ternyata cukup digemari. Khususnya buku terjemahan yang pertama dapat ditemui di rak-rak perpustakaan, baik milik pemerintah dan universitas maupun di rumah-rumah baca yang tersebar di Kota Makassar. Buku ini telah mengalami cetak ulang

sebanyak tiga kali.¹⁷ Buku sejarah kebudayaan yang cukup mendapatkan apresiasi adalah *Kota Kuno Palopo, Dimensi Fisik, Sosial, dan Kosmologi* (2003) dan *Bantaeng; Masa prasejarah ke masa Islam* (2007) yang diterbitkan oleh Masagena Press;¹⁸ serta *Catatan Harian Raja Bone* (2007) diterbitkan oleh La Macca Press.

Vikmar Linggi Allo, supervisor penjualan Gramedia Mal Panakkukang mengakui bahwa penerbit lokal mewarnai 15 hingga 20 persen total jumlah buku yang didisplay; dan mayoritas buku tersebut bertema kebudayaan lokal. Ada dua buku lokal yang menjadi *best seller* di Gramedia adalah terbitan Pustaka Refleksi, yakni *Siri' & Pesse': Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja* karangan Abu Hamid, dkk, yang penjualannya mencapai 20 eksampul per bulan. *Manusia Makassar* karya Hj. Sugira Wahid, yang terbit Mei 2007 menempati posisi kedua buku lokal yang diincar.¹⁹ Beberapa buku lokal yang lain, terbitan Pustaka Refleksi cukup laku di pasar, antara lain *Sejarah Orang Soppeng Orang Beradab* (cetakan pertama 2006); *Toraja Warisan Dunia* (cetakan pertama 2006); dan *Siri' dan Pesse* (cetakan pertama 2003) telah mengalami cetak ulang senyak dua kali. Bahkan satu judul buku Pustaka Refleksi, *Silariang dan Kisah-Kisah Siri'* (cetakan pertama ketiga 2007) telah mengalami tiga kali cetak ulang.²⁰

Buku-buku tema kebudayaan lainnya yang cukup banyak beredar perpustakaan dan toko buku adalah *Jagad Maritim Orang Makassar* (2006) ditulis oleh Darmawan Salman, diterbitkan Inninawa, Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan (2007), kumpulan tulisan (editor Andi M. Akhmar & Syarifuddin) diterbitkan oleh Masagena Press, *Permainan Rakyat Sulsel* (2003) dan *Seni*

¹⁷ Pengamatan penulis dalam melakukan kunjungan ke perpustakaan dan rumah-rumah baca di Kota Makassar antar 1 – 20 April 2008.

¹⁸ Wawancara dengan Muhajar, penjual buku "kagetan", tanggal 6 April 2008.

¹⁹ "Buku Lokal Mulai Menggeliat" www.fajar.co.id tanggal 10 Maret 2008.

²⁰ Sumber, Pustaka Refleksi, 2008.

Tradisional Sulsel (2003), *Peristiwa, Sejarah, Seni dan Budaya Sulawesi Selatan* (2007) diterbitkan La Macca Press.

Kecenderungan mengangkat tema sejarah kebudayaan dan nilai-nilai budaya lokal menunjukkan kekhasan yang dimiliki oleh penerbit Makassar. Kecenderungan ini sekurang-kurangnya disebabkan oleh dua faktor. Pertama, ada spirit untuk membangun wacana kebudayaan dari mereka, yang dimungkinkan oleh latar belakang dari para pengelolanya. Mereka adalah para aktivis mahasiswa, ilmuan (berlatar belakang ilmu budaya), jurnalis, seniman, dan aktivis LSM. Kedua, ketersediaan naskah buku dan jangkauan pasar. Di Makassar belum banyak terdapat penulis dengan mengangkat tema-tema lain. Begitu pula hanya dengan tema kebudayaan lokal mereka dapat mengatasi pasar, sebab untuk memasuki tema-tema umum akan berhadapan dengan penerbit besar dari Pulau Jawa.

Kecenderungan penerbit lokal ini ternyata secara langsung berdampak pada pembelajaran kebudayaan. Pembelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah dapat berjalan yang disebabkan oleh salah satu di antaranya ketersediaan buku pelajaran. Pembelajaran sejarah kebudayaan dan nilai-nilai budaya lokal bagi kalangan muda, terutama murid sekolah dasar sampai pelajar di sekolah lanjutan sangat penting artinya dalam membentuk kepribadian budaya mereka. Agar tidak mengalami alienasi, para generasi muda ini diharapkan mereka belajar kebudayaan sejak dini.

Demikian pula dengan tersedianya banyak jenis buku bacaan tentang sejarah kebudayaan dan nilai-nilai budaya lokal, baik yang ditulis oleh kalangan akademisi maupun yang bukan akademisi memungkinkan masyarakat kota Makassar dapat memilih bacaan yang mereka inginkan. Setidak-tidaknya keadaan ini dapat mendorong minat baca warga Makassar. Minat baca merupakan suatu yang kompleks yang melibatkan keterampilan membaca sekaligus lingkungan yang melingkupinya, dan keduanya saling

bertalian. Keterampilan dibentuk karena proses pembelajaran, sementara itu lingkungan membaca merupakan efek latar kondisi masyarakat sekitar yang berpengaruh kepada pembiasaan membaca.

Buku-buku terbitan penerbit lokal sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki dampak yang begitu luas, bukan hanya dapat mendorong minat baca masyarakat, melainkan juga ada beberapa di antara penerbit yang secara langsung mempromosikan objek-objek wisata, terutama wisata budaya di Sulawesi Selatan. Beberapa terbitan Pustaka Refleksi memuat tradisi dan ritual orang Toraja, komunitas adat di Tana Toa Kajang, tradisi pembuatan perahu di Bira Bulukumba. Penerbit La Macca Press dan Masagena Press menerbitkan buku yang memuat tempat-tempat bersejarah dan bangunan peninggalan kolonial di Sulawesi Selatan. Demikian pula Penerbit Innawa memperkenalkan tempat-tempat bersejarah di Kota Makassar dengan berbagai tradisi yang melingkupinya serta aneka tradisi makanan tradisional di Sulawesi Selatan.

5. Penutup

Penerbit Makassar adalah sejumlah penerbit lokal di kota Makassar yang kelahirannya terdiri atas dua fase. Fase pertama adalah kelahiran penerbit lama yang diprakarsai oleh universitas, seperti lembaga penerbitan Universitas Hasanuddin, LEPHAS, lembaga penerbit UNM, dan lembaga penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Umitoha. Penerbit universitas inilah yang menerbitkan buku-buku yang ditulis oleh para dosen dan peneliti yang sebagian besar diperuntukkan sebagai bahan bacaan mahasiswa. Fase kedua adalah penerbit yang lahir menjelang dan sesudah reformasi dan kejatuhan presiden Soeharto. Penerbit yang lahir pada fase kedua ini adalah Telaga Zam-Zam, Pustaka Refleksi, La Macca Press, Masagena Press, dan lain-lain.

Semangat reformasi cukup mewarnai kelahiran penerbit pada fase kedua yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, dapat dipahami jika para pendirinya berlatar belakang aktivis mahasiswa dan LSM, akademisi, jurnalis, dan seniman. Mereka pada umumnya mengelola wacana idealis dan tidak terlalu memperhatikan pasar. Spiritnya adalah melakukan pencerdasan masyarakat. Ada pula penerbit yang ingin membendung dominasi penerbit-penerbit dari Pulau Jawa. Namun, dalam perkembangannya beberapa di antara penerbit Makassar mulai memasuki industri perbukuan dengan mempertimbangkan aspek pasar.

Pasang surut perkembangan penerbit lokal di Makassar didukung oleh suatu lingkungan perbukuan yang cukup dinamis. Di kota Makassar terdapat banyak intelektual dari berbagai universitas, penulis-penulis lain dari kalangan seniman dan budayawan, jurnalis, dan aktivis mahasiswa yang senantiasa menyediakan naskah-naskah buku. Selain itu, di kota ini terdapat distributor buku, toko buku kecil maupun besar yang menyediakan fasilitas diskon, lembaga penyelenggara pameran buku, kafe-kafe buku, serta diskusi-diskusi atau bedah buku. Hal ini juga ditunjang oleh kebijakan pemerintah kota Makassar yang dikenal dengan nama Gerakan Makassar Gemar Membaca, yang menyediakan rumah baca beserta koleksinya di setiap kecamatan. Seiring dengan itu, juga terbentuk komunitas penulis dan pembaca.

Penerbit Makassar memiliki kecenderungan memilih tema-tema kebudayaan, seperti sejarah, sastra, dan nilai-nilai budaya lokal. Beberapa di antara buku ini cukup laku di pasar. Kecenderungan ini tentu saja berdampak pada upaya pembelajaran kebudayaan di kalangan masyarakat luas. Sekolah-sekolah dapat memilih buku terbitan penerbit lokal untuk dijadikan baik sebagai buku bacaan maupun sebagai buku pelajaran muatan lokal. Bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum

dapat memperoleh buku fiksi, sejarah kebudayaan, dan nilai-nilai budaya lokal yang tersebar pada toko-toko buku, kafe-kafe dan rumah baca, dan perpustakaan. Dengan demikian, buku-buku terbitan penerbit lokal, mendorong minat baca masyarakat dan pembelajaran kebudayaan dan mempromosikan warisan budaya dan objek-objek wisata di Sulawesi Selatan, dan di kota Makassar pada khususnya.

Daftar Pustaka

Adhe, 2007. *Declare! Kamar Kerja Penerbit Jogja (1998-2007)*. Yogyakarta: Komunitas Penerbit Jogja.

"Buku Lokal Mulai Menggeliat" www.fajar.co.id tanggal 10 Maret 2008.

Cahyono, Imam. "Buku, Ilmu, dan Peradaban 'Kacang Goreng'", *Sinar Harapan*, 13 September 2003.

Godber, Bill, Robert Webb, dan Keith Smith. 2000. *Pemasaran Buku Panduan Bagi Para Penerbit* (diterjemahkan oleh M. Arif Rokhman). Yogyakarta: Mitra Gama Widya.

Husein, Ahmad. "Kisah tentang Buku (Bag. 2):

Sekilas Perkembangan di Indonesia", www.duamata.blogspot.com/2006/08/kisah-tentang-buku-bag2-sekilas.html.

Mansyur, M. Aan. "Berakhir Pekan di Kafe Baca", www.panyingkul.com, tanggal 10-08-2006.

Ong, Walter J. 1982. *Orality and Literacy The Technologizing of the Word*. London: Methuen.

"Penerbit Tua, Bertahan karena Idealisme", suplemen "Pustakaloka", *Kompas* 19 Juli 2003.

"Walikota Gemar Membaca Apa?", www.panyingkul.com, Rabu, 23-08-2006.

WACANA KEKERASAN DAN MEDIA SERTA DAMPAKNYA BAGI PARIWISATA

Oleh :

Fierenziana Getruida Junus

Pengantar

Berdasarkan survai yang dilakukan Visa Internasional bekerjasama dengan Pasific Asia Travel Association (PATA), sebanyak 56 persen responden mengatakan banyak faktor yang menyebabkan wisatawan tidak mau datang ke Indonesia. Seperti isu terorisme, ketegangan politik, kriminal sampai biaya hidup yang tinggi dan penyakit seperti flu burung, masih menakutkan wisatawan. Menurut catatan Biro Pusat Statistik sebagaimana dikutip *The Jakarta Post*, kunjungan wisatawan ke Indonesia hingga tahun 2006 cenderung menurun. Tercatat pada tahun 2004 sebanyak 5,3 juta orang, namun pada tahun 2005 menjadi lima juta dan semakin menurun lagi sebanyak 2,5 persen pada tahun 2006. Namun patut disyukuri bahwa pada tahun 2007 menurut data departemen Pariwisata jumlah wisatawan ke Indonesia naik menjadi 5,5 juta.

Menurut survey tadi, Indonesia tidak lagi menjadi pilihan tujuan wisata di Asia, bahkan tidak masuk dalam urutan 10 besar. Indonesia bahkan dikalahkan oleh Thailand, Hongkong, Malaysia dan negara lain yang tidak diperhitungkan sebelumnya termasuk Singapura yang negaranya tidak lebih luas dari Kota Jakarta dan tidak punya objek wisata. Negara yang disurvei adalah Kanada, China, Jerman, Swedia, Inggris, Amerika dan Australia. Hal ini harusnya menjadi perhatian bersama baik pemerintah, pelaku bisnis di bidang wisata maupun masyarakat.

Indonesia pernah mencapai kejayaannya di bidang pariwisata dengan Pulau Bali dan Borobudur sebagai objek wisata dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan kedua objek wisata tersebut pernah mengangkat Indonesia di dunia internasional. Lewat pariwisata pula Indonesia dikenal banyak publik internasional dan menambah pendapatan negara lewat devisa yang tidak kecil. Tetapi kebanggaan itu kini semakin pudar, bukan karena daya tariknya yang menurun tetapi lebih karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Tragedi yang terjadi di Indonesia terlalu banyak, teror sampai bencana alam, ketegangan politik, demonstrasi buruh yang mengurungkan niat penanam modal dari luar negeri untuk berusaha di Indonesia, perilaku aparat yang sering kelewatan, keberanian rakyat terhadap penegakan hukum yang berlebihan, juga membuat situasi yang tidak menarik bagi orang asing.

Kekerasan bahkan lebih banyak mewarnai kehidupan kita. Semua yang terjadi di Indonesia diwarnai dengan kekerasan, pemilihan kepala daerah berakhir dengan perusakan. Dengan dalih kemiskinan rakyat memaksakan kehendak, menolak eksekusi pengadilan kalau perlu dengan membawa parang, celurit dan benda tajam lainnya, dan menantang aparat. Demonstrasi juga selalu mewarnai setiap tuntutan masyarakat demikian juga para tokoh politik yang terkadang bahkan sering menggunakan kekuatan massa pendukungnya menciptakan suasana yang tidak tenang.

Wacana Kekerasan dan Media

PBB menyatakan bahwa abad 20 adalah abad yang penuh dengan kekerasan, sehingga fokus penyelesaian persoalan yang ada adalah dengan meminimalisir konflik yang selalu berujung kekerasan. Kekerasan pun terjadi di berbagai dimensi kehidupan manusia. Di abad 21 ini, ternyata kekerasan bukan semakin

berkurang melainkan semakin meningkat dengan alasan dan keragaman bentuk bahkan akibat yang sulit dimengerti. Di Indonesia kabar kekerasan bukan lah merupakan hal yang luar biasa. Sudah menjadi santapan berita kita sehari-hari berbagai bentuk kerusakan yang berujung kekerasan. Coba simak berbagai peristiwa kerusakan pilkada di daerah-daerah yang berakhir pada perusakan dan kekerasan yang banyak menimbulkan korban.

Sebelum pembahasan lebih dalam mengenai kekerasan, ada baiknya kita mengetahui berbagai pemahaman mengenai kekerasan. Banyak pendapat yang dikemukakan sehubungan dengan kekerasan ini. Thomas Hobbes dan Jean Jacques Rousseau memiliki pemahaman yang bertentangan satu sama lain. Menurut Hobbes, kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia (*state of nature*), suatu keadaan di mana manusia dikuasai oleh dorongan-dorongan yang irasional dan anarkis serta mekanis yang saling membenci sehingga menjadi kasar, buas, jahat, dsb. Dari sinilah pendapat bahwa manusia adalah *homo homini lupus* atau manusia merupakan serigala bagi yang lain yang menimbulkan perang semua lawan semua (*belum omnium contra omnes*)¹. Sementara Rousseau menganggap manusia sebagai ciptaan yang polos, mencintai diri secara spontan, tidak egois dan tidak altruist. Interaksi manusia dengan lingkungan dan perubahan sosial lah yang membuat seorang manusia berubah menjadi seperti binatang. Jadi jika Hobbes melihat bahwa kekerasan sejak mulanya sudah bersemayam pada diri manusia Rousseau melihat bahwa peradabanlah membuat manusia melakukan tindakan kekerasan.

Johan Galtung merumuskannya dengan “kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi

¹ Frans Magnis Suseno (1987: 200-207)

potensialnya". Sementara menurut Mansour Fakih kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Dari berbagai pemahaman dan definisi tadi penulis merumuskan bahwa kekerasan dapat terjadi apabila ada kekuasaan (*power*) yang lebih pada satu pihak saja, dan kekuasaan tersebut digunakan dengan semena-mena kepada pihak lain yang dianggap lemah atau memiliki kekuasaan atau kekuatan yang kurang dari yang dimiliki pihak tersebut. Kekerasan terjadi jika ada dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain. Dominasi ini mencakup berbagai bidang kehidupan, sehingga kekerasan memiliki banyak dimensi, tidak hanya fisik tetapi juga psikis, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Walau demikian masih banyak orang yang memahami bahwa kekerasan hanya terjadi jika ada korban yang mengalami penderitaan fisik. Pemahaman seperti ini menggiring masyarakat kepada sebuah sikap permisif terhadap segala kekerasan yang bukan fisik yang ada di sekitarnya. Bahkan secara tidak sadar banyak orang menjadi agen pelanggeng dari kekerasan yang terjadi.

Menurut Haryatmoko (2007:126) dalam media dikenal setidaknya tiga tipe dunia, yaitu dunia riil, dunia fiksi, dan dunia virtual, sehingga kekerasan juga dibedakan sesuai dengan ketiga dunia tersebut yaitu kekerasan dokumen yang merupakan bagian dari dunia riil atau faktual, kedua kekerasan fiksi yang menunjukkan kepemilikan pada dunia yang mungkin ada; misalnya dalam Kisah fiksi, film, kartun, komik, dan iklan; serta ketiga kekerasan simulasi yang berasal dari dunia virtual, misalnya dalam permainan-video dan permainan *on line* (Nel, 2003 : 38 – 41).

Semuanya bukan merupakan kekerasan fisik, tetapi lebih merupakan kekerasan yang bersifat simbolik. Dan kekerasan ini bisa berlangsung dengan konstan, karena baik para pelaku

maupun korban, keduanya menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Kekerasan seolah sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan inheren di dalam bahasa, cara bertindak, dan cara berpikir.

Berikut penulis akan bahas satu demi satu tipe kekerasan ini. Yang pertama adalah kekerasan riil. Menurut Noel Nel sebagaimana dikutip Haryatmoko (2007 : 127) kekerasan riil juga disebut sebagai kekerasan dokumen. Kekerasan ini mengambil bentuk gambar yang dialami oleh pemirsa sebagai fakta kekerasan. Misalnya adalah berita atau tayangan tentang perkelahian, pembunuhan atau konflik sosial yang dapat mengundang reaksi emosional pada diri pembaca atau penontonnya. Kekerasan semacam ini bisa menimbulkan efek-efek yang saling bertolak belakang, yakni bisa mengakibatkan perasaan tak suka, sedih, atau malah sebaliknya perasaan tertarik dan simpati yang mendalam. Efek pemberitaan dengan pola kekerasan semacam ini juga bisa positif, yakni mengundang pembaca atau penonton untuk peduli terhadap penderitaan korban. Berita, tayangan dan gambar yang berbau kekerasan bisa mengajak pemirsa untuk mulai memikirkan kepentingan di luar dirinya.

Kekerasan dokumen ini dapat menciptakan efek emosional di dalam diri pemirsa apabila relasi antara penerima berita dengan berita yang disajikan sangat tepat, sehingga tidak menimbulkan trauma pada penerima berita yang justru menimbulkan sikap antipati (Haryatmoko, 2007 : 128). Pemilihan fokus yang tepat adalah salah satu cara untuk menimbulkan efek yang diinginkan. Dibanding dengan tayangan gambar, berita dalam bentuk tulisan memiliki kekuatan efek yang lebih besar sesuai keinginan penulis berita. Bahkan sering pembentukan opini terjadi pada tahap ini.

Jika hal ini terjadi kekerasan media pun memasuki ruang privat. Media menjadi aparat hukum yang prematur, apalagi jika sudah menjurus menjadi fitnah. Banyak kasus yang menunjukkan

bagaimana tersangka yang sebenarnya tidak bersalah justru menjadi bulan-bulanan media, dan sama sekali tidak mendapatkan pemulihan nama baik. Yang paling jelas adalah acara *infotainment*, di mana seringkali privasi seseorang dilanggar atas nama kebebasan informasi. Walaupun harus diakui, ada beberapa orang yang menggunakan cara tersebut untuk meningkatkan popularitas mereka.

Tipe kekerasan kedua adalah kekerasan fiktif (Haryatmoko, 2007 : 132). Kekerasan semacam ini dengan mudah kita temukan dalam tayangan-tayangan televisi, film-film aksi yang dibuat sungguh-sungguh mirip dengan konflik pada dunia riil. Hal semacam ini bisa menimbulkan trauma dan perilaku agresif bagi orang-orang yang menontonnya. Memang ada rekayasa teknologi di dalam tayangan semacam itu. Akan tetapi, dampaknya terhadap dimensi psikis pemirsa sangatlah besar, bahkan lebih besar daripada pertandingan tinju yang memang mengandung kekerasan riil. Fiksi mampu memproyeksikan dunia yang tidak ada dalam dunia nyata menjadi seperti nyata. Jadi, walaupun fiksi tidak sama dengan realitas, tetapi fiksi memiliki kemiripan dengan realitas. Bahkan fiksi mampu menawarkan ide-ide baru yang sebelumnya tidak terpikirkan di dalam realitas. Ironisnya kita menjumpai kenyataan bahwa banyak kejadian pembunuhan yang terinspirasi dari film-film thriller yang ditonton oleh si pelaku.

Tipe ketiga dari kekerasan adalah kekerasan simulasi, yang banyak kita temukan dalam permainan video games, baik yang *on line* maupun *off line* (Haryatmoko, 2007 : 133). Misalnya, dalam permainan yang bertema perang, pemain seolah-olah berada dalam situasi perang di mana dia harus melakukan penembakan atau pembunuhan terhadap musuh virtualnya. Dalam keadaan ini perasaan takut, jijik atau sedih tidak ada lagi karena yang pertama-tama ingin dilakukan oleh pemain adalah memenangkan peperangan dengan cara apapun. Inilah salah satu alasan, mengapa banyak sekali orang menyukai permainan video games

tersebut. Pemain dapat merasakan bahkan melakukan apa yang belum tentu bisa dia rasakan dan lakukan dalam dunia nyata.

Kenyataan ini lah yang mendorong para pelaku bisnis hiburan terus mengembangkan teknologi permainan. Fakta dikaburkan, pemain tidak diberi kesempatan untuk berpikir apalagi merefleksikan apa yang terjadi, selain bertindak dan merasakan kenikmatan berperan dalam dunia virtual tanpa memikirkan resiko dan konsekuensi hukum yang dihadapinya bila hal itu terjadi dalam kehidupan nyata. Tanpa sadar hal itu dapat mengubah pola pikir dan pola perilaku pemain itu sendiri dalam kehidupan nyata.

Jenis kekerasan lain yang juga sulit untuk dicegah adalah kekerasan simbolik yang ada di dalam pemberitaan media (Haryatmoko, 2007 : 135). Kekerasan ini disebut sebagai kekerasan simbolik, karena tidak ada akibat yang kelihatan secara langsung. Pada kekerasan simbolik ini, korban malah tidak menyadari dirinya sebagai korban. Korban tidak merasa dirinya telah dimanipulasi, dibohongi, dan bahkan dikuasai. Kekerasan simbolik ini dapat mempengaruhi cara berpikir, cara kerja, dan cara bertindak korban tanpa korbannya sendiri menyadarinya. Yang banyak bekerja dalam kekerasan ini adalah kata dan gambar, dan media yang paling efektif dalam melakukan kekerasan ini adalah iklan. Dalam iklan pemirsa menghadapi tampilan-tampilan yang menarik dengan warna-warni yang cerah dan pilihan kata-kata yang menarik untuk menggiring pemirsa menyukai suatu produk. Bahkan secara halus ideologi baru tentang suatu nilai dalam masyarakat disosialisasikan. Parameter tentang suatu nilai, apakah baik-buruk, cantik-jelek, bermutu-tidak bermutu, digaungkan berulang-ulang dan terus menerus menjadi semacam mantra yang menghipnotis pemirsa untuk meyakini iklan tersebut sebagai suatu kebenaran. Di sinilah media melakukan kekerasan simbolik pada penikmatnya.

Media dan Wacana

Para pluralis mengatakan bahwa media merupakan saluran yang tidak berpihak, bebas dan netral, di mana semua pihak dan kepentingan dapat menyampaikan posisi dan pandangannya secara bebas. Oleh kaum kritis pandangan semacam ini ditolak, kaum kritis memandang media tidak hanya sebagai alat bagi kelompok yang dominan tetapi juga memproduksi ideologi dominan. Lewat media gagasan kelompok yang dominan disebarkan, lewat media peran kontrol kelompok dominan dilegitimasi, lewat media terbentuk komunitas yang diinginkan, bahkan lewat media ideologi kelompok dominan dimapankan. Media tidak pernah bebas, media selalu menjadi subjek yang mengonstruksi realitas, lengkap dengan pemahaman, dan keberpihakan. Media sebagaimana yang diungkapkan oleh Benett (1982 : 288), adalah agen dari mediasi, tidak terpisah dari realitas sosial, media bahkan merupakan bagian dari realitas sosial yang turut membangun realitas tersebut sesuai dengan kepentingannya. Media juga dipandang sebagai wujud dari pertarungan ideologi antar kelompok yang ada dalam masyarakat. Media dalam hal ini bukan sarana yang netral yang menampilkan kekuatan dan kelompok dalam masyarakat sebagaimana adanya, melainkan menampilkan pemberitaan tentang kelompok dan ideologi yang dominan.

Menurut Stuart Hall (1982 : 67)) makna tidak bergantung pada struktur makna itu sendiri, melainkan pada praktik pemaknaan. Makna merupakan suatu produk sosial, suatu praktik, makna tidak mereproduksi, melainkan menentukan realitas melalui pemakaian kata-kata yang dipilih. Secara sederhana, media dapat dianggap sebagai reproduksi dalam bahasa, tetapi media juga memainkan peranannya dalam sebuah pertentangan sosial, sebuah perjuangan dalam memenangkan wacana. Sehingga pemaknaan yang berbeda merupakan arena

pertarungan makna di mana bahasa ada di dalamnya. Dalam pertarungan ini, tiap kelompok berusaha melahirkan pemaknaan yang mengunggulkan kelompoknya atas kelompok lain atau lawannya. Dalam hal ini media dapat dianggap sebagai alat bahkan arena perang antar kelompok.

Tiap kelompok berusaha menampilkan persepsi tentang suatu persoalan menurut pemaknaannya. Sebagai contoh, berita penangkapan Muhdi PR² (20/6/08) dalam beberapa media dibantah oleh pengacaranya. Menurut pengacara Muhdi peristiwa tersebut telah menjadi bias karena yang terjadi sesungguhnya bukan penangkapan melainkan niat baik Muhdi mendatangi kepolisian guna memenuhi panggilan untuk dimintai keterangannya. Oleh beberapa media berita tersebut di bawah *headline* "Penangkapan Muhdi", Juru bicara Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) partai yang dibentuk oleh Muhdi pun segera melakukan pembantahan yang sama seperti yang diungkapkan oleh pengacara Muhdi, bahwa peristiwa tersebut bukan penangkapan melainkan memenuhi panggilan kepolisian. Bahwa yang terjadi adalah politisasi yang dilakukan pemerintah karena pemerintah tidak mampu mencuri hati rakyat sehubungan dengan kegagalan pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

Ada berbagai kepentingan yang berperang lewat media dari peristiwa yang terjadi, bahasa dan media digunakan sebagai alat. Penggunaan kata yang berbeda "penangkapan" yang digunakan banyak media memberi pemahaman kepada pembaca bahwa Muhdi bersalah dan hal tersebut terbukti dengan adanya berita penangkapan. Karena kata "penangkapan" dalam kosa kata bahasa Indonesia bila dihubungkan dengan Polisi selalu merujuk pada orang yang dianggap bersalah, sangat jauh berbeda dengan

² Muhdi PR adalah mantan deputi V Badan Intelijen Negara yang menjadi tersangka konspirasi pembunuhan aktifis HAM Munir.

“memenuhi panggilan memberi keterangan” yang merujuk pada orang yang hanya menjadi saksi dalam suatu kasus tertentu.

Apa yang dilakukan juru bicara partai Gerindra adalah suatu upaya mengubah pemaknaan yang telanjur muncul lewat pemberitaan media. Karena ada kepentingan yang hendak diperjuangkan, yaitu menjaga nama baik serta citra partai yang baru saja dibentuk tersebut dan juga untuk memperjuangkan kebebasan pemimpin partai tersebut yaitu Muhdi PR. Mungkin untuk kasus ini kita sulit menebak kepentingan media, apakah menjadi pemberita yang netral, ataukah memihak kepada pemerintah, ataukah memihak kepada kepentingan lawan Muhdi sebagaimana yang dikuatirkan oleh kelompok Muhdi, atau malah kepentingan ideologi tiap media yang memperjuangkan keadilan dan sebagainya. Karena kasus ini masih bergulir pembaca dan penonton hanya dapat mempercayai apa yang diberitakan karena akses kebanyakan masyarakat hanyalah media.

Kasus tadi adalah contoh bagaimana pemaknaan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Pemaknaan tidak hanya sekedar muncul, begitu saja tanpa strategi yang dipersiapkan, paling tidak dalam suatu pemberitaan banyak yang harus dilakukan oleh pewarta berita seperti pemilihan berita, penentuan sudut pandang (*angle*), pemilihan kata, struktur kalimat dan sebagainya, dan semua tahap tersebut selalu berhubungan dengan kepentingan tiap pewarta terhadap berita yang ditampilkan.

Makna, menurut John Fiske (1990 : 164) tidak ditemukan dalam teks secara instrinsik, karena yang ditemukan dalam teks adalah pesan, sedangkan makna diproduksi lewat proses yang aktif dan dinamis baik dari para pembuat teks maupun pembaca teks. Proses pemaknaan dilakukan secara bersama-sama baik oleh pengirim maupun penerima teks dalam suatu sistem tata nilai yang lebih besar di mana mereka hidup. Di sinilah ideologi bekerja.

Ada tiga ranah definisi ideologi menurut Raymond William (Fiske, 1990 : 164) pertama, ideologi sebagai sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu. Definisi ini digunakan oleh kalangan psikologi yang melihat ideologi sebagai seperangkat sikap yang dibentuk dan diatur dalam bentuk yang koheren. Kedua, sebagai sistem kepercayaan yang dibuat yang bisa dipertentangkan dengan pengetahuan ilmiah. Ideologi dalam hal ini didefinisikan dengan seperangkat kategori yang dibuat dan kesadaran palsu di mana kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya untuk mendominasi kelompok lain. Dominasi dilakukan dengan cara mengontrol kelompok lain dengan ideologi yang disebarkan dalam masyarakat, sehingga kelompok yang didominasi menganggapnya sebagai sesuatu yang alamiah dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ketiga, ideologi dianggap sebagai proses umum produksi makna dan ide.

Dalam ketiga ranah tersebut, media memegang peranan penting di dalamnya. Media mampu melakukan sosialisasi ideologi yang dimiliki kelompok atau kelas tertentu, media pun dapat menjadi alat kontrol, dan alat kelompok tertentu untuk melakukan dominasi atas kelompok lain dan media juga menjadi alat produksi makna dan ide yang diusung oleh kelompok yang dominan.

Berikut kita akan membahas bagaimana media sebagai, alat pembentuk makna dan wacana bahkan alat pengusung ideologi menjadikan kekerasan sebagai komoditi pemberitaan.

Kekerasan sebagai komoditi media

Di dalam media yang ada di Indonesia, kekerasan telah menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang seolah lumrah yang disebut Hannah Arendt (2003) dengan banalisasi kekerasan. Kelumrahan tersebut muncul, karena kita sering terpesona dengan berbagai adegan kekerasan yang kita baca atau

saksikan. Sulit dipungkiri bahwa banyak orang yang menyukai adegan-adegan kekerasan. Hal ini terbukti dengan maraknya berbagai program-program televisi yang menghadirkan kekerasan, seperti *Buser*, *Patroli* bahkan di dalam dunia perfilman, film-film yang memiliki genre *action* menjadi tontonan yang sangat laris. Para penonton kadang sulit membedakan mana yang merupakan suatu realitas, dan mana yang merupakan rekayasa semata. Bahkan sering terjadi penonton tidak menyadari bahwa apa yang ditontonnya benar-benar sebuah rekaan, bukan sebenarnya. Kita dapat merujuk pada program *Smackdown* yang sudah menimbulkan banyak korban di kalangan anak-anak karena mereka meniru adegan kekerasan yang mereka saksikan tanpa tahu bahwa adegan tersebut hanyalah rekayasa.

Yang lebih menakutkan lagi adalah kenyataan adanya pendapat yang mengatakan bahwa kekerasan itu indah karena mampu menciptakan sensasi-sensasi kenikmatan. Kekerasan muncul sebagai salah satu dimensi seni pertunjukan, ketika pemirsa sulit memilah antara etis dan estetis. Kekerasan dalam pengungkapannya sering menimbulkan dua rasa yang bertolak belakang muncul serentak, rasa kagum dan juga muak bercampur aduk. Kekerasan bahkan menimbulkan sensasi kenikmatan sendiri ketika penonton ataupun pembaca merasa takut dan ngeri bahkan penasaran ingin mengetahui sebab dan akibat dari kekerasan itu lebih mendetail. Bahkan sering penonton merasa diajak untuk merancang sendiri kekerasan lain dalam benaknya ketika membaca atau menonton adegan kekerasan tersebut.

Ciri estetik dari kekerasan inilah yang menjadi jualan para pembuat berita, pembuat film atau para pekerja media. Keuntungan finansial tentu saja menjadi tujuan utama, dengan mengesampingkan berbagai konsekuensi moral yang harusnya dipertimbangkan masak-masak. Pandangan bahwa kekerasan adalah seni ini yang membuat adegan penuh kekerasan menjadi

tontonan bahkan hiburan, hal ini menimbulkan kekurangpekaan terhadap penderitaan korban. Menurut hasil studi tentang kekerasan dalam media televisi di Amerika Serikat oleh *American Psychological Association* (Haryatmoko, 2007 : 124) ada tiga hal yang dapat menjadi akibat langsung dari kekerasan. Yang pertama, tontonan dan perilaku kekerasan secara langsung bisa meningkatkan tingkat perilaku agresif penontonnya. Kedua, adegan kekerasan yang diulang terus menerus bisa membuat penontonnya, baik langsung ataupun melalui layar kaca, tidak lagi peka terhadap penderitaan korban yang mengalami kekerasan tersebut. Dan ketiga, kekerasan bisa menciptakan gambaran dunia yang reduktif, yakni bahwa dunia itu sepenuhnya jahat dan kejam, maka orang harus siap melakukan kekerasan untuk mempertahankan diri.

Tanpa mempertimbangkan dampak tersebut media seolah menemukan tambang emas dari sekian banyak kejadian kekerasan yang ada dengan mengumbar wajah kekerasan tersebut bahkan kadang tanpa suntingan yang sewajarnya. Kekerasan bahkan menjadi komoditi yang sangat menguntungkan bagi media, sehingga sadar ataupun tidak, media menjadi agen dari kekerasan yang terjadi. Media bahkan memapankan banalisasi kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.

Para pekerja media selalu berkilah bahwa media massa hanya memotret, melaporkan apa adanya, menyampaikan fakta. Padahal, ada begitu banyak fakta, begitu banyak sudut pandang, begitu banyak perbendaharaan kata sehingga media seharusnya memilih. Apakah menjadikan fakta peristiwa kekerasan sebagai potret kekerasan ataukah hanya sebagai laporan suatu kejadian dengan kemasan yang berbeda sehingga siapapun yang menyimak kabar tersebut melihat sisi positif dari berita tersebut. Pekerja media sering tidak menyadari bahwa pemberitaan yang mereka lakukan sering membentuk wacana bahkan ideologi pada pembaca, sehingga mereka harus lebih bertanggung jawab

dengan pemilihan berita ataupun pemberitaan yang mereka lakukan.

Jurnalisme damai vs Jurnalisme Perang

Sebagaimana istilah yang dipakai, “jurnalisme damai” (*Peace Journalism*) merupakan jenis jurnalisme yang lebih mengarah pada penyampaian informasi yang berdampak pada perdamaian. Istilah ini digunakan untuk membedakannya dengan “jurnalisme perang” (*War Journalism*) yaitu jurnalisme yang mengobarkan peperangan dengan penyampaian informasi yang bersifat provokatif, bahkan intimidatif. Penganut paradigma jurnalisme perang tidak hanya mengobarkan konflik tetapi juga memotret kekerasan secara vulgar, bahkan tanpa pertimbangan yang lebih bijak terhadap dampak yang ditimbulkannya.

Jurnalisme damai mula-mula diperkenalkan oleh Profesor Johan Galtung, ahli studi pembangunan pada sekitar tahun 1970. Galtung mengamati bahwa banyak jurnalisme perang yang mendasarkan kerja jurnalistiknya pada asumsi yang sama, seperti halnya para jurnalis yang meliput olahraga. Yang ditonjolkan hanyalah kemenangan dan kekalahan dalam “permainan kalah-menang” antar dua pihak yang berhadapan. Galtung kemudian mengusulkan agar Jurnalisme Damai mengikuti contoh dalam liputan masalah kesehatan. Seorang jurnalis masalah kesehatan akan menjelaskan perjuangan yang diderita seorang pasien melawan penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti tubuhnya, jurnalis tersebut akan menjelaskan kepada pembacanya tentang penyebab terjadinya penyakit tersebut, gaya hidup, lingkungan sekitarnya, faktor genetik dan lain-lain serta memberikan gambaran tentang kemungkinan penyembuhan penyakit tersebut dan bagaimana tindakan preventif yang dapat dilakukan. Demikian jugalah apa yang harus dilakukan oleh para jurnalis damai. Mereka akan melihat konflik

secara holistik dan lebih berorientasi pada proses terjadinya konflik serta memaparkan liputan yang berorientasi pada situasi kemenangan pada kedua belah pihak atau *win win solution*. Sebaliknya dengan jurnalis yang anti damai atau jurnalis perang, mereka cenderung akan memaparkan berita berfokus pada arena konflik kedua belah pihak dengan tujuan menang perang serta menghadirkan orientasi umum tentang pertarungan menang kalah. Jurnalisme perang mereduksi hanya ada dua pihak saja, jika seseorang bukan teman secara otomatis dia adalah musuh. Hanya ada kita dan mereka, semua fakta yang diberitakan berangkat dari sudut pandang kita, semua masalah berasal dari mereka

Dua hal tersebut tentu sangat kontradiktif. Yang satu menyajikan berita secara damai tanpa melakukan provokasi, sementara yang satunya lagi berfokus pada konflik kedua belah pihak dengan orientasi menang atau kalah sehingga tidak mengubah keadaan, malah akan berakibat menjadi lebih runyam.

Di dalam kalangan media, ada kecenderungan pemahaman bahwa Jurnalisme damai (*Peace Journalism*) adalah jurnalisme yang menyembunyikan fakta. Jurnalisme damai bagi beberapa kalangan media dianggap tidak memaparkan fakta yang sesungguhnya. Bagi mereka, fakta yang mengandung unsur kekerasan harus diungkapkan dengan wajah dan kemasan kekerasan, seolah-olah tidak ada alternatif kemasan berita yang lain. Padahal sebenarnya wartawan selalu memiliki pilihan untuk setiap fakta yang diperhadapkan padanya. Apakah berita perkelahian antar kelompok harus diberi judul yang memprovokasi kedua kubu atau berisi berita yang malah membakar amarah satu kelompok terhadap kelompok yang lain atau malah menyulut kemarahan di kedua pihak? Ataukah mencoba mengungkap fakta-fakta lain yang memperlihatkan kerukunan antar kelompok yang bertikai. Kasus kerusuhan Ambon, Poso, Sampit tidak lepas dari peran media. Saya tidak

bisa melupakan foto seorang pria Ambon yang berlumuran darah dikejar dengan celurit dan parang oleh beberapa lelaki berpeci yang dijadikan gambar sampul majalah Time, sementara gambar tersebut menjadi iklan majalah Time di beberapa *billboard* di pinggir-pinggir jalan di Besancon, Prancis. Foto yang menampilkan wajah kekerasan tersebut dimuat secara vulgar oleh Time pada bulan Desember 1998 lengkap dengan penyebutan korban sebagai Ambon Kristen dan pelaku pembunuhan yang Muslim. Banyak lagi berita dengan kemasan seperti itu yang muncul, dan konflik yang berujung kekerasan terus saja terjadi bahkan semakin meruncing. Bagaimana peran media dalam hal ini? Mungkin sulit menemukan bukti keterkaitannya, namun sulit juga dipungkiri bahwa kemarahan, kebencian mungkin saja timbul akibat pemberitaan yang berpihak yang dilakukan oleh media.

Penutup : Jurnalisme damai sebagai solusi masalah Pariwisata

Bangsa Indonesia yang memiliki keragaman dalam banyak hal, seperti suku, budaya dan agama menjadi negara yang sangat rentan dengan adanya konflik. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki 656 suku masyarakat yang menyebar dari wilayah Merauke hingga Sabang. Berbagai suku mendiami pulau-pulau, yang satu sama lain dipisahkan lautan, bahkan suku masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah daratan memiliki adat kebiasaan yang jauh berbeda. Bahkan diperkuat lagi dengan perbedaan agama yang sering menimbulkan gesekan-gesekan perbedaan yang berpeluang menghasilkan konflik.

Media yang dalam hal ini seharusnya waspada dan jeli dalam melihat konflik yang ada malah cenderung mementingkan keuntungan semata. Media lebih sering memilih menjadikan konflik yang berujung kekerasan sebagai komoditi yang layak jual. Media mengumbar kekerasan dalam pemberitaannya dengan asumsi bahwa kekerasan adalah komoditi yang sangat layak jual, bahkan jualan yang sangat laris. Pembaca cenderung dibuat percaya bahwa mereka menyukai kekerasan. Bahwa kekerasan yang ditampilkan lewat media adalah berdasarkan permintaan pasar, kepentingan penonton atau pemirsa. Secara tidak sadar masyarakat membiarkan media mendikte, menentukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan secara tidak sadar masyarakat menyetujui bahwa kekerasan itulah yang dibutuhkan sebagai tontonan. Bukan masyarakat yang menentukan apa dan tontonan yang bagaimana yang dibutuhkan.

Mungkin sudah harus dipertimbangkan dengan matang konsep jurnalisme yang lebih baik di negara kita, suatu genre yang antara lain dengan pemilihan sudut pandang yang memihak kepada pihak-pihak yang umumnya menjadi korban konflik seperti anak-anak, kaum perempuan dan orang-orang tua dengan

menunjukkan betapa buruknya dampak yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Media dapat memainkan perannya dalam hal ini, alih-alih menjadi alat untuk kepentingan perang dan konflik, media dapat menjadi instrumen pencipta perdamaian antara kedua belah pihak.

Di awal tahun 2007 lalu telah dilaksanakan Bali Global Forum, di mana tema yang diusung adalah "*The Power of Peace: Using the Tools of Information and Communication*". Sebuah tema yang mengangkat peranan media, dengan latar belakang pemikiran bahwa salah satu faktor yang menyebabkan dunia semakin rawan konflik adalah karena pemberitaan yang tidak berimbang dan cenderung sesat. Dengan latar belakang itu, Bali Global Forum mengimbau media menjadi mitra perdamaian dunia. Yaitu, antara lain dengan mempertimbangkan dampak pemberitaan atau tayangan yang mempromosikan kekerasan. Pemilihan Bali sebagai tempat penyelenggaraan bukan tanpa makna melainkan ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Bali pernah menjadi tempat yang sangat eksotik dengan keharmonisan kehidupan masyarakat yang berbeda-beda yang hidup di dalamnya. Namun hanya dalam waktu singkat Bali tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi wisatawan bahkan bagi warga Bali sendiri akibat teror Bom yang telah dua kali mengguncang Bali. Pulihnya citra Bali sangat penting bagi pulihnya pariwisata di Indonesia. Media dalam hal ini haruslah cermat melihat kecenderungan ini, media sebagai alat promosi bagi pariwisata Indonesia seharusnya mempertimbangkan citra Indonesia yang ingin ditampilkan pada dunia. Keterpurukan Indonesia dalam pembangunan pariwisata sudah seharusnya diatasi bersama. Penyebab keterpurukan pariwisata Indonesia seperti kekacauan dan kekerasan yang memperlihatkan wajah bengis dan sadis Indonesia yang ditakuti oleh wisatawan harus segera dieliminir.

Tidak hanya sebagai pencipta damai bagi pihak-pihak yang bertikai para jurnalis sebagai ujung tombak pencitraan wajah Indonesia lewat media seharusnya tidak hanya memperlihatkan *concern* nya terhadap pembangunan pariwisata di Indonesia hanya dengan melakukan promosi keindahan daerah-daerah wisata dan daerah-daerah yang berpotensi wisata yang ada di Indonesia, tetapi juga mampu menampilkan citra yang baik lewat pemberitaan fakta-fakta yang ada di Indonesia dengan mengusung jurnalisme damai. Jurnalisme yang akan mempromosikan wajah khas Indonesia yang ramah yang sejak lama sudah dikenal oleh masyarakat dunia. Sehingga ketakutan wisatawan terhadap terorisme, kekerasan, kekacauan yang membuat mereka urung menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata berubah menjadi keinginan yang kuat untuk menjadikannya tujuan wisata utama.

Daftar Pustaka

- Arendt, Hannah. 2003. *Teori kekerasan* (Ghafna Raiza W., penerj). Yogyakarta : Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan. (Buku asli *On Violence*)
- Bennett, Tony. 1982. *Media, Reality, Signification*. Dalam Michael Gurevitch et all (ed.) *Culture, Society and the Media*. London : Methuen.
- Schiffrin, Deborah. 2007. *Ancangan Kajian Wacana*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta : LKIS

- Fakih, Mansour. 2006. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fiske, John. 1990. *Introduction to Communication Studies*. London and New York : Routledge
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta : Penerbit Kompas
- 2007. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta : Kanisius,
- Stuart Hall. 1982. *Rediscovery of Ideology : The return of the Repressed in Media Studies*. dalam Michael Gurevitch et all (ed.) *Culture, Society and the Media*. London : Methuen.
- Suseno, Frans Magnis. 1987. *Etika Politik*. Jakarta : Gramedia
- Wattimena, Reza. A.A. 2007. *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Yogyakarta: Kanisius

PERANAN ISTANA DAN SANTRI KHALWATIAH TERHADAP KONSTRUKSI DAN PRODUKSI LONTARA ASSIKALAIBINENG SULAWESI SELATAN

Oleh:

Muhlis Hadrawi

FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS HASANUDDIN

2008

Pengantar

Tradisi pernaskahan merupakan ciri kultural yang istimewa pada masyarakat Bugis-Makassar. Ribuan jumlah naskah dalam wujud mikrofilm yang tersimpan pada Kantor Arsip Nasional Makassar menjadi bukti yang menunjukkan keunggulan tradisi tulis tersebut. Beberapa manuskrip produk masyarakat Bugis-Makassar mempunyai keistimewaan luar biasa, seperti / *La Galigo* sebagai karya sastra klasik terpanjang di dunia, *Assikalaibineng* yang disebut-sebut sebagai *kamasutra-nya* Bugis, atau *attoriolong* (historiografi) sebagai dokumen sejarah kerajaan yang memiliki nilai kebenaran yang tinggi, dan seterusnya. Keunggulan dalam beberapa, koleksi naskah lontara ini menjadi aset budaya Sulawesi Selatan yang penting dan pada sisi tertentu memiliki nilai yang kuat dalam memberi daya dukung kepariwisataan budaya, di Sulawesi Selatan. Hal yang tak kalah penting diungkapkan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam produksi teks dan tempat yang menjadi aktifitas penulisan (*scriptoria*) naskah-naskah lontara tersebut.

Sekaitan dengan hal diatas, tulisan ini akan membicarakan dua hal yang fenomenal pada masyarakat Bugis-Makassar, yakni

lontara Assikalaibineng dan tarekat khalwatiah. Jika Khalwatiah dikenal sebagai sebuah tarikat agama Islam, maka lontara Assikalaibineng adalah manuskrip Bugis yang secara khusus mengupas tuntas masalah hubungan seks suami-istri. Dua hal ini disebut fenomenal, sebab tarekat Khalwatiah merupakan tarekat yang sangat mencolok pada warna Islam di Sulawesi Selatan dan dominan diikuti oleh penduduknya khususnya kalangan etnis Bugis. Bahkan, tarekat Khalwatiah ini berada di tempat-tempat dimana terdapat komunitas Bugis dan Makassar yang besar di Nusantara seperti Riau, Malaysia, Kalimantan Timur, Ambon, dan Irian Barat¹. Meskipun demikian, pusat atau inti tarekat ini tetap berada di Sulawesi Selatan, yaitu di kampung Patte'ne, Kabupaten Maros. Demikian pula, dapat dikatakan bahwa hampir semua naskah-naskah yang berhubungan dengan tarekat Khalwatiah pada umumnya berasal dari Sulawesi Selatan, terutama jika dikaitkan dengan narna besar *Syekh Yusuf*.

Sementara itu, Assikalaibineng sebagai naskah lontara produk tradisi tulis dalam masyarakat Bugis dan Makassar, juga menjadi produk budaya yang amat penting. Lontara ini menjadi teks yang mengisi pengetahuan dan menjadi tuntunan bagi masyarakat Bugis dalam menyelenggarakan kehidupan berumah tangga. Apa dan bagaimana seks itu terlaksana dengan *benar* dan *mulia*? Assikalaibineng ini telah menyajikan resepnya dengan seksama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa substansi manuskrip ini dapat disandingkan dengan *kamasutra*-nya orang Bugis, walaupun dapat dikatakan bahwa kandungan

¹ Bruinessen, 1994:285. Statistik dari Departemen Agama (1973) pengikut tarekat Khalwatia Samman dan Khalwatiah Yusuf semuanya berjumlah 142.435 orang. Pokok penganut tarekat ini berada di Maros yang dikembangkan oleh tokoh kharismatik bernama Haji Palopo pada akhir abad ke-19. Jumlah pengikutnya yang sebanyak itu menunjukkan bahwa tarekat khalwatiah menjadi terikat dengan jumlah anggota paling besar pada masa itu, dan hingga sekarang (2008) penganutnya semakin meluas dan bertambah. Alhasil, para partai-partai politik dan pihak-pihak yang membutuhkan suara untuk kepentingan suksesi pemilu atau pilkada, umumnya sangat berupaya mendekati kelompok ini. Pilkada Gubernur Sulsel baru-baru ini menjadikan kelompok ini sebagai incaran pendekatan untuk memperoleh dukungan suara.

Assikalaibineng dalam beberapa sisi menunjukkan kelasnya lebih di atas daripada kamasutra India. Manuskrip ini sangat fenomenal dalam masyarakat, walaupun pada masa kini keberadaannya tidak dikenal lagi secara meluas di kalangan generasi muda masyarakat Bugis sendiri.

Untuk mengungkap pertautan tarekat Khalwatiah dan lontara Assikalaibineng, maka satu pertanyaan yang muncul, bagaimanakah keberadaan sebuah kelompok tarikat keagamaan seperti Khalwatiah Sulawesi Selatan memiliki peran dalam produksi dan konstruksi teks Assikalaibineng?

Dalam menjawab pertanyaan ini, maka tulisan ini akan membicarakan tentang tradisi penulisan naskah lontara dan persentuhannya dengan Islam. Sumber informasi yang diperoleh adalah melalui penelurusan kolofon-kolofon naskah berdasarkan kajian kodikologis lontara atau naskah Assikalaibineng.

Istana Sebagai Scriptoria Penting

Aktivitas penulisan atau penyalinan naskah-naskah Bugis rupanya berlangsung pula di istana-istana, bahkan menjadi skriptoria penting dalam produksi lontara. Istana-istana kerajaan Bugis yang berperan penting dalam produksi lontara misalnya Bone, Wajo, Soppeng, Sidenreng, Barru, Suppa' dan Sawitto. Skriptoria di istana kerajaan ini lebih spesifik pada produksi *lontara attoriolong* (kronik) dan *lontara bilang* (catatan harian) raja-raja. Disamping itu, tradisi penulisan naskah juga berlangsung di lingkungan pesantren atau pusat kegiatan keagamaan seperti di surau dan di rumah kaum agamawan. Tentu saja aktivitas ini melibatkan para santri atau ulama-ulama lokal. Scriptoria kedua ini sangat terkait dengan produksi lontara yang secara spesifik mengandung teks-teks keagamaan seperti fiqih, tuntunan ibadah, syariat-syariat, sastra, tasawuf dan seterusnya.

Berbicara mengenai peranan kelompok-kelompok keagamaan atau tarikat dalam produksi lontara, baik pada masyarakat Bugis, maupun masyarakat Makassar, mengungkapkan kepada kita bahwa kelompok Khalwatiah rupanya menjadi pihak yang memegang peranan penting terutama produksi lontara keagamaan khususnya tasawuf Islam. Penulisan kitab-kitab kuning dan aneka macam ajaran Islam yang meliputi, seperti: fiqih, syariah, tasawuf, sastra, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Penulisan kitab atau lontara Assikalaibineng ini juga tidak terlepas dari peranan kelompok keagamaan.

Assikalaibineng dianggap sebagai *kamasutra*-nya Bugis dan menjadi teks pengetahuan khas orang Bugis-Makassar, diperkirakan sudah muncul sebelum masuknya agama Islam di Sulsel. Namun demikian, dalam perjalanannya Assikalaibineng mengalami persentuhan dengan Islam sehingga mendapatkan semangat dan ideologi Islam sebagai rohnyanya. Hal ini menjadi sebuah prestasi penting bagi Islam sebab telah berhasil mengintegrasikan diri ke dalam sistem budaya seksualitas Bugis sehingga menampilkan ideologi dan norma-norma Bugis yang sejalan dengan prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Hasil integrasi tersebut serta-merta melahirkan sebuah formula Assikalaibineng, yakni tindak-tanduk atau lakuan seks ala Bugis yang kemudian mendapat kekuatan spiritual dari Islam. Gejala konstruksi teks Assikalaibineng ini menunjukkan prestasi penting yang dijalankan tokoh Khalwatiah yang telah melakukan strategi interaksi yang amat cerdas. Dikatakan demikian, sebab permasalahan hubungan seks adalah menjadi sebuah karakter budaya Bugis dan budaya paling peka dan tersembunyi di balik rahasia pribadi dan komunitas orang Bugis. Desain teks Assikalaibineng ini kemudian secara khusus dalam bahasa agama disebut dengan nama *Tasawuf Seks* atau *tasawupe'na allaibinenengnge*.

Desain Assikalaibineng sebagai teks pengetahuan hubungan suami-istri dalam masyarakat Bugis-Makassar, telah memolakan pihak khalwatiah sebagai kelompok yang telah berhasil "mengislamkan kelamin", bahkan menampilkan substansi ideologi Assikalaibineng sebagai sebuah teks tasawuf yang prestisius. Secara substantif naskah ini tidak dapat dilepaskan dari prestasi pengetahuan yang dikonstruksi oleh tasawuf kelompok Khalwatiah dalam memberikan wawasan dan pengetahuan penting dalam relasi hubungan suami-istri. Namun, pertanyaan yang patut diajukan adalah: bagaimanakah genealogi teks Assikalaibineng tersebut, siapakah yang merancanginya, dan bagaimana pula populasi manuskripnya berkembang pada masyarakat Bugis?

Pertanyaan-pertanyaan di atas menarik untuk dijawab dalam rangka melihat pertatutan penting serta peranan kelompok tarikat Khalwatiah dalam konstruksi ideologi dan spiritualitas lontara Assikalaibineng. Lagi pula pertanyaan di atas akan mengajak kita untuk mencoba menelusuri genealogi Assikalaibineng sebagai sebuah genre manuskrip Sulawesi Selatan. Pertanyaan ini akan mengajak pula kita untuk mengungkapkan peranan tarikat keagamaan Khalwatiah sebagai sebuah kelompok tarikat di Sulawesi Selatan yang paling besar dan terkuat di Sulawesi Selatan.

Tokoh Khalwatiah dalam Konstruksi Teks Lontara Assikalaibineng

Kolofon-kolofon naskah mengindikasikan bahwa, paling tidak pada abad XVIII telah teridentifikasi beberapa individu yang terkait sebagai kelompok tarikat Khalwatiah dan kalangan santri dan aristokrat Bugis-makassar. La Tenri Tappu² misalnya, dikenal

² La Tenri Tappu Ahmad Syaleh Syamsuddin Matinroe ri Rompegading, adalah raja Bone ke-23 memerintah pada tahun 1975-1812 M.

sebagai seorang raja di Bone, disebut sebagai penganut penting tarekat Khalwatiah. Beliau disebut-sebut sangat mendalami tasawuf Islam. Bahkan, ia berhasil melahirkan sebuah karya tulis berupa risalah yang berjudul *Tajang Patiroang* atau "*Nurul al-Hadi*". Subtansi risalah ini berbincang mengenai tarekat khalwatiah, tuntunan zikir dan wiridnya. Karya La Tenri Tappu ini menjadi naskah penting sebagai kelompok kitab kuning yang lahir dari aristokrat tinggi dalam kerajaan Bugis Bone, bahkan di Makassar (Gowa dan Tallo). Dia adalah seorang raja dan menjadi pengagum besar dan risalahnya tersebut didasarkan. pada ajaran-ajaran Syekh Yusuf Taj Al-Khalwatiah. *Tajang Patiroang* ini menjadi referensi umum bagi pihak-pihak yang akan mendalami tasawuf Islam dalam tarikat Khalwatiah.

Hal yang terkesan dari *Tajang Patiroang* karya raja Bone tersebut, bahwa pihak aristokrat Bugis di istana-istana, rupanya memegang peranan yang sangat penting dalam produksi pengetahuan dan literatur. Tentu saja ini menjadi sebuah fenomena produksi akademik yang berlaku di istana Bugis. Kesannya adalah, beberapa raja Bugis rupanya tidak saja sekadar melaksanakan tugas kerajaan mengurus politik dan pemerintahan, tetapi ia juga membuat karya tulis sebagai karya intelektual atas kesufiannya. La Tenri Tappu adalah salah seorang raja Bone atau bangsawan Bugis yang mendalami agama Islam dan produktif membuat tulisan.

Bahkan, satu setengah abad sebelum masa La Tenri Tappu, raja Bone ke-12 bernama La Tenripale' (1611-1625) telah mendalami memperdalam ilmu agamanya. Ia bersama dengan pengikutnya berkali-kali melakukan kunjungan ke Gowa untuk urusan pendalaman agama Islam. Demikian pula La Maddaremmeng Matinroe ri Bukaka (1625 - 1640), sebagai salah seorang raja Bone juga mendalami ilmu agama. Bahkan dia berhasil mengonstruksi lembaga adat Sara' kerajaan hingga pada arung Lili (*kerajaan bagian*). Lembaga Sara' ini adalah sebuah

struktur adat dalam kerajaan Bone yang secara khusus menyelesaikan masalah hukum-hukum syariat dalam kaitannya dengan masalah kehidupan masyarakat.

Terdapat pula sebuah naskah lontara yang substansinya secara khusus berisi teknis pelaksanaan *do'a*, *wirid*, dan *tatacara zikir* dan *ratib* yang khas dilakukan dalam tradisi khalwatiah Samman³. Kolofon naskah menuliskan seorang tokoh penting yang menjadi sumber teksnya dengan nama Muhammad Fudail. Adapun Muhammad Fudail ini dalam silsilah keturunannya adalah putra dari Abdullah Al-Munir. Muhammad Fudail disebutkan pernah menetap di Barru. Dan, dialah dipercaya sebagai orang yang mendirikan tarekat Khalwatiah Samman di wilayah Sulawesi Selatan. Naskah yang disebut ajarannya bersumber dari Muhammad Fudail tersebut ditemukan di Palattae, Bone Selatan, dari tangan seorang bangsawan setempat.

Keberadaan naskah ini mengindikasikan bahwa masyarakat di daerah Bone juga menjadi wilayah penyebaran tarikat khalwatiah yang sangat penting, di samping Barru dan Maros sebagai wilayah kediaman tokoh dan konsentrasi atau pusatnya. Meskipun demikian komunitas penganut Khalwatiah di kabupaten Bone sebenarnya berada di Bone bagian utara, yakni di kecamatan Dua Boccoe dan Tellu Siattingnge. Dalam hal lain yang terkait dengan Khalwatiah, yakni bukti-bukti karya dan peranan tarikat Khalwatiah dalam produksi lontara Bugis dan Makassar rupanya dapat dijumpai pula pada lontara hubungan suami-istri yang disebut Assikalaibineng. Assikalaibineng yang

³ Kelompok penganut tarikat khalwatiah pada dasarnya terbagi dua yaitu tarekat khalwatiah Yusuf dan Khalwatiah Samman. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda seperti hal amalan, organisasi, dan komposisi pengikutnya, kecuali kesamaan nama. Dalam hal zikir misalnya, tarikat Khalwatiah Yusuf melafzkan di dalam hati, sementara Khalwatiah Samman melakukannya dengan suara keras dan ekstatik (kepala dan badan bergoyang). Tarekah Khalwatiah Samman memiliki organisasi terpusat, semua gurunya tunduk kepada pimpinan pusatnya di Maros; sementara Khalwatiah Yusuf tidak memiliki pimpinan pusat. Tarikat Khalwatiah Yusuf juga berciri aristokratis sebab pengikutnya banyak berasal dari kalangan bangsawan Bugis atau Makassar, sementara tarekat Khalwatiah Samman lebih merakyat.

mengalami konstruksi ideologi agama telah menjadi teks pendidikan hubungan seksual yang mempunyai kekuatan spiritual Islam. Dengan demikian teks Assikalaibineng pada sisi lain adalah sebuah naskah yang dapat dikategorikan sebagai lontara berdimensi agama. Dikatakan seperti itu sebab, terdapat versi assikalaibineng yang sama sekali menunjukkan substansi pokok sebagai pelajaran hubungan seks.

Peranan tarikat Khalwatiah dalam penulisan dan produksi teks-teks agama dalam manuskrip Bugis sangatlah penting. Secara khusus, produksi naskah-naskah keagamaan, khususnya yang berhubungan dengan tarikat Khalwatiah dengan dua kelompok yang berbeda, menunjukkan perkembangan sejarah dan tradisi penulisan naskah-naskah agama, tidak lagi menjadi monopoli bagi agamawan di luar istana. Akan tetapi, pihak-pihak bangsawan atau aristokrat yang juga mendalami ilmu keagamaan, khususnya pada tarekat Khalwatiah, rupanya menjadikan istana menjadi skriptoria naskah agama. Hal itu telah ditunjukkan oleh La Tenri Tappu raja Bone pada abad ke-18. Dua hal yang terkesan dari gejala ini, yakni keberhasilan santri atau ulama Islam mendekatkan agama Islam kepada istana, tetapi pada sisi lain juga menjadi tanda bahwa kaum bangsawan memiliki perhatian tinggi dan mampu mendalami ilmu keagamaan disamping menjalankan peranan politisnya sebagai aristokrat dalam kerajaan. Gejala ini menandakan sebuah prestasi tinggi yang berhasil diciptakan oleh kalangan bangsawan-bangsawan Bugis Makassar dalam tasawuf agama dan produksi lontara.

Fenomena ini juga terjadi pada produksi teks Assikalaibineng. Dapat disebutkan bahwa basis genealogi konstruksi teks Assikalaibineng yang diperankan oleh Khalwatiah, memang pada awalnya, dilakukan pihak ulama atau tokoh-tokoh keagamaan. Pernyataan ini sangat dikuatkan oleh kolofon-kolofon

naskah lontara, misalnya pada naskah Assikalaibineng yang berkode rol 45 no.23.⁴

Keterangan dalam katalog naskah menyebutkan bahwa nama penulis naskahnya beralamat di Soppeng. Akan tetapi, tidak terdapat keterangan tambahan pada kolofon naskah yang sangat meyakinkan perihal hubungan antara pemilik dan penyalin naskahnya. Kecuali, kesan yang dapat terpahami atas kedua nama orang tersebut, yakni penulis dan penyalin naskah, dipastikan sebagai individu yang latar sosialnya adalah masyarakat golongan biasa, dalam hal ini bukan dari kalangan bangsawan tinggi. Meskipun demikian, hal yang lebih penting dari keberadaan kolofon naskah tersebut tetap memiliki sisi penting, khususnya dalam rangka melihat pertautan antara Assikalaibineng dengan masyarakat Bugis.

Kolofon ini secara khusus mengungkapkan hal penting mengenai Khalwatiah di Sulawesi Selatan yang memosisikan Assikalaibineng sebagai salah satu teks dan pengetahuan yang unik dalam *thuruq*-nya. Situasi ini paling tidak berlangsung pada awal abad XX, situasi dimana republik Indonesia berada dalam cengkeraman kolonial Belanda. Keterangan kolofon yang pertama pada naskah di atas menyebutkan nama *Syaikh Abdullah* sebagai salah seorang yang turut menjadi sumber pengetahuan Assikalaibineng. Kolofonnya menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara Assikalaibineng dengan *thuruq* (penganut tarekat) Khalwatiah, khususnya dari golongan Khawatiah Samman di

⁴ Kode naskah dalam rol berdasarkan pada Katalog Induk Naskah-Naskah Sulawesi Selatan berjudul *Bunga Rampai Lontara*. Teksnya menggunakan bahasa Bugis dan Arab. Jumlah halaman naskah sebanyak 350 halaman, menggunakan aksara Lontara Bugis dan Arab. Teks Assikalaibineng dalam naskah C ini berada pada bagian awal, yaitu pada halaman 1 - 4 1. Volume teks Assikalaibineng pada naskah ini tergolong banyak dibandingkan dengan teks Assikalaibineng lainnya. Keterangan fisik naskah menurut katalog: ukuran sampul 6,5 x 11 cm; ukuran bidang kertas 16,5 x 10,5 cm; blok teks 12,5 X 8 cm; dan jumlah baris tiap halaman 6 - 13 baris. Bahan naskah berupa kertas watermark gambar *Gajah* dan *Pohon Kelapa*. Sampul naskah terbuat dari karton yang berwarna biru dan diberi lapisan. Naskah dijahit dengan benang, namun ada beberapa halaman yang sudah hilang.

Sulawesi Selatan. Redaksi kolofon pada naskahnya, terungkap sebagai berikut :

transliterasi

Makkoniro pappeesseqna to pegauq engngi adanna Saraq-e annessanessana Syaikh Abdullah ri nenena ri anaqna ri eppae/pasalamaq engngi ri wanuwae duwae/(rol 43 no 25, h. 10)

Terjemahan

Demikianlah penjelasan kepada orang yang menjalankan ajaran Syariat yang diterangkan oleh Syaikh Abdullah terhadap ke empat anaknya, yang memberikan kemaslahatan terhadap dua kampung.

Nama Syaikh Abdullah tersebutkan dalam kolofon, namun tidak ada keterangan lebih jauh mengenai siapakah sebenarnya dia. Untuk itu nama ini patut ditelusuri dalam catatan-catatan dari sumber lain. Dalam catatan sejarah mengenai silsilah tokoh Khalwatiah di Sulawesi Selatan, disebutkan bahwa nama Syaikh Abdullah adalah seorang ulama tarekat Khalwatiah Samman di Sulawesi Selatan. Dia menjadi salah seorang yang berperan penting dalam penyebaran tarekat ini pada masyarakat di Sulawesi Selatan. Silsilah mengungkapkan bahwa Syaikh Abdullah adalah putra Haji Palopo alias Abdul Al-Razzaq, pengikut tarekat Khalwatiah Samman. Dia adalah turunan bangsawan rendah dari Bone. Syaikh Abdullah⁷ pernah menjabat sebagai guru tertinggi dan bergelar Puang Lompo dalam silsilah penganjur tarekat Khalwatiah Samman. Syaikh Abdullah meninggal pada tahun 1964.

¹⁶ Wawancara tanggal 12 April 2008.

Syaikh Abdullah mengalami masa-masa sulit sebagai tokoh Khalwatiah pada zamannya, sebab tekanan-tekanan Belanda beserta tuduhan-tuduhan masyarakat yang mendiskreditkan khalwatiah. Konon ada beberapa ulama lain yang merasa terancam wibawanya karena popularitas khalwatiah meningkat, serta-merta melimpahkan tuduhan bahwa terikat Khalwatiah sebagai ajaran bid'ah dan melakukan praktik asusila; bahkan dia difitnah melalui surat kaleng bahwa ia bersekongkol melawan Belanda. Karena situasi yang sangat kompleks yang dialami terikat Khalwatiah tersebut, menyebabkan Syekh Abdullah perlu dicatat sebagai tokoh penting dalam eksistensi dan keberlanjutan Khalwatiah di Sulawesi Selatan hingga sekarang yang masih menunjukkan sebagai kelompok keagamaan yang paling besar dan paling kuat.

Syekh Yusuf dan Genealogi Teks Assikalaibineng

Koleksi-koleksi manuskrip Assikalaibineng⁸ menunjukkan varian-varian yang berbeda, namun pada dasarnya kode-kode spiritual Islam yang terkandung di dalam teksnya tetap menunjukkan ciri khas Khalwatiah. Oleh karena itu, kelompok Khalwatiah menjadi pihak yang sangat penting dalam genealogi dan konstruksi teks Assikalaibineng. Dalam konteks itu maka secara ketokohan dalam mengungkapkan *sanad* atau genealogi Assikalaibineng menunjukkan bahwa Syekh Yusuf menjadi sumber pengetahuan yang pokok. Pernyataan ini secara meyakinkan ditunjukkan dalam kolofon kedua dalam naskah rol 45 no. 23 ini, yakni pada halaman 14 terdapat kata-kata yang menyebutkan nama Syaikh Yusuf sebagai seorang ulama terbesar dari Sulawesi Selatan sekaligus dikenal sebagai penganjur tarekat Khalwatiah dan menjadi sumber ajaran

⁸ lihat table naskah pada lampiran.

Assikalaibineng. Redaksi kolofon yang dimaksudkan tersebut dipetik dalam tulisan sebagai berikut :

Transliterasi

*makkuniro pattarona Petta Tosalamaq-e ri Gowa riasengnge
Sajheq Toripaccingie rahasiana ri Yalla Taal (ASK C h. 14)*

Terjemahan

*demikianlah ketetapan dari Petta Tosalamaq-e di Gowa
bernama Syekh yang disucikan rahasianya oleh Allah Taala.*

Assikalaibineng rupanya menjadi bagian pengetahuan yang diajarkan oleh Syekh Yusuf - yang di dalam teks disebutkan gelarnya bernama *Petta Tosalamaq-e*. Kolofon ini menjadi kode yang sangat penting sebab memberikan informasi kepada kita mengenai asal-usul teks pengetahuan Assikalaibineng yang berkembang di dalam masyarakat di Sulawesi Selatan, baik pada orang Bugis, maupun pada orang Makassar sendiri. Meskipun hingga kini ada sebagian di antara kita yang belum pernah melihat tulisan atau karya Syekh Yusuf yang khusus menyajikan ilmu *jima'* (bersenggama), namun dapat dikatakan bahwa sanad pengetahuan ini yang berkembang di Sulawesi Selatan sesungguhnya bersumber dari ajaran-ajaran Syekh Yusuf. Premis ini sepertinya tidak akan mendapat penentangan, bahkan dapat disepakati. Hanya saja, masalah sanad ini memunculkan pertanyaan tentang apakah arketif pengetahuan Assikalaibineng Bugis-Makassar diperkenalkan langsung oleh Syekh Yusuf kepada masyarakat Sulawesi Selatan? Ataukah pengetahuan ini diperkenalkan melalui perantara muridnya?

Agaknya kemungkinan yang kedua lebih menempati titik kebenaran, sebab dalam catatan sejarah menyebutkan bahwa Syekh Yusuf tidak pernah menginjakkan kakinya di Makassar setelah dia pulang dari tanah Arab yang diperkirakan pada tahun

1670. Dia menetap di Banten dan menjadi seorang penasihat spiritual dan menantu dari Sultan Ageng Tirtayasa. Ia merupakan pimpinan kharismatik bagi orang-orang Makassar dan Bugis yang bermukim di Banten pada masa itu. Pada tahun 1683 dia ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Seylon, kemudian ke Tanjung Pengharapan di sanalah beliau meninggal, tepatnya, pada tahun 1699.

Ajaran-ajaran Syekh Yusuf yang berkembang di Sulawesi Selatan dipastikan masuk dan menyebar secara meluas melalui murid-muridnya, termasuk didalamnya, lontara Assikalaibineng. Teks Assikalaibineng secara genealogi pada awalnya berada dalam format teks berbahasa Makassar, kemudian teksnya ditransfer dalam versi bahasa Bugis. Meskipun demikian, dalam perkembangannya menunjukkan versi bahasa Bugis mengalami perkembangan yang lebih pesat dan lebih variatif. Konstruksi teks Assikalaibineng dalam bahasa Makassar dan Bugis sangat dimungkinkan terjadi, sebab murid-murid Syekh Yusuf lebih didominasi oleh orang Bugis dan Makassar. Murid-murid inilah yang berperan penting dalam melakukan pendokumentasian ajaran-ajaran Syekh Yusuf dalam bentuk manuskrip, termasuk pengetahuan seksualitas.

Abdul Al-Bashir atau yang dikenal dengan nama Puang Rappang adalah salah satu tokoh Khalwatiah di Sulawesi Selatan yang penting sebagai murid dari Syekh Yusuf. Puang Rappang ini disinyalir yang menjadi salah seorang perawi teks Assikalaibineng yang kemudian menjadi babon terhadap beberapa naskah j Assikalaibineng. Sebab, sebagaimana kolofon naskah ASK C seperti yang dikutip di atas, menyebutkan bahwa pengetahuan Assikalaibineng yang diperoleh (didengar) dari Syekh Yusuf. Sementara kolofonnya menyebutkan nama Puang Rappang sebagai penulis.

Puang Rappang adalah *khalifah* utama Yusuf Makassar di Sulawesi Selatan. Dia disebut sangat dekat dengan Syekh Yusuf.

Dia bertemu dengan Syekh Yusuf di Makkah dan kemudian menjadi pengikutnya yang paling setia. Bahkan dia ikut pula bersama dengan Syekh Yusuf ke Banten pada tahun 1678. Setelah penangkapan Syekh Yusuf oleh Belanda, barulah dia pulang ke Makassar dan menetap di Rappang. Puang Rappang atau Abdul Al-Bashir disebutkan meninggal pada tahun 1733. Oleh karena kedekatannya dengan Syekh Yusuf, maka jenazahnya dibawa dan dimakamkan di Gowa di samping makam Syekh Yusuf di Lakiung (Ligtvoet, 1880: 201).

Semanjak peristiwa penangkapan dan pengasingan Syekh Yusuf, mengakibatkan pengikut dan terutama khalifahnya kembali ke Makassar. Peristiwa ini kemudian menjadi momen penting penyebaran ajaran-ajaran Syekh Yusuf di Sulawesi Selatan. Penerus-penerus ajaran Syekh Yusuf di Sulawesi Selatan selain dilakukan oleh para muridnya termasuk pula keturunannya sendiri, yaitu Muhammad Jalal. Penyebaran ajaran Syekh Yusuf dengan tasawuf Islam berdasarkan ajaran-ajaran khalwatiah berkembang pesat, baik pada daerah-daerah Makassar, maupun di daerah Bugis. Paling tidak hingga pada abad XX kekuatan dan pengaruh ajarannya berikut masih sangat kuat pengaruhnya yang diperankan oleh tokoh-tokoh kharismatik khalwatiah. Tersebutlah misalnya Puang lallo dari Garassi di Maros dan Puang Ngemba dari Tomarajennang. Keduanya disebut-sebut sebagai keturunan Bugis.

Di pihak lain dia juga dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan aliran Khalwatiah di kalangan aristokratis Bugis dan Makassar. Umumnya pengikutnya berasal dari kalangan bangsawan Bugis dan Makassar. Demikianlah sehingga latar belakang komunitasnya menjadi salah satu identitas yang membedakan dengan tarekat Khalwatiah Samman yang lebih terbuka bagi rakyat umum. Perbedaan lain mengenai kedua aliran tarekat Khalwatiah Syekh Yusuf dan Khalwatiah Samman⁸ adalah cara berzikir. Khalwatiah Syekh Yusuf bercirikan zikir diam,

sedangkan Khalwatiah Samman berciri zikir keras (bersuara). Keterangan pada kolofon tersebut memberikan kesimpulan bahwa Assiklaibineng dikenal oleh dua kelompok Khalwatiah tersebut di Sulawesi Selatan.

Sebenarnya Khalwatiah hanya satu di Sulawesi Selatan, yang pada awalnya diperkenalkan oleh Syekh Yusuf, bahkan dialah yang diklaim sebagai orang yang pertama memperkenalkan tarekat ini di Indonesia, dan tentu saja di Makassar. Di Sulawesi Selatan Syekh Yusuf digelar dengan nama kehormatan Al-Taj Al- Khalwati, artinya *Mahkota Tarekat Khalwatiah*. Pada perkembangannya Khalwatiah kemudian menjadi dua thuruq atau kelompok tarikat setelah berkembangnya tarikat ini di kalangan masyarakat umum yang kemudian dikenal dengan Khalwatiah Samman. Tarikat Khalwatiyah Samman ini dalam catatan sejarah⁸ dikembangkan di Sulawesi Selatan oleh Haji "Abd Razak Puang Palopo. Aliran ini muncul kemudian setelah kemunculan Khalwatiah Yusuf dan disinyalir dengan mudah diintegrasikan ke dalam jaringan Khalwatiah Yusuf yang sudah ada.

Penutup

Produks, lontara atau naskah-naskah Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan menunjukkan besarnya peranan dan andil kaum aristokrat di istana kerajaan. Bukan hanya naskah-naskah sejarah seperti *attoriolong*, akan tetapi naskah yang memiliki dimensi keagamaan juga banyak lahir dari bangsawan-bangsawan Bugis. Tersebutlah misalnya raja Bone seperti LaTenri Tappu (1775 - 1812) dan La Tenripale' (1611-1625). Lontara seks Assiaklaibineng juga banyak lahir dari istana,

⁸ Cabang tarikat Khalwatiah Samman berhubungan dengan Muhammad bin 'Abd Al-Karim Al-Samman, adalah cabang baru dan mempunyai asal-usul yang sama sekali berbeda dengan khalwatiah. Hanya saja tarikat ini di Sulawesi Selatan kemudian berafiliasi dengan Haji 'Abd Al-Razak alias Puang Palopo. Lihat Bruinessen 1994: 290-293.

contohnya seperti lontara Assikalaibineng yang menjadi koleksi La Pawawoi Karaeng Sigeri yang dirampas oleh Belanda pada tahun 1905, dimana kodeksnya kini terkoleksi di Perpustakaan Nasional RI di Jakarta.

Skriptoria naskah Assikalaibineng berasal dari Istana, dan melibatkan kalangan bangsawan Bugis dan Makassar pada masa lampau. Selanjutnya, pihak yang juga sangat penting dalam konstruksi teks Assiakalaibineng adalah peranan tokoh Khalwatiah, baik kalangan Khalwatiah Yusuf, maupun Samman. Populasi naskah Assilaibineng termasuk sangat banyak, baik dalam bahasa Bugis, maupun dalam bahasa Makassar. Selain itu, skriptoria lontara Assikalaibineng serta naskah lainnya yang melibatkan peranan istana kerajaan Bugis, khususnya pada kerajaan Bone, sangatlah tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. Prof Dr. 1983. *Persepsi Orang Bugis, Makassar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*. Bandung: Alumni.
- Bruinessen, Martin Van. 1999. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Caldwell, Ian. 1988. *South Sulawesi AD. 1300-1600: Ten Bugis Texts*. A Thesis Submitted for the degree of Doctor of Philosophy of The Australian National University.
- Casparis, J.G. 1975. *Indonesian Phaleography A History of Writing in Indonesia firom the Beginnings to C.A.D 1500*. Leiden: E.J. Brill.
- Cassirer, Ernst. 1990. *Manusia dan Kebudayaan. Sebuah Esei Tentang Manusia*. Seri Filsafat Atma Jaya. Terjemahan oleh Alouis Nugroho. Jakarta: Gramedia.
- Djamaris, Edwar. 2002. *Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: CV. Monasco.
- Enre, Fachruddin Ambo. 1999. *Ritumpanna Welenrennge, Sebuah Episode Sastra Bugis Klasik Galigo*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3). 2005. *Kembang Setaman Perkawina. Analisis Kritis Terhadap Kitab Uqud al-Lujayn*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Hadrawi, Muhlis. 1999. *Mitos dan Perilaku Seksual. Tinjauan Terhadap Lontarak Bugis Assikalaibineng*. Penelitian Dana BRI, Direktorat Pemb. Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat Direktur Pend. Tinggi Depdikbud.
- Hadrawi, Muhlis dan Yasminy. 2004. *Pola Hubungan Suami-Istri dalam Aktivitas Seksual, Tinjauan dalam Lontarak Assikalaibineng*. Penelitian Dana BRI, Direktorat Pemb. Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat Direktur Pend. Tinggi Depdikbud.
- Heawood, Edward. 1950. *Historical Riview of Watermarks*. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
- Ihsan, Sofa. 2004. *In The Name of Sex, Santri, Dunia Kelamin, dan Kitab Kuning*. Surabaya: JP Books.
- Ikram, Achadiati. 1997. *Filologia Nusantara*. Jakarta: Pustaka. Jaya.
- . *Petunjuk Praktis Penelitian Filologi*. Makalah, belum disunting.
- Kern, R. A. 1989. *I La Galigo*. Seri Terjemahan KITLV-LIPI. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Koninklijk Instituut Voor Taal Land-en Volkenkunde. *Bydragen* 1993, Deel 149, 3e Aflevering. Jakarta: KITLV Press Agency.
- Malinowsky, Bronislaw. 1963. *The Family, A Mong The Australian Aborigines*. London: University of London Press.

Maswinara, I Wayan. 1997. *Kama Sutra*. Surabaya: Paramita.

Mulyadi, S.W.R. (Editor). 1991. *Naskah dan Kita*. Lembaran Sastra Edisi Khusus. Depok: Fakultas Sastra UI.

Naskah dan Tradisi Lisan Sumber Visi Kultural. Kompas ed. 30 Juli 2005.

Paeni, Muklis dan Kathryn Robinson. 1985. *Agama dan Realitas Sosial*. Ujungpandang: LEPHAS.

Paeni, Muklis dkk. 2003. *Katalog Induk Naskah Nusantara Sulawesi Selatan*. Jakarta: Arsip Nasional R.I (ANRI): Jakarta.

Pudentia, 2005. *Kearifan Lokal dalam Tradisi Lisan dan Tertulis*. Makalah dalam Seminar Naskah Kuno Nusantara Sebagai Warisan Bernilai Luhur, Perpustakaan Nasional R.I. Salemba. 11 - 12 Mei 2005.

Purwadaksi, Ahmad. 2004. *Ratib Samman dan Hikayat Syekh Muhammad Samman, Suntingan Naskah dan Kajian Isi Teks*. Jakarta: Jambatan.

Rahim, A. Rahman. 1995. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujungpandang: Lembaga Penerbitan Unhas (LEPHAS).

Robson, S.O. 1978. *Pengkajian Sastra-Sastra Tradisional Indonesia, dalam Bahasa dan Sastra thn. IV Nomor 6* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

——— S.O. 1988. *Principles of Indonesian Philology*. Dordrecht Providence: Foris Publication.

- Rujiati, Sri Wulan. 1994. *Kodikologi Melayu di Indonesia*. Lembar Sastra edisi khusus No.24. Fak. Sastra Universitas Indonesia.
- Soebadio, Haryati. *Penelitian Naskah Lama Indonesia*. Bulletin Yaperna edisi 7, 11. Juni. 1975.
- Sudjiman, Panuti. 1994. *Filologi Melayu*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sukatno, CR Otto. 2002. *Seks Para Pangeran: Tradisi dan Ritualisasi Hedonisme Jawa*. Jakarta: Bentang.

Lampiran

Tabel 1

Rol. Kode	Judul MS dlm Katalog	Teks Assikalaibineng Menurut Hasil Pembacaan Ulang	Bahasa Aksara	Keterangan Naskah
22/33	Bunga Rampai Keagamaan	Tidak terdapat teks Hubungan seksual, kecuali pengajaran pelaksanaan akad nikah.	Bugis & Arab Lontara & Arab.	24 hlm. Pemilik: Muh. Arsyad Hasan. Alamat: Welado Kab. Bone.
32/8	Doa-Doa dan Shalawat	Tarikat cahaya Isjalala dan hubungannya dengan hubungan suami istri. Doa-doa dan ucapan dalam melakukan hubungan suami istri.	Bugis & Arab.	25 hlm. Alamat: Siddo, Barru. Pemilik: Hamzah.
33/9	Tarikat dan Keluargaan	Mantra pemikat. Waktu yang baik hubungan suami istri. Ucapan Nabi tentang Seks.	Bugis & Arab Lontara & Arab.	28 hlm. Pemilik: H. Badawi. Alamat: Batu Pute, Kab. Barru
33/18	Nikah Batin dan Tanda-Tanda Tubuh Manusia	Tidak terdapat tatacara hubungan seksual, kecuali tentang nikah batin.	Bugis. Lontara.	20 hlm. Pemilik: H. Badawi. Alamat: Batupute, Kab. Barru
33/32	Doa-doa Tatacara Bersuami istri	Pintu-pintu kelamin perempuan dan teknik menyentuhnya.	Bugis & Arab. Lontara & Arab.	45 hlm. Alamat: Jl. Andalas Kota Makassar
33/40	Bunga Rampai Keagamaan dan Nikah Batin	Tatacara hubungan suami-istri. Pengobatan kelamin.	Bugis & Arab. Lontara & Arab.	103 hlm. Pemilik: Muh. Tahir. Alamat: Tanriedong.
45/23	Bunga Rampai Lontara	Kisah kehidupan seksual Ali dan Fatimah. Titik ransangan perempuan pada malam tertentu. Tatacara hubungan seks. Teknik ransangan dan menyentuh pintu kelamin. Cara mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan.	Bugis & Arab. Lontara & Arab.	350 hlm. Pemilik: H. Abdullah K. Alamat: watampone- Bone. Penulis: La Paddaga Abd. Rahim.
45/27	Fikhi	Tatacara melakukan hubungan suami-istri.	Maakssar & Arab. Serang & Arab.	44 hlm. Pemilik: Dg. Gassing. Alamat: Buhung, Tanete, Selayar.
46/24	Doa-doa dan Assikalaibine-ngeng	Bacaan dan tatacara hubungan suami-istri.	Arab & Bugis. Lontara & Arab.	52 hlm. Pemilik: M. Said. Alamat: Desa Barowa, Kec. Buwa, Luwu.
48/5	Doa-doa Tarekat Sakkeq Rupa.	Tatacara berhubungan suami-istri. Tatacara dan bacaan sesudah berhubungan suami-istri. Tata cara supaya istri dicintai oleh suaminya.	Bugis dan Arab Lontara & Arab.	40 hlm. Pemilik: Nira Ambeqna Baso. Alamat: Desa Sakti, Kec. Buwa, Kab. Luwu.
48/18	Bunga Rampai Agama dan	Tempat/ posisi mani pada waktu atau malam-malam tertentu.	Bugis. Lontara.	108 hlm. Pemilik: Nira

	Budaya	Perilaku/tatacara Tatacara hubungan suami-istri menurut tuntunan dari Saydina Ali dan Fatimah.		Ambeqna Baso. Alamat: Desa Sakti, Kec.Buwa, Kab. Luwu.
52/24	Bunga Rampai Budaya dan Keagamaan	Hari-hari yang baik dan buruk untuk melakukan hubungan suami-istri.	Bugis & Arab. Lontara & Arab.	28 hlm. Pemilik: N. Rahman. Alamat: Jl. Sunu, Makassar.
56/23	Bunga Rampai Agama dan Budaya	Tatacara melakukan hubungan suami-istri	Bugis, Mks, & Arab. Lontara & Arab.	64 hlm. Pemilik: Muh. Saleh Mullia. Alamat: Lembang, Kajang, Bulukumba.
60/26	Bunga Rampai Keagamaan	Ilmunisa, Tatacara hubungan suami-istri.	Bugis & Arab. Lontara & Arab.	39 hlm. Pemilik: Raja-raja Banawa, Pudjananti. Alamat: Donggala.
69/21	Lontara Akkalabinengeng	Perilaku dan bacaan hubungan suami-istri. Aneka mantra pemikat lawan jenis.	Bugis. Lontara.	8 hlm. Pemilik: Rahmawati Tajuddin Alamat: Jl.T.Patempo
69/29	Lontara Allaibinengeng	Prosedur hubungan suami-istri. Doa-doa dalam hubungan suami-istri.	Bugis & Arab. Lontara & Arab.	66 hlm. Pemilik: A. Muh. Ali. Alamat: Watmpone, Kab. Bone.
0/22	Baca-baca Hubungan Suami Istri	Mantra bagi wanita agar suaminya tidak menyeleweng.	Bugis. Lontara.	13 hlm. Pemilik: H. Bakri Alamat: Tempe, Wajo

Tabel 2

Rol. Kode	Judul MS Dalam Kataloq	Teks Assikalaibineng Hasil Pembacaan ulang	Bahasa Aksara	Keterangan Naskah
11/18	Catatan Harian	Tatacara menyentuh pintu faraj wanita.	Bugis. Lontara.	146 hlm. Pemilik: H. Ahmad.
26/13	Ilmu Tarekat	Tarekat sulapaq eppaq pada tubuh manusia. Gambar anatomi vagina 11 seri.	Bugis & Arab. Lontara, Serang, & Arab.	154 hlm. Pemilik: I Tiwi. Alamat: Jl. Urip Sumoharjo, Ir.3 Mks. Penyalin: Tanriale. Asal MS: Mampi, Kab. Polmas.
35/15	Bunga Rampai Budaya	Tatacara mandi junub. Perilaku sebelum melakukan hubungan seks untuk membangkitkan gairah wanita serta doa-doanya. Tatacara agar awet muda setelah hubungan seks.	Bugis & Arab. Lontara & Arab.	52 hlm. Pemilik: Amiruddin. Alamat: Paccerrakkang-Daya.
47/18	Pemanis (Cenninrara)	Perilaku/persiapan wanita sebelum melakukan hubungan suami-istri.	Bugis. Lontara.	26 hlm. Pemilik: A. Anton Pangeran. Alamat: Jl. Merdeka No.1 Palopo.

PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP PENANAMAN DAN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAMAI DI INDONESIA

Oleh :

Prof. Dr. Abdul Hakim Yassi, Dipl.TESL., MA

Fakultas Ilmu Budaya,

Universitas Hasanuddin, Makassar

PENGANTAR

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong *multicultural country* karena terdiri dari kurang lebih 700 *ethnic groups* (Sugono, 2007). Tentu saja, fenomena ini memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif sebagai negara multikultur, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam yang hidup dan bertumbuh subur mulai dari Sabang sampai Marauke. Kekayaan ini tentu saja merupakan suatu aset yang tak ternilai harganya bagi bangsa Indonesia sehingga bisa menjadi salah satu sumber devisa negara yang sangat prospektif khususnya dalam bidang pariwisata. Sebaliknya, sisi negatif sebagai negara multikultur menempatkan Indonesia sebagai negara yang rentan dengan kerusuhan yang salah satu pemicunya adalah konflik antar *ethnic groups*. Masih jelas dibenak kita beberapa konflik antar etnik yang terjadi di Indonesia, misalnya konflik antara suku Madura dan suku Banjar di Sampit Kalimantan, konflik antar suku di Papua, Ambon, NTB, dan lain sebagainya.

Artikel ini membahas bagaimana peran lembaga perguruan tinggi, melalui misinya yang dikenal dengan istilah Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat, mampu untuk menanamkan, menciptakan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya damai di Indonesia. Hal ini sejalan dengan poin 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 4, yang berbunyi, "Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat". Kemudian, dipertegas oleh Rektor ITB, Joko Santoso (2005) dalam sambutannya pada acara Temu Tahunan ke-8 Forum Rektor Indonesia dan Konvensi Kampus ke-2, 17-19 Mei 2005 yang mengatakan bahwa kampus adalah bagian dari masyarakat tertinggi, oleh karena itu menjadi wajar apabila kampus menjadi garda terdepan dalam penegakan tata nilai.

Sebelum membahas ketiga poin dari Tri Darma Perguruan Tinggi tersebut, sebaiknya terlebih dahulu kita menyimak bersama apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan damai. Kata damai secara sempit bisa berarti terbebas dari, atau penghentian suatu perang atau kerusakan. Sebenarnya, kata damai bisa lebih dari sekedar makna seperti itu. Damai juga bisa berarti resolusi dari sebuah konflik dengan tanpa kekerasan, dan kemudian membangun suatu nilai-nilai yang universal didambakan oleh semua manusia di bumi ini seperti respek terhadap kehidupan, hak asasi manusia (HAM), kemerdekaan, kesetaraan, dan keadilan. Ini berarti dibutuhkan kemampuan seluruh komponen bangsa dari sebuah negara dalam mengatur suatu kehidupan yang sehat dan teratur dalam suatu lingkungan yang aman dan berkesinambungan dengan kesempatan pengembangan ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya.

Selanjutnya, yang dimaksudkan dengan pengembangan nilai budaya penulis telah mengutip pendapat professor Le Thanh Khoi (1992) dari Universite Paris V, "*Cultural development is the*

development of knowledge, values, and attitudes bringing about the fulfillment of personalities and their creative capabilities". Jadi, pengembangan budaya merupakan pengembangan pengetahuan, tata nilai, serta sikap yang membentuk personaliti serta seluruh kemampuan kreatifitas seseorang.

PENGAJARAN

Salah satu kegiatan utama dari lembaga pendidikan tinggi adalah melatih dan melahirkan guru-guru yang akan mengajar baik pada tingkat pendidikan dasar maupun pada tingkat pendidikan lanjutan menengah pertama dan atas. Seperti diketahui bersama bahwa nilai-nilai serta norma-norma budaya, keterampilan, dan pengetahuan yang diberikan oleh seorang guru memiliki peran yang sangat signifikan bukan hanya terhadap kualitas pendidikan anak didik melainkan juga terhadap sikap dan karakter anak didiknya. Input yang ideal yang diberikan oleh seorang guru kepada anak didiknya akan melahirkan suatu pribadi yang selain mempunyai tingkat intelegensia yang baik juga pribadi yang santun, bermoral, dan bertanggungjawab. Dengan demikian, fase pada pendidikan dasar menjadi begitu sangat krusial bagi anak didik, karena tahun-tahun awal dari masa kanak-kanak merupakan fase yang sangat penting bagi perkembangan sikap dan *social skills* anak didik tersebut.

Pada hakekatnya, fakta bahwa anak-anak didik yang berasal dari beragam suku, kultur, dan kepercayaan memiliki kesempatan belajar bersama dan berteman di sekolah yang sama diyakini merupakan salah satu faktor yang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dalam masyarakat yang multiras dan multibudaya. Pertemanan serta pergaulan anak didik yang nota bene berasal dari latar kultur, ras, dan kepercayaan yang beragam akan menjadi pengetahuan dan fondasi yang kokoh bagi mereka kelak dikala mereka telah menjalani kehidupan yang nyata dalam komunitasnya sehingga

mereka akan mampu menciptakan suatu kehidupan sosial yang harmonis yang mengedepankan aspek toleransi yang tinggi terhadap sesama. Oleh karena itu, para guru harus dididik untuk mencerna nilai-nilai atau norma-norma budaya serta sikap yang mengedepankan toleransi terhadap orang lain, menanamkan respek terhadap keragaman budaya, ras, serta kepercayaan, HAM, dan kedamaian. Dengan demikian, mereka harus mengikuti kuliah atau mengambil matakuliah yang modulnya memuat isu-isu seputar budaya damai, seperti pendidikan multikultural, etika, HAM, termasuk hak anak-anak, dan metode belajar bersama.

Lembaga perguruan tinggi juga seyogyanya bertanggung-jawab terhadap perancangan kurikulum sekolah, dan memastikan bahwa kurikulum tersebut memuat isu-isu lokal, regional, dan internasional, masalah seputar perdamaian, dan HAM.

Pada tingkat universitas, ada beragam cara untuk menanamkan serta mengembangkan budaya damai melalui program-program pembelajaran. Pertama, modul-modul yang bermuatan perdamaian sebaiknya dimasukkan ke dalam mata-mata kuliah yang tersedia di berbagai bidang ilmu seperti ilmu politik, hubungan internasional, sejarah, sosiologi, kerja sosial, ilmu agama, ilmu manajemen, pendidikan, hukum, ilmu komunikasi, psikologi, antropologi, dan lain sebagainya. Contoh kongkritnya, isu "Alternatif Resolusi Konflik" bisa menjadi modul pada mata kuliah di Fakultas Hukum, "Diplomasi Preventif" di Fakultas Ilmu Politik, "Koeksistensi Antar-etnik" untuk sarjana Sosiologi. Pada hakekatnya, modul-modul yang bermuatan perdamaian bisa ditumpangkan pada hampir semua mata-mata kuliah di universitas.

Pendekatan yang lain untuk mengembangkan budaya damai di perguruan tinggi bisa dilakukan dengan mengregionalisasikan atau bahkan menginternasionalisasikan kegiatan-kegiatan akademik. Mahasiswa seyogyanya diberikan

pemahaman yang komprehensif seputar kesalingbergantungan antar negara yang satu dengan yang lainnya pada aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan ekologi. Mahasiswa harus memahami dan kemudian menghormati perbedaan-perbedaan nilai-nilai budaya baik antar suku maupun antar bangsa pada tingkat regional, atau bahkan internasional, serta sadar akan historisiti bangsa-bangsa tersebut. Selain itu, mereka juga harus diberikan pemahaman yang mendalam menyangkut masalah-masalah yang krusial yang dihadapi oleh negara-negara tersebut, seperti laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengrusakan lingkungan, pelanggaran HAM, penyebaran penyakit seperti AIDS, dan lain sebagainya, dan kemudian mendiskusikan isu-isu tersebut secara komprehensif untuk mencari solusi dari masalah-masalah tersebut. Mereka harus menghormati kesalingbergantungan global negara-negara anggota tersebut serta efek dari politik internasional terhadap wilayah tersebut. Mereka harus mengetahui peran serta fungsi organisasi-organisasi internasional yang besar, khususnya yang berada di bawah bendera PBB. Semua mahasiswa, apapun bidang ilmunya, sebaiknya mengambil mata kuliah pilihan yang ada hubungannya dengan regional, misalnya mata kuliah bahasa dari negara anggota yang berada pada tingkat regional tersebut, termasuk sejarah atau politik wilayah tersebut, kajian HAM, masalah lingkungan dan lain sebagainya. Dengan memiliki pengetahuan serta pemahaman yang komprehensif terhadap negara-negara anggota yang berada pada tingkat regional tersebut memungkinkan mereka kelak berada pada posisi kunci, apapun karir dan profesi mereka, untuk mempromosikan hal-hal yang berkaitan dengan penanaman serta pengembangan nilai-nilai budaya damai di wilayah tersebut.

Pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi, baik itu dalam waktu singkat, yakni sewaktu libur semester ataupun dalam jangka waktu yang panjang, yakni antara satu atau dua semester,

adalah juga merupakan cara yang efektif untuk mempromosikan isu-isu yang berkaitan dengan perdamaian dan kesefahaman antar baik individu, kelompok, maupun antar negara. Hal ini bahkan akan lebih menguntungkan apabila pertukaran mahasiswa tersebut dilakukan antar negara yang memiliki faham atau kepercayaan dan budaya yang berbeda. Indonesia memiliki beberapa program pertukaran baik siswa maupun mahasiswa yang diwadahi oleh Departemen Pendidikan Nasional. Untuk itu, perguruan tinggi seyogyanya menggunakan wadah ini sebaik-baiknya dalam rangka membangun suatu kehidupan sosial yang harmonis.

Model pembelajaran PBB di Mauritius juga merupakan cara yang efektif untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya damai bagi siswa (7). Model pembelajaran ini merupakan sebuah program yang khususnya ditujukan buat siswa sekolah lanjutan atas dimana sekelompok siswa berperan sebagai delegasi diplomat dari negara-negara anggota PBB dan memperdebatkan isu-isu besar yang merupakan agenda internasional dari PBB. Model ini dikelola baik secara nasional, regional, maupun secara internasional. Kelebihan dari model ini adalah dia memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada siswa untuk selain memahami mekanisme kerja dari sistem PBB, juga menghormati pandangan-pandangan politik negara-negara anggota lainnya, dan yang paling penting adalah siswa pada forum ini diberi kesempatan untuk membicarakan isu-isu internasional yang mendasar yang berkaitan dengan lingkungan, pengembangan sosial dan ekonomi, HAM dan ketidakstabilan politik. Sejak diperkenalkan di sekolah-sekolah menengah di Mauritius beberapa tahun yang lalu, model pembelajaran ini telah dianggap sebagai sebuah program yang mampu menciptakan pemahaman internasional dan yang memperluas wawasan serta meningkatkan *communion skills* para peserta dalam hal ini para siswa. Pengetahuan serta

keterampilan yang diperoleh dari program ini tentu saja kelak akan menjadi *framework* yang efektif dan berdaya guna bagi siswa tersebut dalam rangka mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan penanaman serta pengembangan nilai budaya damai dimana saja mereka berada, dan semakin efektif bila siswa tersebut menduduki posisi kunci pada sebuah lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dengan demikian, disarankan bahwa seyogyanya model program pembelajaran ini diperluas penerapannya ke negara-negara lain termasuk Indonesia karena memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan nilai budaya damai di atas bumi ini pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya yang sangat rentan terhadap konflik etnik.

Cara efektif lainnya yang perlu dilakukan oleh perguruan tinggi dalam rangka menanamkan nilai budaya damai adalah dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada wanita untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Meskipun metode ini kelihatannya tidak berdampak langsung terhadap pengembangan nilai budaya damai, dampak itu bisa dideteksi dari peran seorang wanita sebagai seorang ibu rumah tangga. Sebagai seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya, seorang ibu menjadi agen utama terhadap transformasi serta penanaman tata nilai dan sikap yang lebih mengedepankan aspek toleransi, pengertian, dan hormat kepada orang lain kepada anak-anak mereka. Tentu saja, metode ini akan lebih efektif bila ibu-ibu rumah tangga tersebut telah melalui suatu pendidikan formal di perguruan tinggi yang mata-mata kuliahnya telah menggunakan modul-modul yang memuat isu-isu krusial yang berkaitan dengan tata nilai budaya damai. Selain itu, melalui pengaruhnya terhadap anak-anak serta keluarganya pada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan nilai-nilai budaya, ibu-ibu rumah tangga yang berpendidikan tersebut bisa memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap bukan saja keluarganya sendiri melainkan

pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu, porsi kesempatan untuk menikmati pendidikan di perguruan tinggi bagi perempuan di Indonesia harus menjadi prioritas dari kebijakan pemerintah Indonesia.

PENELITIAN

Poin utama lainnya dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah penelitian. Perguruan tinggi menjadi pusat-pusat kegiatan penelitian di berbagai bidang ilmu, karena pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang merupakan tugas utama yang diemban oleh lembaga perguruan tinggi sangat bergantung pada dinamika kegiatan penelitian di lembaga tersebut. Pemerintah Indonesia melalui DP2M DIKTI menyediakan dana yang begitu besar dalam rangka memacu kegiatan penelitian di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan IPTEK secara berkesinambungan dan komprehensif sehingga pada akhirnya akan melahirkan suatu IPTEK yang berdaya guna bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Indonesia juga akan mampu berbicara dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Belajar dari konflik-konflik antar etnik yang terjadi di Indonesia, para akademisi di perguruan tinggi akan memiliki isu-isu penelitian yang begitu kaya tentang manajemen konflik. Bidang-bidang kajian penelitian bisa diarahkan kepada isu-isu yang berkaitan dengan konflik seperti kajian yang diarahkan untuk menemukan penyebab utama konflik tertentu, kajian yang diarahkan pada pengidentifikasian perbedaan-perbedaan utama (budaya, ras, politik) yang mengarah pada konflik, teknik pemecahan konflik yang bagaimana yang efektif meredam sebuah konflik, dan lain sebagainya. Penulis yakin bahwa konflik merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan tidak

selamanya bisa dihindari. Konflik bisa saja terjadi dimana-mana termasuk di lingkungan yang damai. Penelitian-penelitian tentang asal dan manajemen dari suatu konflik bisa menjadi bahan pertimbangan para pengambil kebijakan dalam merancang suatu program yang mengarah pada penciptaan suatu suasana yang damai dan tentram di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu pula dilakukan pendokumentasian hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap konflik misalnya dalam bentuk penerbitan jurnal-jurnal penelitian khusus untuk konflik. Dokumentasi ini sangat bermanfaat terhadap manajemen konflik untuk masa akan datang. Di Afrika, ada jurnal khusus untuk konflik yang diterbitkan dua kali setahun yang berjudul "The African Journal on Conflict Resolution (2).

UNESCO, melalui program budaya perdamaianya, telah memberikan suatu dorongan yang sangat signifikan terhadap kegiatan penelitian dan kegiatan akademik lainnya yang berkaitan dengan kajian-kajian perdamaian dengan membentuk divisi khusus yang mengelola budaya perdamaian yang dikenal dengan istilah UNESCO Chairs for the Culture of Peace yang tersebar di beberapa tempat, seperti di Universitas Durban-Westville di Afrika selatan (3), dan di Universitas Cocody in Cote d'Ivoire (4). Divisi perdamaian UNESCO yang berada di Universitas Cocody melakukan pelatihan-pelatihan penelitian untuk mendorong tumbuhnya aspek demokrasi, HAM, sifat toleransi, dan nilai-nilai budaya lainnya yang berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian yang abadi. Pembentukan divisi-divisi tersebut tentu saja memungkinkan lembaga-lembaga lainnya yang ada disekitar wilayah tersebut berkordinasi, serta fokus dalam mendorong kajian-kajian perdamaian. Lembaga-lembaga lainnya yang mendirikan wadah perdamaian adalah yang dikenal dengan nama Gandhi-Luthuli Peace Institute. Lembaga ini mengampanyekan anti-kekerasan sebagai alat untuk mencapai perdamaian. Untuk

itu, institusi ini mencari cara yang paling efektif untuk menciptakan perdamaian melalui penelitian dan disseminasi teori, prinsip-prinsip, serta strategi-strategi anti-kekerasan.

Ada sejumlah negara yang tergolong multirasial, multi-etnik, dan multikultur. Untuk itu mereka harus memiliki metode-metode yang tepat serta efektif terhadap penanaman dan pengembangan nilai-nilai budaya damai di negara tersebut. Beberapa negara tertentu memiliki sejarah yang panjang terhadap proses terciptanya stabilitas, perdamaian dan kehidupan yang harmonis, seperti Mauritius, dan Karibia. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat bagi negara lainnya termasuk Indonesia untuk mempelajari konteks sosio-kultur dari kedua negara tersebut untuk menemukan penyebab-penyebab utama dari suatu kestabilan. Hasil kajian tersebut dapat dijadikan suatu model atau *framework* yang efektif terhadap pengembangan budaya damai bagi negara lainnya. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan aspek kompatibilitas dari *framework* tersebut terhadap negara lainnya khususnya bagi mereka yang berbeda latar sosio-kulturnya sehingga dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu bilamana diperlukan.

Negara-negara yang disebutkan di atas adalah termasuk negara-negara yang rentan dengan kerusuhan karena dipicu oleh peperangan dan konflik etnik. Namun demikian, kerusuhan bisa juga diakibatkan oleh faktor-faktor lain seperti ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Contoh, ada peningkatan angka kriminal dan ketidakamanan di kota-kota besar di Afrika dibanding di kota-kota kecil atau di desa (Kwakwa, 1997). Faktor-faktor apakah yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap fenomena ini? Apakah hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dengan tajam?, atau apakah hal tersebut berhubungan dengan narkoba dan semacamnya? Ataukah disebabkan oleh bangkitnya agama-agama yang fundamentalist? Faktor apakah yang bisa mengakibatkan agama menciptakan perbedaan-perbedaan serta

kebencian dan bukannya perdamaian dan keharmonisan? Seperti di Afrika, di Indonesia proses demokratisasi sudah pula diperkenalkan. Problemanya, apakah pengenalan ini tidak terlalu dini? Sudah siapkah kita berbeda pendapat dengan pihak lain? Apakah demokratisasi menguntungkan atau sebaliknya justru menciptakan kerusuhan-kerusuhan seperti yang terjadi pada hampir seluruh PILKADA yang dilakukan di Indonesia? Semua pertanyaan-pertanyaan ini merupakan lahan yang subur bagi penelitian-penelitian di lembaga perguruan tinggi serta lembaga penelitian di seluruh Indonesia. Hasil-hasil temuan dari penelitian-penelitian ini akan membantu para pengambil kebijakan dalam mengambil langkah-langkah yang penting untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya damai di Indonesia.

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Poin terakhir dari Tri Darma Perguruan Tinggi adalah pengabdian pada masyarakat. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi akan dimanfaatkan selain pada pengajaran juga disebarkan kepada masyarakat sebagai *end users* melalui kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat. Teknologi-teknologi yang berbau terapan yang biasa disebut dengan istilah teknologi tepat guna diperkenalkan kepada masyarakat pengguna teknologi tersebut. Sehingga tujuan pengembangan IPTEK yang sesungguhnya adalah ditujukan serta diamanahkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Inilah fungsi serta misi utama dari lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, perguruan tinggi bukanlah merupakan sebuah menara gading yang tidak tersentuh oleh dan menyentuh masyarakat yang ada disekitarnya.

Mengadakan konferensi, workshop, dan kuliah umum merupakan salah satu cara lembaga perguruan tinggi untuk menyebarkan informasi termasuk informasi-informasi

menyangkut nilai budaya damai kepada masyarakat. Dengan demikian, melalui wadah ini, lembaga perguruan tinggi diharapkan akan mampu menanamkan kepekaan berbagai isu yang menyangkut perdamaian kepada masyarakat. Berikut ini beberapa contoh kongkrit seminar atau konferensi yang mengambil isu-isu yang berkaitan dengan damai sebagai tema utamanya. Pada tahun 1993, universitas Juba di Sudan mengadakan konferensi bertema perdamaian dan pengembangan (5). Peserta konferensi terdiri dari kaum akademisi, cendekiawan, dan pemerintah. Dalam konferensi tersebut dibicarakan berbagai isu krusial yang berkaitan dengan perdamaian. Pusat Kajian Pengungsi Universitas Moi bekerja sama dengan badan-badan PBB, pemerintah, LSM, dan gereja mengadakan seminar bertema membangun perdamaian yang bertujuan membangun rekonsialisasi, meredam konflik, dan menawarkan teknik-teknik meredam konflik kepada para pemimpin kelompok sosial dan lain sebagainya (1). Asosiasi internasional para rektor bekerja sama dengan badan-badan terkait PBB beberapa kali telah melakukan konferensi menyangkut perdamaian di beberapa negara (6). Tahun 1997, asosiasi internasional para rektor di Afrika dan yang di Timur Tengah mengadakan seminar yang bertema Peran Universitas dalam Menciptakan Perdamaian Dunia di Arab Saudi. Topik-topik yang dibahas menyangkut konsep-konsep yang baru dalam rangka menciptakan perdamaian, pengalaman serta mekanisme untuk menciptakan perdamaian di Afrika, pengembangan ekonomi serta perdamaian dunia.

Lembaga perguruan tinggi bisa juga mengadakan pelatihan-pelatihan atau kursus singkat yang berdurasi beberapa hari tentang berbagai macam isu yang berkaitan dengan perdamaian seperti memediasi pertentangan, manajemen konflik, HAM, proses demokratisasi, manajemen penampungan pengungsi, dan lain sebagainya. *Target groups* dari kegiatan ini

adalah para legislatif, anggota militer, diplomat, pemimpin atau tokoh agama, tokoh masyarakat, birokrat, serta pemimpin LSM.

Lembaga-lembaga perguruan tinggi dapat pula menyiapkan pelayanan terhadap para pengungsi yang diakibatkan oleh suatu konflik. Seperti diketahui bersama bahwa konflik antar suku selalu berujung pada terjadinya pengungsian besar-besaran bagi warga yang ingin mencari tempat yang lebih aman. Namun demikian, di tempat-tempat penampungan, para pengungsi justru diperhadapkan dengan masalah baru lainnya seperti tenda atau tempat penampungan yang tidak layak, air bersih, pendidikan anak-anak, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Lembaga perguruan tinggi dapat mengambil bagian dengan menyediakan bantuan bagi para pengungsi dalam bentuk pengiriman sejumlah mahasiswa ke lokasi penampungan. Mahasiswa dari berbagai bidang ilmu seperti kedokteran, pendidikan, pertanian, teknik, sosiologi, dan psikologi dapat dilibatkan membantu para pengungsi ini di tempat penampungan mereka pada saat liburan semester. Program seperti ini bukan saja memberikan keuntungan bagi para pengungsi melainkan pula bagi mahasiswa itu sendiri, karena masalah-masalah yang ditemukan di tempat penampungan tersebut merupakan masalah original dan otentik yang tentu saja sangat berguna untuk dikaji lebih jauh mungkin dalam bentuk proyek penelitian tesis atau disertasi.

KESIMPULAN

Melalui kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, lembaga pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat krusial terhadap penanaman serta pengembangan budaya damai dengan cara memastikan bahwa masyarakat mengembangkan sikap yang baik terhadap toleransi, dan kesalingberfahaman, yakni terbebas dari aspek-aspek seperti

berburuk sangka dan salah dalam menilai orang lain, serta memiliki kemampuan untuk secara kritis, objektif, dan cakap menilai dan menimbang krisis-krisis waktu lampau dan sekarang. Hal ini sejalan yang dikatakan oleh Professor Khoi bahwa pengembangan budaya membutuhkan pemahaman baik pengalaman pada waktu yang lampau maupun yang saat ini.

Pada hakekatnya, memahami sosio-kultur kelompok atau bangsa lain merupakan hal yang positif mendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis pada komunitas yang multikultur seperti Indonesia. Hal ini bisa diperoleh melalui kajian berbagai bidang ilmu seperti kesusastraan, sejarah, seni, dan lain sebagainya. Pendekatan antar-disiplin menjadi penting bukan saja karena berkaitan dengan karakter global dari suatu kehidupan modern, melainkan pula karena percepatan suatu perubahan membutuhkan pengajaran yang mampu membentuk sikap yang bukan saja peka terhadap suatu perubahan melainkan juga sikap yang mengedepankan toleransi terhadap sesama, meskipun berasal dari latar budaya, ras, dan kepercayaan yang berbeda, sehingga bisa tercipta suatu kehidupan sosial yang aman dan harmonis.

REFERENSI

Khoi, Le Thanh. 1992. Contribution of Education to Cultural Development: The role of education in the cultural and artistic development of the individual. Article presented in an International Conference on Education, Geneva. 14-19 September 1992.

Kwakwa, E. 1997. The Response of African Universities to Social Instability and Crises. Paper presented at the General Conference, Lusaka, Zambia 13-17 January 1997.

Santoso, Joko. 2005. Peran Pendidikan Tinggi dan Budaya Manusia. *www.forum-rektor.org*

Sugono, Dendy. 2007. di R.A. Susanti. Separuh Bahasa Dunia Nyaris Punah. *Tempointeraktif.com-unesco*.

Referensi Lainnya

1. "Moi University's Response to Refugee and Humanitarian Studies/Conflict Prevention and Management". Private Communication from the Vice-Chancellor of Moi University.
2. "An Agenda for Peace in Africa". Information published by ACCORD, c/o University of Durban-Westville, South Africa.
3. UNESCO. "Raport sur l'Action du Programme pour une Culture de la Paix" Conference Generale, 28eme Session, Paris, septembre 1995

4. Commission Nationale Ivoirienne pour l'UNESCO. Rapport General-Reunion de Suivi du Colloque Sous Regional "Conflits Actuels et Culture de Paix", Abijan, 26-29 novembre 1996.
5. University of Juba. "Third Conference Proceedings – Peace and Development", Khartoum, February 1993.
6. LUXMUNDI, IAUP Quarterly Report, Fall 1996
7. "Students Need Education for Justice and Peace". ACCORD, c/o University of Durban-Westville, South Africa.

Dari Kota Kolonial hingga Ibukota Propinsi: Melacak Perkembangan Infrastruktur dan Perencanaan Kota Manado

Oleh :

Ilham, S.S., M.Hum.

(Staf Pengajar Jurusan Ilmu Sejarah, FIB – Unhas)

Pendahuluan

Sejak kapan kota-kota di Indonesia berdiri dan berkembang sebagai pemukiman yang memiliki jaringan sosial ekonomi dan infrastruktur yang kompleks?. Pertanyaan yang sulit dijawab, jika *generalisasi*¹ ingin diberlakukan atasnya sebagai sebuah konsep atau pengertian. Jika kota-kota di Eropa dan Amerika Utara terbentuk di masyarakat yang kurang lebih sama, berdasarkan konsep budaya dan ideologi yang sama. Kota-kota Asia Tenggara memiliki sejarah keanekaragaman masing-masing². Bahkan untuk lingkup kota-kota di Indonesia, jika kota-kota di Jawa adalah merupakan warisan kota tradisional yang dibangun atas konsep tradisional dengan menjadi pusat-pusat kekuasaan, maka ada kota yang berkembang tidak memegang fungsi tadi.

Terlepas dari pola perkembangan kota tersebut, Infrastruktur maupun perencanaan kota pada dasarnya telah diusahakan dan tersedia sejak sebuah kota telah memiliki organisasi sosial politik. Baik pada kota tradisional, kota kolonial, hingga kota pascakolonial. Kota prakolonial telah diperlengkapi dengan

¹ Generalisasi dalam konsep ilmu sejarah menunjuk kepada suatu "keajegan" (keteraturan), dalil, atau hukum yang berlaku untuk beberapa kasus.

² Hans Dieter Evers & Rudiger Korff, *Urbanisme di Asia Tenggara. Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), Hlm 11; Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm.156-157.

infrastruktur kraton dan berbagai fasilitas kerajaan lainnya seperti pasar, masjid, alun-alun dan sebagainya. Bahkan pusat-pusat peradaban yang lebih awal lagi selalu diperlengkapi dengan fasilitas atau tempat-tempat upacara keagamaan. Demikian pula tentang perencanaan kota sejak awal sudah diperhatikan. Setiap masa selalu memiliki perencana kota yang handal. Pendiri Mataram, Pangeran Mangkubumi kemudian lebih dikenal Sultan Hamengkubuwono I diyakini telah merancang tata ruang awal 'pusat' Mataram, kota Yogyakarta sekarang. Pada masa kolonial, tidak diragukan lagi Thomas Karsten adalah perencana kota-kota di Hindia Belanda. Begitupun masa pascakolonial, perencanaan Ibukota Jakarta tidak terlepas dari 'desain' Henk Ngantung. Di Makassar pada tahun 1960an, Walikota Makassar saat itu H.M. Patompo menyusun rencana perluasan dan tata kota yang cukup 'kontroversial'.

Manado sendiri adalah sebuah kota yang lahir tidak karena kepentingan kekuasaan tradisional, karena memang Minahasa yang menjadi kesatuan geografis Manado tidak pernah berada dalam satu kesatuan kekuasaan maupun pusat kerajaan. Manado baru dapat dikatakan sebagai kota, setelah masuknya orang luar, khususnya kedatangan bangsa Barat. Sebelum itu nyaris hanyalah wilayah bermukim kelompok-kelompok orang Minahasa dan tempat perdagangan barter dilakukan.

Karena kota ini 'lahir' seiring dengan kedatangan bangsa Barat, maka kota pada awalnya langsung memiliki ciri khas kota kolonial³ yang kuat, tanpa ada 'saingan' dari kekuatan tradisional

³ Konsep kota kolonial ini, bandingkan dengan pendapat Peter J.M. Nas. Menurutnya, kota kolonial adalah kota yang terdapat di dunia ketiga, kota-kota ini bukanlah benar-benar merupakan pusat penunjukan modal dan pusat produksi tetapi merupakan tempat pengumpulan hasil bumi yang kemudian disalurkan ke negeri lain, kota kolonial juga merupakan pusat distribusi untuk penjualan barang-barang dari negara barat. Hal ini berarti bahwa uang dan barang dikumpulkan di kota dan diangkut menuju Eropa. Di negeri jajahan, perdagangan, pengangkutan dan pengusahaan pertanian sangat berorientasi ke luar negeri, sedangkan pemerintah berlangsung dari negara yang memanfaatkan kota guna penguasaan daerah jajahan.

atau yang lain. Kota ini dibangun dengan dilengkapi berbagai fasilitas untuk keperluan pemerintah kolonial⁴, serta tata ruangnya di susun atas 'selera' kolonial.

Berdasar atas kenyataan bahwa infrastruktur dan perencanaan kota telah diusahakan secara berkelanjutan. Maka tulisan ini mencoba menggambarkan aspek itu terhadap kota Manado. Dengan perhatian sejak Manado secara resmi 'menjadi' kota tahun 1919 hingga tahun 1970an ketika telah resmi memegang berbagai predikat, sebagai pusat pemerintahan di Sulawesi Utara hingga pusat ekonomi di kawasan itu. Tentu saja persoalannya sangat luas, oleh karena itu akan dijelaskan hal-hal yang menjadi bagian penting atau yang menjadi keunikan (uniques)⁵ atas aspek itu.

Dari Wenang ke Manado: Perkembangan Awal Kota Manado

Adanya keinginan untuk selalu melacak jejak awal perkembangan suatu wilayah selalu menarik diketahui untuk berbagai kepentingan. Untuk membangun citra dan peran masa depan jelas tinjauan masa lalu dibutuhkan. Itu dimaksudkan untuk mencari pengakuan atau peneguhan atas peran-peran historis wilayah atau daerah yang bersangkutan. Usaha semacam ini menjadi kecenderungan beberapa kota atau daerah di Indonesia

⁴ Biasanya sebuah kota yang dipengaruhi oleh situasi kolonial, berawal dari berdirinya kantor-kantor pemerintahan asing dan benteng. Tahap berikutnya, muncul pemukiman Eropa, klab-klub dan lapangan pacuan kuda. Kota juga dihubungkan dengan daerah pertanian, terutama perkebunan tebu, dengan membangun jalan kereta api dan jembatan penghubungnya. Pada akhirnya, kota menjadi pusat pemerintahan asing yang merupakan bagian yang lebih luas dalam kompleks politik kolonial.

⁵ *Unigness* (keunikan) dalam ilmu sejarah adalah hal yang dianggap menjadi jiwa zaman atau kejadian yang hanya menjadi milik peristiwa itu saja atau milik masa itu. Dapat saja ada beberapa peristiwa yang mirip, tapi masing-masing peristiwa mempunyai keunikan tersendiri yang tentu saja tidak dimiliki peristiwa lainnya. Karena sebuah peristiwa hanya berlaku sekali dan tidak akan berulang dengan hal yang sama.

belakangan ini.⁶ Usaha ini dapat dikatakan sebagai cara membangun identitas lokal, kecenderungan seperti ini semakin banyak ketika Undang-undang Otonomi Daerah diberlakukan pemerintah pusat sejak tahun 2000. Dengan banyaknya pemekaran wilayah, mendorong daerah-daerah yang belum mengetahui hari jadinya sibuk mengusahakannya. Sejarawan pun kembali dilirik untuk tujuan itu, semoga saja mereka yang terlibat tidak semata-mata melakukannya karena kegiatan proyek yang memuat pesan-pesan “sponsor”, ini juga berlaku di Manado. Pada tahun 2004, sebuah seminar diselenggarakan untuk mengkaji kembali hari lahir kota Manado⁷. Pertanda romantisme masa lalu mulai dibangun. Akhirnya disepakati hari jadi kota ini tanggal 14 Juli 1623⁸, dengan motto kotanya *Si Tou Timou Tumou Tou*⁹. Manado¹⁰ yang dikenal sekarang berasal dari kata “Mana rou” atau “Wana rou” artinya “tempat yang jauh”¹¹. Kata ini dihubungkan dengan jarak perjalanan dari pedalaman Minahasa yang membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai di lokasi Manado sekarang. Sebelumnya, wilayah itu bernama Wenang. Wenang

⁷ *Harian Kompas*, 14 Juli 2004.

⁸ Penetapan hari jadi kota Manado ini merupakan “modifikasi” tanggal, bulan, dan tahun yang berbeda. Tanggal 14 Juli 1623 merupakan momentum yang mengemas tiga peristiwa bersejarah sekaligus. Tanggal 14 yang diambil dari peristiwa heroik yaitu peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946, dimana putra daerah ini bangkit dan menentang penjajahan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian bulan Juli yang diambil dari unsur yuridis yaitu bulan Juli 1919, yaitu munculnya *Besluit* Gubernur Jenderal tentang penetapan *Gewest* Manado sebagai *Staadgemeente* dikeluarkan. Tahun 1623 yang diambil dari unsur historis yaitu tahun dimana Kota Manado dikenal dan digunakan dalam surat-surat resmi.

⁹ Motto kota sangat memasyarakat dan dianggap kebanggaan warga kota. Konsep *Si Tou Timou Tumou Tou* merupakan filsafat hidup masyarakat Minahasa yang dipopulerkan oleh Sam Ratulangi, yang berarti: “Manusia hidup untuk memajukan orang lain”. Dalam ungkapan bahasa Manado, seringkali dikatakan: “baku beking pande”.

¹⁰ Kota Manado terletak di ujung jazirah utara pulau Sulawesi, pada posisi geografis 124°40' - 124°50' BT dan 1°30' - 1°40' LU. Iklim di kota ini adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 24° - 27° C. Curah hujan rata-rata 3.187 mm/tahun dengan iklim terkering di sekitar bulan Agustus dan terbasah pada bulan Januari. Intensitas penyinaran matahari rata-rata 53% dan kelembaban nisbi ± 84 %.

¹¹ Penjelasan lain tentang asal kata Manado ini, adalah penjelasan Parengkuan dan Manoppo yang mengutip Riedel (1872) menyatakan bahwa Manado berasal dari bahasa Tombulu Tua yakni *Manaror* yang sepadan dengan *Maharor*, *Maerur* atau *Maheerur* yang artinya berkumpul atau bersama, dengan menunjukkan lokasi dimana orang saling bertemu.

sendiri adalah pemukiman awal di kaki bukit Wenang dan menjadi dasar serta cikal perkembangan kota sampai hari ini. Konon dahulu kala, sebelum bangsa asing datang. Minahasa termasuk Manado berada dalam 4 wilayah kekuasaan *Taranak Wangko* atau *Pakasan Taranak*¹² yang berasal dari satu keturunan Toar dan Lumimuut. Satu *Pakasan Taranak* biasanya terdiri dari beberapa *walak*¹³. Salah satu wilayah pakasaan saat itu adalah pakasaan Tombulu. Kelompok-kelompok keluarga pakasaan Tombulu inilah yang kemudian membangun *wanua wenang* ketika terjadi perluasan pemukiman dan pemencaran penduduk yang terjadi sekitar abad kesepuluh¹⁴.

Ketika terjadi perselisihan Spanyol dengan Minahasa dan memaksa Spanyol meninggalkan Manado pada 10 Agustus 1643. Memberi peluang diikatnya persahabatan dengan Belanda untuk menghalau kembalinya Spanyol. Belanda kemudian diizinkan membangun loji di Manado tahun 1654. Benteng itu mulanya dibangun dari kayu pada tahun 1654 dan diberi diberi nama "*de Nederlandsche Vastieghheid*". Kemudian dibangun satu benteng beton *Fort Amsterdam* 1673 oleh Henri du Chiez¹⁵. Tahun 1703,

¹² *Pakasan Taranak* adalah sistem pemerintahan tradisional Minahasa yang berbasis pada kelompok-kelompok *taranak* (keluarga). Dipimpin oleh seorang pimpinan *Taranak* dan menempati satu areal tanah atau wilayah daerah dengan kekuasaan tersendiri. Menurut H.M. Taulu, *Taranak Wangko* adalah satu keluarga besar atau suku. Sedang oleh L. Adam mengutip tulisan Prof. Willem dalam bukunya "*Vers Pride Geschieden*" menyebutnya '*Pakasan*' artinya keluarga besar suku yang mempunyai kebudayaan yang sama termasuk bahasa dan mempunyai satu daerah kekuasaan.

¹³ *Walak* adalah satu kelompok keluarga yang juga mempunyai wilayah kekuasaan tersendiri. Menurut N. Graafland, istilah *walak* berasal dari '*balk*' atau '*balak*' yakni menunjuk pada andil yang harus ada pada penduduk dalam penyeteroran balok kayu demi pembangunan bangunan-bangunan pemerintah di Manado. Tetapi N. Adriani menyatakan bahwa *walak* bukan dalam arti diturunkan dari perkataan *balk* dalam bahasa Belanda, tetapi perkataan '*balak*' bebas dari pengaruh asing dan diturunkan dari kata *walak* atau suku, yang juga dapat diartikan wilayah suku. Istilah *walak* ini dipergunakan resmi pemerintah Belanda atas satu kelompok keluarga dalam satu persekutuan hukum adat serta menunjukkan wilayah kekuasaannya. Sedang menurut van Vollenhoven, Wilken, Ter Haar dan Brouwer bahwa *walak* adalah suku bangsa atau *Stammen* berdasarkan wilayah pertama yang mereka duduki dan dipertahankan terhadap berbagai gangguan atau kekuatan asing yang ingin merampok wilayah tersebut.

¹⁴ Pemencaran dan penyebaran penduduk Minahasa pada abad ke-10 ini merupakan penyelidikan Dr.N. Ph. Wilban, seorang pendeta Kristen Protestan yang masuk Minahasa tahun 1868. (Arsip Pemerintah Dati II Minahasa tahun 1979).

¹⁵ E.C. Godee Molsbergen. *Geschiedenis van de Minahasa tot 1829 (Weltevreden: 's-Gravenhage - Martinus Nijhoff, 1928)*, hlm. 31. Raymon Mawikere, *ibid*, hl.112. Parengkuan, op. cit., hlm. 4.

sekeliling benteng itu ditembok batu dan kemudian banyak lagi terjadi perubahan di dalam dan luarnya. Kebakaran tahun 1855 memberi peluang untuk sekali lagi memperbaikinya dengan sungguh-sungguh¹⁶.

Sampai awal abad ke-19, Manado masih berada dalam wilayah administratif Karesidenan Ternate. Barulah sejak tahun 1817 diadakan langkah-langkah penataan jajaran pemerintahan kolonial di wilayah ini. Tujuh tahun kemudian yakni 1824 dibentuk Karesidenan Manado¹⁷. Terbentuknya Karesidenan dengan menempatkan seorang residen, J. Winzel yang berkedudukan di Manado, secara langsung telah menyebabkan fungsi kota Manado menjadi semakin penting karena posisinya sebagai ibukota karesidenan. Bukan saja sebagai kota benteng seperti periode sebelumnya, melainkan juga sebagai kota kolonial dan kota pusat perdagangan.

Dari sudut penataan ruang, cikal bakal Manado sendiri terdiri atas pembagian kampung yang jelas. Posisi benteng adalah pusat kota, dan di sekelilingnya itulah berbagai perkampungan berada. Perkampungan orang Eropa, kampung Cina, kampung

¹⁶ N. Graafland, *Minahasa. Negeri, Rakyat, dan Budayanya* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991), hlm. 12.

¹⁷ Karesidenan Manado adalah pecahan dari Karesidenan Ternate (Maluku Utara), meliputi seluruh Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah sekarang, kecuali kepulauan Sangir Talaud, yang baru pada 1825 dimasukkan dalam wilayah karesidenan ini. Pembentukan karesidenan ini berdasar besluit pemerintah Belanda No.10 tanggal 14 Juni 1824 dan Staatsblad No 28a/16 Juni 1824. Manado sendiri salah satu afdeeling bersama dengan enam afdeeling lainnya yakni Likupang, Kema, Tondano, Tanawangko, Amurang, Belang. Afdeeling Manado meliputi lokasi seluruh kota Manado yakni lokasi sekitar benteng Amsterdam, pemukiman orang-orang Eropa di sebelah selatan benteng, pemukiman orang-orang Arab dan Cina serta pemukiman timur asing lainnya di sebelah timur laut benteng. Termasuk wilayah sekitar kota yang meliputi sebagian walak Manado, sebagian walak Kalawat Wawa, sebagian walak Ares, dan sebagian walak Kakaskasen yang semuanya berbatasan dengan kota Manado pada saat itu. Pada tahun 1830 diadakan reorganisasi pemerintahan walak menjadi distrik-distrik yang dipimpin seorang *mayoor*. Untuk wilayah Manado, terdiri dari beberapa distrik; 1. distrik Manado pusatnya di Sindulang, 2. distrik Ares berpusat di wanua Wenang, 3. distrik Bantik di Malalayang. 4. distrik Kabat Bawah atau Kalawat Wawa. Tentang pembentukan Karesidenan ini lihat Bertha Pantouw, *Minahasa sebelum tahun 1829 dan beberapa perubahan dalamnya. Kurun waktu 1824-1846*, dalam Roy E. Mamengko, (ed.), *op. cit.*, hlm. 57; Lihat juga *Laporan Politik Tahun 1837*, "Saatkundig Overzicht van Nederlandsch Indie, 1837", (Djakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sedjarah Arsip Nasional RI, No. 4, 1971), hlm. 45.

Arab, kampung *borgo*¹⁸. Di samping itu di setiap bagian perkotaan telah berdiri kampung yang dihuni oleh orang-orang dari berbagai tempat di Minahasa, yang nama kampungnya disesuaikan dengan nama tempat asal mereka. Perkampungan itu diantaranya; kampung Sonder, Tompaso, Tondano, Kawangkoan, Tomohon, Kakas, Remboken, Tombariri, Langowan dan sebagainya.

Tentang kampung yang namanya sesuai dengan berbagai wilayah di Minahasa, itu memiliki keterkaitan yuridis dan segi historis bahwa milik-milik (*eigendom*) adalah kepunyaan distrik-distrik dalam lingkup wilayah Minahasa. Bagaimana perkampungan itu ada, dijelaskan L. Adam berikut;

“pada mulanya distrik-distrik membutuhkan tanah-tanah di ibukota (Manado, pen) untuk penimbunan padi, kemudian kopi, yang harus diangkut penduduk berdasarkan penyerahan wajib ke pelabuhan. Sekaligus tanah itu menjadi tempat-tempat pemberhentian untuk tukang-tukang pedati, di situ didirikan gudang-gudang (*pakhuis*) dan rumah-rumah sementara, ya malahan didirikan penginapan untuk kepala-kepala yang dahulu, karena sarana-sarana lalu lintas yang kurang baik selalu dipanggil ke Manado”¹⁹.

¹⁸ Borgo atau *burgers* adalah golongan penduduk yang punya sejarah panjang dalam struktur penduduk Minahasa. Istilah ini pertama kali ditujukan kepada orang-orang yang pernah membantu Belanda, khususnya yang pernah menjadi tentara kolonial dengan hak-hak istimewa dibandingkan penduduk umumnya, seperti pembebasan dari kerja wajib, pajak dan sebagainya. Istilah ini pun kemudian melekat kepada orang-orang Manado yang melakukan kawin campur dengan orang-orang Eropa, termasuk keturunan mereka. Lebih khusus golongan ini berasal dari; (a) tentara-tentara sewaan atau *mardeikers*. Tentara-tentara ini adalah bekas budak-budak yang telah dibebaskan dan kemudian dijadikan pengawal atau dikumpul menjadi satu kesatuan *mardeikers*. (b) bangsa Eropa lainnya antara lain Portugis, Spanyol yang ditawan dalam perang, kemudian dibebaskan termasuk keturunannya dengan orang-orang Philipina dan lain-lain. (c) bangsa Belanda yang menyeleweng dan dijatuhi hukuman kemudian dibebaskan dan tetap tinggal pada daerah jajahan. Begitu juga pegawai orang Belanda yang dipecat karena menyeleweng dan tetap tinggal di daerah jajahan, termasuk keturunannya. (d) dari penduduk pribumi daerah-daerah yang telah bersumpah menjadi pembantu utama atau pegawai Belanda. Orang *borgo* bisa diidentifikasi dari marga yang digunakannya, seperti Thomas, Andries, Winters, Fernandus, Engelen, Cristovel, dibandingkan dengan marga pribumi seperti Kaunang, Runtukahu, Mangundap, Ratag, Koagow dan sebagainya. Marga yang digunakan oleh orang borgo selalu berasal dari marga Belanda, Spanyol, atau Portugis.

¹⁹ L. Adam, *op.cit.*, hlm. 34.

Manado Sebagai Gemeente, 1919-1942

Tentunya banyak hal yang menjadi elemen kehidupan *urban*, sebab peradaban tidak dapat berkembang tanpa adanya organisasi politik. Organisasi pemerintahan diperlukan oleh masyarakat, sehingga kehidupan pemukiman dapat dikoordinasi di suatu tempat yang tetap. Organisasi politik diperlukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban teritorial sehingga kehidupan sosial ekonomi dan produksi dapat berlangsung terus menerus²⁰. Sejalan dengan itu, diberlakukannya undang-undang desentralisasi di Hindia Belanda awal abad ke-20, telah mendorong munculnya kota-kota yang otonom. Di Manado, usaha lebih serius dalam pembangunan kota terjadi pada masa residen W.F.J. Kroon, yang memikirkan kemungkinan kota Manado dapat ditingkatkan sebagai suatu gemeente. Inisiatif pertama dilakukan dengan membentuk panitia yang dikenal 'Dana Haminte' (*Gemeente Fonds*) pada tahun 1916. Badan inilah yang terus mengusahakan hingga akhirnya pada tanggal 1 Juli 1919, *gemeente* Manado terbentuk²¹.

Kota kolonial di Hindia Belanda juga menjadi medan kontestasi berbagai etnis atau suku. Masing-masing "menguasai" dan mempertahankan ruang untuk kegiatannya, termasuk perumahan, bangunan komersil, bangunan umum, monumen dan pekuburan. Setiap golongan dengan latar belakang budaya yang berbeda telah berjuang dengan caranya sendiri untuk kebutuhan mereka sendiri. Hasil dari perjuangan tak terkendalikan ini adalah morfologi yang kacau yang hanya dapat dipecahkan dengan perencanaan kota²².

²⁰ A. Bagoes Wiryomartono, *Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia; Kajian mengenai Konsep, Struktur, dan Elemen Fisik Kota sejak Peradaban Hindu Budha, Islam hingga Sekarang* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 12.

²¹ Lihat 25 *Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905-1930* (Semarang: Gedrukt bij G. Kolff & Co., 1930), hlm. 441-448.

²² Freek Colombijn, *Paco-paco (Kota) Padang. Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad Kedua Puluh dan Penggunaan Ruang Kota* (Padang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dengan Badan Warisan Sumatera Barat, 1994), hlm. 8.

Perencanaan kota secara berkelanjutan mulai dilakukan seiring dengan dibentuknya kota-kota di Indonesia²³. Salah satu usaha itu adalah perbaikan kampung (*kampung verbetering*). Di Manado, usaha ini dilakukan dengan pembangunan fasilitas-fasilitas pada kampung-kampung atas usaha pembiayaan dari *gemeente fonds*. Jelas sejak awal dana haminte, berperan dalam pembangunan berbagai fasilitas kota. Membentuk satu panitia atau badan yang anggota-anggotanya dari pegawai Belanda, bumiputera, tokoh masyarakat, dan perusahaan swasta. Mengusahakan pengumpulan keuangan baik lewat pasar-pasar dan lainnya;

“Badan ini tanpa diragukan akan memenuhi suatu kebutuhan. Sampai sekarang ada sebuah dana kota yang terdiri dari anggota-anggota yang diangkat Residen baik pegawai-pegawai maupun orang-orang swasta yang selalu memerhatikan kepentingan-kepentingan khusus dari Manado. Sungguhpun tidak dapat diingkari, bahwa panitia ini dengan dana-dana yang dikuasainya, sebagian besar terdiri dari uang-uang pasar, telah melaksanakan hal-hal yang baik (penerangan jalan, pendirian sebuah bioskop, dan lain-lain). Tetapi karena tidak merupakan badan hukum, karena susunannya yang seluruhnya tergantung kepada Residen, tidak mempunyai wewenang yang cukup untuk mengerjakan sendiri urusan-urusan yang penting²⁴

Sejak terbentuknya *gementeraad* Manado, maka *gemente fonds* dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk Dinas pekerjaan umum yang bernama *Verkeer en Waterstaat* yang bekerja di bawah pengawasan *gemeente raad*. *Verkeer en Waterstaat*

²³ Tentang sejarah perencanaan tata kota di Indonesia. Lihat Soepangat, *op. cit.*

²⁴ L. Adam, *Bestuur*, 1975; 49, diungkapkan pertama kali dalam tulisannya pada majalah *Bijdragen to de Taal Land en Volken Kunde van Nederlandsche-Indie* (s-Gravenhage, jilid 81 bagian V, 1925).

bertanggungjawab dalam pengelolaan pembangunan kota seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, kelistrikan dan penerangan, pembangunan dan pemeliharaan gedung dan kantor pemerintah, perumahan dinas dan umum, pembangunan dan pemeliharaan pasar, gedung-gedung pertemuan, lapangan olahraga, pacuan kuda, dan proyek perbaikan kampung-kampung.

Selanjutnya Dinas Verkeer en Waterstaat ini berhasil mengumpulkan dana dan membangun kompleks perkantoran bagi kepentingan 'haminte Manado' di lokasi kampung Tikala, tepatnya di sebelah timur lapangan olahraga Sparta. Juga dibangun puluhan rumah permanen di sebelah utara dan barat dari lapangan Sparta Tikala. Menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat pemukiman yang tergolong elit di kota Manado. Dinas ini juga berwenang memberikan rekomendasi bagi pihak swasta yang bermaksud mengadakan pembangunan, misalnya kepada perusahaan keluarga Lie Boen Yat & Co. Perusahaan swasta ini sampai menjelang masuknya Jepang, berhasil membangun satu kompleks perumahan elit di pesisir pantai Sario yang waktu itu masuk wilayah kampung Titiwungan²⁵.

Persoalan keuangan selalu menjadi hambatan atas usaha Gemeente Manado dalam pembangunan kota. Untuk mengatasi kekurangan dana itu, maka tahun 1922 dikeluarkan '*Bestuurhervormingswet*', dimana pengelolaan pendanaan lebih diperluas. Penetapan peraturan-peraturan serta pemungutan pajak-pajak diserahkan dalam pengelolaan Dewan Gemeente Manado, antara lain; pajak jalan, pajak penghasilan perkebunan, pajak reklame, pajak anjing, pajak minuman keras, pajak tontonan dan bea pasar²⁶. Yang menarik adalah pajak anjing dan minuman keras. Anjing, selain menjadi binatang peliharaan, terkadang juga dikonsumsi sebagian orang Minahasa. Tentang Minuman keras, karena minuman jenis ini yakni *saguer* atau *cap tikus* digemari.

²⁵ FEW. Parengkuan, et al., *op.cit.*, hlm. 24.

²⁶ Alex Turang, *op.cit.*, hlm. 223; Erni H.Tumbel, *op.cit.* hlm. 47.

Konsumsi minuman keras ini erat hubungannya dengan kebiasaan setempat yang senang berpesta²⁷.

Tentang pembiayaan pembangunan kota, lebih lanjut dapat kita ketahui dari hasil penelitian M. Brouwer. Brouwer mencatat anggaran belanja dan pendapatan Haminte Manado sejak tahun 1920-1929 berjumlah f. 295.000 dengan pengeluaran berjumlah f. 265.000. Sebagai perbandingan berikut rincian anggaran pendapatan dan belanja tahun 1929;

Tabel. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Manado Tahun 1929.

A. Penerimaan		B. Pengeluaran	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
1. Laba Sisa tahun 1928	f. 47.466	1. Pemerintah	f. 27.475
2. Bantuan tetap negeri	f. 40.535	2. Penagihan Pajak dll	f. 4.390
3. Toelage tanah	f. 2.957	3. Pekerjaan Umum	f. 104.000
4. Pajak-pajak	f.128.900	4. Penerangan jalan	f. 20.630
5. Uang Leges, Rooi, dll	f.12.350	5. Pemadam Kebakaran	f. 1.710
6. Perusahaan	f. 20.294	6. Kebersihan Jalan	f. 31.800
7. Pengembalian Pinjaman	f. 20.000	7. Pengusahaan dan pemeliharaan pasar	f. 54.760
		8. Kesehatan umum	f. 5.490
		9. Pembayaran Pensiunan	f. 3.620
		10. Bunga Hutang-hutang	f. 17.525

Sumber; M. Brouwer, 1936: 94-95, Alex N. Turang, 1979: 228-229; Erni Heni Tumbel, 1996: 49-50.

Untuk pembiayaan pembangunan, pemerintah kotalah yang mengusahakannya dengan berbagai cara. Sejak berdiri, Manado mengatur sendiri keuangan, seperti yang ditentukan dalam undang-undang desentralisasi. Berkembang dengan modal kekuatan sendiri, dengan berbagai sumber keuangan yang ditetapkan dengan peraturan sah (*verordeningen*). Haminte Manado telah dapat menyelenggarakan kepentingan kota, dengan mendirikan bermacam-macam usaha sebagai daerah otonom,

²⁷ Wawancara: Manado, Januari 2005.

seperti halnya dalam anggaran belanja pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia II, yang tidak pernah menerima tunjangan dari pemerintah pusat²⁸.

Pendapatan dari berbagai sumber itu dipakai untuk pembangunan berbagai fasilitas kota, seperti terlihat pada tabel pengeluaran di atas. Selain itu sejak tahun 1920 sampai tahun 1928, sudah banyak usaha pembangunan yang menunjukkan perubahan-perubahan wajah kota. Seperti pelebaran dan pengaspalan jalan, kebersihan, pembentukan dinas kebakaran, pembangunan perumahan, pembangunan gedung kotapraja di Tikala, gedung pembantaian hewan di Tikala²⁹, peningkatan fasilitas pasar-pasar, perluasan *waterleiding*, perbaikan parit-parit, pembuatan sumur-sumur air minum, dan peningkatan fasilitas rumah sakit³⁰. Untuk sektor kesehatan, beberapa saat kemudian dilakukan pembangunan rumah sakit umum gunung Wenang Manado.

Sejalan dengan kebutuhan akan infrastruktur kota. Sejak Januari 1934, tugas "Departement van Verkeer en Waterstaat" semakin bertambah³¹. Berbagai tugas tersebut, memberi

²⁸ Hal ini dinyatakan dalam statement DPRD kotapraja Manado sebagai hasil dari sidang lengkap pada tanggal 20 Februari 1952 (ANRI Makassar, Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960 No. 195. 5).

²⁹ Rumah pembantaian hewan sebelumnya berada di muara sungai Tondano. Lihat *Desentralisatie Verslag 1929. Gemeente Manado* (Lansdrukkerij-Weltevreden, 1929), hlm. 143-144.

³⁰ Alex Turang, *op. cit.*, hlm. 227.

³¹ Adapun tugas *Departement van Verkeer en Waterstaat* sesuai dengan Peraturan Negara tahun 1933 No. 509 YO 1934 No. 603 dan 704 adalah: 1) pengaturan lalu lintas umum. 2) pembuatan dan eksploitasi jalan kereta api dan trem. 3) pembuatan, pemeliharaan dan penguasaan jalan raya sepanjang tidak diserahkan kepada instansi lain. 4) pengawasan lalu lintas jalan. 5) pembangunan dan eksploitasi pelabuhan termasuk pemeliharaannya. 6) masalah ekonomi di bidang pelayaran. 7) pengawasan serta penanganan lalu lintas udara sipil. 8) pos, telegraph dan telefoon. 9) bank, tabungan pos. 10) kelistrikan. 11) pembangunan dan eksploitasi tenaga air. 12) penguasaan atas sungai dan perairan alam, danau dan rawa sepanjang tidak diserahkan kepada instansi lain. 13) Pembangunan dan eksploitasi jaringan irigasi dan pekerjaan pengairan lainnya sepanjang tidak diserahkan kepada instansi lain. 14) pembangunan, pemeliharaan, dan penguasaan gedung-gedung negara dengan keperluan: a. instansi sipil, sepanjang instansi tersebut tidak diberi wewenang untuk itu, b. departemen Angkatan Laut (marine) sepanjang pengurusannya tidak diserahkan kepada departemen peperangan, terkecuali pembangunan Mercusuar. 15) penyewaan gedung bagi keperluan instansi-instansi. 16) pembuatan dan eksploitasi air minum, riol-riol dan pekerjaan lain untuk kepentingan kesehatan rakyat sepanjang itu tidak diserahkan kepada instansi lain. 17) pengawasan atas pekerjaan umum yang didasarkan pada pasal 6 *Indische Staats Regering*. 18) perusahaan tambang-tambang negara. Lihat, *15 tahun Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Utara. 1964-1979, Suatu Memori Pembangunan* (Manado: Kantor PU Propinsi Sulawesi Utara, 1979), hlm. 7-8.

gambaran kepada kita akan infrastruktur yang standar akan sebuah kota kolonial, termasuk di Manado.

Menghadapi berbagai persoalan pembangunan kota, lambat laun sebelum perang telah terdapat keyakinan bahwa suatu rencana kota memang perlu³²

Beberapa kota mulai mewujudkan rencana kota, seperti Malang dan Bandung. Akhirnya pemerintah Manado juga membentuk panitia untuk mempelajari soal-soal pembangunan kota. Panitia ini pada tahun 1938 selesai dengan suatu konsep-ordonansi pembentukan kota. Dalam ordonansi ini diberi kewajiban pada haminte untuk membuat rencana kota bersama undang-undang bangunannya³³. Pada saat itu, Manado dipimpin oleh walikota dengan suatu dewan kota³⁴. Tentang rencana kota tadi belum sempat terealisasi, karena keburu datangnya pendudukan Jepang.

Masa Pendudukan Jepang dan Negara Indonesia Timur (NIT), 1942-1949

Tidak pernah terkira, Jepang dengan cepatnya dapat menduduki sebahagian besar negara di Asia Tenggara dan Asia Timur, setelah penyerangannya atas pangkalan armada Amerika

³² Untuk menangani perkembangan pembinaan fisik (*stads*) *gemeente*, memerlukan tenaga ahli perencanaan tata ruang kota untuk menanggulangnya. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga ahli planologi (*stedeboouw*) Belanda. Salah seorang yang paling terkenal dari zaman sebelum pecah perang dunia II ialah Ir. Thomas Karsten sebagai *stedeboouwkundige* yang menjadi penasehat (*staads*) *gemeente* di kala itu. Sekaligus telah merancang tata ruang beberapa kota di Indonesia. Konsepnya pada dasarnya adalah menerapkan gagasan modern tentang perencanaan tata ruang kota, bersandar pada ilmu pengetahuan tentang cara memperkembangkan kota, yang tumbuh setelah dan sebagai akibat terjadinya revolusi industri di negeri Inggris abad XIX, disesuaikan dengan keadaan dan kenyataan di Indonesia.

³³ *Harian Pelita*, 17 Februari 1949, No 85, Tahun ke IV, hlm.2.

³⁴ Keanggotaan dewan kota ini awalnya terdiri dari 11 anggota yakni 7 bangsa Eropa, 3 Indonesia, dan 1 timur asing. Oleh kesadarn politik rakyat Indonesia di kota Manado, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Samratulangi di dalam dan diluar *volksraad*, maka sebelum perang dunia kedua, dewan haminte Manado telah diperluas menjadi 13 anggota; 5 bangsa Eropa, 5 Indonesia, dan 3 timur asing. Anggota-anggota tersebut telah dipilih langsung oleh rakyat pemilih. (*Staatblad Hindia Belanda* 1919 No.205).

Serikat di Hawaii, Desember 1941. Manado adalah salah satu wilayah yang pertama diduduki di Hindia Belanda pada Januari 1942. Pendudukan Jepang pada dasarnya terorganisir dalam kesatuan militer. Namun di beberapa tempat pemerintahan sipil juga diperhatikan. Di Manado, Sistem pemerintahan kota disebut Manado Si yang dipimpin oleh Si Tjo dengan anggota-anggota dewannya. Juga ada pemerintahan karesidenan (Syu), di samping pemerintahan militer (Minseibu) yang dipimpin oleh Laksamana Muda Hamanaka³⁵.

Selama pendudukan Jepang di Manado, hampir dipastikan tidak terjadi usaha pengaturan tata kota, selain mobilisasi dan pemakaian fasilitas kota yang sudah ada untuk kepentingan perang. Meskipun pada periode Jepang ini, dibentuk juga lembaga pekerjaan umum yang disebut dengan Dobokukai yang berada dalam sistem pemerintahan kota (Manado Si). Diantara pembangunan infrastruktur masa Jepang adalah pembangkit tenaga listrik di Tonsea Lama³⁶. Termasuk pembangunan lapangan terbang Mapanget dengan kerja paksa, setahun setelah mendaratnya Jepang di Manado.

Infrastruktur yang lain pada masa Jepang ditandai pula oleh aktifitas ekonomi. Terlihat usaha seperti toko serba ada Kaneko atau firma Futaba yang bergerak di bidang ekspor/impor. Selain itu Jepang juga membuat rencana-rencana besar untuk sektor ekonomi yaitu untuk membangun satu pabrik tekstil di Sario Manado, meski rakyat harus berkorban dengan harus menanam kapas. Tetapi ternyata pabrik itu, hanya tempat untuk membersihkan kapas dan penampungan. Kapas yang dihasilkan penduduk Minahasa dibersihkan kemudian dikemas, selanjutnya diangkut, dikirim ke Jepang. Didirikan juga pabrik karung di Manado, mereka mengadakan pembelian serat kulit kayu, sampai

³⁵ R.Z. Leirissa, *Minahasa Di Awal Perang Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Merah Putih dan Sebab-Musababnya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 67.

³⁶ H.A. Lolong, *Sejarah Pendudukan Jepang di Minahasa 1942-1945* (Manado:1989),hlm. 55.

pelosok-pelosok pedesaan. Harganya sangat rendah, dapat dikatakan diberikan setengah cuma-cuma³⁷.

Bekas bank Belanda De Javasche Bank, dijadikan Taiwan Ginko (Bank Taiwan). Beberapa perusahaan yang dapat disebutkan adalah; perusahaan obat-obatan Takeda Yakuin K.K. dan Tanabe Yakuin K.K., perusahaan kulit Nanyo Tanin, perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor Mitsuibusa, perusahaan listrik dan merupakan perusahaan pemerintah Nippon Hasoden K.K., perusahaan di bidang perkebunan dan distribusi Nanyo Takusyoku (Nantaku). Perusahaan listrik lainnya Hasoden, terdapat juga Nyanyo Kohatsu Kabushiki Kaisya bergerak di perikanan dan perbekalan, Minsei Onkokai Manado Sinbun di bidang pelayaran. Oleh pendudukan Jepang, bidang yang mengurus soal perekonomian dikenal Minseibu Shooka³⁸

Begitu Jepang pergi, daerah-daerah di Indonesia Timur tidak langsung bergabung dengan pemerintahan Indonesia yang berpusat di Jakarta. Atas prakarsa dan usaha Belanda untuk kembali "berkuasa" maka dibentuklah Negara Indonesia Timur (NIT), yang beribukota di Makassar³⁹.

Meski dapat dikatakan bahwa periode NIT ini merupakan periode transisi, namun pada saat inilah untuk pertama kalinya sebuah rencana kota Manado akhirnya disusun pada tahun 1949. Berdasar Peraturan-Presiden NIT tanggal 6 Oktober 1947 (Staatsblad N.I.T. No.7) dan memperhatikan kondisi kota yang mengalami kerusakan perang oleh pemboman sekutu⁴⁰. Rencana pembangunan kota ini diperuntukkan untuk penambahan jumlah penduduk untuk 25 atau 30 tahun. Dengan memperhatikan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 20, 52, 55, 72.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

³⁹ NIT terbentuk setelah melalui dua konferensi yang diikuti oleh seluruh wakil-wakil daerah dari wilayah Indonesia Timur. Konferensi pertama di Malino pada 16 Juli 1946 dan konferensi kedua di Denpasar 7-24 Desember 1946. Lebih lanjut tentang NIT, lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985).

⁴⁰ Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960. No. 195 (5). ANRI Makassar.

kepentingan dan kebutuhan segala golongan penduduk, perumahan, lalu lintas, kerohanian, dan kesehatan. Juga memperhatikan bagaimana pembagiannya menurut golongan, kemampuan dan agama⁴¹. Dalam rencana kota ini, dikatakan bahwa Manado akan dibangun menjadi salah satu kota paling indah di Indonesia Timur.

Adanya rencana kota membantu untuk mengetahui kondisi dan bagaimana sebuah kota dikembangkan. Rencana kota yang disusun ini didasarkan atas suatu pembagian daerah cadangan (peruntukan, pen.). Daerah cadangan yang dimaksud adalah; (1) daerah cadangan bangunan yang meliputi semua tanah yang diperuntukkan bagi bangunan-bangunan. (2) daerah cadangan lapangan yang meliputi semua tanah-tanah untuk penggunaan umum, seperti taman-taman, lapangan-lapangan, taman-taman olahraga, pekuburan. (3) daerah cadangan lalu lintas, yang meliputi semua tanah-tanah untuk lalu lintas dan alat-alat lalu lintas. (4) daerah cadangan air dan saluran-saluran, parit-parit, dan sebagainya. (5) daerah cadangan pertanian dan alam, yang meliputi semua tanah-tanah untuk maksud pertanian.

Berdasarkan daerah peruntukan inilah, berbagai pembangunan infrastruktur dan tata letak bangunan dilaksanakan. Beberapa hal yang dijelaskan yang menjadi bagian rencana kota diantaranya; (a) Perkembangan dan bentuk kota, (b) Manado Utara, (c) Bagian Tionghoa, (d) Susunan Jalan-jalan, (e) Taman-taman: Olah raga, Pekuburan-pekuburan, (f) Pelabuhan. Sektor inilah yang dianggap mendesak untuk diperhatikan dalam perencanaan kota ini.

Bagaimana tata kota ini disusun, dapat dilihat sambil memperhatikan kondisi kota yang tergambar berikut ini. Kota Manado tidak cukup menarik dan bagus letaknya di wilayah pantai, bagian pantai tidak tertutup. Di dekat pantai kebanyakan terletak kampung-kampung yang tidak teratur susunannya dan di bagian

⁴¹ Harian *Pelita*, 18 Februari 1949.

ini juga kurang lebar sepanjang *Residentie Laan* yang gedung-gedungnya membelakangi laut. Angin laut yang sejuk susah masuk karena bangunan-bangunan terlalu rapat dan banyak tumbuhan-tumbuhan. Dari laut, Manado tidak memberi pemandangan yang indah dan sebaliknya pemandangan ke laut terhalang. Tanah-tanah bukit di Teling tidak dipergunakan untuk perluasan kota. Bentuk kota telah menjadi panjang, perluasan kota seharusnya diadakan dekat pusat kota ialah dengan mempergunakan tanah bukit. Sebagai pusat kota dekat dengan pantai, hal-hal itulah yang perlu diperhatikan⁴².

Untuk beberapa bagian kota yang seharusnya mendapat perhatian adalah Manado Utara. Bagian ini (teristimewa Wawonasa dan sekitarnya), dalam perkembangannya jauh ditinggalkan oleh bagian selatan. Jika bagian ini di masa yang lampau berhubungan baik dengan selatan melalui jembatan-jembatan dan jalan-jalan yang baik, maka di sini akan berkembang bagian kota yang indah dan dekat pusat kota letaknya. Perbaikan pada tempat lain adalah pada Kampung Tionghoa. Bagian ini karena letaknya boleh dikatakan terjepit tidak dapat berkembang dengan baik juga karena tanah-tanah di dalamnya sangat berlumpur maka sepanjang jalan berdiri bangunan yang sangat rapat. Halaman yang panjang dan sempit, dengan bangunan yang panjang-panjang semuanya sangat menghalangi masuknya cahaya dan hawa sehingga akibatnya ialah keadaan perumahan yang tidak sehat⁴³. Situasi ini masih belum jauh berubah ketika penggambaran perkampungan ini diuraikan Graafland pada akhir abad ke-19 yang lalu.

Pada periode tahun 1950-an, jalan-jalan kota belum tertata dengan baik. Usaha pelebaran jalan berakibat *pila-pila* jalan dan trotoar-trotoar yang sempit serta kurang tempat untuk tanaman-tanaman di pinggir jalan. Kurang diperhatikan juga soal pejalan

⁴² Harian *Pelita*, 19 Februari 1949.

⁴³ Harian *Pelita*, 21 Februari 1949.

kaki. Beberapa pertigaan dan perempatan jalan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Tempat berhenti kendaraan-kendaraan di pasar-pasar tidak mencukupi. Di sini juga terlihat masalah pada taman-taman olahraga dan pekuburan-pekuburan. Manado pada waktu yang silam kekurangan sekali taman. Walaupun banyak tempat di bukit-bukit antara bangunan-bangunan dapat dipergunakan untuk itu. Tempat-tempat yang ada dalam keadaan buruk sehingga merugikan pemandangan kota. Manado juga kekurangan sekali tempat olah raga. Taman olah raga Sario jauh letaknya dari pusat perumahan, terlebih juga Manado Utara membutuhkan taman olah raga yang bagus. Sedangkan terlampau banyaknya pekuburan-pekuburan di Manado merugikan pembentukan kota. Apalagi kebiasaan untuk menguburkan sendiri dan memakai tanah-tanah yang paling bagus, tidak baik untuk perkembangan kota yang sempurna⁴⁴. Walaupun sejak sebelum perang sudah banyak pekuburan-pekuburan ditutup, karena umumnya tidak memuaskan letaknya. Di samping itu pekuburan kadang menimbulkan permasalahan untuk penggunaannya, seperti yang terjadi di Tikala pada akhir kolonial. ketika penduduk asli Tikala telah mengajukan protes kepada hukuntua mereka, karena ada jenazah yang dikuburkan di pekuburan Tikala yang mana tak berhak karena mereka bukan orang Tikala asli⁴⁵.

Permasalahan perkotaan lainnya adalah susunan bangunan rumah-rumah. Karena susunan bangunan rumah di Manado tidak beraturan dan bercampur tidak karuan. Sedang di dalam kampung-kampung tidak diperhatikan garis-garis cadangan (*rooilijnen*). Perbaikan juga akan dilakukan pada pelabuhan.

⁴⁴ Beberapa pekuburan itu masih dapat dilihat sekarang. Seperti di pertemuan jalan Sarapung dan jalan Ahmad Yani, disana ada pekuburan Belanda/Eropa (sudah dibongkar), pekuburan Borgo, dan pekuburan Islam. Pemerintah Kotapraja sendiri sebenarnya telah terlibat dalam pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan pekuburan-pekuburan. Mengenai hal ini, lihat *Decentralisatie Verslag 1924-1925. Gemeente Manado* (Landsdrukkerij-Weltevreden, 1926), hlm. 183-184.

⁴⁵ Surat Kabar *Sentausa*, 29 Juli 1939 No 5, hlm 3

Dimana kesulitan-kesulitan muncul karena kondisi pelabuhan Manado yang tidak bagus karena terkumpulnya pasir. Menyikapi ini maka muara sungai Tondano di pindahkan ke utara.

Beberapa bagian kota lainnya yang perlu penataan adalah tanah-tanah di bukit Teling yang disediakan untuk perluasan bangunan tangsi-tangsi militer. Di sudut *Bernhardweg* Teling terdapat tanah sekolah, misalnya sekolah Menengah dan juga rumah-rumah. Di tanah-tanah bukit ini diharapkan menjadi tempat bangunan kota yang indah. Dapat juga dicatat di sini, bahwa untuk kepentingan lalu lintas akan dibangun jalan dari *Renbaanweg* melalui bukit-bukit terus ke Tikala dan *Kemaweg*. Sedang di pesisir pantai direncanakan perbaikan jalan pantai. Di sebelah utara mulai rumah Residen sampai melewati benteng, maka antara tanah *Residentielaan* dan pantai tidak disediakan untuk bangunan tetapi untuk taman-taman bunga, dan dalam taman-taman di sekitar kantor Residen, didirikan kantor Gubernemen.

Perbaikan jalan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan kota pascakolonial. Selain jalan melewati Teling ke *Renbaanweg* yang sudah disebutkan tadi, juga perbaikan *Bernhardweg* untuk potongan-potongan sudut jalannya. Terusan *Residentielaan* dan *Pasarstraat* sampai ke daerah pelabuhan, termasuk perbaikan perhubungan *Bernharweg* dengan *Julianalaan* untuk meringankan lalu lintas di *Tondanoweg*⁴⁶.

Di sektor ekonomi kota, setelah berakhirnya pendudukan, usaha-usaha yang ada pada masa Jepang menghilang. Dapat jadi karena perusahaan-perusahaan itu sebenarnya perpanjangan kekuasaan pendudukan. Kepergian Jepang, awalnya digantikan oleh sekutu dan NICA membuka peluang kembalinya Belanda, termasuk dalam aktifitas ekonomi. Selain usaha Belanda dan Cina, terlihat berbagai aktifitas ekonomi orang Indonesia. Sebagai perbandingan, berikut kita dapat melihat berbagai perusahaan, yang juga memberi keterangan tentang keadaan firma, N.V,

⁴⁶ Harian *Pelita*, 22 Februari 1949.

maatschappij dan toko di kota Manado yakni; Belanda dan asing lainnya: Java Bank, Escompto Bank, K.P.M. (juga menyelenggarakan agent "Rotterd Lloyd", "Nederland", dan "J.C.P.L."), Harmsen Verwey, Van Essen, Reiss & Co, Hagemeyer, Geo Wehry, Hoppenstedt, Lindeteves, Java-Staal, Bursumy, Tels & Co. Beberapa usaha orang Tionghoa, diantaranya; Hiap Hong Eng Lok, Kian Gwan, Tek Bie Kongsie, Tjen Eng Kongsie, Liem Liong Boen, Tan Eng Tek, Soen Liong, Tek Hong, Tjim Bie, Ban Hong Liong, Win Ong. Sedang perusahaan orang Indonesia diantaranya; Nocemo, Kawanua Trading & Co, Prauwenveer, Jajasan Copra, Kawanua Store, Sukadame, Toronata, Suka Madju, Minahassa, Bank Nasional, Klabat, Ipi, Nusantara, Rakjat⁴⁷.

Dari Kota Besar Hingga Ibukota Propinsi, 1950-1970

Penandatanganan kedaulatan Indonesia tahun 1949, sekaligus menandai semakin "menghilangnya" pengaruh kolonial di berbagai daerah⁴⁸. Pada tahun 1951, dibentuk struktur pemerintahan baru, Manado kemudian menjadi Kota besar, dengan 15 orang anggota dewan kota (Keputusan Acting Gubernur Tgl. 29-3-1951 No.129), dan 3 orang anggota badan DPD (Beslit Gubernur Sulawesi Tgl. 13 Agustus 1951, No 451). Dewan kotapraja itu dipilih langsung oleh rakyat pemilih pada tanggal 14 Juli 1951, yang mewakili partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam wilayah kotapraja. Pemilihan ini dihadiri oleh 12.447 pemilih sedangkan tercatat dalam daftar adalah 19.875 pemilih⁴⁹. Sejak tahun 1953 status Manado menjadi "kota besar", itu berarti Manado yang menjadi ibukota wilayah Minahasa sebelumnya untuk pertamakalinya harus terpisah

⁴⁷ ANRI Makassar, *Arsip Propinsi Sulawesi* 1950-1960. No. 195 (5).

⁴⁸ Sampai tahun ini, residen dan pejabat militer di Manado masih dijabat oleh orang Belanda. Sejak tahun 1950 menandai hilangnya mereka.

⁴⁹ ANRI Makassar. *Op. cit.*

secara administrasi. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1960, Manado sekaligus menjadi ibukota Propinsi Sulawesi Utara dan Tengah.

Selang beberapa saat Manado menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, sebuah pergolakan daerah terjadi. Yakni peristiwa Permesta (Perjuangan Semesta Alam), yang awalnya dicetuskan dan berpusat di Makassar. Namun setelah Sulawesi Selatan menarik dukungannya, maka pusat perjuangannya dipindahkan ke Manado. Antara tahun 1957 hingga 1961, Manado menanggung beban atas peristiwa itu.

Meski berada dalam suasana pergolakan Permesta, masih terlihat usaha pembangunan kota. Justru pada saat inilah, slogan pembangunan “besar-besaran” didengung-dengungkan. Bisa jadi untuk menarik hati masyarakat untuk mendukung Permesta. Jalan-jalan dibuat ke pedalaman dengan membuka hutan-hutan, hingga pemberitaan di koran-koran lokal dikatakan sebagai pembangunan “gerak cepat” di Manado, dengan melakukan pekerjaan padat karya.

— Seperti pemandangan yang terlihat tahun 1957, ketika pembangunan trotoar dan tembok-tembok pagar di jalan-jalan kota Manado dikerjakan dengan kerja bakti. Dipelopori selain penduduk kota, juga sejumlah anggota angkatan darat dari Komando Kota Besar Manado (KKM) yakni melebarkan jalan Sam Ratulangi dan jalan Kalabat, dan diikuti sekitar 2000 orang⁵⁰.

Beberapa infrastruktur yang dibangun periode ini diantaranya; SMP negeri 2 buah dan 3 gedung SR negeri. Gedung SMP dibuat selengkap mungkin dengan 6 buah bilik dan kantornya, sedangkan SR di Kombos dan di Kampung Baru, perbatasan kota Manado dan Minahasa, juga di kampung Islam, jalan Wori Manado. Dibangun asrama polisi di Paal IV jalan Tomohon yang tanahnya dibeli dari Liem Soei Tong. Pendirian asrama pasukan pemadam api dan sekolah-sekolah. Termasuk

⁵⁰ Koran *Gelora Maesa*, 23 September 1957, thn 1, No 35, hlm. 1.

pembangunan kembali lapangan "Olympia" Sario, dilengkapi lapangan badminton dan kolam renang⁵¹. Juga usaha perluasan rumah sakit Manado⁵². Selain jalan, dilakukan penambahan poliklinik, bilik-bilik sekolah, perbaikan parit-parit, dan jalan-jalan baru dibuat seperti Kumaraka, Ranotana, Kampung Ketang, dan Pakowa⁵³.

Sekitar tahun 1958, tepatnya masa pemerintahan walikota G.K. Montolalu, dilaksanakan pembangunan perumahan rakyat dan pembangunan stadion. Perumahan itu didirikan oleh yayasan kas pembangunan kota dan dijual bebas kepada warga kota yang berminat⁵⁴. Walikota saat itu juga akan memulai pembuatan jalan raya di tepi pantai (*strand-boulevard*). Untuk rencana ini, sekitar 1000 rumah tangga yang berdiam di sekitar pantai akan dipindahkan. Sedangkan tentang pasar benteng (pasar 45), dikatakan bahwa pasar itu akan dijadikan suatu pasar yang bertingkat⁵⁵.

Setelah berakhirnya Permesta, dan kontrol atas kota Manado sudah di tangan "pusat" (pemerintah Indonesia di Jakarta). Suatu infrastruktur untuk ketersediaan air bersih dibangun atas "jasa" pemerintah pusat. Penambahan instalasi saluran air minum itu mengambil air dari sungai Tondano dan akan dikerjakan oleh pemerintah Prancis dengan pemborong *De Gremont*, dengan biaya sekitar 9.000.000,- *New Franc*. Bak air yang akan dipakai pada pembangunan saluran air tersebut akan ditempatkan pada dua tempat yakni sebuah terletak di pegunungan kampung Singkil dan satunya di pegunungan kampung Teling. Bersamaan dengan itu, dilakukan juga pelebaran jalan, dan juga sementara dikerjakan

⁵¹ Harian *Pikiran Rakyat*, 31 Juli 1957, thn VIII, No. 126; 17 Juni 1957, thn VIII, No 92.

⁵² Harian *Pikiran Rakyat*, 8 April 1957, thn VII, No 39.

⁵³ Harian *Pikiran Rakyat*, 8 Juni 1957, thn VIII, No 90.

⁵⁴ Perumahan ini terdiri atas 5 golongan. Harganya bervariasi tergantung golongan rumahnya, golongan 1 yang termahal dan golongan 5 yang termurah. Untuk rumah golongan 1 yang banyaknya 100 buah, untuk mendapatkannya diharuskan membayar 1/3 dari harga rumah itu yakni Rp. 25.000 dan sisanya dibayar mencicil dalam jangka 20 tahun lamanya. Dalam rencana rumah rakyat untuk golongan 1 dan 2, Maret 1958 sudah akan selesai.

⁵⁵ Harian *Pikiran Rakyat*, 13 Januari 1958, thn VIII, No 275, hlm. 1.

pembangunan tingkat dua pasar 45 bahagian atas sebagai kelanjutan program masa sebelumnya. Menyusul kemudian pembangunan pasar Wanea di jalan Babepalar⁵⁶.

Pihak militer (ABRI) juga terlibat dalam hal pembangunan berbagai infrastruktur dan prasarana kota. Usaha ini merupakan pencerminan 'kuasa' pusat terus ditanamkan di daerah ini. Seperti pekerjaan Komando Militer XIII/Merdeka berikut. Hingga tahun 1964, pembuatan jalan raya Manado-Bitung sepanjang 67 km. Antara tahun 1965-1968 dikerjakan perpanjangan *run way* lapangan terbang Sam Ratulangi sepanjang 250 m, lebar 35 m. Pembuatan jembatan Malalayang dengan panjang 36,60 m. Perbaikan jalan protokol di dalam kota Manado sepanjang 7 km, lebar 8 m. Pada tahun 1969-1975, dilaksanakan pembangunan seperti; pembuatan lapangan sepakbola di Sario Manado. Pembongkaran pasar *Citra* Manado untuk dibangun pusat pertokoan. Pembongkaran hotel Manado dan dibangun hotel Kawanua berlantai 3 bertaraf internasional. Pembuatan gedung balak intel di Wanea Manado. pembuatan gedung Makolog Dam XIII/Merdeka di Teling Manado. serta pembuatan jalan Miangas-Manado sepanjang 2 km, lebar 3 m⁵⁷.

Penutup

Dari rencana kota dan pembangunan infrastruktur di atas, telah memberikan gambaran situasi fisik atas perkembangan kota Manado hingga tahun 1970an. Pergantian rezim yang terus berlangsung; kolonial, pendudukan Jepang, periode transisi NIT, terjadinya kekacauan akibat peristiwa Permesta, hingga Manado menjadi ibukota Propinsi, tidak menghalangi usaha-usaha pembangunan kota. Pergantian kekuasaan sekaligus

⁵⁶ Surat Kabar *Genderang Prajurit*, 20 Juli 1963, thn V, No 29, hlm. 2.

⁵⁷ Djoni Herjanto Omas, *Sejarah Perkembangan Komando Daerah Militer XIII/Merdeka di Sulawesi Utara 1958-1985* (Manado: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, 1997), hlm. 47-48.

memperlihatkan 'motivasi' masing-masing rezim dalam 'membangun' kotanya. Jiwa zaman sekaligus tergambar dengan memperhatikan infrastruktur dan rencana kota, khususnya perubahan dan kontinuitas atas aspek ini.

Segera setelah Manado diresmikan sebagai gemeente, berbagai usaha pengembangan kota dilakukan. Dimulai dengan perbaikan perkampungan (*kampung verbetering*), dibentuk lembaga yang mencari dana untuk pembiayaan pembangunan kota yang dikenal dengan *Gemeente Fonds* (dana haminte). Berbagai fasilitas perkotaan dibangun, khususnya infrastruktur untuk menunjang administrasi pemerintahan kolonial. Termasuk usaha awal untuk menyusun rencana kota, meski kemudian tidak terwujud dengan kedatangan Jepang.

Pada periode Jepang, meskipun tidak ada perhatian khusus untuk pembangunan kota, namun tetap diusahakan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung rencana perang Jepang. Begitupun pada periode NIT, pada masa inilah untuk pertamakalinya sebuah rencana kota disusun. Pemerintah kota menyebut bahwa rencana kota ini adalah sebuah usaha untuk menjadikan Manado sebagai kota terindah di wilayah NIT.

Ketika Manado sudah dalam pelukan Indonesia, sebuah 'pemberontakan' terhadap 'pusat' mengambil basis di wilayah ini. Tentu saja kekacauan akan terjadi, namun masih tetap terlihat usaha pembangunan kota. Selain pembangunan infrastruktur baik di kota Manado sendiri, maupun di wilayah Minahasa lainnya. Pihak Permesta 'mempromosikan' bahwa pembangunan besar-besaran sedang dilaksanakan. Namun itu sesungguhnya adalah upaya untuk meyakinkan penduduk setempat, bahwa tanpa campur tangan pusat, kitapun bisa membangun sendiri bahkan bisa lebih cepat.

Berakhimya Permesta, membawa Manado memegang fungsi lain yakni sebagai ibukota propinsi, yang sebenarnya dibentuk sebagai salah usaha untuk meredam 'pemberontakan'

ini. Dengan demikian, berarti pula bahwa sebuah 'hubungan' pusat-daerah telah dibangun yang pada kenyataannya pada periode selanjutnya, hubungan ini merupakan kontrol pusat atas daerah. Pembangunan infrastruktur maupun tata kota sejak masa ini, dipengaruhi pula oleh kepentingan pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Surat Kabar:

ANRI Makassar, Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960. No. 195.5.

Desentralisatie Verslag 1929. Gemeente Manado (Lansdrukkerij-Weltevreden, 1929)

Staatblad Hindia Belanda 1919 No.205.

Harian *Kompas*, 14 Juli 2004.

Harian *Pelita*, 17 Februari 1949.

Harian *Pelita*, 18 Februari 1949.

Harian *Pelita*, 19 Februari 1949.

Harian *Pelita*, 21 Februari 1949.

Harian *Pelita*, 22 Februari 1949.

Surat Kabar *Sentausa*, 29 Juli 1939 No 5.

Harian *Pikiran Rakyat*, 8 April 1957, thn VII, No 39.

Harian *Pikiran Rakyat*, 8 Juni 1957, thn VIII, No 90.

Harian *Pikiran Rakyat*, 17 Juni 1957, thn VIII, No 92.

Harian *Pikiran Rakyat*, 31 Juli 1957, thn VIII, No. 126.

Harian *Pikiran Rakyat*, 13 Januari 1958, thn VIII, No 275

Surat Kabar *Genderang Prajurit*, 20 Juli 1963, thn V, No 29.

Koran *Gelora Maesa*, 23 September 1957, thn 1, No 35.

Wawancara:

Pdt. David Mononutu Lintong (75 tahun): Mantan sekretaris umum BPS GMIM; Tomohon, 27 Januari 2005.

Ust. H. Gusti Syamsi (66 tahun): Tokoh masyarakat/kampung Komo; Manado, 20 Januari 2005.

Prof. Hasan Yan (68 tahun): Guru besar Universitas Sam Ratulangie, tokoh masyarakat kampung Islam dan mantan anggota BKSAUA (Badan Kerjasama Antar Umat Agama); Manado 23 Januari 2005.

Buku dan Artikel:

25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905-1930, Semarang: Gedrukt bij G. Kolff & Co., 1930.

15 tahun Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Utara. 1964-1979, Suatu Memori Pembangunan, Manado: Kantor PU Propinsi Sulawesi Utara, 1979

Adam, L., *Pemerintahan di Minahasa*, Jakarta: Bhratara, 1975

Agung, Ide Anak Agung Gde, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

Colombijn, Freek, *Paco-paco (Kota) Padang. Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad Kedua Puluh dan Penggunaan Ruang Kota*, Padang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dengan Badan Warisan Sumatera Barat, 1994.

- Evers, Hans Dieters & Rudiger Korff, *Urbanisme di Asia Tenggara. Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Graafland, N., *Minahasa. Negeri, Rakyat, dan Budayanya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Laporan Politik Tahun 1837*, "Saatkundig Overzicht van Nederlandsch Indie, 1837", Djakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sedjarah Arsip Nasional RI, No. 4, 1971.
- Leirissa, R.Z., *Minahasa Di Awal Perang Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Merah Putih dan Sebab-Musababnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Lolong, H.A., *Sejarah Pendudukan Jepang di Minahasa 1942-1945*, Manado:1989.
- Mamengko, Roy E (ed.), *Etnik Minahasa. Dalam Akselerasi Perubahan. Telaah Historis, Teologis, Antropologis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Mawikere, Raymond, "Minahasa dan Kolonialisme; Warisan Sejarah, Akselerasi Perubahan, dan Dinamika Hubungan sampai Akhir Abad ke-19", dalam Roy E. Mamengko (ed.), *Etnik Minahasa. Dalam Akselerasi Perubahan. Telaah Historis, Teologis, Antropologis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Molsbergen, E.C. Godee, *Geschiedenis van de Minahasa tot 1829*, Weltevreden: 's-Gravenhage – Martinus Nijhoff, 1928.
- Omas, Djoni Herjanto, *Sejarah Perkembangan Komando Daerah Militer XIII/Merdeka di Sulawesi Utara 1958-1985*, Manado: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, 1997.

- Pantouw, Bertha, *Minahasa sebelum tahun 1829 dan beberapa perubahan dalamnya. Kurun waktu 1824-1846*, dalam Roy E. Mamengko, (ed.), *op. cit.*, hlm. 57;
- Parengkuan, FEW, et al., *Sejarah Kota Manado 1945-1979*, Jakarta: Depdikbud, 1986.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Soepangat, "Sejarah Perkembangan Sistem Perencanaan Tata Ruang Pembangunan di Indonesia", Jakarta: Buletin Kotapraja; No 4, Tahun VIII/1979.
- Turang, Alex, *Tinjauan Singkat Pemerintahan Kota Manado*, Manado: Tesis Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangie, 1979.
- Tumbel, Erni H., *Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado Tahun 1919-1971*, Manado: Skripsi Fakultas Sastra Unsrat, 1996.
- Wiryomartono, A. Bagoes, *Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia; Kajian mengenai Konsep, Struktur, dan Elemen Fisik Kota sejak Peradaban Hindu Budha, Islam hingga Sekarang*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Nilai HAM Dalam Tradisi Lisan Masyarakat Bugis - Makassar

Oleh : Wahyuddin¹

Pendahuluan

Awal abad XX ditandai dengan perubahan konstalasi politik dunia dimana era perang dingin berakhir. Negara-negara yang dahulunya berada dibawah rezim penjajah satu persatu mulai mendeklarasikan kemerdekaan negaranya. Situasi tersebut membawa implikasi besar dalam tatanan global. Sistem politik dunia yang ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi perlahan-lahan mulai dikendalikan oleh negara adikuasa Amerika Serikat dengan jargon demokrasinya. Cengkeraman ide demokrasi yang disebarkan Amerika merambah hampir seluruh negara dibelahan dunia, meskipun beberapa negara juga masih mempertahankan sistem politiknya sendiri. Indonesia sebagai bagian dari negara dunia juga tak bisa mengelak dari kecenderungan global tersebut.

Tentu perubahan sistem politik dunia yang memengaruhi politik Indonesia juga secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi tatanan nilai dalam masyarakat. Demokrasi dengan berbagai nilainya harus “berhadapan” dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum konsep demokrasi yang dipromosikan oleh Amerika Serikat. Timbul pertanyaan sekaitan hal tersebut, apakah konsep demokrasi tersebut merupakan sesuatu yang baru, dalam arti merupakan nilai asing bagi masyarakat Indonesia yang karena otoritas politik mencoba

¹ Staf pengajar pada fakultas Ilmu Budaya Unhas

untuk dilaksanakan, ataukah demokrasi itu merupakan sebuah istilah baru yang sebenarnya nilai-nilai dasarnya telah ada di masyarakat kita. Hal lain juga yang berkaitan adalah konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan paket dari demokrasi, dimana sebuah negara dikatakan benar-benar demokratis jika negara tersebut secara serius telah menghormati (to respect), menjaga (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak warga negara. Dalam kaitan tersebut juga muncul pertanyaan apakah konsep Hak Asasi Manusia yang secara meluas telah diakui oleh hampir semua negara dengan menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 (Duham 1948), bahkan Indonesia selain menjadi negara yang ikut menandatangani Duham tersebut, juga telah meratifikasinya kedalam sistem hukum nasional sehingga konsep HAM tersebut berlaku secara mengikat dalam wilayah negara Indonesia merupakan sebuah konsep yang baru atau sebuah konsep yang secara substansi berkaitan dengan sistem nilai masyarakat Indonesia.

Hal-hal tersebut penulis anggap penting untuk memberikan klarifikasi mengenai apakah demokrasi dan HAM merupakan sebuah nilai “asing” atau merupakan nilai yang telah ada dalam kebudayaan masyarakat kita tetapi muncul dengan istilah lain dan secara bersamaan dipromosikan oleh pihak Amerika yang kebetulan dalam hal-hal lain merupakan representasi negara yang sering menjadi polisi dunia. Dikotomi antara sesuatu yang merupakan nilai “asing” dan nilai yang berasal dari masyarakat sendiri tentu memberikan pengaruh dalam implementasi konsep dan nilai tersebut menjadi kebijakan budaya dan politik negara. Adanya stereotipe dari sarjana barat yang melihat bahwa nilai-nilai masyarakat lokal bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia internasional juga menjadi indikasi adanya sebuah persoalan dialog antara masyarakat Barat dan masyarakat negara berkembang. Selain itu usaha penegakan HAM yang merupakan

usaha penghormatan terhadap martabat manusia sering disalahartikan sebagai usaha imperialisme oleh negara-negara barat. Karena itu dialog antar nilai kebudayaan dalam hal ini nilai HAM yang terwujud dalam pasal-pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan nilai kebudayaan lokal masyarakat Indonesia (Bugis-Makassar) menjadi relevan.

Kebudayaan dan Tradisi Lisan

Kebudayaan sebagai sebuah istilah dimaknai secara berbeda-beda oleh para pakar. Meskipun demikian Koentjaraningrat (2004) membagi wujud kebudayaan dalam tiga pengertian yakni kebudayaan sebagai sistem nilai, ide, norma (cultural system), kebudayaan sebagai suatu kompleksitas kelakuan berpola (social system) dan yang ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Pengertian kebudayaan tersebut memperlihatkan sebuah pengertian yang mencakup keseluruhan aspek manusia, mulai dari yang abstrak berupa ide, nilai hingga yang kongkrit dan dapat diobservasi yakni perilaku dan benda-benda budaya. Berangkat dari pengertian demikian tersebut diatas, sistem nilai sebuah masyarakat yang bersifat abstrak dapat dipelajari salah satunya melalui tradisi lisan masyarakat.

Tradisi lisan difahami sebagai segala wacana yang diucapkan meliputi yang lisan atau sistem yang bukan aksara, disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut dimana keberadaannya dalam masyarakat merupakan pencerminan nilai-nilai yang mereka anut. Kehadiran tradisi lisan dalam masyarakat memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah media pendidikan (pedagogical device). Melalui tradisi lisan masyarakat mentransformasikan nilai-nilai mereka kepada para generasi penerusnya. Hampir segala aspek nilai kehidupan ditransformasikan melalui tradisi lisan misalnya nilai moral, nilai

hukum dan sejarah. Dengan demikian tradisi lisan menghubungkan satu generasi dengan generasi lainnya dalam satu kelompok masyarakat. Sistem nilai, perilaku masyarakat pada satu kurun waktu tertentu memiliki korelasi dengan teks-teks lisan yang mereka sering dengar karena baik disadari maupun tidak disadari, teks lisan tersebut meresap ke dalam alam bawah sadar masyarakat kemudian menjelma menjadi nilai dan selanjutnya mengarahkan perilaku. Karena itu untuk memahami kebudayaan suatu masyarakat dapat dilakukan dengan memahami tradisi lisan mereka yang memuat totalitas ideologi dan konsep-konsep dasar tata kehidupan mereka.

Masyarakat yang mentransformasi nilai kebudayaan mereka melalui tradisi lisan biasanya berciri komunal karena sifat tradisi lisan adalah proses dari mulut ke kuping dimana mendengarkan itu bersifat kolektif. Berbeda dengan masyarakat yang tidak memiliki tradisi lisan dalam transformasi kebudayaannya, biasanya masyarakat belajar kebudayaan melalui membaca dimana proses membaca bersifat individual. Masyarakat Bugis-Makassar yang dikenal memiliki tradisi lisan memang merupakan masyarakat yang cirinya bersifat komunal, dimana sifat kebersamaan antara individu terjalin begitu erat.

Tradisi lisan sebagai media untuk merawat dan melestarikan kebudayaan menduduki peran yang sangat penting dalam menjaga kohesi sosial masyarakat. Ketika seorang yang "dituakan" dalam sebuah komunitas bercerita kepada sekelompok pendengar maka selain terjadi transformasi kebudayaan melalui cerita, kebersamaan antara pendengar sendiri dan pendengar dengan pencerita menimbulkan kedekatan emosional yang pasti tidak dijumpai dalam masyarakat dengan budaya aksara-membaca karena memang bersifat individual. Memang dalam realitas keseharian dewasa ini terdapat berbeagai media yang juga secara lisan mentransformasikan pengetahuan dan informasi semisal media elektronik, namun kadar ataupun

posisinya berbeda dengan tradisi lisan dimana pencerita berhadapan langsung dengan para pendengarnya. Karena itu disematkan istilah kepada fenomena yang terakhir tersebut sebagai *primary reality* dan yang kedua disebut sebagai *secondary reality*. Melalui pembahasan ini, penulis ingin memperlihatkan peran penting yang diemban tradisi lisan dalam melestarikan kebudayaan, sehingga sebaliknya juga, untuk mengerti kebudayaan sekelompok masyarakat, kita dapat mempelajari tradisi lisan mereka. Karena itu penulis menganggap nilai-nilai kebudayaan Bugis-Makassar dapat dipelajari melalui tradisi lisan mereka.

Sejarah dan Konsep HAM internasional

Sejarah lahirnya HAM merupakan sebuah periode pergulatan manusia dan kemanusiaan. Sepanjang abad pertengahan di Eropa diselimuti oleh “awan kegelapan” dimana ketika itu martabat kemanusiaan sangat direndahkan oleh kekuasaan raja-raja yang didukung otoritas gereja. Bangsawan dan agamawan mengklaim kebenaran mereka sebagai kebenaran mutlak. Rasio individu harus tunduk dibawah dogma bahwa bangsawan merupakan keturunan dewa yang karenanya titahnya absolut. Periode ini berlangsung cukup panjang hingga mulai muncul kesadaran masyarakat yang meskipun sifatnya masih terbatas tentang perlunya penghargaan terhadap hak-hak individu tanpa memandang status yang lain. Dua peristiwa besar menandai kebangkitan kesadaran masyarakat terhadap perlunya penghargaan terhadap individu yakni deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 dan berkobarnya Revolusi Prancis tahun 1789. Kedua peristiwa tersebut merupakan puncak-puncak perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan sepanjang waktu sebelumnya. Perlu juga diketahui bahwa peristiwa tersebut digerakkan oleh semangat pentingnya

hak-hak individu dihargai tanpa ada perbedaan apapun jua. Setelah periode tersebut muncul suatu gerakan anti terhadap persamaan hak-hak manusia. Ras Aria merasa bahwa diri mereka berbeda dengan ras lainnya. Akibat lanjutannya adalah perang dunia terjadi yang menelan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Diakhir peperangan itulah kemudian muncul kesadaran baru tentang pentingnya melindungi manusia dari penderitaan dan kesengsaraan. Puncaknya kemudian pada tanggal 10 desember tahun 1948, anggota negara PBB melalui resolusi 217 A mendeklarasikan komitmen mereka terhadap penegakan hak-hak individu dan warga negara dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Setelah peristiwa itu disusullah dengan munculnya sejumlah konvensi-konvensi internasional yang merincikan hak-hak apa saja yang negara harus dihormati kaitannya dengan warga negara mereka.

Perdebatan mengenai apa itu sesungguhnya yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia belumlah tuntas hingga saat ini. Para cendekia berpendapat dengan menggunakan cara pandang yang berbeda sehingga mengakibatkan tinjauan yang berbeda pula. Secara umum, terdapat dua pandangan dalam melihatnya. Sebahagian ahli mengatakan bahwa konsep HAM bersifat universal yang terdapat pada semua agama maupun pandangan filsafat dunia (Chun 2001), namun ahli lain ada juga yang berpendapat bahwa konsep HAM lahir di barat dan proses universalisasinya terjadi belakangan. Berdasarkan beberapa bacaan yang mendukung tulisan ini, konsep HAM bermula dari pemikiran bahwa Tuhan menurunkan sejumlah hak kepada manusia yang bersifat alamiah (*natural right*). Hak yang bersifat alamiah tersebut berbeda dengan hak-hak yang didapatkan dari hukum. Karena itu Thomas Hobbes membedakan istilah *right* dan *law*. Pandangan ini kemudia dipertegas oleh Jhon Locke yang berfikir bahwa hak-hak yang bersifat alamiah dimiliki oleh masing-masing individu. Untuk menjaga hak-hak tersebut, maka dibuatlah

kontrak antar warga negara dengan negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Locke menegaskan bahwa *natural right* berpusat pada individu.

Dalam perjalanannya, penegakan HAM yang diakui oleh secara bersama seperti yang termaktub di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi acuan dalam menilai apa yang dimaksud dengan nilai-nilai HAM universal/internasional, karena itu dalam tulisan ini akan coba dilihat nilai HAM yang terdapat dalam tradisi lisan masyarakat Bugis-Makassar dengan nilai-nilai HAM universal yang termaktub dalam pasal-pasal DUHAM.

Klasifikasi HAM dalam DUHAM

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) terdiri atas 30 pasal yang memuat prinsip-prinsip dasar HAM. Dari ke-30 pasal tersebut, kita dapat mengklasifikasi secara umum beberapa jenis hak yakni :

1. Hak yang bersifat individu sifatnya, yakni hak-hak yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia seperti hak untuk hidup, kebebasan, keselamatan, hak persamaan perlindungan di depan hukum, bebas dari perbudakan, merdeka atas fikiran sendiri, bebas memilih agama, hak untuk menikah dan membentuk keluarga dll.
2. Hak-hak sipil dan politik (sipol) seperti hak untuk mengeluarkan pendapat, hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas negara, hak kebebasan berkumpul, hak untuk turut serta dalam pemerintahan negara baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya.
3. Hak-hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob) seperti hak atas jaminan sosial, hak untuk memiliki harta, hak untuk secara bebas memilih pekerjaan, hak atas pengupahan yang adil, hak memperoleh pendidikan, hak untuk turut serta

dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, hak menikmati kesenian dll.

Dari keseluruhan hak-hak yang terdapat dalam DUHAM tersebut, tidaklah berarti bahwa manusia sebagai pemilik hak dapat bebas sesuka hati karena dalam DUHAM sendiri terdapat batasan menjalankan hak bahwa setiap orang tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang yang memang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Selain itu juga dalam DUHAM mempertimbangkan penegakan hak-hak individu yang menghormati kesusilaan dalam masyarakat ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Nilai HAM dalam Masyarakat Bugis-Makassar

Sebelum membahas tentang konsep hak dalam masyarakat Bugis-Makassar, penulis memulai dengan konsep “manusia” dalam masyarakat Bugis-Makassar. Manusia dapat diterjemahkan kedalam dua konsep *tau* dan *rupatau*. *Tau* menjadi representasi manusia dengan segala kualitas rohani yang dimilikinya, sebaliknya *rupatau* merupakan representasi segala aspek yang bersifat fisik-jasmaniah. Dikotomi ini sejalan dengan pembagian manusia kedalam dua aspek dalam agama yakni tubuh dan roh. Dalam pandangan masyarakat Bugis-Makassar yang terdapat dalam pesan-pesan orang tua, *tau* itu bersifat universal, artinya kualitas rohani yang dimiliki oleh semua manusia adalah sama, manusialah yang dalam fase-fase kehidupannya yang mengembangkan kualitasnya yang membuat kualitas itu berbeda satu dan yang lain. *Tau* merupakan pengejawantahan Tuhan ke dalam dunia nyata (fisik) yang dimaksudkan sebagai pemimpin dan pengatur alam ini. Karena *tau* itu bersumber dari Tuhan, maka

sifatnya universal dan tak dihapus. Jika kita ingin menunjuk secara langsung yang mana yang disebut *tau* dalam manusia, dapatlah kita sebut bahwa akal dan hati nurani sebagai pengejawantahannya. Semakin akal dan hati nurani dijaga, semakin bermartabatlah manusia tersebut. Pandangan tersebut sejalan dengan Konsep HAM internasional yang termaktub dalam Pasal 1 DUHAM bahwa “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Dalam tradisi lisan kita ketahui bahwa konsep Masyarakat Bugis-Makassar mengenai hal tersebut terefleksi dalam *seddimi tau rupannami maega* (Bugis) dan *se’re mi tau rupannaji jai* (Makassar) yang berarti bahwa manusia itu sebenarnya substansinya hanya satu, namun yang berbeda-beda adalah rupanya (fisik-jasmaniah). Perbedaan manusia secara fisik, ras, agama dan sejumlah identitas lain sebenarnya termasuk kedalam penggolongan manusia dalam arti *rupatau*, sedangkan substansi manusia yang diwakili oleh akal dan hati nurani menjadi representasi *tau* yang bersifat universal. Sehubungan dengan hak tersebut diatas, konsep hak asasi bisa bermakna hak-hak yang terdapat dalam inti manusia yakni *tau* itu sendiri. Karena *tau* itu berasal dari Tuhan, maka Tuhan sendiri pula yang harus mencabutnya. Dalam kaitan tersebut muncullah larangan untuk membunuh sesama manusia. Manusia dalam arti *rupatau* tidak memiliki hak sedikitpun untuk menghilangkan *tau* yang ada pada *rupatau* yang lain. Nilai hak hidup disini sangat jelas terungkap. Dalam pesan – pesan orang tua juga sering didengarkan kalimat *naidi rupataue tempedingki munoi padatta rupatau* (sesama manusia dilarang saling membunuh). Meskipun demikian dalam sejarah dan bahkan hingga saat sekarang hukuman mati masih sering dilakukan, padahal dalam pesan tersebut jelas menolak tegas adanya pembunuhan seseorang oleh orang lain, dalam arti hukuman mati juga tentu tidak dibenarkan. Untuk hal tersebut

penulis akan singgung pada sub bahasan selanjutnya. Inti ajaran/pesan yang kita tarik dari tradisi lisan tersebut adalah semua manusia sebenarnya sama pada pengertian manusia sebagai *tau*. Perbedaan muncul ketika manusia diartikan *rupa tau*. Dari sinilah kemudian muncul apa yang disebut stereotipe, stigma dan sejumlah istilah yang disematkan kepada kelompok masyarakat lain yang berbeda dengan kita. Konsep *the others* muncul karena perspektif yang digunakan sangat bersifat fisik-materialis. Padahal pandangan yang melihat substansi manusia adalah sama sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang universal. Dalam pasal 1 DUHAM disebutkan bahwa “ semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Dalam Pasal 2 Duham disebutkan “ Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, nilai HAM internasional tersebut sejalan dengan nilai manusia dalam pengertian *tau*. Definisi HAM internasional sebagai seperangkat hak-hak yang melekat pada semua umat manusia, merupakan pemberian Tuhan sejak lahir dan tak dapat dicabut oleh siapapun sebenarnya sangat sesuai dengan pemahaman ajaran masyarakat Bugis-Makassar. Karena itu secara umum adanya anggapan bahwa HAM merupakan nilai “barat” tidak sepenuhnya benar. Penampilan HAM yang sering diboncengi oleh politik pemerintah dan politik internasional membuat HAM kerap salah difahami oleh masyarakat.

Hak hidup

Hak hidup merupakan hak yang paling fundamental yang dimiliki oleh semua manusia. Tanpa penegakan hak hidup, maka tidak ada pula penegakan hak-hak lain. Pada pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa masyarakat Bugis – Makassar sangat menghargai hak hidup setiap manusia terbukti adanya pesan *naidi rupataue tempedingki munoi padatta rupatau* (sesama manusia dilarang saling membunuh). Pertanyaan muncul ketika adanya pembunuhan yang dilegalkan sebagai hukuman bagi orang-orang yang terbukti melakukan kesalahan. Dalam kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar dikenal adanya nilai utama berupa *siri'* dan *pessé (paccé)*. *Siri'* atau rasa malu merupakan sebuah sistem gagasan, ide yang merupakan sistem budaya masyarakat Bugis-Makassar. *Siri'* mengandung ungkapan psikis yang dilandasi perasaan malu untuk berbuat sesuatu hal yang tercela serta dilarang oleh kaidah adat. Leonard Andaya (1979) melihat bahwa *siri'* dapat bermakna ganda yang tampaknya saling berkontradiksi. Pertama yakni *schame* (rasa malu) dan yang kedua adalah *self worth* (harga diri). Meskipun tampak kontardiktif, namun sesungguhnya tidak demikian, selanjutnya Andaya mengungkapkan *There is no contradiction in these terms, for a sense of shame implies a conception by a individual of his own self worth from which arises his dignity, siri' is a concept which embraces the idea of self worth and shame*. Laica (1995) menyimpulkan Andaya bahwa kedua aspek *siri'* tersebut harus senantiasa berada pada kedudukan yang saling berimbang. Tanpa keberadaan salah satu aspek akan menjadikan kepribadian pecah serta tidak utuh secara totalitas. Manakala aspek malu mendominasi kepribadian, maka aspek harga diri harus mengimbangi. Manakala aspek harga diri cenderung kepada sikap angkuh, maka aspek malu serta sikap rendah hati harus mengembalikan sikap harga diri pada kedudukan yang berimbang.

Orang yang kehilangan *siri'* berarti orang tersebut kehilangan rasa malu dan juga kehilangan harga diri. Dalam tradisi lisan masyarakat Bugis-Makassar diketahui bahwa *naia tau dek'é siri'na*, *tania tau*, *olokolomi maddupa tau* (Manusia yang tidak punya rasa malu/harga diri bukanlah manusia sejati tetapi hewan berwajah manusia). Dari sini kita lihat bahwa yang membedakan manusia dan hewan hanya harga diri dan rasa malu. Rasa malu dan harga diri hilang ketika orang tersebut melakukan perbuatan tanpa menggunakan akal dan hati nuraninya. Karena itu *tau* seperti yang dibahas sebelumnya merupakan istilah yang disematkan kepada akal dan hati nurani. Orang yang tidak menggunakan keduanya bukanlah *tau* dalam konsep masyarakat Bugis-Makassar. Karena itu peran akal dan hati nurani sangat penting untuk menjaga rasa malu dan harga diri. Lebih lanjut disebutkan pula *siri' é mi riaseng tau* (yang disebut manusia adalah rasa malu dan harga diri). Pesan ini sangat keras memperingatkan bahwa penampilan fisik manusia tidak ubahnya seperti hewan ketika rasa malu dan harga dirinya tidak ada. Sering terjadi salah persepsi bagi masyarakat dewasa ini yang melihat bahwa dengan penampilan fisik yang glamor, mewah akan meningkatkan martabat dan harga dirinya, padahal martabat dan harga diri tidak berkaitan dengan sesuatu yang tampak secara fisik melainkan berhubungan dengan akal dan hati nurani. Semakin manusia menggunakan akal dan hati nuraninya dalam melakukan tindakan, maka akan semakin bermartabatlah orang tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, jika dalam kehidupan kita, ditemukan sekelompok masyarakat yang sangat menghargai dan menganggap harga diri seseorang yang secara fisik tampil mewah sementara akal dan hati nuraninya tidak digunakan, maka itu berarti bahwa masyarakat tersebut telah menurunkan derajat kemanusiaannya setara dengan hewan. Nilai utama yang lain dalam masyarakat Bugis-Makassar adalah *pessé* (*paccé*). Nilai tersebut selalu dipandang berpadanan dengan dengan nilai *siri'*. Andaya (1981)

mengatakan *pessé (paccé)* adalah a *Bugis-Makassar concept of empathy with the members of one's community*. Nilai tersebut bersumber dari *esse babua* yakni perasaan pedih dalam kalbu seseorang karena melihat penderitaan orang lain. *Pessé (paccé)* berfungsi sebagai pemersatu, penggalang solidaritas serta pemuliaan kemanusiaan (*sipakatau*). Ketika ada seseorang yang tertimpa musibah, maka bagi orang yang memiliki rasa *pessé (paccé)* pasti akan segera menolongnya, karena kalau tidak ditolong maka orang tersebut tidak memiliki penghargaan terhadap kemanusiaan. *Sipakatau* merupakan istilah dalam bahasa Bugis-Makassar yang dapat menggambarkan bagaimana semangat saling menghargai, saling membantu dan saling memanusiakan menjadi kunci untuk mengerti nilai *pessé (paccé)* ini. Dari pemaparan dua nilai utama tersebut, hukuman mati dalam konteks nilai masyarakat Bugis-Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut. Seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar norma sosial disebut sebagai orang yang kehilangan *siri'*. Seseorang yang kehilangan *siri'* tersebut tidak lagi dianggap sebagai *tau* karena *siri'e mi riaseng tau*. Konsekwensinya orang tersebut dianggap bukan lagi manusia yang utuh karena yang tertinggal hanya fisiknya saja. Nilainya sama dengan hewan. Seseorang bisa pulih *siri'* nya jika ia mengaku bersalah terhadap perbuatannya dan mendapat hukuman yang setimpal, namun kesalahan yang dianggap sangat berat yang menghilangkan *siri'* seseorang maka ketika ia di hukum mati, sebenarnya bukan lagi manusia dalam arti *tau* yang dihukum mati karena *tau* tersebut sudah tidak berarti tetapi yang dihukum mati adalah *rupatau* saja.

Hak persamaan di depan hukum

Hukum atau dalam dalam istilah lokal disebut *ade* merupakan sistem norma dan aturan-aturan adat (Mattulada 1985). *Ade* berhubungan dengan *siri'* .*Ade* itu menjaga *siri'*.

Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat diyakini oleh masyarakat sebagai batasan yang tidak boleh dilanggar karena kalau dilanggar, maka kita akan kehilangan *siri'*. Dalam tradisi lisan dikenal ungkapan *Siri'émme ri onroang rilino. Utettong ri adeé, najagainnami siri'ta. Naia siri'é sunge naranreng, nyawa na kira-kira.* (Hanya dengan *siri'* kita hidup di dunia. Saya setia pada *ade'* karena ia menjaga *siri'*. Adapun *siri'* jiwa timbalnya, nyawa yang dituju). Lebih lanjut (Laica 1995) mengemukakan *siri'* membangun *ade'* sementara *ade'* menjaga dan memelihara *siri'*. Manakala martabat manusia (*tau*) ditentukan oleh kadar harkat *siri'* didalam dirinya, maka kepatuhan seseorang terhadap *ade'* turut menentukan martabat dirinya sebagai manusia (*tau*). Secara linear kita dapat menggambarkan bahwa masyarakat Bugis-Makassar mempercayai bahwa manusia yang sesungguhnya adalah *tau* yang terdiri atas akal dan hati nurani. Hukum atau *ade* merupakan produk yang lahir sebagai hasil olahan akal dan hati nurani. Karena itu *ade* harus dipatuhi karena itu *siri'*, kalau tidak dipatuhi maka *siri'* juga hilang karena *ade* lahir dari *siri'*. Karena *ade* merupakan pengejawantahan *siri'* maka semua orang memiliki hak dan tanggungjawab yang sama atasnya, karena sesuai asalnya *ade* berasal dari akal dan hati nurani yang dimiliki sama dan setara oleh semua manusia. Begitu pentingnya peran hukum (*ade*) dalam pemerintahan, sehingga dalam tradisi lisan kita jumpai ungkapan *Pada toi iko pakkatenni adeé, isseng majeppui ri asengnge ade', muatutuiwi, mupakarajai, apa ade'é ritu riaseng tau, nakko temmuissengi ri asengé ade'tencaji ritu riaseng tau, apa dé'tu appongenna ade'é sangadinna lempu'é muparajaiwi tau'mu ri déwataé, mumatanré siri' apa ianaritu to maraja tau'i ri déwataé, matanré siri, iana ritu tau temmassarang lempu'é tau makkuaé* (Seperti juga, hai engkau pemangku adat, pamilah dengan sungguh-sungguh apa yang disebut *ade*, peliharalah, hormatilah karena *ade* itulah yang disebut manusia. Apabila engkau tak mengetahui apa yang disebut *ade* maka tak

jadilah manusia itu disebut manusia. Karena tak ada pangkalnya *ade* itu kecuali kejujuran. Perbesarlah rasa takutmu kepada Dewata dan pertinggillah *siri'* karena orang yang besar rasa takutnya kepada Dewata dan tinggi *siri'*nya itulah orang yang tak terpisahkan dengan kejujuran.) Dalam pasal 7 DUHAM disebutkan bahwa " Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini". Sejalan dengan makna pasal tersebut diatas, seorang hakim abad XVI di daerah Wajo , Lapagala Nenek Mallomo menuturkan bahwa *adek'é temakkeana temakkeappo* (hukum tidak beranak dan bercucu). Secara implisit ia mengemukakan bahwa tak ada pengecualian terhadap hukum, setiap orang memiliki akses yang sama. Seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak diperbolehkan untuk bersifat diskriminasi meskipun yang dihadapinya adalah keluarga sendiri. Secara lebih jelas pesan tersebut dilanjutkan dengan mengatakan *Maradeka to Wajo'é, adeknami napopuang* (Rakyat Wajo bebas, hanya hukum yang berada diatas segalanya). Karena itu prinsip independensi hukum bukanlah sebuah konsep baru, begitupula ide kesetaraan di depan hukum telah dikenal sejak minimal pada abad XVI.

Hak sipil dan Politik

Hak sipil dan politik menyangkut hak-hak warga negara sebagai individu dan sebagai masyarakat hubungannya dengan sesama manusia dan hubungannya dengan negara. Pada Pasal 21 ayat 1 sampai ayat 3 Duham disebutkan bahwa : (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya. (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat

dalam jabatan pemerintahan negaranya. (3). Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Pasal ini secara umum mensyaratkan adanya partisipasi secara terbuka dan egaliter bagi semua masyarakat terhadap posisi-posisi di pemerintahan. Ada dua kata kunci sistem pemerintahan sebuah negara disebut menghargai HAM yakni aksesibilitas dan akuntabilitas. Aksesibilitas menyangkut partisipasi egaliter dari masyarakat. Akuntabilitas berarti tidak ada rahasia dalam proses partisipasi. Dalam sebuah cerita dalam *lontaraq mula taué* ketika Sang pencipta ingin menciptakan dunia tengah (dunia manusia), dimana Sang pencipta berkeinginan agar kelak di tempat tersebut akan hidup manusia yang akan mengucapkan doa dan memohon pertolongan-NYA jika terjadi bencana, dipanggillah sang permaisuri untuk diminta pendapatnya. Sang pencipta sebagai simbol Pemimpin dan permaisuri sebagai simbol rakyat merepresentasikan sebuah hubungan yang demokratis, dimana hak suara rakyat didengarkan oleh pemimpin sebelum mengambil keputusan. Dalam tradisi lisan Makassar tepatnya perjanjian antara Karaeng Bayo dan Gallarang yang mewakili rakyat terucap *Makkanamako kimmamio, naia punna massowongkang, tama'lémbarakang. Punna ma'lembarakang, tamassowongkang* (Bertitahlah engkau lalu kami menunduk patuh. Kalau kami menjunjung, kami tidak memikul, kalau kami memikul, kami tidak menjunjung). Maksudnya segala keputusan pemimpin akan dipatuhi sepanjang perintah tersebut memang untuk kebaikan dan adil bagi masyarakat, namun rakyat akan menolak meskipun itu keputusan raja jika perintah tidak adil. Artinya bahwa suara rakyat juga bisa mengubah keputusan pemimpin. Sehingga rakyat betul-betul

berdaulat. Dalam tradisi lisan Bugis lain terdapat ungkapan *Puang temmabawampang, ata tenribawampang* (Raja tidak dapat memerintah sewenang-wenang, kawula tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang). *Puang mappatutu, ata ripatutu, Puang teppaleo, ata tenrileo*. (Raja melayani, kawula dilayani, Raja tidak mengepung, kawula tidak dikepung) Maksudnya pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam memerintah, pemimpin berkewajiban mendengarkan keluhan kesah rakyat. Dalam sebuah ungkapan di Wajo *luka taro datu, telluka taro ade. Luka taro ade telluka taro anang, luka taro anang telluka tau maega*. (Batal ketetapan raja tak batal ketetapan pemangku adat, batal ketetapan pemangku adat, tak batal ketetapan para kepala keluarga, batal ketetapan para kepala keluarga tak batal ketetapan orang banyak.) Ungkapan ini sangat jelas memperlihatkan sebuah jenjang hierarkis pengambilan keputusan dimana suara rakyat (tau maega) menjadi landasan terkokoh dari semua jenis keputusan. Ini menunjukkan ciri komunal masyarakat Bugis-Makassar menempatkan suara mayoritas sebagai inti kesepakatan. Demokrasi sebenarnya menerapkan prinsip ini. Karena itu sistem politik yang demokratis haruslah menghormati HAM dalam hal penegakan hak-hak rakyat. Dari sekelumit gambaran diatas terlihat bahwa konsep demokrasi memiliki akar dalam nilai kebudayaan masyarakat kita, karena itu juga HAM khususnya hak-hak politik yang mengharuskan penghormatan hak individu dalam berperan serta dalam pemerintahan juga terakomodasi. Meskipun memang dalam realisasinya terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam penyaluran aspirasi masyarakat, namun yang terpenting bahwa masyarakat Bugis-Makassar memiliki akar nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak sipil dan politik masyarakat.

Hak – hak pribadi lainnya

Dalam beberapa pasal di DUHAM juga memasukkan perlindungan terhadap hak memiliki harta pribadi, hak atas pekerjaan dan hak atas kesehatan, kesejahteraan termasuk hak atas pangan, pakaian dan perumahan. Pada pasal 17 DUHAM ayat 1 disebutkan bahwa “ setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain”. Pada ayat 2 dilanjutkan dengan “ Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena”. Merujuk pada pasal yang melindungi hak atas kepemilikan harta pribadi tersebut, dalam sebuah episode sejarah perjanjian Karaeng Bayo dan para gallarang terdapat ungkapan *Anné kiallenu kikaraéngang, batang kalémmangi angkaraéngko, téyai panganguamang*. (Bahwasanya kami mempertuan engkau, hanya diri pribadi kami mempertuan engkau, bukan harta benda kami). Ungkapan tersebut secara eksplisit memperlihatkan bahwa meskipun seorang pemimpin memiliki kuasa untuk mengatur kehidupan masyarakatnya tetapi tidak berarti ia boleh dengan sewenang-wenang mengklaim harta benda masyarakatnya sebagai miliknya. Dalam kata lain bahwa masyarakat diakui memiliki hak atas harta mereka sendiri. Secara lebih jelas hak atas kepemilikan harta pribadi terlihat dari ungkapan berikut *Tannualléi jangang ri lérammang, tanukkocikai bayao ri bakampomang, tanualléi kaluku sibatumang rappo sipaémmang*. (Engkau tidak akan mengambil ayam kami dari tempatnya bertengger, engkau tidak akan mengambil telur ayam dari pekarangan kami, tidak mengambil kelapa walau sebutirpun, tidak mengambil pinang walau hanya setandan). Dilanjutkan dengan ungkapan *Punna nia nakaéroki pangnganuammang nuballi sitabba nubballia, nusambéi sitaba nusambéia, nupalaki sitaba nupalaka nakisaréangko, tanutappakiaki panganuammang* (Jika engkau meninggalkan barang milik kami, engkau membelinya sepatut

harganya, engkau menggantinya sepatut pengantiannya, engkau meminta sepatut yang dipinta lalu kami akan memberikan kepada engkau. Engkau tidak boleh mengambil begitu saja milik kami). Ungkapan tersebut memperlihatkan secara jelas bahwa hak atas kepemilikan harta pribadi sejak zaman dahulu telah memiliki akar di kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar. Selanjutnya dalam pasal 25 Duham dikemukakan bahwa “ setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan ...”. Dalam perjanjian pemerintahan yang diadakan oleh Manurungé ri sekkanyili dengan 60 Matoa yang mewakili rakyat di Tana Soppeng, para matoa berkata ...*Mudongiri temmatippa'kkeng, musalipuri temmadingikkeng, muwessé temmakapakkeng*, (engkau menjaga kami dari gangguan burung pipit, maksudnya raja wajib menjaga harta benda rakyat dari gangguan pencuri, engkau menyelimuti kami agar kami tidak kedinginan, maksudnya raja berkewajiban memenuhi kebutuhan pakaian serta perumahan bagi rakyat, engkau menyatukan kami bagaikan seikat padi yang tidak hampa, maksudnya raja berkewajiban menghimpun rakyat guna mendapatkan hasil panen yang melimpah. Dari penggambaran tradisi lisan diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat Bugis-Makassar memiliki akar budaya yang menghargai hak-hak ekonomi. Kewajiban dasar sebuah negara adalah menyediakan kebutuhan pokok masyarakatnya sejalan dengan fungsi pemerintahan Bugis-Makassar di masa lampau. Dalam bahasa Bugis terdapat sebuah konsep *massalipuri* yang artinya memberikan perlindungan dalam segala aspek, rohani dan jasmani termasuk pemenuhan kebutuhan ekonomis. Meskipun demikian konsep tersebut dilengkapi dengan *sitinaja*, maksudnya pemenuhan ekonomi itu tidak berlebih-lebihan dalam arti hidup mewah. Jadi yang dipenuhi adalah kebutuhan dasar yang cukup untuk kehidupan mereka.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya ide-ide tentang hak asasi manusia bukan sebuah nilai baru bagi masyarakat Bugis-Makassar bahkan jauh sebelum Amerika mempromosikannya, nilai tersebut telah memandu praktek kehidupan masyarakat. Anggapan bahwa konsep hak asasi manusia berakar dari kebudayaan "barat" dan melakukan proses universalisasinya melalui pemaksaan negara Adikuasa Amerika. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dikotomi pendapat mengenai apakah hak asasi manusia itu bersifat universal atau tidak terjawab bahwa secara substansi memang nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia ada di kebudayaan lokal masyarakat, meskipun pada prakteknya sering terjadi pelanggaran. Dengan pengetahuan bahwa konsep HAM internasional memiliki akar dalam kebudayaan lokal masyarakat kita diharapkan membuat baik pemerintah maupun masyarakat menganggap HAM bukan lagi sebagai nilai asing ataupun imperialisme baru dari negara barat. Hal tersebut penting dalam pergaulan internasional mengingat salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah penegakan HAM dalam sebuah negara. Karena itu tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melakukan penegakan HAM. Penegakan HAM tentu akan mengakibatkan kondisi masyarakat akan semakin kondusif. Dengan kondisi yang kondusif tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, karena salah satu alasan penghambat perekonomian adalah ketika para investor/pengusaha khawatir untuk menginvestasikan dananya karena alasan tidak ada jaminan keamanan. Jika negara telah menjamin rasa aman dalam masyarakat, negara menjamin hak individu untuk bebas dari rasa takut maka secara otomatis hal tersebut akan merangsang para pelaku ekonomi untuk berinvestasi, termasuk didalamnya pelaku pariwisata. Citra negara yang tidak

lagi dicap sebagai negara pelanggar HAM akan membuat masyarakat internasional akan melihat Indonesia sebagai negara kunjungan wisata yang dengan demikian perekonomian negara juga bisa meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Leonard Y .1979. *A Village perception of Arung Palakka and the Makassar War Of 1666 -1669*, dalam Anthoni Reid dan david Marr (eds.), *Perception Of the past in South East Asia*. Singapura.
- _____. 1981. *The heritage of Arung Palakka*, VKI, 91, The Hague : Nijhorf
- Duranti Alessandro. 1997. *Linguistic Anthropology*. Cambridge University Press
- Elsam. 2001. *Instrumen pokok HAM internasional*. Jakarta.
- Geertz Clifford. 1973. *The interpretation of culture*. Basic books: New York
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Aksara Baru
- Marzuki Laica. 1995. *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar* (Sebuah Telaah filsafat hukum). Hasanuddin University Press
- Mattulada. 1985. *Latoa. Satu Lukisan Analitis terhadap Antropolgi Politik Orang Bugis* Disertasi UI tahun 1975. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Tol dan Pudentia. 1994 . *Folklore Indonesia*. Jakarta. Temprint

CITRA WANITA DALAM CERITA RAKYAT MAKASSAR:

RELEVANSINYA DENGAN MASA KINI

Oleh :

Muslimat

A. Pendahuluan

Isu tentang wanita sejak dahulu telah menjadi perhatian, terutama bagi mereka yang dengan kepekaan sosialnya “melihat” ketidakadilan perlakuan terhadap wanita di dalam keluarga dan masyarakat. Topik ini, bahkan, merupakan aspek fundamental dari suatu agama dalam kaitannya dengan kemampuan agama tersebut membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan. Dalam agama Islam misalnya, pemikiran-pemikirannya senantiasa diwarnai dengan bahasa eksklusif tentang wanita. Dalam Al-Qur'an, digambarkan bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW bertujuan membebaskan manusia dari belenggu penindasan yang menghilangkan integritas kemanusiaan mereka (QS. A1-A'raf: 157). Di samping mengajarkan tentang keesaan Tuhan, Al-Qur'an juga merekam berbagai kisah penindasan yang terjadi pada masa kenabian Muhammad seperti perbudakan, penganiayaan anak yatim, subordinasi wanita, dan bentuk-bentuk marginal lain (Dzuhayatin, 2002- 12)

Wanita sebagai objek penelitian pun sudah banyak dan sejak lama dilakukan penelitian yang muncul kembali pada tahun 60-an dan berkembang di lingkungan universitas dalam bentuk penelitian ilmiah sesungguhnya bersumber dari gerakan

feminisme (Andersen, 1983:10-12). Gerakan ini muncul pada abad ke-18 dan dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa wanita sepanjang sejarahnya mengalami subordinasi dan perlakuan sewenang-wenang. Ketidakadilan terhadap wanita menurut sejarahnya tampak dalam setiap sisi kehidupan. Dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, baik di dalam suatu rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Inti gerakan ini diarahkan kepada kesadaran bahwa di dalam masyarakat ada suatu golongan manusia yang belum ter pikirkan nasibnya, yaitu kaum wanita (Sadli, 1995: 14-15).

Di Indonesia, pemikiran-pemikiran tentang wanita muncul melalui gagasan-gagasan R.A. Kartini. Kartini berpendapat, orang yang paling menderita dan sengsara di bawah sistem kolonialisme adalah wanita. Menurutnya, wanita tidak hanya mengalami penjajahan kolonial tetapi juga terkekang oleh adat-istiadat atau nilai-nilai budaya (Suryochondro, 1995: 14-15). Di sinilah awal munculnya organisasi-organisasi wanita sebagai wadah untuk memikirkan masalah-masalah wanita di luar lingkungan domestik.

Objek penelitian yang berkaitan dengan peran dan posisi wanita di dalam masyarakat sangat kompleks, termasuk di antaranya penelitian terhadap karya sastra. Dalam kaitannya dengan sastra, salah satu topik penting adalah bagaimana wanita direpresentasikan di dalam teks sastra. Hal ini terkait dengan hubungan antara karya sastra dengan masyarakat, dengan pengarang, baik sebagai individu yang dengan kediriannya mempunyai konsep dan gagasan dalam memandang kehidupan (wanita) atau pun sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat

Di dalam dunia sastra Barat, karya sastra yang lahir dalam jumlah besar menggambarkan stereotipe-stereotipe wanita. Karya-karya tersebut mendefinisikan wanita sebagai wanita dalam hubungannya dengan kepentingan pria, tidak

mempresentasikan pengalaman kaum wanita, tetapi menggambarkan wanita menurut pandangan pria (Donovan, 1990:266-267)

Citra wanita dalam sastra Indonesia menggambarkan pula gejala universal dengan ciri peran berdasarkan jenis kelamin. Seksualitas dan identitas kewanitaan dalam sastra Indonesia dibentuk oleh standar-standar maskulin dan mereka merasa menderita jika menyimpang dari norma patriarkhal (Hellwig, 1994:187-204). Di samping itu, sejumlah novel menampilkan wanita-wanita yang memperoleh penentuan diri dan kebebasan individualnya. Mereka memiliki kekuatan untuk bertindak secara otonomi.

Fenomena yang mewarnai karya sastra Barat dan Indonesia dengan muatan persoalan penindasan dan subordinasi wanita, ditemukan pula sebagai ciri yang menandai karya sastra klasik Makassar terutama yang berbentuk prosa (cerita rakyat). Persoalan yang dibicarakan di dalam cerita rakyat Makassar (selanjutnya disingkat CRM) adalah persoalan kemanusiaan yang bersifat universal. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat erat relevansinya dengan kehidupan masa kini dan dipandang bermanfaat untuk penataan masa depan yang lebih baik. Urgensi persoalan yang secara substansial terdapat dalam cerita rakyat Makassar ini, menjadikannya objek kajian yang menarik.

B. Cerita Rakyat Makassar

Cerita rakyat adalah cerita yang berbentuk prosa, tidak dikenal siapa pengarangnya dan tersebar secara lisan (Abrams, 1981: 66-67). Cerita rakyat merupakan cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan (KBBI, 2002:210). Menurut William R. Bascom (dalam Danandjaya, 2002:50) cerita rakyat dibagi tiga yaitu *mite*, *legenda*, dan *dongeng*. Ketiga jenis cerita ini menurut Bascom masing-masing memiliki

ciri-ciri yang menandainya. Genre ini diakui sebagai hasil kreativitas masyarakat kolektifnya.

Objek penelitian yang diuraikan dalam makalah ini adalah cerita rakyat Makassar, yaitu cerita yang lahir di tengah-tengah masyarakat Makassar pada masa lampau. Cerita ini merupakan cerminan sikap, pandangan, dan cita-cita masyarakat Makassar pada waktu itu yang hidup di bawah nilai-nilai tradisional yang mengungkung kehidupan wanita.

Cerita *Sitti Naharirah* (1999), selanjutnya disingkat CSN, *Kisah I Marabintang* (1995), selanjutnya disingkat KIM, dan *I Mandik Daeng Rimakkah* (1992), selanjutnya disingkat IMDR menjadi sampel yang diuraikan dalam tulisan ini. Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Bascom (dalam Danandjaya, 2002:50), cerita ini berbentuk legenda. Ketiga cerita yang masing-masing telah diterbitkan dalam bentuk tercetak tersebut, dipandang representatif terhadap populasi dengan pokok masalah yang menjadi objek formalnya.

Cerita dimaksud diperkirakan lahir pada saat orang Sulawesi Selatan umumnya dan orang-orang Makassar khususnya berada di bawah tekanan orang-orang Eropa yang ingin menanamkan kekuasaannya serta nilai-nilai dan faham yang dianutnya, yaitu pada abad XVII-XIX. Ketika itu, orang-orang Makassar hidup dengan norma dan nilai-nilai budaya yang diperlakukan secara ketat. Penyimpangan terhadap suatu nilai dimaknai sebagai bentuk pelanggaran. Dengan demikian, yang bersangkutan harus bersedia menerima sanksi dari masyarakatnya.

C. Karya Sastra sebagai Cermin Masyarakat

Sebagai salah satu bentuk karya sastra (lama), cerita rakyat berfungsi sebagai cermin dari masyarakatnya. Hubungan ini dapat dipahami karena sebagai karya sastra, cerita rakyat bukanlah semata-mala hasil imajinasi pengarang, melainkan hasil

keaktivitas pengarang di dalam merespon realitas objektif yang dilihat atau diketahuinya. Dalam perspektif sosiologi sastra, para ilmuwan sastra memperlakukan karya sastra sebagai produk yang dikondisikan oleh suatu keadaan sosial dan tuntutan-tuntutan pada saman itu (Abrams, 1981:76).

De Bonald (dalam Wellek, 1989:10) tebih jauh menjelaskan bahwa karya sastra adalah ungkapan perasaan masyarakat (*literature is an expression of society*). Pernyataan ini dimaknai oleh Wellek bahwa sastra mencerminkan dan mengekspresikan hidup. Pengarang tidak bisa tidak mengekspresikan pengalaman dan pandangannya tentang hidup tetapi tidak benar kalau dikatakan bahwa pengarang mengekspresikan kehidupan secara keseluruhan atau kehidupan saman tertentu secara konkret dan menyeluruh. Teeuw (1982: 18-26) menawarkan empat cara yang mungkin dilakukan, yaitu (1) afirmasi (menetapkan norma-norma yang telah ada; (2) restorasi (ungkapan kerinduan kepada norma yang sudah usang; (3) negasi (pemberontakan terhadap norma yang sedang berlaku; dan (4) inovasi (mengadakan pembaruan terhadap norma yang telah ada).

Uraian di atas mengandung pengertian bahwa karya sastra, selain merupakan cermin dari kehidupan sosial, juga berpotensi untuk menyampaikan kenyataan yang bertentangan atau berbeda dengan kehidupan nyata untuk memperoleh sesuatu yang dicita-citakan oleh pengarang, suatu kebenaran yang menurut pengarang harus diperjuangkan. Hal inilah yang terlihat dalam CRM. Cerita rakyat Makassar memperlihatkan penolakan (negasi) terhadap nilai yang ada di dalam masyarakat dan menciptakan nilai baru (inovasi) untuk mencapai kehidupan yang dirindukannya, terutama yang berkaitan dengan kehidupan wanita

Suatu pendekatan yang masih bercikal bakal pada sosioiogi, yaitu feminisme, terutama feminisme liberal, memberikan perhatian khusus kepada kehidupan wanita. Feminisme Liberal menekankan pemikirannya pada individu, yaitu pentingnya

kebebasan dan otonomi individu. Feminis ini menyuarakan persamaan hak antara pria dan wanita. Feminis ini beranggapan bahwa subordinasi wanita berakar dari keterbatasan hukum dan adat yang menghalangi wanita masuk ke dalam lingkungan publik. Masyarakat menganggap bahwa wanita karena kondisi alamiah yang dimilikinya, kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik dibandingkan pria. Oleh karena itu, wanita dianggap tidak mampu menjalankan peran di lingkungan publik. Anggapan inilah yang ditentang oleh feminisme liberal. Menurut kaum liberal, manusia (wanita dan pria) diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama, dan harus pula mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya (Madsen, 2000:135-37).

Feminis Liberal menekankan bahwa, peraturan, hukum, dan undang-undang negaralah yang bertanggung-jawab terhadap penindasan dan subordinasi wanita. Pemisahan wanita sebagai kelas dengan identifikasi pribadi dan rumah tangga sementara bidang publik secara eksklusif diberikan kepada pria ditekankannya sebagai bentuk subordinasi (Stanton dalam Madsen, 2000: 338-40). Penggunaan teori feminis di dalam penelitian sastra dikenal dengan istilah kritik sastra feminis. Pendekatan inilah yang digunakan di dalam mengungkapkan citra wanita dalam CRM. Dengan pendekatan ini akan terlihat bagaimana seorang wanita diberi peran dan bagaimana ia menerima dan menjalankan perannya sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh pengarang.

D. Wanita dalam Pandangan Nilai-Nilai Budaya Makassar

Nilai-nilai budaya yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah nilai-nilai sosial masyarakat Makassar yang mengatur kehidupan wanita baik secara pribadi maupun dalam interaksinya dengan masyarakat sebagai makhluk sosial yang menjadi latar penciptaan cerita yang menjadi objek kajian yang dibicarakan

dalam makalah ini. Untuk maksud tersebut, pokok bahasan ini diawali dengan penjelasan tentang pengertian nilai-nilai budaya dan batasan pengertian tentang Makassar. Tulisan sederhana ini tidak dapat menjelaskan pengertian dimaksud secara kompleks dan menyeluruh. Uraian ini dimaksudkan memberi pengertian secara sederhana tentang nilai-nilai budaya Makassar tersebut dalam kaitannya dengan objek penelitian.

Nilai-nilai budaya adalah salah satu di antara tiga wujud kebudayaan seperti yang disampaikan oleh Koentjaraningrat (1985:100, 1990:186-187), yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud ini bersifat abstrak dan ada dalam kepala atau alam pikiran warga masyarakat. Wujud ini merupakan sesuatu yang dianggap bernilai, berharga, dan penting di dalam kehidupan mereka. Gagasan-gagasan tersebut tidak lepas antara satu dengan yang lain tetapi selalu berkaitan menjadi suatu sistem dan merupakan jiwa dalam kehidupan masyarakat. Sistem ini disebut sistem nilai budaya dan merupakan pedoman tertinggi yang memberi arah dan orientasi bagi kehidupan warga masyarakat (Koetjaraningrat, 1985: 100, 1990: 186-188, 1985: 25, dan Marzuki, 1995: 100).

Dalam kaitannya dengan objek penelitian yang dibicarakan dalam makalah ini, yang disebut dengan Makassar sebagai latar penciptaan karya adalah Makassar sebagai suatu etnis yang memiliki ciri-ciri dan uraian sejarah tersendiri dalam membangun budayanya. Makassar, yang pada masa lampau merupakan suatu kesatuan dalam pemerintahan yang berbentuk kerajaan yaitu kerajaan Gowa-Tallo (kerajaan Makassar). Etnis inilah yang melahirkan cerita rakyat tersebut pada masanya (sesuai pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam uraian cerita). Cerita ini berlatar belakang masa pemerintahan kerajaan. Cerita ini diwariskan oleh etnis tersebut kepada anak cucunya hingga sekarang.

Orang-orang Makassar hidup dengan norma dan nilai-nilai budaya yang diperlakukan secara ketat dengan menjadikan *Siri'* sebagai nilai fundamentalnya. *Siri'* sebagai harga diri dan kehormatan menuntut pemberlakuan nilai-nilai yang telah dikonvensikan. Sebagai ideologi, *siri'* menuntut tanggung jawab setiap individu untuk senantiasa berperilaku tidak menyimpang dari aturan-aturan. Penyimpangan terhadap suatu nilai dimaknai sebagai bentuk pelanggaran, dengan demikian, yang bersangkutan dipandang "tidak memiliki *siri'* " dan karenanya dipandang tidak memiliki harga diri.

Wanita sebagai bagian dari masyarakat terikat oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu sebagai ciri yang menandai kelompoknya. Wanita adalah harga diri suatu keluarga atau harga diri masyarakat. Demikian nilai budaya mengaturnya dan setiap individu sebagai bagian dari masyarakat harus memahami posisi ini. Ketersinggungan pribadi karena perlakuan yang dipandang tidak sopan terhadap wanita dapat menjadi pemicu ketersinggungan suatu keluarga bahkan menjadi ketersinggungan masyarakat dalam etnis tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebuah perbuatan yang menjurus kepada tindakan merusak nama keluarga dengan mencemarkan kehormatan wanita sebagai anggotanya, berakhir dengan pembunuhan (Yatim, 1983: 32). Itulah sebabnya maka wanita Makassar berdasarkan nilai-nilai tradisionalnya lebih terhormat jika dia tinggal di rumah dengan alasan dia dapat menjaga diri dari hal-hal yang dapat menurunkan harga dirinya. Wanita dipandang sebagai *ati goari* (isi bilik).

Untuk mempertahankan dan melanggengkan posisi wanita sebagai harga diri suatu keluarga, diberlakukan sejumlah aturan. Wanita ditempatkan di rumah karena dikhawatirkan jika mereka meninggalkan rumah, mereka dapat mencemarkan nama baik keluarga. Posisi ini berefek pada pembagian kerja. Tugas wanita adalah segala urusan di dalam rumah dan pria berurusan dengan

dunia luar. Sesungguhnya, orang Makassar tidak bermaksud mendeskriminasi atau pun memarginalkan wanita dengan posisi ini. Namun, disadari atau tidak, posisi ini berdampak negatif bagi kehidupan wanita.

Posisi ini membuat wanita “terpenjara” di rumah dengan sejumlah tugas domestik yang tidak produktif. Mereka (wanita), akhirnya menjadi kelompok manusia yang tidak mengenal dan memahami dunia luar (publik) dan hampir dalam segala hal bergantung pada pria. Kompleksitas dari sejumlah aturan yang harus dipenuhinya menjadikan mereka termarginalkan dan terposisikan pada kelas subordinatif. Akhirnya wanita menjadi inferior terhadap pria. Wanita menjadi makhluk yang “lemah” dan terhadapnya terjadi penindasan dan ketidakadilan.

Tempat wanita yang hanya di rumah menyebabkan berbagai bentuk kesulitan baginya. Ia bukan hanya tidak mampu mengembangkan kemampuan kreativitasnya dan melakukan berbagai hal di luar tugas domestik, melainkan juga menjadi tidak punya pengetahuan. Pada kondisi ini, kemudian masyarakatnya mengecap wanita sebagai manusia pemalas, tidak kreatif, tolol, dan bodoh, sementara pria adalah golongan manusia yang tangguh, manusia yang tahan menghadapi tantangan dan cobaan apapun. Dikatakannya, *appaki antu tawanna gaukna buraknea na nikanaya assipa baine, sekrena, kuttui, makaruanna leai, makatalluna dongoki, maka appakna bebeki* (ada empat sifat yang dimiliki oleh seorang pria sehingga dinamakan bersifat wanita, pertama ia pemalas, kedua ia tidak kreatif, ketiga tolol, dan keempat bodoh) (Hakim, 1992:11) Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sifat malas, tidak kreatif, bodoh, dan tolol hanya menjadi sifat mutlak wanita. Jika seorang pria memiliki sifat tersebut, ia dianggap sebagai wanita.

Uraian ini merupakan suatu gambaran citra wanita Makassar dalam kehidupan berdasarkan nilai-nilai budaya tradisionalnya.

Kenyataan inilah yang diprotes oleh masyarakat Makassar pada masa itu melalui cerita rakyat yang dilahirkannya

E. Citra Wanita dalam Cerita Rakyat Makassar

Citra adalah setiap gambar pikiran yang merupakan sebuah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai (gambaran) yang dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap sebuah objek yang dilihat oleh mata, syaraf penglihatan, dan daerah-daerah otak yang berhubungan atau yang bersangkutan (Pradopo, 2002:80) Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang dimiliki oleh seseorang mengenai pribadi atau kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase, atau kalimat dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa atau puisi.

Citra yang dimaksud dalam uraian ini adalah citra yang dihubungkan dengan tokoh wanita yang ada di dalam cerita rakyat Makassar, yaitu semua wujud rupa, gambaran tokoh wanita melalui kesan mental atau bayangan visual yang terekspresikan dari kata, frase, kalimat, baik melalui reaksi secara verbal maupun nonverbal dalam cerita rakyat Makassar. Gambaran tersebut meliputi wujud fisik yang berhubungan langsung dengan jasmani tokoh dan nonfisik berupa pikiran atau gagasan-gagasan, sifat, pola tingkah-laku baik yang berhubungan dengan pribadi maupun dalam kaitan dengan kehidupan sosial tokoh.

Dalam citraan tokoh wanita, cerita Rakyat Makassar "mengemas" bentuk-bentuk penindasan dan ketidakadilan. Cerita ini memperlihatkan dukungan dan penolakan masyarakat terhadap nilai yang berlaku pada masa itu dan memunculkan nilai baru, nilai yang dapat mengangkat posisi wanita di dalam masyarakat. Nilai-nilai baru yang disampaikan lewat peran para tokoh wanita atau pun pria ini sejalan dengan gagasan-gagasan dan pola tingkah laku yang diperjuangkan oleh para pejuang keadilan dan kesetaraan gender. Gambaran gagasan-gagasan

tersebut dan nilai-nilai tradisional yang dipertentangkan antara keduanya dapat dilihat pada pembahasan berikut.

1. Citra Fisik

Citra fisik tokoh wanita yang mencolok dalam CRM adalah kecantikan. Kecantikan merupakan suatu kelebihan fisik (bernilai positif) pada tiap orang yang memilikinya. Dalam cerita ini, Kelebihan tersebut dianggap sebagai sumber malapetaka dan penyulut pertikaian yang menyengsarakan banyak orang. Kecantikan Sitti Naharirah merupakan pemicu kejahatan Nakhoda Husen yang berniat merebutnya dari "tangan" Nakhoda Hasan (CSN, hlm.15) dan menjadi penyebab kesengsaraan hidup Sitti Naharirah.

Kecantikan I Marabintang yang dipersamakan dengan bidadari menyebabkan kesewenang-wenangan I Nojeng Manninggau terhadap isterinya dan menjadi penyebab perang besar yang menjatuhkan banyak korban. Peristiwa ini dipicu oleh sifat tokoh pria yang selalu ingin menguasai segala sesuatu, ia ingin menjadikan I Marabintang sebagai lambang kekuasaan dan pemuas napsu seksnya (KIM, hlm. 227) Jika tidak sebagai simbol pertikaian dan malapetaka, fisik wanita dijadikan sebagai pajangan yang siap ditatap dan "dinikmati" kapan pun pria menginginkannya (IMDR, hlm. 44).

Wanita dalam cerita ini diposisikan sebagai objek, kambing hitam dari berbagai kejahatan dan keburukan. wanita bukanlah tempat kedudukan suara hati, melainkan objek yang dihadirkan untuk memfasilitasi sesuatu menurut pandangan pria (Newton, 1994:190). Analisis ini menunjukkan betapa genting kedudukan wanita di dalam masyarakat. Mereka tidak hanya didudukkan pada posisi negatif dalam hal yang berkaitan dengan kekurangannya, dalam kelebihan-kelebihannya pun ia tetap dipojokkan dan diposisikan secara negatif.

Dalam menghadapi perlakuan para tokoh pria tersebut, para tokoh wanita melakukan perlawanan melalui penolakan dalam bentuk verbal atau pun melalui tindakan-tindakannya. Perlawanan ini menunjukkan bahwa wanita tidak menerima dirinya dijadikan boneka mainan yang diperebutkan. Gagasan ini sama dengan gagasan yang diperjuangkan oleh para feminis. Menurut kaum Feminis, wanita bukanlah cermin kosong dan bukan pula hiasan molek tanpa manfaat atau satwa tanpa pikiran yang dalam kehidupannya sendiri tidak mampu mengeluarkan suaranya (Freiden, 1974: 73-74).

Penolakan tokoh wanita terhadap nilai-nilai budaya dalam cerita tersebut bukan hanya dalam hal yang berkaitan dengan perlakuan tidak adil dalam hubungan yang bersifat fisik, melainkan juga dalam kaitannya dengan posisi dan kedudukannya yang lain. Misalnya, dalam kedudukannya sebagai isteri, sikap atau sifat pemberani, cerdas, bertanggung jawab, mandiri dan berbagai kemungkinan sifat yang lain.

2. Citra Non Fisik

a. Wanita sebagai Isteri

Rumah adalah tempat wanita. Rumah dianggap sebagai tempat suci moral dan moralitas yang tumbuh di dalam rumah dianggap pekerjaan wanita. Keluarga diidealisasikan dengan dunia wanita, terlepas dari kehidupan publik dan merupakan pusat dari perkembangan kepribadian para anggota keluarga (Andersen, 1983:110-111). Nilai-nilai tradisional Makassar yang menjadikan wanita sebagai harga diri suatu keluarga mengharuskan wanitanya untuk tinggal di rumah dan jauh dari kehidupan publik. Bagi seorang

wanita yang berstatus isteri, tempatnya adalah di rumah, memelihara anak dan menjaga kehormatan suami. Pelanggaran terhadap nilai ini dipandang sebagai *siri'* dan menjadikan yang bersangkutan turun harga diri dan kehormatannya.

Dalam cerita rakyat Makassar, narator memosisikan wanita dalam peran tradisionalnya sebagai isteri dalam kehidupan menderita. Mereka diperhadapkan dengan keputusan-keputusan suami yang membuat mereka mengalami beban bathin (CSN, hlm, 12-16, 21, KIM, hlm, 187, IMDR, hlm, 40-44). Sebagai isteri, para tokoh wanita ini tidak dengan pasrah menerima perlakuan suaminya. Mereka adalah wanita-wanita yang bereaksi secara positif dalam menghadapi perlakuan para suami mereka (CSN, hlm, 21, KIM, hlm. 212-214, IMDR, hlm. 44).

Reaksi para tokoh wanita membebaskan diri dari sikap "kuasa" pria, pelepasannya dari ideologi androsentrisme, baik melalui gugatan secara terang-teranga dengan tingkah laku maupun melalui pernyataan-pernyataan secara verbal, terlepasnya dari kehidupan suami karena perceraian, kematian, atau pembuangan sebagai "benda tidak berharga" membawa mereka pada kehidupan berbahagia. Reaksi yang dilakukan dalam kemandiriannya dan pelepasannya dari budaya patriarkhi menuansakan makna pemberlakuan nilai tradisional ini sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki dan tidak layak untuk dipertahankan.

Citra wanita yang tampak dalam CRM tidak hanya memperlihatkan gugatan terhadap ketidakadilan perlakuan suami terhadap isteri di bawah ideologi patriarkhinya, tetapi juga kesalahan dalam memaknai konsep poligami yang tercantum dalam QS. An-Nisa:3.

Menurut Dzuhayati (2002:12), dalam menafsirkan Al-Qur'an, terjadi relasi dialektis antara teks dan konteks yang dalam hal ini diwakili oleh perspektif penafsir. Perspektif sebagai produk dari sosialisasi kultur secara kolektif sedikit-banyaknya akan mempengaruhi penafsiran mereka. Inilah yang menyebabkan terjadinya penafsiran yang bias patriarkhi terhadap kebenaran agama.

I Nojeng Manninggau, salah seorang tokoh antagonis dalam KIM memaknai poligami sebagai takdir Tuhan yang harus diterima oleh isteri dalam bentuk apapun, termasuk berbagai bentuk perlakuan suami sebagai risiko kodrat yang harus ditanggung oleh seorang wanita. Sebagai isteri, I Basse Mantega melontarkan gugatan keras terhadap penafsiran bias patriarkhi yang dilakukan I Nojeng Manninggau untuk mempertahankan "kekuasaannya". (KIM, hlm. 212). Menurut I Base Mantega, I Nojeng telah salah menafsirkan dalil tersebut dan berlindung di balik kesalahan itu untuk keuntungan pribadinya.

b. Wanita Pemberani

Tokoh-tokoh wanita dalam CRM adalah tokoh pemberani. Dalam budaya Makassar, sifat seperti ini merupakan ciri maskulinitas. Wanita dipandang sebagai makhluk yang lemah. Oleh karena itu, mereka harus selalu dilindungi. Dalam merespon pendapat seperti ini, feminisme menegaskan, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita kecuali yang murni biologis. Perbedaan yang tampak seluruhnya disebabkan oleh usaha yang diilhami oleh patriarkhi untuk memasyarakatkan wanita sebagai kelas yang lebih rendah (Barnhouse, 1994:52).

Tokoh-tokoh wanita dalam CRM, adalah tokoh-tokoh pembawa ideologi yang berbeda. Mereka adalah wanita

yang berani menyampaikan kebenaran yang diyakininya dan tidak takut menghadapi kesulitan yang menghadangnya (CSN, hlm.15-1) Selain berani mengajukan pendapat, mereka pun berani menentang maut, menghadapi kesulitan yang mengancam keselamatan jiwanya (KIM, hlm. 234-235, 258, 212-213, 178-183, dan IMDR, hlm. 57). Mereka bukanlah wanita lemah sebagaimana nilai budaya memosisikannya.

c. Wanita Cerdas

Selain pemberani, para tokoh wanita dalam CRM pun memiliki kemampuan untuk memahami secara cepat esensi suatu keadaan baru yang dihadapinya sehingga mampu secara cepat pula menyesuaikan diri dengan keadaan baru tersebut. Ciri ini merupakan ciri orang cerdas (Sarjana dan Diana, 2002: 182-183)), berlawanan dengan sifat tolo yang oleh orang Makassar melalui *pasang* (pesan-pesan) nya dikatakannya sebagai ciri wanita.

Dalam cerita ini pun, narator memperkenalkan nilai-nilai yang memandang pria sebagai sumber kebenaran. Perspektif seperti ini berdasar pada androsentrisme, suatu ideologi yang memandang pria sebagai ukuran segala sesuatu (Rutven, 1990:1). Ideologi seperti ini dapat dilihat pada CSN (hlm. 25), KIM (hlm. 176). Namun, pandangan ini pun digambarkan oleh narator sebagai sesuatu yang harus ditolak. Penolakan tersebut dibuktikan dengan munculnya para tokoh wanita yang dengan kecerdasan dapat menyelesaikan setiap masalah rumit yang dihadapinya (KIM, hlm. 283-259, 288-289, 263, 178, 182). Mereka bahkan mampu mempengaruhi orang lain karena kepandaiannya berdiplomasi (CSN, hlm. 24-26, KIM, hlm.178). Dalam

citraan yang digambarkan oleh narator ini, mereka mampu mengangkat posisinya sebagai orang yang terhormat di dalam masyarakatnya.

d. Wanita Bertanggung Jawab

Seorang wanita (isteri) bertanggung jawab melayani suami, mengurus anak, mengerjakan semua pekerjaan domestik dan menjaga kehormatan suami. Inilah tanggung jawab yang embankan kepada wanita Makassar masa lampau. Para tokoh dalam CRM ini ditampilkan dengan citra yang berbeda. Mereka bukanlah wanita yang hanya mampu melaksanakan pekerjaan domestik melainkan wanita-wanita yang mampu merespon dengan cepat suatu kondisi yang dihadapinya, tanpa menyalahkan keadaan, kondisi, dan lingkungan terhadap apa yang dialami. Mereka bukanlah isteri dengan citra tradisional, melainkan wanita yang mampu menyelesaikan masalah-masalah rumit dengan menaklukkan setiap rintangan yang menghalanginya (CSN, hlm, 22-2-3, KIM, hlm. 234, 240, 243, dan 1MDR, hlm. 77).

Wanita dalam cerita ini diidealisasi berdasarkan citra baru mereka, yaitu citra yang berbeda dengan norma masyarakatnya, dan menjadi wanita menderita di dalam peran tradisionalnya. Gagasan ini merupakan suatu bentuk gugatan terhadap nilai-nilai tradisional yang memosisikan wanita sebagai kelas kedua (*the cecond class*)

Berdasarkan nilai tradisionainya, orang Makassar mengecap wanita sebagai manusia pemalas, tidak kreatif, dan tolol (Hakim, 1992:11). Dalam kondisi seperti ini, wanita bergantung kepada pria secara fisik, mental, dan ekonomi. Wanita inferior terhadap pria karena nilai-nilai budaya mengondisikannya menjadi makhluk yang lemah.

e. Wanita Mandiri

Para tokoh wanita dalam CSN, KIM, dan IMDR adalah wanita-wanita mandiri. Mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik yang berhubungan dengan fisik, mental, dan kebutuhan ekonomi. Sititi Naharirah mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalannya meskipun ia hidup sebagai yatim piatu. Ia hidup secara layak, bahkan memperoleh status terhormat di dalam masyarakatnya setelah terhempas oleh derita perceraianya dengan Nakhoda Hasan dan Nakhoda Husen. (SCN, hlm. 10, dan 18) Ia bahkan menjadi "tulang punggung" pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga yang kemudian dihangunnya bersama suaminya yang ke tiga (CSN, hlm. 22-23).

Citra kemandirian ditemukan pula dalam KIM (hlm. 235-236). Pada bagian ini diceritakan kehidupan seorang wanita lanjut usia hidup di tengah hutan belantara. Ia memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dengan berkebun dan beternak. Wanita tua (si Nenek) melindungi dirinya dengan kemampuan kanuragan dan kematangan jiwanya yang "sempurna". Realitas imajiner ini sangat berbeda dengan realitas faktual kehidupan masyarakat Makassar masa itu.

Keberpihakan narator terhadap sifat dan tingkah laku para tokoh wanita dilakukan dengan cara memenangkan tokoh wanita pada posisi yang berbeda tersebut. Fakta imajiner ini dapat dimaknai sebagai tujuan narator melahirkan cerita-cerita tersebut, yaitu untuk menunjukkan bahwa wanita di dalam kebebasannya dari nilai tradisional yang membelenggunya dapat hidup secara wajar sebagaimana pria melakukannya. Untuk itu, diperlukan

nilai-nilai baru yang mendukungnya. Interpretasi ulang terhadap nilai-nilai budaya sebagai ideologi yang mengatur kehidupan mereka perlu dilakukan.

Ketidakadilan terhadap wanita karena prasangka gender (salah pemahaman terhadap konsep gender) secara "kental" mewarnai CRM. Pelekatan sifat terhadap pria dan wanita yang dilembagakan oleh masyarakat seakan-akan sebagai hal yang kodrati menjadi pemicu ketidakadilan dan penindasan terhadap wanita. Ketidakadilan gender seperti yang dikategorikan oleh Fakih (1997: 12-13) dalam bentuk subordinasi, stereotipe, dan kekuasaan, tampak dengan jelas dalam cerita yang menjadi objek penelitian ini. Topik ini merupakan suatu objek kajian yang menarik untuk diteliti lebih jauh.

F. Relevansi Citra dengan Masa Kini

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya relevansi hasil penelitian ini dengan realitas kehidupan masa kini. Penelitian ini tidak hanya menginformasikan realitas kehidupan masyarakat pada zaman tertentu, tetapi juga memberikan petunjuk tentang salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dalam kehidupan sekarang, terutama yang berhubungan dengan deskriminasi wanita, subordinasi, berbagai bentuk penindasan yang disebabkan oleh ideologi patriarkhi, dan penapsiran agama bias jender yang juga menjadi masalah pokok dalam cerita rakyat Makassar. Narator memberikan jalan ke luar dari masalah tersebut lewat tokoh yang menjadii fokalisor dalam menyampaikan gagasan yang dicita-citakannya.

Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya tradisional yang dianut dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat bertujuan menciptakan tatanan hidup yang lebih baik.

Namun, disadari atau tidak pengejawantahan nilai-nilai tersebut kadang-kadang berpotensi menciptakan ketidakadilan di dalam masyarakat. Hal ini bahkan menjadi penyebab penderitaan dan marginalitas kelompok tertentu di dalam masyarakat. Realitas seperti inilah yang dialami oleh para tokoh wanita dalam CRM. Mereka menderita di dalam citraan tradisionalnya. Mereka tersubordinasi oleh budaya patriarkhi. Di dalam nilai baru yang diperjuangkannya, mereka memperoleh kebahagiaan, mengangkat status dan derajat kemanusiaannya.

Kehidupan seperti ini pulalah yang diperjuangkan dalam gerakan keadilan dan kesetaraan gender saat ini. Untuk itu, perlu membangun suatu kesadaran baru, kesadaran tentang pentingnya reinterpretasi terhadap nilai-nilai tradisional yang masih berlaku di dalam masyarakat yang berpotensi membangun atau menciptakan berbagai bentuk ketidakadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa gagasan tentang perjuangan keadilan dan kesetaraan gender dan kehidupan yang lebih memperhatikan wanita yang menurut sejarahnya di Indonesia diawali dengan gagasan R.A. Kartini, ternyata telah disuarakan oleh masyarakat Makassar beberapa abad yang lalu. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang-orang Makassar (Sulawesi-Selatan) lebih cepat dan lebih kritis di dalam merespon fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakatnya.

G. Penutup

Gerita Rakyat Makassar mengemas dua gagasan pokok, yaitu gambaran nilai-nilai tradisional yang mengunggulkan kehidupan masyarakat Makassar ketika itu dan nilai-nilai baru sebagai ekspresi keinginan masyarakat untuk ke luar dari kehidupan yang terikat oleh aturan-aturan tradisional, terutama dalam segala aspek yang terkait dengan kehidupan wanita. Kedua gagasan pokok ini ditampilkan dengan maksud berbeda, yang

pertarna sebagai sesuatu yang ditentang dan ingin dihilangkan dan yang kedua sebagai ide-ide yang didambakan atau yang dicita-citakan.

Cerita ini memberi gambaran berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan terhadap wanita yang disebabkan oleh nilai-nilai yang mereka anut. Walaupun fakta di dalam cerita tersebut fiktif, hal tersebut bukan tidak mungkin terdapat di dalam masyarakat yang dijiwai oleh ideologi patriarkhi. Penolakan dan perlawanan yang dilakukan oleh para tokoh protagonis dengan caranya masing-masing, kemenangannya dalam reaksi tersebut, mengandung makna keinginan masyarakat pemilik cerita ini untuk menegakkan nilai baru dan ke luar dari kebiasaan tradisional yang mengungkung kehidupan wanita. Kebebasan dan keadilan, merupakan kunci utama perjuangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahrams, M,H. 1981. *A Glossary of Literary Terms*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Andersen, Margaret L. 1988. *Thingking About Women: Sociological and Feminist Persfektives*. Macmillang Publishing Co Inc: New York.
- Barnhause, Ruth Tiffany, 1994. *Identitas Wanita: Bagaimana Mengenal dan Membentuk Citra Diri* (diterjemahkan oleh A.G. Gunandi). Yokyakarta: Canisius.
- Danandjaya, James. 2002. *folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, don Lain-Lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaeni, dkk. 2002. *Rekonstrukst Metodologis Wacana Keselaraun Gender*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.

- Donovan, Josephin. 1990. "Beyon the Net, Feminist Criticism as a Moral Criticism" Dalam K.M.Newton (ed.) *Twentieth Century Literary Theory*. London: Macmillan Education.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transpormasi Sosial*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafid, Muh. Yunus dan Muchlis Hadrawi. 1999- "Cerita Sitti Naharirah" dalam *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai 'I'radisional Sulawesi S'elaton*. Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Kajian dan Nilai Tradisional.
- Hakim, Zainuddin. 1992. *Pasang dan Paruntukkana dalam Sastra Klasik Makassar*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hellwig, Tineke. 1994. *In the Shadow of Change: Women in Indonesian Literature*. Calivornia: Center for Southeast Asia Studies.
- Koentjaraningrat. 1985. "Persepsi tentang Kebudayaan Nasional" dalam Alfian (ed.). *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- _____ 1990 *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Laurenson, Diana dan Alan Swengewood. 1974 *The Sociology of Lite*. London: Granada Publish Limited.
- Madsen, Deborah L. 2000. *Feminist Theory and Literary Practice*. London: Pluto Press.
- Marsuki, Laica. 1995. *Siri' Bagian Kesadara Hukum Rakyat Bugis Makassar: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press. .

- Nappu, Sahabuddin dan Syamsu Rijal. 1998. *Kisah I Marabintang*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Parawansa, P. dkk. 1992. "Sinrilik I Makdik Daeng Rimakkah" dalam *Sastra Sinrilik Makassar*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pradopo, Rachmad Djoko. 2002. *Pengkajiar Puisi*. Yokyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sadli, Supardi. 1995. "Pengantar tentang Kajian Wanita" dalam Tapu Omas Ihrami (ed.). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sarbana, Baban dan Dina Diana. 2002. *Ampuh Menjadi Cerdas Tanpa Batas*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Suryochondro, Sukanti. 1995. "Timbulnya Perkembangan dan Gerakan Wanita di Indonesia" dalam Tapu Omas Ihrami(ed.). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Teew, A. 1982. *Khasanah Sastra Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wellek, Rene dan Austin Warren. 1989. *Teori Kesusasteraan* (diterjemahkan oleh Melani Budianta). Jakarta: PT Gramedia.
- Yatim, Nurdin. 1983. *Subsistem Honorifik Bahasa Makassar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

PELESTARIAN WARISAN BUDAYA *TANGIBLE* : BENTENG-BENTENG YANG DIHANCURKAN DI KOTA MAKASSAR

OLEH : ANWAR THOSIBO

A. Pendahuluan

“Semua benteng pertahanan yang berada di sepanjang pantai kerajaan Makassar (Gowa-Tallo) yang mencerminkan pertahanan terhadap kompeni, telah disetujui untuk dimusnakan, dirobohkan seperti yang ada di Barombong, Panakukang, Garassi, Mariso, Barobbosok, dan lain-lainnya. Yang diperbolehkan berdiri adalah benteng besar Somba Opu untuk tempat tinggal raja (Sultan) tetapi tidak boleh lagi diadakan tembakan-tambahan atau membuat yang lain kembali di manapun juga kecuali atas mufakat kompeni” (pasal 10 Isi Perjanjian Bungaya, 1667)

Isi Perjanjian Bungaya yang dikutip diatas menandai awal mula hancurnya sebagian besar warisan budaya di kota Makassar yang dalam sejarah kebudayaan Indonesia telah menciptakan suatu identitas tersendiri untuk kota Makassar sebagai kota benteng. Dikatakan demikian karena benteng merupakan jati diri dan hasil kegiatan budaya suku bangsa Makassar masa lampau dan sekaligus sebagai kebanggaan yang diakrapi oleh masyarakat luas. Itulah sebabnya maka pemberian nama benteng *Ujungpandang* (Makassar), benteng *Kale-Gowa* dan benteng *Anak-Gowa* dalam pengertian tertentu selalu

diasosiasikan dengan kota Makassar atau diri pribadi orang Makassar.

Ketika benteng satu persatu dihancurkan oleh kompeni Belanda di depan mata rakyat Makassar, tentu saja terasa sangat menyedikan. Rasa kesediaan itu sama seperti ketika Gedung Proklamasi di Jakarta dibongkar atau tatkala warisan budaya dunia yaitu Candi Borobudur terkena musiba akibat ledakan bom yang dipasang oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat dunia sangat menyesalkan tindakan yang demikian, dan di Indonesia, bukan hanya orang Jawa yang merasa sedih dan kehilangan, tetapi seluruh warga bangsa Indonesia, tanpa melihat suku, agama, ras atau asal usulnya. Yang melakukan tidak menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan dosa besar, khususnya dosa terhadap anak cucu generasi kemudian.

Dalam konteks sekarang dan masa depan, dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang sistem pemerintahan yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, maka dalam hal pengelolaan benda warisan budaya, pemerintah pusat hanya bertindak sebagai fasilitator, dinamisator dan koordinator, sementara yang menjadi pelaksana di bidang perlindungan, pemeliharaan maupun pemugaran, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/kota (Suroso MP, 2008 : 1-2).

Berpodaman pada ketentuan yuridis tersebut di atas, maka pemerintah kota Makassar beserta masyarakatnya kini memiliki wewenang penuh untuk melakukan pengelolaan (yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi) dan pelestarian (yang meliputi pembinaan, perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan) terhadap semua obyek warisan budaya yang ada di kota Makassar termasuk benteng. Dalam teknis pelaksanaannya pun, juga perlu memperhatikan perubahan paradigma pelestarian dari yang semula sifatnya statis atau preservasi menjadi pelestarian yang bersifat dinamis atau

konservasi. Dengan perubahan itu maka pengertian konservasi kini merupakan istilah yang menjadi payung dari segenap kegiatan pelestarian yang meliputi preservasi, restorasi, rehabilitasi, adaptasi, revitalisasi dan rekonstruksi.

Bentuk kegiatan pelestarian terhadap benteng-benteng yang kini tinggal merupakan puing-puing reruntuhan tentu saja adalah rekonstruksi, yaitu membangun kembali seperti keadaannya semula. Bila suatu benteng yang hancur akan direkonstruksi, bukan lagi berarti bahwa bangunan benteng tersebut akan dikembalikan ke bentuk dan fungsi aslinya (Eko Budiardjo 1997: 91). Bisa saja benteng tersebut beralih fungsi (*new uses for old building*). Contohnya, benteng *Fort Rotterdam* sudah dijadikan museum, pusat kegiatan seni budaya atau perkantoran seperti sekarang ini. Di luar negeri banyak contoh demikian. Kawasan pertokoan *The Rocks* yang terkenal di Sydney, semula adalah bekas kompleks penjara.

Wacana tentang perlunya rekonstruksi kini semakin sering dikumandangkan oleh organisasi pencinta warisan budaya Makassar. Permasalahan yang umum di sampaikan adalah bahwa demi mempertahankan eksistensi benteng yang hancur serta menghindari salah tafsir atau salah pengertian generasi sekarang, maka satu-satunya yang dapat memberikan jaminan yang lebih pasti dan bermanfaat adalah rekonstruksi. Jika pada akhirnya wacana tersebut dapat dilaksanakan, maka pertanyaan yang segera muncul: apakah kita mempunyai cukup data untuk membangun kembali seperti keadaannya semula? dan apakah ada kerangka kepentingan yang lebih luas selain tuntutan yang bersifat lokal?

Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan di atas, namun sebelumnya kita perlu mengetahui apa yang dimaksud warisan budaya dan bagai mana bentuk pelestariannya ke depan.

B. Konsep Warisan Budaya dan Bentuk Pelestariannya

Konsep warisan budaya beserta penjelasan-penjelasanannya yang akan dikemukakan di sini sebagai besar diambil dari pemikiran seorang ahli arkeologi yaitu Edi Sedyawati (2008: 1-2), dengan sedikit perubahan dan tambahan di dalamnya. Warisan budaya diartikan sebagai segala hasil kegiatan budaya yang diakui sebagai milik bersama oleh suatu bangsa atau suku bangsa, yang dengan demikian seringkali dijadikan sebagai petanda bagi jatidiri bangsa atau suku bangsa bersangkutan. Tidak jarang pula terdapat suatu hasil budaya yang merupakan warisan bersama dari lebih dari satu bangsa atau suku bangsa, sebagai akibat dari persentuhan dalam perjalanan sejarah bangsa dan suku bangsa tersebut. Terjadinya persamaan warisan budaya dapat disebabkan antara lain oleh kegiatan migrasi atau proses saling pengaruh yang dapat terjadi dalam jangka waktu panjang sehingga terjadi peminjaman unsur-unsur budaya secara substansial, baik satu arah maupun dua arah.

Warisan budaya juga dapat dipilah atas yang *tangible* yaitu benda yang dapat disentuh atau dipegang dan yang *intangible* yaitu takbenda, yang sifatnya abstrak dan kongkrit. Penelitian di bidang arkeologi seringkali hanya berkenaan dengan warisan budaya yang *tangible*. Namun demikian, tidak harus berarti bahwa aspek-aspek budaya *intangible* yang terkandung atau tersirat di dalam benda arkeologi tidak menjadi perhatian. Hal itu dapat terjadi ketika dilakukan suatu interpretasi; pemaknaan, fungsi dan kegunaan suatu benda hampir selalu merupakan suatu obsesi para ahli arkeologi

Berbeda dengan yang di atas, terdapat anggapan bahwa warisan budaya yang sepenuhnya *intangible* bukan urusan penelitian arkeologi. Anggapan seperti itu tidak sepenuhnya benar, karena informasi mengenai yang *intangible* dari masa lalu dapat

diperoleh melalui benda-benda dari masa lalu, terutama yang mengandung tulisan dan penggambaran visual seperti yang dapat ditafsirkan dari ornamen *passurak Tongkonan* Toraja atau relief-relief candi Borobudur. Walaupun ada pemilahan tentang warisan budaya, tidak berarti bahwa warisan budaya yang *tangible* itu tidak terkait dengan konsep-konsep maupun proses kerja yang *intangible*. Pada dasarnya, benda apapun yang dibuat atau diambil dari alam dan digunakan oleh manusia tentulah mengandung konsep, setidaknya mengenai nama dan kegunaannya.

Cakupan warisan budaya bangsa juga memiliki persyaratan tertentu yaitu : kebermaknaan yang mendalam dalam sejarah kebudayaan bangsa, keunggulan mutunya, dan pengakuan nasional terhadapnya, meskipun kancah budaya yang melahirkannya terbatas pada suatu kalangan suku bangsa tertentu. Contohnya adalah bangunan benteng *Ford Rotterdam* yang dihasilkan oleh suku bangsa Makassar. Masuknya benteng tersebut sebagai warisan budaya bangsa dilandasi pemikiran bahwa meskipun tempat asal suku bangsa Makassar menunjuk pada wilayah Makassar tetapi sebaran hunian khalayak suku bangsa Makassar di masa kini tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian maka kebudayaan Makassar tidak dapat begitu saja dianggap hanya milik daerah Makassar. Lokalitas warisan budayanya pun hanya berkaitan dengan posisi geografis sebagai asal usul, dan tidak berkaitan sepenuhnya dengan kepemilikan.

Dalam hal pelestarian warisan budaya bangsa, maka dengan mengikuti jalan pemikiran di atas berarti tanggung-jawab untuk perlindungan dan perawatannya perlu menggunakan standar mutu yang sama di seluruh wilayah Indonesia yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Untuk menjaga standar mutu itu tentu diperlukan koordinasi nasional yang ketat. Adapun pemanfaatannya dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi,

Daerah atau Kota, namun dengan menggunakan kaidah-kaidah umum nasional yang harus berwawasan pelestarian.

Tambahan pula bahwa pelestarian yang pada mulanya lebih dipusatkan pada upaya perlindungan dan pemeliharaan warisan budaya sebagai aset bagi pengembangan ilmu pengetahuan (akademik) dan pembentukan identitas jatidiri (idiologik), kini dituntut pula untuk dapat berperan dalam memajukan kemakmuran rakyat (ekonomi). Dengan demikian upaya pelestarian bukan sekedar ditujukan untuk mempertahankan keunikan maupun kelangkaannya agar tetap lestari melainkan juga diharapkan dapat merikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Akhirnya, perubahan yang perlu dilakukan bukan hanya dari segi yuridisnya saja melainkan juga paradigmanya perlu dirubah sehingga pelestarian yang semula yang semula bersifat statis (preservasi) menjadi pelestarian yang bersifat dinamis (konservasi). Pelestarian preservasi, maksudnya benda peninggalan arkeologi yang menjadi obyek preservasi dipertahankan seperti keadaan aslinya. Yang berbentuk puing-puing (tembok, kolom. Reruntuhan) tetap ditampilkan dalam wujud puing-puing; sementara pelestarian konservasi cakupannya lebih luas, sasarannya tidak terbatas pada benda arkeologi saja (*artefak oriented*), melainkan meliputi juga lingkungan (*site oriented*) dan kawasan (*region oriented*) dan bahkan kota yang bersejarah (*Historic towns oriented*).

C. Data Arkeologi Tentang Benteng yang telah hancur

Pelaksanaan survey lapangan dan eskavasi terhadap sejumlah situs benteng yang telah hancur sudah sering dilakukan oleh para arkeolog. Begitu pun keterangan mengenai benteng di Makassar sejak mulai dibangun sampai masa penghancurannya juga telah tercatat di dalam sumber-sumber tertulis. Melalui kedua informasi ini, maka pertama, kita dapat merekam data-data arkeologis dari sisa reruntuhan dan temuan tinggalan lainnya dalam situs benteng sebagai bahan analisis dan sintesis. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penafsiran untuk mencari kesesuaian dengan sumber-sumber tertulis sejaman. Untuk pendataan awal, di bawah ini akan disajikan hasil dari kedua informasi tersebut di atas dan hanya menyangkut beberapa benteng yang dianggap berpotensi untuk direkonstruksi demi kepentingan destinasi budaya.

1. Situs Benteng Somba Opu.

Situs benteng Somba Opu terletak ditepi pantai dan diapit oleh dua sungai yaitu sungai Jeneberang dan sungai Balangberu. Benteng ini diperkirakan dibangun pertama kali pada awal abad XVI, kemudian disempurnakan dengan beberapa penambahan tanpa merubah bentuk denahnya pada pertengahan abad XVI. Benteng ini akhirnya diruntuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1667. Berdasarkan hasil survey permukaan dan eskavasi yang pernah dilakukan maka dapat diketahui adanya sisa-sisa bahan material bangunan benteng beserta tinggalan-tinggalan arkeologi lainnya. Bahan material pembangunan benteng Somba Opu dan sisa reruntuhannya adalah:

1. Batu padas tiga dimensi dengan variasi ukuran
 - (A) 91 X 41 X 25 cm.
 - (B) 82 X 41 X 22 cm.
 - (C) 56 X 31 X 19 cm.
 - (D) 44 X 29 X 18 cm.

2. Batu bata tiga dimensi dengan variasi ukuran
(A) 33 X 20 X 5 cm.
(B) 24 X 15 X 4 cm.
(C) 25 X 22 X 6 cm.
(D) 22 X 12 X 3 cm.
3. Gundukan tanah liat yang gembur dan berpasir dengan warna agak keputihan, termasuk dalam kategori jenis tanah alluvial.

Peninggalan arkeologi lainnya yang ditemukan di permukaan tanah dan di dalam tanah terdiri dari berbagai jenis yaitu:

1. Ribuan fragmen gerabah
2. Kerak besi
3. Ratusan fragmen keramik asing
4. Sumur tua
5. Mata uang asing
6. Meriam
7. Peluruh meriam
8. Buah pala.

Denah Benteng Soba Opu hampir menyerupai bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 660 X 400 atau luas keseluruhan 264.000 meter persegi. Pada mulanya, benteng Somba Opu hanya merupakan gundukan tanah liat mengikuti denah dengan perkiraan tinggi gundukan 1,5 meter (Patunru, 1967:12). Ketika dilakukan penyempurnaan, gundukan tanah diperlebar dan diberi batu padas dengan maksud sebagai pondasi. Tinggi dinding juga di tingkatkan mencapai kurang lebih 7 meter dengan menggunakan batu bata. Adapun ketebalan dinding tidak seragam dengan ukuran antara 3,6 – 4,1 meter. Dinding yang menghadap ke laut diperkuat sebagai pertahanan dengan membangun empat bastion yang berbentuk setengah lingkaran cembung setinggi

dinding. Bastion digunakan sebagai tempat meletakkan senjata berat yaitu meriam dan altileri (Sagimun, 1991 : 48). Adapun dinding yang menghadap ke daratan hanya dibangun sebuah bastion yang berbentuk runcing menjorok keluar.

Ada dua pintu benteng, satu berada di sisi utara bagian barat sedang yang lainnya terletak di bagian selatan. Oleh karena struktur dinding terputus maka kedua pintu ini kini sudah tidak jelas (Hasir Sonda: 1999 : 45). Di dalam benteng terdapat bangunan rumah panggung dari bahan kayu yang digunakan sebagai tempat tinggal raja dan para bangsawan Makassar. Selain itu juga terdapat bangunan Masjid, gudang penyimpanan alat kerajaan dan sumur tua.

2. Benteng Tallo

Situs benteng Tallo terletak ditepi pantai dan diapit oleh dua sungai yaitu Sungai Tallo di bagian timur dan Sungai Anak Tallo di bagian utara. Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan Benteng Tallo dibangun pertama kali, namun perbaikan dan penabahan panjang benteng pernah dilakukan pada awal abad XVII. Kemudian diruntuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1667. Berdasarkan hasil survey permukaan dan eskavasi yang pernah dilakukan maka dapat diketahui adanya sisa-sisa bahan material bangunan benteng beserta peninggalan-peninggalan arkeologi lainnya. Bahan material pembangunan benteng Tallo dan sisa-sisa reruntuhan adalah :

1. Batu padas tiga dimensi dengan variasi ukuran
 - (A) 70 X 36 X 20 cm.
 - (B) 72 X 50 X 25 cm.
 - (C) 60 X 30 X 35 cm.
 - (D) 42 X 17 X 7,5 cm.
2. Batu bata tiga dimensi dengan variasi ukuran
 - (A) 50 X 20 X 25 cm.

- (B) 24 X 13 X 4 cm.
- (C) 27 X 15 X 2,5 cm.
- (D) 24 X 13 X 4,5 cm.

3. Batu Karang dengan ukuran relatif alamiah
4. Perekat (spasi) batu bata berwarna putih
5. Gundukan tanah liat yang lempung berhumus dan tanah gembur berpasir dengan warna agak keputihan, termasuk dalam kategori jenis tanah alluvial.

Peninggalan arkeologi lainnya yang ditemukan di permukaan tanah dan di dalam tanah terdiri dari berbagai jenis yaitu:

1. Fragmen artefak
2. Kerak besi
3. Keramik asing
4. Filitur
5. Genteng
6. Ekofak
7. Peluru meriam
8. Fragmen tembikar
9. Meriam Kuna

Denah benteng Tallo hampir menyerupai bentuk empat persegi panjang dengan perkiraan luas areal secara keseluruhan 60,400 meter persegi. Pondasi dasar benteng ini tidak terbuat dari gundukan tanah liat seperti di benteng Somba Opu tetapi terdiri dari tumpukan batu-batu karang yang susunannya menyebar tidak teratur dengan ukuran lebar 260 cm. Konstruksi dinding menggunakan batu padas dan batu bata berwarna merah. Panjang dinding bagian barat 1180 meter dan di bagian timur 1020 meter. Tinggi dinding 6 meter dengan ketebalan antara 4,5 sampai 5,3 yang berisi timbunan tanah liat. Dinding yang sejajar dengan garis pantai diperkuat sebagai pertahanan dengan membangun 5 buah bastion yang berbentuk setengah lingkaran

cembung setinggi dinding. Bastoan digunakan sebagai tempat meletakkan meriam.

Pintu benteng hanya satu buah dan ditempatkan di sebelah selatan. Pintu ini dinamakan *Timungangga ri Tallo*. Di dalam benteng terdapat bangunan rumah panggung dari bahan kayu yang digunakan sebagai tempat tinggal raja Tallok dan kerabatnya. Selain itu juga terdapat sumur tua yang berbentuk segi empat berdiameter 1,5 cm X 1,5 cm dengan kedalaman 5-7 meter dari permukaan tanah. Juga terdapat batu pelantikan raja yang bentuknya bulat dengan diameter 72 cm dan ketebalan 31 cm. Selain itu, juga terdapat kompleks makam raja-raja Tallo dengan ukuran luas 68 X 68 meter serta gundukan tanah tempat mengintai perahu yang datang (Rasyid, 1983:40).

3. Benteng Sanrobone

Situs benteng Sanrobone terletak di dataran rendah sebelah selatan benteng Somba Opu. Dalam tradisi lisan dikatakan bahwa benteng ini dibangun pertama kali oleh raja Sanrobone yaitu Kare Panca Belong pada awal abad XVI dalam kedudukannya sebagai raja taklukan atas perintah raja Gowa Tumaparisi Kallonna. Benteng ini juga diruntuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1667. Berdasarkan hasil survey permukaan dan eskavasi yang pernah dilakukan maka dapat diketahui adanya sisa-sisa bahan material bangunan benteng beserta tinggalan arkeologi lainnya. Bahan material bangunan benteng Sanrobone dan sisa-sisa reruntuhan adalah :

1. Batu bata tiga dimensi dengan variasi ukuran.
 - (A) 27 X 15 X 3 cm.
 - (B) 26 X 25 X 5,5 cm.
 - (C) 24 X 5,5 X 3 cm.
 - (D) 23 X 5,5 X 3,5cm.

2. Gundukan tanah liat yang gembur berpasir dengan warna agak keputihan, termasuk dalam kategori jenis tanah alluvial.

Peninggalan arkeologi lainnya yang ditemukan di permukaan tanah dan di dalam tanah terdiri dari berbagai jenis yaitu:

1. Meriam Perunggu
2. Peluruh Meriam
3. Fragmen keramik asing
4. Mata uang
5. Fragmen genteng
6. Fragmen tembikar.

Denah benteng Sanrobone meyerupai bentuk trapesium memanjang dari utara ke selatan dengan perkiraan luas keseluruhan 37,240 meter persegi. Pada mulanya, benteng Sanrobone hanya merupakan gundukan tanah liat mengikuti denah dengan perkiraan ketinggian 1,5 meter. Ketika dilakukan penyempurnaan, gundukan tanah diperlebar dan diberi batu bata dengan maksud sebagai pondasi benteng sehingga mencapai ketebalan 4,45 meter. Tinggi dinding juga di tingkatkan mencapai kurang lebih 4 meter dengan menggunakan batu bata. Teknik penyusunan batu bata tidak menggunakan perekat. Panjang dinding di bagian utara 260 meter, di bagian selatan 443 meter, di bagian barat 573 meter dan di bagian timur 707 meter. Dinding yang menghadap ke selatan diperkuat dengan membangun 4 bastion yang berbentuk bulat dengan ukuran kaki 50 meter dan bagian atas ber diameter 11,50 meter. Keempat bastion ini digunakan untuk menaruh meriam.

Jumlah pintu benteng 3 buah yang keseluruhannya sengaja diletakkan di bagian utara mungkin dengan alasan bahwa dinding tembok tempat ini tidak menggunakan tanah isian. Namun menurut lontarak bilang Kerajaan Gowa, benteng Sanrobone memiliki tujuh pintu dengan nama tersendiri yaitu *Jonggoa* di barat

laut, *Sarraka* di timur, *Budeng Mallaga* di tenggara, *Lauwa* di barat, *Babanga* di bagian tengah. Dua lainnya merupakan pintu gerbang yang terletak di bagian depan menghadap ke barat dan pintu kecil yang terletak di bagian selatan. Di dalam benteng terdapat bangunan rumah panggung dari bahan kayu yang digunakan sebagai tempat tinggal raja Sanrobone dan kerabatnya yang dinamakan *Barugaya*. Selain itu juga terdapat bangunan Masjid dan makam raja-raja Sanrobone.

4. Benteng Kale Gowa

Situs benteng Kale Gowa terletak di daerah perbukitan dan merupakan lokasi pusat cikal bakal dari turunan raja-raja Kerajaan Gowa. Pada mulanya Kale Gowa adalah daerah pemukiman, akan tetapi kemudian ditingkatkan perannya menjadi Benteng pertahanan yang diperkirakan dibangun pertama kali pada pertengahan abad XVI. Akhirnya benteng ini juga diruntuhkan oleh Belanda pada tahun 1667. Berdasarkan hasil survey permukaan dan eskavasi yang pernah dilakukan maka dapat diketahui adanya sisa-sisa bahan material bangunan benteng beserta tinggalan-tinggalan arkeologi lainnya. Bahan material pembangunan benteng Kale Gowa dan sis-sisa reruntuhan adalah :

1. Batu bata tiga dimensi dengan variasi ukuran
 - (A) 35 X 20 X 7 cm.
 - (B) 30 X 19 X 3 cm.
 - (C) 27 X 15 X 3,5 cm.
 - (D) 27 X 15 X 6 cm.
2. Gundukan tanah liat yang gembur dan berpasir dengan warna agak keputihan, termasuk dalam kategori jenis tanah alluvial.

Peninggalan arkeologi lainnya yang terdapat di dalam situs benteng Kale Gowa seharusnya cukup banyak dan bervariasi

mengingat daerah ini adalah wilayah yang sakral, akan tetapi adanya kegiatan penggalian liar menyebabkan peninggalan arkeologinya tidak dapat diketahui lagi.

Denah benteng Kale Gowa memiliki keunikan tersendiri karena bentuknya hampir meyerupai lingkaran penuh dengan perkiraan luas keseluruhan 33,560 meter persegi. Pada mulanya, benteng Kale Gowa hanya merupakan gundukan tanah liat mengikuti denahnya dengan perkiraan tinggi gundukan 1,5 meter . Ketika dilakukan penyempurnaan, gundukan tanah diperlebar dan diberi batu padas dengan maksud sebagai pondasi sehingga mencapai lebar 2,3 meter. Tinggi dinding juga di tingkatkan mencapai kurang lebih 3,5 meter dengan menggunakan batu bata yang disusun secara rapi (Johan Nyompa, 1991 : 2). Keseluruhan lingkaran dinding tidak memiliki bastion seperti pada benteng-benteng lainnya.

Pintu benteng hanya sebuah dan menghadap ke utara. Di dalam benteng terdapat bangunan rumah panggung dari bahan kayu yang digunakan sebagai tempat tinggal raja dan para bangsawan. Selain itu juga terdapat batu pelantikan raja berjumlah 5 buah, 3 buah berupa batu andesit dan alamiah dengan ukuran masing-masing: pertama, panjang 73 cm dan lebar 67 cm; kedua, panjang dan 84 lebar 59; ketiga, panjang 40 cm dan lebar 30 cm. Dua yang lainnya merupakan batu kapur yang mengapit ketiga batu tersebut di atas; Selain itu, juga terdapat sumur kerajaan terdiri dari: sumur prajurit (*barania*), sumur ahli nujum (*bissu*), dan sumur besar (*lompoa*). Makam raja-raja dengan ukuran 78 X 79 meter juga terdapat di dalam benteng Kale Gowa.

5. Situs Benteng Anak Gowa.

Situs benteng Anak Gowa terletak di tanah pedalaman dan memiliki jalan khusus menuju benteng Kale Gowa. Benteng ini diperkirakan dibangun pertama kali pada awal abad XVII pada

masa pemerintahan raja ke XV yaitu Sultan Alauddin kemudian disempurnakan dengan beberapa penambahan tanpa merubah bentuk denahnya pada pertengahan abad XVII. Akhirnya diruntuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1667. Berdasarkan hasil survey permukaan dan eskavasi yang pernah dilakukan maka dapat diketahui adanya sisa-sisa bahan material bangunan benteng beserta tinggalan arkeologi lainnya. Bahan material pembangunan benteng Anak Gowa dan sisa-sisa reruntuhannya adalah :

1. Batu bata tiga dimensi dengan variasi ukuran
 - (A) 45 X 22 X 7 cm.
 - (B) 44 X 22 X 9 cm.
 - (C) 40 X 22 X 6 cm.
 - (D) 44 X 15 X 10 cm.
 - (E) 42 X 10 X 3 cm
2. Batu sedimen
3. Gundukan tanah liat yang gembur dan berpasir dengan warna agak keputihan, termasuk dalam kategori jenis tanah alluvial.

Tinggalan arkeologi lainnya yang ditemukan di permukaan tanah dan di dalam tanah terdiri dari berbagai jenis yaitu:

1. Meriam Perunggu
2. Peluruh Meriam

Denah benteng Anak Gowa berbentuk segi empat bujur sangkar dengan perkiraan luas 300 X 400 m² atau lebih kurang 12.000 meter². Pada mulanya, benteng Somba Opu hanya merupakan gundukan tanah liat mengikuti denah dengan perkiraan ketinggian dinding 1,5 meter. Ketika dilakukan penyempurnaan, gundukan tanah diperlebar dan diberi batu padas dengan maksud sebagai pondasi sehingga mencapai ketebalan 4,45 meter. Tinggi dinding juga di tingkatkan mencapai kurang

lebih 6 meter dengan menggunakan batu bata. Pada ke empat sudut benteng diperkuat dengan membangun empat bastion yang berbentuk segi empat dengan ukuran bagian kaki 30 meter dan bagian atas 16,5 meter. Bastion di bagian barat letaknya agak menonjol ke luar dimaksudkan sebagai tempat pengintaian musuh dan tempat pemasangan bendera. Begitu pun di bagian timur berdekatan dengan pintu masuk, terdapat gundukan tanah sepanjang 20 meter yang kontur tanahnya agak tinggi melebihi ketinggian dinding benteng.

Pintu benteng terdiri empat buah yang ditempatkan di bagian tengah dari ke empat sisi benteng. Lebar pintu bagian selatan 4,15 meter, bagian utara 3,12 meter, bagian timur 1,5 meter dengan ketinggian 2,6 meter. Ukuran lebar pintu kelihatannya sangat kecil bila dibandingkan dengan benteng lainnya, oleh karena itu hanya dipergunakan oleh pejalan kaki dan penunggang kuda. Di dalam benteng hanya terdapat tiga sumber mata air dan tidak terdapat satu pun bangunan permanen. Pada bagian selatan dinding benteng ditemukan alur dengan lebar 15 – 20 meter sejajar dengan dinding benteng. Ukuran kedalaman alur tersebut 1 – 2 meter dari permukaan tanah bagian luar. Hal ini menandakan bahwa benteng Anak Gowa juga dilengkapi dengan parit.

D. Sulawesi Selatan sebagai Destinasi Budaya Suatu Peluang

Selama dua tahun belakangan ini, pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata gencar melakukan promosi dan publikasi terhadap lima destinasi atau daerah tujuan wisata Indonesia selain Bali. Kelima daerah destinasi tersebut adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Terpilihnya Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah tujuan

wisata di Indonesia melalui suatu pertimbangan bahwa wilayahnya memiliki daya tarik tersendiri dan dianggap berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi budaya. Hal itu berarti bahwa aspek budaya adalah aspek andalan dan menjadi icon untuk Sulawesi Selatan.

Sebagai konsekwensi dari terpilihnya Sulawesi Selatan menjadi destinasi budaya, maka kedudukan kota Makassar sebagai ibukota provinsi memainkan peranan penting dan sekaligus menjadi barometer untuk wilayah Sulawesi Selatan dalam hal pengelolaan dan pelestarian warisan budaya. Terutama dalam tahun 2008, fokus perhatian melakukan publikasi dan promosi perlu di arahkan kepada tiga agenda penting yang berskala publik nasional maupun yang berskala internasional. Agenda pertama adalah : *Visit Indonsia Year*; Kedua, *World Culture Forum*; Dan ketiga adalah Kongres Kebudayaan. Untuk skala lokal, segenap kegiatan pengelolaan dan pelestarian warisan budaya yang sudah dilaksanakan selama ini perlu terus dikembangkan baik dari segi kualitasnya maupun jumlah kwantitasnya. Pengembangan itu tentu saja dimaksudkan sebagai suatu bentuk nyata akan dukungan terhadap ketiga agenda penting di atas. Dalam hubungan ini pula, maka realisasi perubahan nama Fakultas salah satu perguruan tinggi di kota Makassar dari Fakutas Sastra Universitas Hasanuddin menjadi Fakultas Ilmu Budaya UnHas, patut ditempatkan.

Ke depannya, segenap warga kota makassar juga dapat berkiprah menyambut gelombang ekonomi keempat. Ekonomi keempat adalah ekonomi kreatif yang berbasikan pada kebudayaan dan sudah menjadi sebuah industri yang menjanjikan. Industri budaya tidak boleh disepeleahkan karena ia dapat mensejahterakan rakyat dan dengan demikian memiliki peluang untuk mengentaskan kemiskinan. Langkah penting lain dalam menyongsong gelombang ekonomi kreatif tentu saja adalah mendaftarkan karya warisan budaya agar tidak diakui sebagai milik bangsa lain.

Kepentingan rekonstruksi benteng-benteng yang hancur sangat terbuka lebar, setelah Sulawesi Selatan telah ditetapkan sebagai salah satu daerah kunjungan wisata di Indonesia selain Bali. Pelaksanaannya juga dimungkinkan oleh karena Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Unhas memiliki ahli-ahli yang secara teoritis dan teknis dapat menyusun panduan program perencanaan dan perancangan untuk tujuan rekonstruksi. Selain itu, Pemerintah kota Makassar juga tentu berkepentingan untuk memanfaatkan dan mengembangkan hasil rekonstruksi untuk tujuan destinasi dan ekonomi.

Meskipun sebagian besar benteng di Makassar tinggal berupa puing-puing reruntuhan, kita tetap beruntung karena masih terdapat sebuah benteng yang masih utuh sampai sekarang yaitu benteng *Ford Rotterdam*. Terhadap bangunan benteng yang masih utuh, tentu saja keadaan struktur, bentuk, fungsi, konstruksi dan tata ruangnya masih dapat diketahui dengan jelas, akan tetapi terhadap tinggalan benteng yang hanya berupa puing-puing reruntuhan tentu saja memerlukan upaya rekonstruksi yang maksimal agar dapat diketahui keseluruhannya secara pasti.

Program perencanaan yang harus dirumuskan dalam rangka rekonstruksi sudah barang tentu tidak akan lepas dari upaya meningkatkan kebanggaan atas kebudayaan sendiri. Tolak ukur kelayakannya pun untuk dijadikan sebagai destinasi budaya cukup terpenuhi bila dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kesejarahan, benteng merupakan lokasi peristiwa sejarah yang penting. Dilihat dari segi estetika, benteng memiliki keindahan struktur, ornamen dan bentuk (trapezium, bujur sangkar, lingkaran penuh dan segi empat panjang). Dari segi kualitas pengaru, keberadaannya akan meningkatkan citra lingkungan sekitarnya. Dari segi nilai komersial, benteng sangat berpotensi untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi pariwisata. Dan dilihat dari segi nilai ilmiah, sangat berperan untuk pendidikan dan pengembangan ilmu.

E. Penutup

Harus diakui bahwa betapapun ilmiahnya konsep yang ditawarkan serta bagusny program yang ditawarkan untuk melaksanakan pengelolaan dan pelestarian warisan budaya *tangible*, realisasinya akan sulit sekali bila tidak didukung dengan pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, sudah tiba saatnya untuk memotivasi berbagai pihak, agar bersedia menjadi *maecenas*. *Maecenas* dapat diartikan sebagai tokoh panutan yang menyediakan diri (waktu, tenaga pikiran dan dana) untuk mencurahkan perhatian dalam bidang perlindungan dan pengembangan warisan budaya *tangible* yang nirlaba tanpa pamri, seperti Pangeran Philips dengan *World Wildlife Fund*-nya.

Segenap pihak juga perlu bersatu padu dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian warisan budaya *tangible* baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri. Dari pemerintah kota diharapkan terbitnya peraturan untuk melindungi warisan budaya *tangible*, peraturan tersebut bisa berupa peraturan daerah (perda) yang mengacu kepada ketentuan UU benda cagar budaya. Dari pihak swasta, diharapkan keterlibatan aktifnya dalam memanfaatkan warisan budaya *tangible* yang potensial untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Sebagaimana keuntungan tersebut akan dapat disumbangkan untuk pemerliharan dan peningkatan kualitas bangunan, yang memang membutuhkan biaya cukup banyak. Dari masyarakat sendiri dituntut rasa memiliki yang besar, dan agar bersatu padu mencurahkan perhatian pada pelestarian.

Daftar Pustaka

Anonim, Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda cagar budaya.

Darwas Rasyid, 1983

Beberapa catatan tentang Benteng-benteng Kerajaan Gowa.
Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Provinsi Sulawesi Selatan

Edi Sedyawati, 2008

"Konsep Warisan Budaya: Lokal, Nasional, dan Internasional",
Makalah dalam Kongres Ikatan Ahli Arkeologi dan
Pertemuan Ilmiah Arkeologi, XI di Solo.

Eko Budiardjo, 1997

Arsitektur Sebagai Warisan Budaya, Jakarta : Jambatan

Hasir Sonda, 1999

Beteng-Benteng Kerajaan Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan
Tinjauan Bentuk dan Fungsinya. Jakarta : *Tesis* Program
Pascasarjana UI.

Patunru, 1967

Sejarah Gowa, Makassar : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan
dan Tenggara.

Sagimun, 1991

Benteng Ujung Pandang, Jakarta : PN Balai Pustaka.

Suroso, MP, 2008

"Perubahan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1992 dalam
konteks sekarang dan masa depan", *Makalah* dalam
Kongres Ikatan Ahli Arkeologi dan Pertemuan Ilmiah
Arkeologi, XI di Solo.

KERAJAAN BONE

DARI KERAJAAN PINJAMAN KE KERAJAAN TAKLUKAN

(1860 – 1905)

Oleh : Drs. Suriadi Mappangara, M. Hum

I. Pendahuluan

Dalam sejarah panjang Kerajaan Bone, sejak didirikan kira-kira sekitar pertengahan abad XIV sampai kekalahan Besse Kajuara pada tahun 1860, periode sejarah Kerajaan Bone pascakekalahan itu mengalami perubahan total, utamanya dalam hal wewenang dan kekuasaan, baik raja maupun Dewan Adat Pitu. Perubahan itu lambat laun telah memudahkan wibawa dan kekuasaan Kerajaan Bone yang selama ini sangat dikagumi oleh kerajaan-kerajaan lain yang ada di daerah ini.¹ Kerajaan Bone harus menandatangani kontrak pendek yang memberi batasan bergerak dalam menjalankan pemerintahannya. Kedaulatan Bone terkekang. Jika sebelumnya Dewan Hadat Kerajaan Bone menjadi lembaga yang melegitimasi seorang yang akan diangkat raja, setelah menjadi Kerajaan Pinjaman hak itu sudah tidak lagi murni dipegangnya. Semuanya harus mendapat persetujuan Pemerintah Hindia Belanda.

Pengangkatan Singkeru Rukka tidak terlepas dari campur tangan Belanda. Atas jasa-jasa yang diberikan selama ini Belanda menaruh percaya kepada Achmad Singkeru Rukka sebagai raja yang dapat diajak bekerjasama. Beliau sebelumnya pernah

¹ Sejak kemenangan Arung Palakka atas Kerajaan Gowa dalam peperangan pada tahun 1666-1669, Kerajaan Bone dapat dikatakan menjadi juru bicara dalam segala hal dalam hubungannya dengan pihak Belanda. Selanjutnya Kerajaan Bone membangun hegemoni kekuasaannya dengan memperluas wilayah pengaruh dan kekuasaannya, baik yang dilakukan secara damai (lewat perkawinan misalnya), maupun dengan jalan peperangan.

mendapat hukuman dari Kerajaan Bone karena usaha-usahanya untuk menjatuhkan kekuasaan. Oleh karena gagal ia kemudian mengungsi ke satu daerah di sekitar Maros. Di tempat ini ia mencoba membangun kerjasama dengan Belanda namun di tolak karena Belanda belum yakin apakah hubungan akan bertambah baik ataupun tidak. Belanda bersikap menunggu perkembangan.

Setelah mendapat ampunan dari Raja La Parenrengi, ia pun kembali ke Bone tetapi tidak diberi jabatan yang berarti oleh karena itu ia mencoba mencari jalan untuk dapat berkuasa. Usaha itu tidak berhasil karena tidak mendapat dukungan dari bangsawan lainnya dan juga masyarakat Bone. Sewaktu timbul konflik antara Bone dengan Belanda sehubungan dengan tindakan raja Bone Besse Kajuara yang dianggap tidak bersahabat dengan Belanda, Singkeru Rukka mencoba melakukan kontak dengan Belanda dan berusaha membangun kerjasama dengan Belanda.

Setelah serangkaian usaha dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara Bone dan Belanda gagal, akhirnya Belanda memutuskan untuk melakukan serangan atas Bone dengan bantuan Singkeru Rukka. Bone akhirnya ditaklukkan dan tahta Kerajaan Bone jatuh ke tangan Singkeru Rukka.

Setelah kekalahan Besse Kajuara², dengan persetujuan pemerintah Hindia Belanda, pada tanggal 31 Januari 1860 Achmad Singkeru Rukka diangkat menjadi Raja Bone XXIX dengan gelar Sultan Ahmad (1860 – 1871)³. Kekalahan Kerajaan Bone

² Atas pertimbangan untuk tetap mengobarkan perlawanan, Besse Kajuara memutuskan untuk mengungsi dari Bone. Bersama beberapa pembesar kerajaan, ia mencoba untuk membangun kekuatan kembali. Namun, hal ini tidak bertahan lama karena perpecahan yang terjadi dalam Kerajaan Bone sendiri telah memudahkan Belanda untuk mengatur siasat dalam mematahkan perlawanan dari Besse Kajuara. Meskipun Besse Kajuara mengungsi dengan membawa alat-alat kebesaran raja, namun hal itu tidak membantu usahanya untuk tetap mempertahankan kedudukannya. Pemerintah Hindia Belanda lewat pengaruh Dewan Hadat dan juga sekutunya Singkeru Rukka, akhirnya usaha Besse Kajuara gagal. Setelah beberapa waktu dilakukan upaya untuk memaksa Besse Kajuara menyerah gagal, lewat Dewan Hadat PituE, Kerajaan Bone mengakui kekalahannya.

³ Achmad Singkeru Rukka adalah cucu dari raja La Mappatunru (Raja Bone yang memerintah pada tahun 1812-1823), ibunya kawin dengan Raja Barru dan gagal menggantikan bapaknya menjadi Raja di Bone.

dan pengangkatan Singkeru Rukka menandai era baru dalam hubungan bilateral antara kedua kuasa ini. Jika sebelumnya, hubungan itu didasarkan atas saling menghormati dan mengakui atas otonomi masing-masing, namun periode berikutnya hubungan itu tampaknya berat sebelah, yaitu lebih menguntungkan pihak Pemerintah Hindia Belanda. Bahkan setelah kejatuhan Kerajaan Bone, pihak pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan bahwa Kerajaan Bone menjadi miliknya, dan Besse Kajuara tidak boleh menginjakkan kakinya lagi di Kerajaan Bone.

Sepuluh hari setelah pengangkatan, Achmad Singkeru Rukka bersama Arung Pitu ditandatangani Kontrak Politik. Dalam kontrak itu ditetapkan bahwa Sinjai, Kajang, dan Bulukumba Tua menjadi wilayah pemerintahan langsung *Gubernemen* Hindia Belanda. Selain itu juga dalam kontrak itu dikatakan bahwa Kerajaan Bone diubah statusnya, dari anggota sekutu dari Belanda berdasarkan perjanjian Bungaya 1667-1669, menjadi Kerajaan Pinjaman (*Leenvorstendom*). Kerajaan Bone kini adalah milik *Gubernemen* Hindia Belanda yang dipinjamkan kepada Achmad Singkeru Rukka. Jadi, Achmad Singkeru Rukka bertindak sebagai raja pinjaman di Kerajaan Bone.⁴

Meskipun Achmad Singkeru Rukka bertindak sebagai seorang raja pinjaman, hal itu hanya ada di atas kertas semata. Pihak pemerintah Hindia Belanda tidak memperlakukan Raja Bone sebagai seorang budak yang harus mengikuti seluruh kehendak tuannya. Dalam batas-batas tertentu Achmad Singkeru Rukka masih dapat bertindak selaku raja, namun harus diakui bahwa penetrasi Belanda dalam kehidupan politik di Kerajaan Bone semakin jauh dan dalam.

⁴ Achmad Singkeru Rukka diangkat menjadi Raja di Kerajaan Bone banyak didasarkan atas balas budi pemerintah Hindia Belanda pada Achamad Singkeru Rukka yang memiliki andil yang cukup besar dalam memenangkan Belanda dalam perang melawan Kerajaan Bone pada tahun 1859.

Dalam banyak catatan diketahui bahwa pada masa pemerintahan Achmad Singkeru Rukka, kehidupan politik di Kerajaan Bone berjalan baik. Masyarakat hidup dalam keadaan tenteram dan damai. Gejala politik hampir dapat dikatakan tidak tampak. Dalam kehidupan keagamaan, Achmad Singkeru Rukka mempunyai perhatian besar dalam agama Islam.⁵ Pada masa pemerintahannya, aliran tarekat Chalwatiah tersebar di wilayah Kerajaan Bone dan berada di bawah perlindungannya. Aliran ini memiliki pengikut yang banyak.⁶

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Achmad Singkeru Rukka tetap menjaga hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di wilayah ini. Hubungan dengan pihak pemerintah Hindia Belanda tetap dijaganya agar Belanda tidak terlalu dalam mengatur sendi-sendi kehidupan Kerajaan Bone. Hubungan yang dibina ini sedikitnya telah memuaskan hati pemerintah Hindia Belanda, jika dibandingkan dengan tingkah laku politik yang diperlihatkan oleh raja-raja Bone sebelumnya.

Singkeru Rukka berkuasa selama kurang lebih 11 tahun, pada tahun 1871 ia meninggal dan dimakamkan di Topaccing (Bone). Ia kemudian diberi gelar anumerta *Matinroe ri Topaccing*.

Elite bangsawan Bone kini dikontrol oleh Belanda. Kontrak politik yang ditandatangani Singkeru Rukka atas persetujuan Dewan Hadat telah mengekang kebebasan Kerajaan Bone dalam membangun hubungannya dengan kerajaan-kerajaan lain. Satu hal yang membantu Singkeru Rukka adalah ketentraman yang dapat diciptakannya selama ia memerintah. Posisi To marilalang dan Panglima Perang Kerajaan Bone berada di tangan anaknya, La Pawawoi Karaeng Segeri. Selain itu perhatiannya pada agama Islam dan berkembang pesatnya ajaran Tarekat Chalwatiah dimasa kekuasaannya.

⁵ Ia menulis sebuah buku pelajaran agama Islam dengan judul *Nurul Hadi*. Lihat Aburrazak Daeng Patunru, *Sejarah Bone*, hal. 50.

⁶ Aliran ini mula-mula di pimpin oleh seorang ulama dari Palembang yang bernama Syekh Abdulahilmunir, kemudian oleh Syekh Muh. Fudail Manessa (orang Barru), kemudian oleh Syekh Zak (putra La Mappangara Arung Sinai Matinroe ri Sessok Maros).

Setelah wafat, atas persetujuan pemerintah Hindia Belanda, ia digantikan oleh puterinya yang bernama Fatimah Banri. Meskipun ada kekhawatiran akan pelantikan seorang perempuan dalam tahta Kerajaan Bone, namun pemerintah Hindia Belanda melihat bahwa kerjasama yang diperlihatkan ayahandanya telah dapat meyakinkan Belanda bahwa hubungan yang baik tetap dapat dipertahankan.⁷

Sepanjang abad XIX Pemerintah Hindia Belanda dipersulit oleh dua orang ratu dari Kerajaan Bone, yaitu I Manning Arung Data dan Besse Kajuara. Keduanya memiliki prinsip yang tegas dan cenderung memusuhi Belanda. Dalam catatan sejarah ditemukan enam orang ratu di Kerajaan Bone. Pada masa kekuasaan ratu itu sebenarnya ia tidak banyak melakukan fungsi karena keterbatasan yang dimilikinya, oleh karena itu ia banyak diwakili oleh Tomarilalang (Perdana Menteri) dan juga Dewan Hadat Kerajaan. Pada waktu ratu Bone pertama berkuasa, yaitu We Tenrituppu ia telah mengubah Matowa Pitu menjadi Arung Pitu. Perubahan itu erat kaitannya keterbatasan beliau dalam memerintah dan mengubah Dewan Matowa menjadi Arung agar ia dapat dibantu dalam menjalankan pemerintahannya. Pada masa pemerintahannya Kerajaan Bone melakukan penyerangan atas Kerajaan Bone untuk menyebarkan agama Islam. Ratu Bone ini berangkat ke Sidenreng untuk belajar agama Islam dan wafat di sana. Ratu Kerajaan Bone yang kedua adalah Batari Toja. Ia naik tahta menggantikan ayahnya La Patau menjadi raja di Bone dan juga sebagai Datu di Luwu dan Soppeng. Setelah setahun berkuasa di Bone ia menyerahkan kekuasaan kepada adiknya, dan demikian juga menyerahkan kekuasaan kepada adik tirinya di Soppeng. Ia naik tahta menjadi ratu untuk periode kedua setelah kematian La Panaongi. Pada masanya Bone di serang oleh La

⁷ Dua raja Bone yang berkelamin perempuan sebelumnya telah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat, bahkan telah menyebabkan timbulnya perang antara Bone dan Belanda. Hal inilah yang mengkhawatirkan pemerintah Hindia Belanda, jika hal yang demikian ini muncul ketika seorang raja perempuan ditempatkan lagi dalam istana Kerajaan Bone.

Madukelleng dan ia terpaksa mengungsi ke Gowa. Ratu Bone ke tiga adalah I Manning Arung Data, ia juga mempelopori perlawanan terhadap masuknya Inggris di Sulawesi Selatan. Ratu Bone ke empat adalah Besse Kajuara dan dalam masa kekuasaannya ia juga mendapat serangan dari Belanda dan harus turun tahta Kerajaan Bone.

Pengangkatan Ratu di Bone adalah bagian dari usaha untuk mempertahankan kekuasaan kelompok bangsawan. Batara Toja yang memerintah di tiga kerajaan besar bukanlah berarti bahwa raja yang tersebut hebat dan memiliki prestasi yang luar biasa, tapi hanya upaya agar tahta kerajaan tetap berada dalam garis keturunan bangsawan yang berkuasa, dalam hal ini keturunan Arung Palakka.

Ketika ratu berkuasa yang banyak memegang peran adalah To marilalang dan juga Dewan Hadat Kerajaan. Merekalah yang mengatur pemerintahan, kesetiaan rakyatlah yang harus dijaga. Rakyat percaya bahwa yang berhak memerintah adalah mereka yang memiliki darah bangsawan murni.

Pada masa pemerintahan ratu Bone ke lima Fatimah Banri tidak banyak berbeda dengan ratu-ratu Bone lainnya. Pemerintahan banyak dipegang oleh Tomalalang La Pawawoi Karaeng Segeri yang juga bertindak sebagai panglima perang. Oleh karena itu pihak Belanda tidak terlalu khawatir karena La Pawawoi dipandang sangat bersahabat dan telapun dibuktikan dalam perang di tahun 1860 ketika menaklukkan Bone.⁸

Setelah kematiannya Dewan Hadat melantik anaknya menjadi Ratu Kerajaan Bone yang bernama I Bunga Sutra Daeng Bau Arung Apala yang berumur 13 tahun. Setelah satu minggu pelantikannya, Pemerintah Hindia Belanda tidak menyetujuinya pelantikan tersebut. Braam Moris ke Bone dan bertemu dengan Dewan Hadat Kerajaan Bone untuk membatalkan pelantikan

⁸ La Pawawoi pernah mendapat tanda kehormatan dari Pemerintah Hindia Belanda karena jasanya yang telah dibuatnya.

tersebut. Dewan Hadat tidak memiliki pilihan lain untuk mengabulkan permintaan Braam Moris karena mengacu pada kontrak yang telah dibuat sebelumnya. Braam Moris kemudian menunjuk La Pawawoi Karaeng Segeri sebagai pengganti Fatimah Banri. Braam Moris khawatir karena I Bunga Sutera belum dewasa dan ini berarti yang akan menjalankan pemerintahan Kerajaan Bone adalah ayahnya, Karaeng Popo seorang bangsawan tinggi di Kerajaan Bone. Pemerintah Hindia Belanda khawatir jika kedua kerajaan ini dapat bersatu maka keberadaan Belanda akan terancam.

Dalam sejarah panjang daerah ini, Kerajaan Bone dan Gowa, meskipun dalam hal-hal tertentu sering timbul konflik yang berakhir dengan perang, namun harus pula diakui bahwa secara tradisional kedua kerajaan ini memiliki ikatan geneologis yang sangat dekat. Antara kedua kerajaan ini telah terjalin ikatan geneologis yang dirintis oleh Arung Palakka pada akhir abad XVII. Telah terjalin hubungan yang demikian erat. Elite bangsawan Bone dan Gowa sudah begitu erat sehingga harus berhati-hati dalam memberi setiap kesempatan yang dapat mengancam keberadaan Belanda.

Kasus I Bunga Sutera Daeng Bau Arung Apala menjadi contoh jelas tentang ketidakberdayaan Dewan adat Kerajaan Bone dalam menghadapi keinginan Pemerintah Hindia Belanda. Apa yang menimpa I Bunga Sutera Daeng Bau Arung Apala adalah tragedi besar dalam sejarah pelantikan Raja di Kerajaan Bone. Dewan Adat Pitu adalah satu lembaga tertinggi di Kerajaan Bone yang mengatur jalannya pemerintahan. Tidak ada seorangpun dapat menduduki tahta kerajaan tanpa melewati pintu Dewan Adat Pitu. Demikian besar wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Dewan Ade Pitu, tidak saja ditunjukkan ketika dalam keadaan damai, tetapi juga dalam keadaan genting. Seperti kasus yang menimpa Besse Kajuara. Sewaktu ia memutuskan untuk mengungsi dari tanah kekuasaannya dan berupaya untuk tidak

kembali lagi, Dewan Ade Pitu Kerajaan Bone memutuskan untuk menyatakan menyerah pada Pemerintah Hindia Belanda.

Pilihan pada La Pawawoi Karaeng Segeri sebagai raja didasarkan atas pengabdian yang telah ditunjukkan oleh La Pawawoi Karaeng Segeri sewaktu menyerang Bone pada tahun 1859-1860. Penolakan Pemerintah Hindia Belanda atas pelantikan yang dilakukan oleh Dewan Adat Pitu Kerajaan Bone memperjelas pada kita bahwa hampir dapat dipastikan bahwa Kerajaan Bone ketika itu sudah menjadi boneka bagi Pemerintah Hindia Belanda. Dibatakannya pelantikan itu memberi dua indikasi. Pertama, hal itu menunjukkan peran Pemerintah Hindia Belanda dalam banyak hal jauh lebih dominan dibandingkan dengan Dewan Hadat Bone. Kedua, menunjukkan kelompok bangsawan di Kerajaan Bone tidak bersatu dan terbagi dalam beberapa kelompok. Ada kelompok yang masuk dalam pengaruh dan kekuasaan Belanda, anti Belanda dan juga yang tidak memihak.

2. La Pawawoi Karaeng Segeri

Dalam catatan sejarah pemerintah Hindia Belanda, figur La Pawawoi Karaeng Segeri jauh lebih berterima dan telah menunjukkan kepatuhannya selama berhubungan dengan pihak pemerintah Hindia Belanda. Ia dilahirkan di Kalukubodoa (Tallo') pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 1826. Jaringan keluarga La Pawawoi sangat luas dalam kalangan bangsawan di Sulawesi Selatan. Meskipun ketika dilantik ia sudah berusia kurang lebih 70 tahun, namun hal itu tidak menjadi masalah bagi pemerintah Hindia Belanda untuk memilihnya duduk di atas tahta Kerajaan Bone. Usia tidak menjadi masalah karena yang dibutuhkan adalah darah murni tomanurung yang mengalir dalam tubuhnya.

Pada tahun 1844 La Pawawoi mendapat gelar Karaeng Segeri dan menetap di Bone. Pada tahun 1850 ia diangkat menjadi *Dulung* di Ajangngale. Ketika ayahnya diangkat menjadi raja di

Kerajaan Bone, ia dilantik menjadi *arung* di Bulu-Bulu (Sinjai). Pada tahun 1870, ia diangkat menjadi penguasa di Mambu dan Sijelling. Tujuh tahun kemudian, beliau diangkat menjadi *Punggawa* (panglima) Angkatan Perang Kerajaan Bone.

Melihat pada karier yang dimiliki dan jasanya kepada pemerintah Hindia Belanda, tidak ada keraguan bagi pemerintah Hindia Belanda untuk tidak menyetujui pengangkatan La Pawawoi sebagai Raja Bone.⁹ Pada tanggal 16 Februari ia dilantik menjadi Raja Bone dalam usia 70 tahun.¹⁰ Seperti dengan raja-raja sebelumnya, ia juga harus menandatangani kontrak, sebagai satu tanda kesetiaan pada pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda merasa yakin bahwa apa yang La Pawawoi tunjukkan selama sudah cukup meyakinkan Belanda.

Berkat pengalamannya, La Pawawoi cukup memahami tingkah laku politik pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, La Pawawoi dalam banyak hal ingin memperkuat kerajaannya dengan mencoba untuk mengurangi penetrasi kekuasaan Belanda. Namun hal itu tidak dapat dilakukan dengan baik. Cengkraman Belanda dalam banyak sendi-sendi kehidupan rakyat Bone sangat kuat sehingga mengganggu jalannya pemerintahan di Kerajaan Bone. Pihak Kerajaan Bone melihat bahwa Belanda telah terlalu banyak mencampuri urusan dalam negeri Kerajaan Bone.

Hubungan antara kedua kuasa ini mulai meruncing ketika La Pawawoi tanpa sepengetahuan pemerintah Hindia Belanda mengirim pasukannya ke Tana Toraja untuk membantu rakyat Toraja dalam mempertahankan diri dari gangguan Enrekang.¹¹

⁹ Pada tahun 1876 La Pawawoi bersama pasukannya menyertai Tentara Belanda menyerang Turatea (Binamu, Bangkala dan beberapa daerah di sekitarnya) untuk menumpas pemberontakan. Pada tahun 1877 ia juga memberi bantuan kepada Belanda untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh I Maru Karaeng Bonto-Bonto di Labakkang dan sekitarnya. Ia juga diutus oleh pemerintah Hindia Belanda untuk meyakinkan Luwu agar mau menandatangani Kontrak Bungaya yang diperbaharui.

¹⁰ Semasa ia berkuasa posisi Tomarilalang dijabat oleh anaknya yaitu Abdul Hamid.

¹¹ Penyerangan itu dipimpin langsung oleh panglima perang Kerajaan Bone, Abdul Hamid.

Selain itu hubungan yang kurang harmonis juga muncul ketika pemerintah Hindia Belanda mencoba untuk menguasai pelabuhan Bajoe dan Pallime, terutama dalam hal penarikan pajaknya. Usaha ini tentu saja mendapat tantangan dan menolak mentah-mentah keinginan Pemerintah Hindia Belanda itu. Kerajaan Bone selama ini hidup dari penghasilan pajak dari kedua pelabuhan itu. Keinginan Belanda tentu saja ditolak oleh La Pawawoi Karaeng Segeri. Sikap yang kurang bersahabat ini membuat pemerintah Hindia Belanda semakin bernaftu untuk menguasai Bone secara langsung. Keinginan itu mendapat perlawanan keras dan pihak Kerajaan Bone beranggapan tuntutan pemerintah hindia Belanda adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan hanya mencari-cari alasan untuk menyerang Kerajaan Bone. Bagi pemerintah Hindia Belanda, tuntutan untuk menarik pajak pada dua pelabuhan itu dianggap masih wajar mengingat status dari Kerajaan Bone sebagai Kerajaan Pinjaman. Dua titik pandang yang berbeda ini menjadi cikal bakal lahirnya konflik yang kemudian meletus menjadi perang besar pada tahun 1905.

Serangan yang dilakukan pada tahun 1905 yang dikenal dalam sejarah daerah ini dengan istilah *Rumpakna Bone*, bukanlah suatu kejadian yang timbul secara tiba-tiba. Serangan itu telah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan perubahan cara pandang pada daerah kekuasaan. Perang besar 1905 telah mengakhiri otonomi daerah di Sulawesi Selatan pada umumnya.

3. Perang Bone – Belanda 1905

Pada awal abad XX ada perhatian besar yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap wilayah yang berada di luar pulau Jawa dan Madura. Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk melakukan serangkaian tindakan untuk menguasai wilayah di luar Pulau Jawa yang dianggap berpotensi dikuasai oleh pihak asing. Tindakan itu harus dilakukan secara damai, namun jika

terpaksa satu tindakan militer dilakukan. Perluasan wilayah pengaruh politik Pemerintah Hindia Belanda pada sejumlah kerajaan-kerajaan yang berotonomi mencapai puncaknya ketika J.B. Van Heutsz diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1904 – 1909.

Pada tahun 1901 dalam salah satu **Laporan Kolonial** disebutkan bahwa perundingan untuk pelepasan hak memungut pajak ekspor-impor dan pemberian ganti rugi sehubungan dengan hal itu, dikatakan tidak menemui jalan keluar, hal ini dianggap telah menyalahi kesepakatan. Ketidakpuasan Pemerintah Hindia Belanda sampai tahun itu masih dapat dipertimbangkan. Pada tahun 1903 ada berita yang sampai ke Batavia tentang penyimpangan dan kesalahpahaman. Dalam sebuah surat tertanggal 27 Maret 1903, Gubernur G.W.W.C. Baron van Hoevell, mengusulkan adanya penghapusan penguasa pribumi di Bone, dan hal itu harus dilakukan segera. Ahli waris yang sah kerajaan, telah meninggal seminggu sebelumnya. La Pawawoi dianggap telah melakukan tindakan semena-mena sehingga banyak para kawulanya pindah ke daerah lain. Van Hoevell juga menulis surat kepada La Pawawoi dengan kata-kata: Bone nampaknya melupakan pelajaran tahun 1860 dan melalui gambaran dalam naskah saya mengajukan peringatan. Jadi ini merupakan peringatan saya yang terakhir. Saya terkejut ketika harus melapor kepada Paduka Gubernur Jenderal bahwa Bone telah menyelewengkan kekuasaannya. Surat itu tampaknya memperlihatkan bahwa hubungan kerjasama antara keduanya sedang terganggu bahkan cenderung dikatakan dalam bahaya.

Sampai pada tahun 1903 ada sedikit bukti yang menunjukkan kekecewaan Belanda terhadap tingkah laku politik yang diperlihatkan oleh Kerajaan Bone. Dalam salah satu laporan resmi tahunan yang ditujukan kepada Parlemen, menyebutkan adanya operasi militer yang dilakukan oleh Kerajaan Bone di Tanah Taraja pada tahun 1897-1898, dan juga serangan yang

dilancarkan atas Kerajaan Wajo pada tahun 1899-1900. Jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Kerajaan Bone dianggap telah melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, yaitu Bone tidak bisa meluaskan pengaruh di luar wilayah kekuasaannya. Namun dalam hal-hal tertentu ketidaksenangan Belanda itu masih dapat diterima dan dimaklumi oleh Pemerintah Hindia Belanda, meskipun mengenai hal itu memberi teguran pada Kerajaan Bone.

Ketika seluruh usaha yang dilakukan 'membujuk' La Pawawoi Karaeng Segeri untuk melakukan beberapa kesepakatan dinyatakan gagal, pihak Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk melancarkan serangan atas Kerajaan Bone. Putusan ini sebenarnya sangat terpaksa dilakukan mengingat Politik Etis yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1901, bertujuan untuk 'membalas budi' bagi rakyat Hindia Belanda. Namun demikian, garis besar politik Pemerintah Hindia Belanda secara keseluruhan di Hindia Belanda tetap harus berjalan, yaitu menanamkan kekuasaan politik pada seluruh wilayah yang pernah bernaung dalam pengaruh VOC.

Serangan yang dilancarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 ke atas Kerajaan Bone bukanlah satu tindakan yang dilakukan secara tergesa-gesa. Serangan itu sendiri telah direncanakan jauh sebelumnya karena Raja Bone, La Pawawoi Karaeng Segeri dipandang telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan padanya. Dalam salah satu terbitan pada tanggal 27 April 1903 dalam koran Javabone, terbit satu tulisan dengan judul 'Bone Harus Ditaklukan'.¹²

Mengenai putusan untuk menyerang Kerajaan Bone, dalam Lontarak **Tolo Rumpuna Bone** disebutkan:

"Madecengko sia bela sining pangulu musuku, mutarakkana mulao kua ri lipuna Bone muakkeda riolona Batara tungkekna Bone iaro nasurowannak sudarata ri uraik

¹² Lihat Harry A. Pooze dan Pim Schoorl, *Excursies in Celebes* (Leiden: KITLV, 1991).

jiniralakna Bettawe maeloi sia ponratu jiniralakan Bettawe pasiatai Juppandang, mai ri lipuna Bone angkanna mai ri Luwuk pattakkasenna ri Warek mai ri Tana Toraja turun mai ri Sidenreng lalu ri tana Wajo, pattakkasenna ri Soppeng. Akkadatokko labela koronele bettaede maelo toi ponratu jiniralakna Bettawe parekkenngi minangae ri labuwanna Pallimek naia paddeppungekko asselek sumpampalamu ri labuanna Pallimek”¹³

Terjemahannya:

“Baiklah engkau sekalian komandan tentaraku berangkat menuju ke daerah Bone katakan dihadapan Batara tunggal Bone adapun yang disuruhkan oleh sahabatmu di pusat Jenderal di Batawi ingin rupanya wahai tuanku Jenderal Betawi itu menjajah Ujungpandang, bersama dengan Bone sampai di Luwuk berbatasan Warek sampai Tana Toraja turun sampai di Sidenreng ke Timur sampai di Wajo berbatasan dengan Soppeng. Katakan juga bahwa si Kolonel jagoan ingin pula wahai tuanku Jenderal Betawi menguasai sungai di pelabuhan Pallimek lalu dialah mengumpulkanmu hasil pajakmu di pelabuan Pallime”.

Pada bulan Juli 1903, van Hoevell diganti oleh C.A. Kroesen yang tampaknya lebih keras dan lebih ambisius untuk meluaskan pengaruh Belanda.¹⁴ Pada bulan Juni 1903 koran Makassar telah memuat sejumlah tulisan yang dipenuhi dengan suara-suara permusuhan yang ditujukan pada Bone. Rakyat Bone menunjukkan kemarahan ketika pada bulan Juli diberitakan bahwa Pemerintah Hindia Belanda akan menurunkan rajanya. Berita-berita pers ini juga turut memicu meningkatkan suhu konflik antara Bone dengan Pemerintah Hindia Belanda.¹⁵

¹³ Lihat Muhammad Salim, *op. cit.*, hal. 2-3.

¹⁴ Konran Javabode tanggal 23 April 1903 menyebutnya sebagai seorang negarawan yang tidak mudah dan tidak murah, seorang yang siap untuk membawa perbaikan). Lihat : *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Dalam Lontarak *Tolo Rumpakna Bone* yang ditulis oleh Andi Malla Petta Bela (Arung Manajeng), pada awal tulisannya dikatakan:

Makkedi La Menriana. Ia mula tabbakkana rukka samallangiede mai ri lipuna Bone gaukna Arung Salampe calabainna Pattiro winruna Daeng Paroto sabennarakna Pallimek temmappattuppu ri adek temmappalete ri rapang. Naia maseng alena mangkauk ri tana Bone'.

Terjemahannya:

Kisah menuturkan. Pada waktu permulaan kekacauan umum di daerah Bone, perbuatannya Arung Salempa jantannya Pattiro kelakuan Daeng Paroto syahbandar Pallime tak menaati adat dan menuruti hukum. Dia yang menganggap dirinya raja mangkauk di Bone'.¹⁶

Merujuk naskah Lontarak tersebut di atas, diketahui bahwa Pallime, nama salah satu pelabuhan terkenal di Bone menjadi faktor penting yang membuat timbulnya hubungan yang kurang baik antara Bone dan Belanda. Pelabuhan Pallime bukanlah satu-satunya faktor yang membuat hubungan antara dua kekuatan itu meruncing. Keinginan Belanda untuk menempatkan petugas untuk mengawasi jalannya perdagangan di pelabuhan itu dan tidak disetujui oleh pemerintah Kerajaan Bone, dapat dianggap sebagai pemicu sehingga perang antara kedua kekuatan itu tidak dapat dibendung.¹⁷

Secara umum imperialisme Belanda dapat dibagi atas tiga bagian. Bagian pertama dikenal dengan masa imperialisme ragu-

¹⁶ Muhammad Salim, *Tolo Rumpakna Bone: transliterasi dan terjemah Lontarak* (Ujungpandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan, 1991), hal. 1.

¹⁷ Dalam sejarah hal yang demikian ini sering disebut sebagai faktor yang mempercepat terjadi satu peristiwa. Perang Candu yang terjadi di Cina pada tahun 1839-1842 dipicu oleh pembuangan candu yang dilakukan oleh petugas-petugas Cina. Tindakan itu menimbulkan kemarahan orang Inggris dan memicu timbulnya perang. Demikian juga dalam kasus pembuangan teh di Boston yang memicu Perang Kemerdekaan Amerika.

ragu yang berlangsung antara 1873-1894/95. Imperialisme ini ditandai dengan Perang Aceh. Bagian kedua adalah masa pertumbuhan yang berlangsung antara tahun 1894/96-1909, dan bagian ketiga adalah antara tahun 1909-1915. Masa pertumbuhan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz (1904-1909), ditandai dengan kebijakan Aceh yang baru sejak tahun 1896, penegakan kekuasaan Belanda di Papua tahun 1898, ekspedisi ke Jambi 1901-1907) dan Kerinci 1902, Borneo Tenggara 1904-1906, Sulawesi Selatan 1905-1907, Bali 1906, Flores 1909 dan bagian lain kepulauan ini.¹⁸

Sebelum satu ekspedisi besar dikirim ke Kerajaan Bone, pada tanggal 21 Juni 1905, dari Makassar berangkat satu rombongan dengan menumpang kapal laut membawa sepucuk surat yang dialamatkan pada pimpinan tertinggi di Kerajaan Bone, yaitu La Pawawoi Karaeng Segeri. Ada harapan besar bahwa surat itu akan dapat merubah sikap La Pawawoi dalam menyikapi tuntutan Pemerintah Hindia Belanda. Dalam rombongan itu ikut serta Residen Brugman bersama Kontrolleur Goedhart serta Cramer sebagai juru bahasa. Mereka tiba di pelabuhan BajoE pada tanggal 22 Juni 1905.¹⁹ Isi surat itu menuntut Raja Bone untuk memperbolehkan Pemerintah Hindia Belanda untuk menempatkan wakilnya untuk mengatur, mengawasi, dan memungut pajak di pelabuhan Pallime. Selain itu pula diajukan satu kontrak baru, yaitu *Korte Verklaring* (Pernyataan Pendek) untuk diperiksa, diteliti dan harus pula ditandatangani.

La Pawawoi dan seluruh Dewan Ade Kerajaan membahas isi surat itu, dan memutuskan untuk menolak segala tuntutan yang diajukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 29 Juni 1905 pemerintah Kerajaan Bone memberi jawaban yang

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Surat ini dibawa oleh salah seorang karaeng dari Maros. Lihat Lontarak Tolok Rumpuna Bone yang ditransliterasi dan diterjemahkan oleh Muhammad Salim terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 1991.

intinya menolak seluruh keinginan dari Pemerintah Hindia Belanda. Atas penolakan itu, Pemerintah Hindia Belanda kecewa.

Pemerintah Hindia Belanda mencoba untuk mencari alasan untuk membenarkan tindakan militer mereka ke atas Kerajaan Bone. Diungkapkanlah beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh La Pawawoi Karaeng Segeri yang dianggap melanggar kesepakatan yang telah dibangun, antara lain:

1. Luwu meminta bantuan Bone dalam melawan suku Toraja. Gubernur Sulawesi hanya mengizinkan pengiriman senjata. La Pawawoi sebaliknya mengirim pasukan yang kuat di bawah para punggawa dan dia minta upah sebagian tanah Toraja. Tetapi penerapan kekuasaannya diluar batas-batas kerajaan berarti melanggar traktat. La Pawawoi ditegur oleh Gubernur.
2. Aru Peneki membakar kampung yang berbatasan dengan Bone karena bermaksud untuk membantu Bola (nama kampung). Kerajaan Bone meminta denda namun ditolak. Oleh pemerintah Kerajaan Bone diambil keputusan untuk menaklukan Peneki. Gubernur meminta punggawa Bone untuk kembali.
3. Raja menentang penelitian ahli pertambangan di Bone dan terhadap pelepasan cukai impor ekspor dengan ganti rugi; keduanya ini ditetapkan dalam kontrak.
4. Raja Bone mengajukan berbagai keberatan dan tidak memberikan bantuan dalam pengukuran perairan di Teluk Bone;
5. Sebanyak 20 orang perahu dikirim ke Luwu, memungut cukai ekspor-impor, melakukan pembakaran dan mencampuri urusan pemerintahan.²⁰

²⁰ *Memory van Overgave: van den aftredenden Assistant Resident van Bone, L. A. Emanuel 25 October 1945 – 20 April 1948.*

Merujuk pada beberapa kejadian itu, Pemerintah Hindia Belanda merasa cukup alasan untuk melakukan tindakan militer terhadap Kerajaan Bone. Di mata Pemerintah Hindia Belanda, Kerajaan Bone dianggap tidak pernah mencoba belajar pada peristiwa lalu, yaitu ketika satu tindakan militer yang dilakukan pada tahun 1860 yang menyebabkan Bone berada dalam status Kerajaan Pinjaman.

Pengiriman militer dipandang sesuatu yang sangat tepat yang bertujuan:

1. Mematahkan semua perlawanan bersenjata Bone, menduduki dan mencoba menguasai tokoh raja dan para anggota keluarganya apabila mereka bersama-sama melarikan diri serta merampas kekayaan kerajaan.
2. Membantu keamanan dan ketertiban lebih jauh diseluruh wilayah itu, serta seluruh kekuasaan di Sulawesi Selatan yang memberikan bantuan senjata kepada Bone.
3. Berangkat menuju Luwu apabila kerajaan ini menolak memenuhi tuntutan yang disodorkan oleh pemerintah, juga untuk memaksakan penjagaan keamanan, ketertiban dan kepatuhan atas peraturan dan perintah kita.
4. Membantu pemerintah Sulawesi Selatan dalam penegakan semua aturan pemerintah yang dianggap perlu.²¹

La Pawawoi Karaeng Segeri sangat sadar bahwa penolakan itu akan berakibat fatal. Penolakan itu tidak saja sebagai petanda bahwa perang terbuka akan segera terjadi, tetapi itu merupakan satu-satunya pilihan bagi Kerajaan Bone untuk tetap eksis. Jika kedua pelabuhan utama Kerajaan Bone menjadi bagian yang dikontrol langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda, secara pelan tapi pasti, itu berarti membunuh diri sendiri. Kedua pelabuhan itu menjadi tulang punggung perekonomian Kerajaan Bone.

²¹ *Memorie van Overgave (Residentie Celebes en Onderhorigheden, door Gouverneur T. C. Vorstman, 1924 (Den Haag: Algemeene Rijkarchief ARA), hal. 14.*

Bagi La Pawawoi putusan yang diambil itu telah diperhitungkannya. Selama ini secara pelan-pelan telah dibangun upaya untuk membebaskan Kerajaan Bone dari segala pengaruh. Apa yang dialami oleh Bone sejak kekalahan Besse Kajuara pada tahun 1860, yang menyebabkan Kerajaan Bone berubah status menjadi Kerajaan Pinjaman, adalah sesuatu yang sangat tidak dapat diterimanya. Jika merujuk perjanjian yang dilakukan oleh Arung Palakka dengan VOC, telah disepakati bahwa pihak Belanda tidak akan mencampuri urusan dalam Kerajaan Bone. Apa yang dilakukan Belanda selama ini dianggap telah menyalahi kesepakatan itu. Turunnya status Kerajaan Bone dari satu kerajaan besar yang berotonom, menjadi Kerajaan Pinjaman, sesungguhnya menjatuhkan derajat dan martabat Kerajaan Bone. Raja Bone mencoba membangun kekuatan meskipun itu berarti melanggar kesepakatan, dan harus disadari pula bahwa pengangkatan La Pawawoi Karaeng Segeri tidak lepas dari campur tangan yang dimainkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Genderang perang telahpun ditabuh oleh Bone. Semua pihak yang bertanggung jawab sehubungan dengan perang itu dipersiapkan. Daerah-daerah takluk Bone telah pun diberitahukan dan mengirimkan laskarnya untuk mempertahankan ibu kota kerajaan. Sekutu-sekutu Bone juga tidak ketinggalan menyatakan kesanggupannya untuk membantu Bone jika kelak diserang oleh Belanda. Para dulung, Arung Palili, semuanya sibuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangan orang Belanda yang akan menyerang Bone. Persiapan para laskar Bone itu ditunjukkan pada Raja Bone. Mereka melakukan "*mangaru*" atau "*mangoso*" untuk memperlihatkan tekad dan kesetiaan mereka dalam mempertahankan Kerajaan Bone jika Belanda melakukan serangan.²²

²² Dalam Lontarak *Tolok Rumpakna Bone* dapat dibaca bagaimana para pemimpin tertinggi Bone dari seluruh daerah kekuasaannya datang menghadap Raja Bone untuk menunjukkan kesetiannya dalam membela Kerajaan Bone.

Pada tanggal 11 dan 13 Juli 1905 pasukan perang Belanda yang berasal dari Jawa Tengah diberangkatkan dari Tanjung Priuk, dari Semarang pada tanggal 13 dan 15 Juli, dan pasukan dari Jawa Barat diberangkatkan dari Surabaya pada tanggal 13 dan 15 Juli. Seluruh armada pasukan Belanda itu berlayar menuju Bulukumba dan dari tempat ini secara bersamaan menuju BajoE.

Setelah upaya damai dilakukan untuk meminta Bone mematuhi beberapa ketentuan yang diminta oleh Belanda ditolak, pasukan Belanda melakukan serangan dengan terlebih dahulu menyerang Ujung Pattiro. Meskipun dihadap oleh pasukan Bone, tetapi hal itu tidak berarti banyak karena daerah ini dianggap yang paling lemah pertahanannya. Setelah menguasai Ujung Pattiro, tempat ini digunakan sebagai basis untuk menyerang pelabuhan BajoE.

Pada tanggal 20 dan 27 Juli serangan dilancarkan ke atas BajoE. Di wilayah ini Belanda menghadapi perlawanan yang sengit dan seru. Pimpinan perang Kerajaan Bone turun ke medan laga mempertahankan wibawa dan kekuasaan Kerajaan Bone. Serangan awal yang dilancarkan oleh Belanda ternyata hanya untuk melihat kekuatan dari Kerajaan Bone. Setelah berlangsung beberapa hari, serangan mematikan dilancarkan pada tanggal 27 Juli. Serangan itu sendiri mendapat perlawanan dari pasukan Bone. Dalam catatan arsip Belanda, perlawanan yang dihadapi oleh Belanda di daerah ini merupakan perlawanan yang cukup berat.

Setelah berhasil menguasai daerah sekitar Bajoe dan melakukan gerak maju menuju ibu kota Kerajaan, Raja Bone beserta beberapa orang pasukannya memutuskan untuk mengungsi ke daerah pedalaman. Pengungsian ini juga bertujuan untuk memperluas daerah pertempuran dan juga untuk membangkitkan semangat juang pada pasukan Bone. La Pawawoi dan pasukannya terpaksa harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain agar tidak ditangkap. Pertempuran

berlangsung lama karena mereka menargetkan untuk menangkap La Pawawoi Karaeng Segeri hidup atau mati untuk menuntaskan perang. Karena selama La Pawawoi masih bebas, selama itu pula kerajaan masih dianggap berdiri.

Sementara pengejaran atas La Pawawoi terus dilakukan, pada tanggal 5 Agustus 1905, Tomarilalang bersama lima anggota Dewan Adat Bone akhirnya menyatakan tunduk dan mengakui kemenangan Belanda. Tomarilalang dan lima anggota Dewan Adat Bone ini tidak turut mengungsi bersama La Pawawoi Karaeng Segeri. Ada dugaan bahwa hubungan antara Tomarilalang dan Raja Bone kurang harmonis.²³ Pernyataan tunduk yang dibuat oleh Dewan Adat ini ditolak oleh Pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Usaha pengejaran Raja Bone terus dilakukan.

Pada masa pemerintahan La Pawawoi Karaeng Segeri, fungsi dan tugas Dewan Ade Pitu Kerajaan Bone ditekan. Dewan Ade Pitue hampir tidak memiliki wibawa sama sekali. Ada dugaan bahwa hubungan itu sudah mulai retak ketika Pemerintah Hindia Belanda membatalkan pengangkatan Bungasutera yang baru berusia 13 tahun menggantikan ibunya. Pemerintah Hindia Belanda menolak pengangkatan itu karena khawatir akan pengaruh Kerajaan Gowa akan semakin besar di Kerajaan Bone karena ayah Bunga Sutera adalah bangsawan tinggi dari Kerajaan Gowa. Mengetahui bahwa Bunga Sutera telah dilantik oleh Dewan Ade Pitu Kerajaan Bone, Gubernur Sulawesi Selatan dan Daerah Bawahannya, berangkat ke Bone untuk membatalkan pelantikan itu. Pemerintah Hindia Belanda lebih berkenan untuk mengangkat La Pawawoi Karaeng Segeri yang dalam banyak hal telah diketahui kesetiaannya. Akhirnya pada tahun 1896 La Pawawoi diangkat oleh Dewan Ade Pitu, 6 hari setelah pengangkatan Bungasutera.

²³ Dalam sejarah Bone hubungan kurang harmonis antara Tomarilalang dan Raja pernah juga terjadi di abad XIX. Ketika itu Tomarilalang Bone, terpaksa untuk sementara mengungsi ke Makassar.

Pasukan Kerajaan Bone yang semakin terdesak di hampir disetiap medan tempur akhirnya mengalami kekalahan. Raja Bone memutuskan untuk mengungsi ke pegunungan Awo, satu daerah yang terletak di atas Bukit di Tana Toraja. Tempat pengusian ini pun akhirnya diketahui oleh Belanda.²⁴ Melihat keadaan yang demikian La Pawawoi Karaeng Segeri bertanya kepada anaknya tentang strategi apa yang harus dilakukan karena tempat mereka telah dikepung oleh Belanda. Panglima perang Bone memutuskan untuk melakukan perang sampai titik darah terakhir. Baginya, sudah tidak ada gunanya untuk menyingkir, karena Belanda tetap akan mengejar, perang kali ini digunakan untuk melihat siapa yang kalah.²⁵

Setelah Belanda melakukan pengintaian dan memperhitungkan secara matang langkah-langkah yang akan dilakukan, serbuan ke atas pertahanan Raja Bone dilancarkan. Panglima Tertinggi perang Kerajaan Bone, Petta PonggawaE Baso Pangilingi Abdul Hamid beserta pasukannya melakukan perlawanan. Pertempuran berlangsung seru dan banyak korban yang gugur.

Pada tanggal 18 Nopember 1905, sekitar jam 05.00 pagi hari Belanda melakukan serangan secara mengejutkan. Pasukan Bone melakukan perlawanan sengit. Panglima pasukan Bone, Baso Pangilingi Abdul Hamid yang bertempur mempertahankan kubunya akhirnya harus tewas karena terkena peluru musuh bersama 25 orang pasukannya.²⁶ Perang pun berakhir. Raja Bone tidak memiliki daya lagi untuk tetap membangun kekuatan. Setelah anaknya dimakamkan di pegunungan Awo, ia pun akhirnya harus ditawan dan diberangkatkan ke Pare-Pare.

²⁴ Dalam berbagai catatan Lontarak Bone diceritakan bahwa La Pawawoi Karaeng Segeri menolak semua bantuan yang disodorkan padanya oleh sekutu-sekutu Kerajaan Bone, misalnya soppeng dan Wajo.

²⁵ Muhammad Salim, *op. cit.*, hal. 200.

²⁶ Muhammad Amir, *Perlawanan Rakyat Bone Terhadap Pendudukan Militer Belanda Pada Tahun 1905* (Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan dan Tenggara, 2001), hal. 113.

Pemerintah Hindia Belanda mengkhawatirkan akan muncul sejumlah perlawanan dari rakyat Bone khususnya dan di Sulawesi Selatan umumnya jika La Pawawoi tetap berada di Sulawesi Selatan. Dalam banyak pengalaman tampaknya gerakan-gerakan perlawanan yang muncul di hampir seluruh wilayah Hindia Belanda dibangun karena adanya kesetiaan yang membabi buta dari rakyat terhadap penguasanya. Oleh karena itu La Pawawoi diputuskan untuk dikirim ke Bandung.²⁷

Jatuhnya Bone tidak berarti tugas Belanda telah usai. Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk melakukan serangan atas Kerajaan Gowa yang dipandang berbahaya karena masalah *siri na pacce* bagi bangsawan Gowa. Dalam budaya Bugis–Makassar perasaan senasib dan sepenanggungan menjadi bagian budaya yang dipegang teguh pada kelompok bangsawan. Kekalahan yang dialami Bone dapat membangkitkan perasaan solidaritas Gowa yang memiliki ikatan geneologis dengan Bone. Raja Bone yang ditaklukkan, La Pawawoi Karaeng Segeri adalah sepupu satu kali dari raja Gowa yang berkuasa, Karaeng Lembang Parang. Perkawinan bagi masyarakat Bugis–Makassar bukanlah perkawinan antara dua insan semata. Perkawinan itu adalah juga perkawinan dua keluarga besar yang menyatu dalam satu ikatan. Keberhasilan satu keluarga berarti keberhasilan pada keluarga lainnya. Kesengsaraan satu keluarga haruslah dapat dirasakan oleh keluarga lainnya. Solidaritas yang demikian ini menimbulkan rasa prihatin dan menggerakkan pihak yang merasakan itu untuk datang membantunya.

Serangan militer Belanda selanjutnya adalah Kerajaan Luwu dan Gowa. Kedua kerajaan ini harus tunduk kepada Pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya satu persatu kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan jatuh di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

²⁷ La Pawawoi wafat pada tanggal 11 Juni 1911 di Bandung.

Kontrak Pendek yang ditandatangani Bone sebagai satu wilayah di bawah kontrol Pemerintah Hindia Belanda merupakan satu hal baru yang sama sekali tidak diketahui implikasinya bagi elite bangsawan Bone. Ada persepsi yang berbeda dalam menanggapi esensi dari satu perjanjian. Raja Bone dan Dewan Hadatnya sepanjang menunjukkan kerjasama yang baik menganggap sudah mematuhi kontrak itu, namun bagi Pemerintah Hindia Belanda esensi perjanjian itu adalah mengikut aturan yang tertera dalam kontrak tersebut. Akibatnya Achmad Singkeru Rukka dan La Pawawoi Karaeng Sigeri tetap menjalankan tugasnya sebagai raja, yaitu menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya seperti isi perjanjian yang dilakukan antara Tomanurung dengan rakyat Bone. Keberadaan bangsawan Bone kini mulai terancam. Pemerintahan modern yang akan diterapkan Pemerintah Hindia Belanda dalam banyak hal sangat berbeda. Tidak ada lagi hak-hak istimewa yang harus mereka dapatkan. Tidak ada lagi upeti yang diperolehnya ataupun tidak ada lagi denda pelanggaran dibayar dengan benda. Semuanya harus jelas. Tidak ada lagi kebiasaan atau adat istiadat dan tradisi sebagai pembenaran selama hal itu dianggap satu penindasan. Tidak ada lagi pengabdian sebagai wujud kesetiaan. Masyarakat dicabut dari akarnya, yaitu kepercayaan bahwa bangsawanlah yang harus memerintah dan rakyat yang harus diperintah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Poeze, Harry and Schoorl, Pim, *Excursies in Celebes*. Leiden : KITLV.
- Abdurrazak Daeng Patunru, dkk. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1989.
- Alfian; Nazaruddin Sjamsuddin (penyunting). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Amir Effendi Siregar (ed.). *Arus Pemikiran Ekonomi Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, cetakan kedua, Maret, 1999.
- Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).
- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta kekuatan Politik dan pembangunan*. Jakarta: CV. Rajawali, cetakan kedua, 1982.
- Burhan Djabier Magenda, *The Surviving Aristocracy in Indonesia: Politics in Three Provinces of the Outer Islands*. Michigan: Cornell University, 1989.
- Chabot, H.Th. *Verwanschap Stand en Sexe in Zuid Celebs*. Groningen: University Press, 1956.
- Charles F. Adrian. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, cetakan pertama, 1992.
- Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906 – 1942*. Tesis S-2, Universitas Indonesia, 1983.
- Eisenstadt S.N. *Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism*. California: Sage Publication, 1977.
- H.A. Suterland, "Power Trade and Islam in The East Eastern Aschipelago, 1700 – 1750", dalam Philips Quarles van Ufford and Mathew Schoffeleers, *Religion and Development : Torards an Integrated Aproach*, (Amsterdam, Free University Press, 1983).
- Hadiz, Vedi R. *Politik Pembebasan, Teori-Teori Negara Pasca Kolonial*. Yogyakarta: INSIST dan Pustaka Pelajar, cetakan I, 1999.

Haedar Nashir. *Pragmatisme Politik Kaum Elit*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan pertama, Februari 1999.

Harun Kadir (dkk). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945 – 1950* (tidak diterbitkan). Ujungpandang: Lembaga Penelitian UNHAS bekerjasama dengan Bappeda Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, 1984.

Harvey, Barbara Sillars. *Tradition, Islam, and Rebellion : South Sulawesi 1930 – 1965*. Michigan: University Microfilms International, 1976.

Heddy Shri Ahimsa Putra. *The Politics of Agrarian and Clientelism in Indonesia: Bantaeng, South Sulawesi, 1883 to 1990*. (Disertasi) Columbia University, 1993.

———. *Minawang, Hubungan Patron – Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988.

Herlina Lubis, *Khidupan Kaum Menak Priangan 1800 – 1940 (disertasi)* Yogyakarta: Pascasarjana, UGM, 1997.

Ichlasul Amal. *Regional and Central Government in Indonesia Politics: West Sumatra and South Sulawesi 1949 – 1979*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, first printing, 1992.

Ijzereef, Willem. *De wind en de bladeren: Hierarchie en autonomie in Bone en Polombangkeng, 1850 – 1950*. Disertasi. Groningen: Rijksuniversiteit, 1994.

Lontaraq Tologna Bone.

Lontaraq Bone.

Memory van Overgave: van den aftredenden Assistant Resident van Bone, L. A. Emanuel 25 October 1945 – 20 April 1948.

Memorie van Overgave { Reseidentie Celebes en Onderhorigheden, door Gouvernour T. C. Vorstman, 1924 (Den Haag: Algemeene Rijkarchief ARA), hal. 14.

Muhammad Amir, *Perlawanan Rakyat Bone Terhadap Pendudukan Militer Belanda Pada Tahun 1905* (Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan dan Tenggara, 2001).

Pengarah:
Dr. MUHLIS PAENI
Dra. SRI RAHAYU BUDIARTI, MM
Drs. THAMRIN B. BACHRI, M.Sc
Dra. TITEN M. SOEKARAYA, M.Si

Perpustakaan D
Jenderal Kebu

303.4847

MUH

S

ISBN 979127400-2



9 789791 274258

